



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

**KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021 - 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kebumen 2021–2025. Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2025 merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan teknokratik untuk bahan persiapan penyusunan RPJMD sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.

Substansi dalam dokumen ini meliputi gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kebumen, gambaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kebumen, permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Kebumen. Dalam proses penyusunan dokumen ini telah memperhatikan kondisi dan isu-isu lingkungan global, regional, serta nasional. Pembangunan Kabupaten Kebumen dalam lima tahun ke depan masih menghadapi isu strategis antara lain kemiskinan, daya saing ekonomi daerah, kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kesenjangan wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Menghadapi isu strategis tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dalam lima tahun ke depan akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Sumberdaya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Dalam penyusunannya



dokumen ini juga telah dilakukan pembahasan bersama antara Sekretaris Daerah, BAPPEDA dan seluruh Perangkat Daerah dengan Berita Acara Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Kepala BAPPEDA dan Perwakilan Unsur Perangkat Daerah pada 15 Oktober 2020. Untuk itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan kontribusi demi tersusunnya dokumen ini dan manakala masih dijumpai kekurangan atau kelemahan, sangat diharapkan saran/masukan guna perbaikan lebih lanjut. Demikian, semoga dokumen ini bermanfaat.

Kebumen, 19 Oktober 2020

KEPALA BAPPEDA,
KABUPATEN KEBUMEN



Ir. PUDJIRAHAJU
Pembina Utama Muda

NIP. 19620713 198703 2 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Hubungan Antardokumen	11
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	15
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	16
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	16
2.1.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan	18
2.1.3 Geologi dan Tanah	20
2.1.4 Hidrologi	32
2.1.5 Klimatologi	36
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah	38
2.1.7 Wilayah Rawan Bencana	54
2.1.8 Kondisi Demografi	58
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	65
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	65
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	83
2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga	105
2.3 Aspek Pelayanan Umum	111
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar	115
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar	178
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	267
2.3.4 Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	296
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	325
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	325
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur	327
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	330
2.4.3 Fokus Sumberdaya Manusia	334



BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	338
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	338
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	339
3.1.1.1	Kinerja Pendapatan Daerah	339
3.1.1.2	Kinerja Belanja Daerah	346
3.1.2	Neraca Daerah	350
3.1.2.1	Perkembangan Neraca Daerah	351
3.1.2.2	Rasio Likuiditas	359
3.1.2.3	Rasio Solvabilitas	360
3.1.2.4	Rasio Aktivitas	362
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	364
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	364
3.2.2	Analisis Pembiayaan Daerah	368
3.3	Kerangka Pendanaan	372
3.3.1	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	372
3.3.1.1	Proyeksi Pendapatan Daerah	373
3.3.1.2	Proyeksi Belanja Daerah	387
3.3.1.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah	396
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	400
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	404
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	405
4.1.1	Bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia	406
4.1.2	Bidang Ekonomi	428
4.1.3	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	435
4.1.4	Bidang Tatakelola Pemerintahan	442
4.2	Lingkungan Strategis	456
4.2.1	Lingkungan Internal	457
4.2.2	Lingkungan Eksternal	472
4.3	Isu-Isu Strategis	487



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Luas Wilayah Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan	17
Tabel 2.2	Ketinggian Tanah dari Permukaan Air Laut di Kabupaten Kebumen	19
Tabel 2.3	Persebaran CAT Kabupaten Kebumen	33
Tabel 2.4	Mata Air di Kabupaten Kebumen	35
Tabel 2.5	Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen	36
Tabel 2.6	Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Kebumen	37
Tabel 2.7	Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2018	54
Tabel 2.8	Curah Hujan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2018	57
Tabel 2.9	Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2018	57
Tabel 2.10	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2019	58
Tabel 2.11	Indikator Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 ..	65
Tabel 2.12	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	66
Tabel 2.13	Peranan Sektoral dalam PDRB Kabupaten Kebumen atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2015-2019	67
Tabel 2.14	PDRB Kecamatan atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	69
Tabel 2.15	Nilai Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung dari Keterkaitan Ke Belakang (<i>Backward Linkages</i>)	71
Tabel 2.16	Nilai Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung dari Keterkaitan Ke Depan (<i>Forward Linkages</i>)	73
Tabel 2.17	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah	76
Tabel 2.18	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	77
Tabel 2.19	Pertumbuhan PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2018	78
Tabel 2.20	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah	80
Tabel 2.21	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2018	81
Tabel 2.22	Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	82
Tabel 2.23	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	93
Tabel 2.24	Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2019	97
Tabel 2.25	Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	97
Tabel 2.26	Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan	100
Tabel 2.27	Jumlah Grup Kesenian Tahun 2015-2019	106
Tabel 2.28	Jumlah Gedung Kesenian Tahun 2016-2020	106
Tabel 2.29	Perkembangan Jumlah Sanggar Seni Kebumen Tahun 2015-2019	107
Tabel 2.30	Jumlah Klub Olahraga	108



Tabel 2.31	Jumlah Gedung Olahraga	109
Tabel 2.32	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	113
Tabel 2.33	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen, dan 4 Kabupaten Sekitar Tahun 2019	113
Tabel 2.34	Rata-Rata Nilai per Unsur Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019	113
Tabel 2.35	Tabel Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	116
Tabel 2.36	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	116
Tabel 2.37	Rasio Jumlah Lembaga PAUD Per Siswa Jenjang PAUD Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	117
Tabel 2.38	Perkembangan Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	118
Tabel 2.39	APS Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	123
Tabel 2.40	Jumlah Siswa SD/MI Melanjutkan ke SLTP/MTs Kebumen Tahun 2015-2019	124
Tabel 2.41	Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	125
Tabel 2.42	Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	126
Tabel 2.43	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015-2019 Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen	127
Tabel 2.44	Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	128
Tabel 2.45	Rasio Guru Per Kelas Rata-Rata Terhadap Murid Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	129
Tabel 2.46	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015-2019 Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen	130
Tabel 2.47	Rasio Guru Per Sekolah Kebumen Tahun 2015-2019	131
Tabel 2.48	Persentase Kelulusan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	132
Tabel 2.49	Perkembangan Sekolah Terakreditasi jenjang SD/MI Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	133
Tabel 2.50	Perkembangan Akreditasi SLTP/MTs di Kebumen Tahun 2015-2019	134
Tabel 2.51	Persentase Kelas Kondisi Baik Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	135
Tabel 2.52	Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019	136
Tabel 2.53	Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	137
Tabel 2.54	Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	140
Tabel 2.55	Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	142
Tabel 2.56	Perkembangan Kasus Penyakit Menular 2015-2019	145



Tabel 2.57	Perkembangan Kasus Penyakit Menular (TB dan DBD) per Kecamatan Kabupaten Kebumen 2015-2019	147
Tabel 2.58	Penyakit Tidak Menular Kebumen Tahun 2015-2019	150
Tabel 2.59	Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen Sampai dengan Tahun 2019	151
Tabel 2.60	Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	153
Tabel 2.61	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	154
Tabel 2.62	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	155
Tabel 2.63	Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	156
Tabel 2.64	Jaminan Kesehatan	156
Tabel 2.65	Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2015-2019	157
Tabel 2.66	Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2020	158
Tabel 2.67	Kondisi Jembatan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	159
Tabel 2.68	Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen	159
Tabel 2.69	Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen	160
Tabel 2.70	Kondisi Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ..	161
Tabel 2.71	Kondisi RTH Publik Di Kawasan Perkotaan Kebumen Tahun 2017 ..	162
Tabel 2.72	Peruntukan Ruang di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	162
Tabel 2.73	Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	162
Tabel 2.74	Status Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2019	163
Tabel 2.75	Perkembangan Kawasan Kumuh Perkotaan yang Tertangani Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019	164
Tabel 2.76	Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	164
Tabel 2.77	Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2018	165
Tabel 2.78	Angka Kriminalitas Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019	167
Tabel 2.79	Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019	169
Tabel 2.80	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Tenaga Satpol PP Berdasar Permendagri Nomor 60 Tahun 2012	170
Tabel 2.81	Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	171
Tabel 2.82	Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	175
Tabel 2.83	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2015 ...	176
Tabel 2.84	Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kebumen	178
Tabel 2.85	Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Pengangguran	179
Tabel 2.86	Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase TPAK 2015-2019	180



Tabel 2.87	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kebumen Tahun 2016-2019	182
Tabel 2.88	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen 2015-2019	183
Tabel 2.89	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Kebumen 2015-2019	184
Tabel 2.90	Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Kebumen 2015-2019	185
Tabel 2.91	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015-2019	188
Tabel 2.92	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda Kabupaten Kebumen 2015-2019	189
Tabel 2.93	Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	191
Tabel 2.94	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	193
Tabel 2.95	IPM dan IPG Tahun 2015-2019	195
Tabel 2.96	Tabel IPM Pilah Gender Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	195
Tabel 2.97	Komposit Pembentuk IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019	198
Tabel 2.98	Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Kebumen 2015-2019	199
Tabel 2.99	Pegawai Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020	201
Tabel 2.100	Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	204
Tabel 2.101	Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum Kabupaten Kebumen 2015-2019	207
Tabel 2.102	Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	208
Tabel 2.103	Data Jumlah Desa Rawan Pangan	209
Tabel 2.104	Harga Rata-Rata Pangan Strategis 2017-2019	210
Tabel 2.105	Data Kelompok yang Telah Dibina dan Memperoleh Bantuan Stimulan Pemanfaatan Pekarangan	211
Tabel 2.106	Data Hasil Rapid Tes PSAT (Positif Pestisida)	212
Tabel 2.107	Kinerja Pertanahan di Kabupaten Kebumen	212
Tabel 2.108	Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	213
Tabel 2.109	Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	216
Tabel 2.110	Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	216
Tabel 2.111	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	217
Tabel 2.112	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	217
Tabel 2.113	Uji Pencemaran Air Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	218



Tabel 2.114	Persentase Akses Terhadap Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2018	219
Tabel 2.115	Kinerja Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kebumen Tahun 2019	221
Tabel 2.116	Jenis Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2019 ..	221
Tabel 2.117	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019	223
Tabel 2.118	Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	225
Tabel 2.119	Perkembangan Jumlah Orkesmas Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	227
Tabel 2.120	Persentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019	228
Tabel 2.121	Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	229
Tabel 2.122	Pencanangan Kampung KB Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019	230
Tabel 2.123	Rincian Lokasi Kampung KB Kabupaten Kebumen	231
Tabel 2.124	Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	233
Tabel 2.125	Pencanangan Kampung KB Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019	236
Tabel 2.126	Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Kebumen Tahun 2020	237
Tabel 2.127	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	238
Tabel 2.128	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	238
Tabel 2.129	Lama Waktu Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	239
Tabel 2.130	Biaya Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	239
Tabel 2.131	Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	241
Tabel 2.132	Jumlah Terminal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	241
Tabel 2.133	Jumlah Angkutan Umum dan Izin Trayek di Kabupaten Kebumen Tahun 2020	242
Tabel 2.134	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	244
Tabel 2.135	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jawa Tengah 2019	245
Tabel 2.136	Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Kebumen Tahun 2019	246
Tabel 2.137	Daftar Aplikasi/Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019	247
Tabel 2.138	Kondisi Infrastruktur Digital Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2019	251
Tabel 2.139	Persebaran ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen	252



Tabel 2.140	Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020	253
Tabel 2.141	Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	255
Tabel 2.142	Perkembangan Nilai Investasi Sektor Tersier Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	257
Tabel 2.143	Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	259
Tabel 2.144	Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019	260
Tabel 2.145	Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	262
Tabel 2.146	Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	264
Tabel 2.147	Kinerja Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	266
Tabel 2.148	Kinerja Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	267
Tabel 2.149	Produksi dan Kebutuhan Ikan Olahan Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2019	275
Tabel 2.150	Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 ..	276
Tabel 2.151	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Kebumen	279
Tabel 2.152	PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	282
Tabel 2.153	Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	284
Tabel 2.154	Luas Panen dan Produksi Padi Ladang Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	284
Tabel 2.155	Luas Panen dan Produksi Palawija Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	284
Tabel 2.156	Luas Lahan Panen Perkebunan Dibanding Luas Lahan Pertanian (Ha) Tahun 2016-2019	285
Tabel 2.157	Luas Lahan Panen Hortikultura Dibanding Luas Lahan Pertanian (Ha)	285
Tabel 2.158	Produksi Buah-Buahan Kabupaten Kebumen (Ton) Tahun 2015-2019	286
Tabel 2.159	Produksi Sayur-Sayuran Kabupaten Kebumen (Ton) Tahun 2015-2019	286
Tabel 2.160	Perubahan Iklim di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2018	287
Tabel 2.161	Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	290
Tabel 2.162	Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	293
Tabel 2.163	Jumlah Industri di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020	294
Tabel 2.164	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	296
Tabel 2.165	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	298
Tabel 2.166	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2019	299
Tabel 2.167	Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen	300
Tabel 2.168	Penilaian SAKIP Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2019	304



Tabel 2.169	Indeks Integritas Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019	307
Tabel 2.170	Nilai EKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019	309
Tabel 2.171	Kesesuaian Program antara RPJMD dan RKPD serta RKPD dengan APBD Tahun 2018 dan 2019	313
Tabel 2.172	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019	315
Tabel 2.173	Perkembangan Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019	317
Tabel 2.174	Hasil Penilaian SPIP Kabupaten Kebumen Tahun 2019	318
Tabel 2.175	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	321
Tabel 2.176	Data Pejabat Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	322
Tabel 2.177	Data Pejabat Fungsional Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	323
Tabel 2.178	Data Pejabat Fungsional Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	323
Tabel 2.179	Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ..	325
Tabel 2.180	Angka Konsumsi RT Perkapita Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah Tahun 2015-2019	325
Tabel 2.181	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018	326
Tabel 2.182	Rata-rata Konsumsi RT Perkapita Sebulan Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah, Tahun 2018-2019	327
Tabel 2.183	Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Kebumen (ha) Tahun 2020	328
Tabel 2.184	Persentase Luas Wilayah Produktif (ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020	329
Tabel 2.185	Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020	330
Tabel 2.186	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	331
Tabel 2.187	Rata-rata Lama Perijinan di Kabupaten Kebumen	331
Tabel 2.188	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen	335
Tabel 2.189	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 ..	336
Tabel 3.1	Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	342
Tabel 3.2	Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	343
Tabel 3.3	Proporsi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	344
Tabel 3.4	Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	348
Tabel 3.5	Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	348
Tabel 3.6	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ...	349
Tabel 3.7	Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	353
Tabel 3.8	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	356
Tabel 3.9	Rasio Lancar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	359



Tabel 3.10	Rasio <i>Quick</i> Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	360
Tabel 3.11	Rasio Total Hutang terhadap Aset Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	361
Tabel 3.12	Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	362
Tabel 3.13	Rata-rata Umur Piutang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ...	363
Tabel 3.14	Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	363
Tabel 3.15	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	366
Tabel 3.16	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	367
Tabel 3.17	Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	370
Tabel 3.18	Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	371
Tabel 3.19	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2021-2025	375
Tabel 3.20	Proyeksi PAD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	375
Tabel 3.21	Proyeksi DBH Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	377
Tabel 3.22	Proyeksi DAU Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	378
Tabel 3.23	Proyeksi Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	380
Tabel 3.24	Proyeksi Dana Insentif Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	380
Tabel 3.25	Proyeksi Pertumbuhan Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	382
Tabel 3.26	Proyeksi Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah kepada Kab./Kota Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	383
Tabel 3.27	Proyeksi Pertumbuhan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	385
Tabel 3.28	Proyeksi Pertumbuhan Hibah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	386
Tabel 3.29	Proyeksi Dana Darurat Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	387
Tabel 3.30	Proyeksi Pertumbuhan Belanja Pegawai Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	388
Tabel 3.31	Proyeksi Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	389
Tabel 3.32	Proyeksi Pertumbuhan Belanja Hibah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	390
Tabel 3.33	Proyeksi Pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	392
Tabel 3.34	Proyeksi Belanja Subsidi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 ...	392
Tabel 3.35	Proyeksi Belanja Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	394
Tabel 3.36	Proyeksi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	394
Tabel 3.37	Proyeksi Pertumbuhan Belanja Transfer Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2019	396



Tabel 3.38	Proyeksi Pertumbuhan SiLPA Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	397
Tabel 3.39	Proyeksi SiLPA Belanja Modal, SiLPA Belanja BLUD dan SiLPA Total Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	398
Tabel 3.40	Proyeksi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	398
Tabel 3.41	Proyeksi Penyertaan Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	399
Tabel 3.42	Proyeksi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	399
Tabel 3.43	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	401
Tabel 3.44	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah dan Kapasitas Riil Kemampuan Kepala Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	403

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RPJMD	6
Gambar 1.2	Keterkaitan Antardokumen Perencanaan	12
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kebumen	18
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Kebumen	20
Gambar 2.3	Peta Jenis Tanah Kabupaten Kebumen	24
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Kebumen	32
Gambar 2.5	Peta Hidrogeologi Kabupaten Kebumen	34
Gambar 2.6	Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kebumen	35
Gambar 2.7	Peta Curah Hujan Kabupaten Kebumen	37
Gambar 2.8	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kebumen	39
Gambar 2.9	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen	41
Gambar 2.10	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen	44
Gambar 2.11	Peta Delineasi Kawasan Geopark Karangsembung-Karangbolong ..	48
Gambar 2.12	Peta Kawasan Peruntukan Industri di Kec. Petanahan dan Kec. Klirong	51
Gambar 2.13	Foto Drone Eksisting Kawasan Peruntukan Industri di Kec. Petanahan dan Kec. Klirong	51
Gambar 2.14	Rencana Trase Tol Cilacap-Yogyakarta	53
Gambar 2.15	Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen	55
Gambar 2.16	Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	59
Gambar 2.17	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	60
Gambar 2.18	Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen Berdasarkan Usia Tahun 2019	61
Gambar 2.19	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019	62
Gambar 2.20	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 ..	63
Gambar 2.21	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) Selama Periode 2015-2019	64
Gambar 2.22	Pertumbuhan Ekonomi di Kecamatan Ayah, Kebumen, Poncowarno, dan Sadang, Tahun 2014-2018	78
Gambar 2.23	Perbandingan Angka Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	81
Gambar 2.24	Pertumbuhan IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	84
Gambar 2.25	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2019	85
Gambar 2.26	Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2019	86
Gambar 2.27	UHH Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2019	87
Gambar 2.28	HLS Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	90
Gambar 2.29	RLS Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	91
Gambar 2.30	Pengeluaran Per Kapita (Dalam Ribuan) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	92



Gambar 2.31	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	98
Gambar 2.32	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2015-2019	99
Gambar 2.33	Peta Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2018	101
Gambar 2.34	Peta Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2019	101
Gambar 2.35	Target dan Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2015-2021	104
Gambar 2.36	Perkembangan APK PAUD Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	117
Gambar 2.37	APK SD Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 ..	120
Gambar 2.38	APK SMP, Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2015-2019	121
Gambar 2.39	APM SD/MI Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	121
Gambar 2.40	APM Jenjang SMP/MTs Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	122
Gambar 2.41	Perkembangan Sekolah Terakreditasi Jenjang SD/MI Kabupaten Kebumen 2015-2019	133
Gambar 2.42	Perkembangan Sekolah Terakreditasi Jenjang SLTP/MTs Kabupaten Kebumen 2015-2019	134
Gambar 2.43	Perkembangan Jumlah Kasus dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	137
Gambar 2.44	Usia Harapan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	139
Gambar 2.45	Perkembangan Jumlah Kasus dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	140
Gambar 2.46	Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2016-2019	143
Gambar 2.47	Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2016-2019	144
Gambar 2.48	Sebaran Kasus HIV/AIDS per Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	146
Gambar 2.49	Realisasi dan Target Penanganan PMKS Kebumen Tahun 2015-2019	174
Gambar 2.50	Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	181
Gambar 2.51	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar, Ditempatkan dan Belum Ditempatkan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018	182
Gambar 2.52	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota	187
Gambar 2.53	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	190
Gambar 2.54	Perkembangan IDG Kabupaten Kebumen 2015-2018	197
Gambar 2.55	Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	200
Gambar 2.56	Diagram Rantai Distribusi Pangan	211
Gambar 2.57	Estimasi Angka Kelahiran Total (TFR) Indonesia	235
Gambar 2.58	Peta Perhubungan Darat Kabupaten Kebumen	243
Gambar 2.59	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kebumen Tahun 2019	245
Gambar 2.60	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah 2019	246



Gambar 2.61	Perkembangan Nilai Investasi Per Sektor Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	257
Gambar 2.62	Luas Perairan Umum Daratan Kabupaten Kebumen (ha)	270
Gambar 2.63	Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	273
Gambar 2.64	Volatilitas dan Disparitas Harga Beberapa Komoditas di Kabupaten Kebumen	291
Gambar 2.65	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	297
Gambar 2.66	Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	306
Gambar 2.67	Jumlah ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	320
Gambar 2.68	Persentase Tingkat Pendidikan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019	321
Gambar 3.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	345
Gambar 3.2	Dana Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	345
Gambar 3.3	Belanja Operasi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	350
Gambar 3.4	Belanja Modal dan Belanja Transfer Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	350
Gambar 3.5	Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	372
Gambar 3.6	Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	372
Gambar 4.1	Komponen Pembentuk Isu Strategis Kabupaten Kebumen	405
Gambar 4.2	Permasalahan Pembangunan Manusia di Kabupaten Kebumen	412
Gambar 4.3	Alur Permasalahan Bidang Ekonomi	429
Gambar 4.4	Kerangka Alur Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	436
Gambar 4.5	Kerangka Alur Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Kebumen	446



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berada pada bagian selatan. Kebumen awalnya merupakan salah satu kabupaten dari Kerajaan Mataram Islam dengan nama Kabupaten Panjer. Pada zaman Kerajaan Mataram Islam, Kabupaten Kebumen (Panjer) mempunyai peran penting dalam melawan kolonialisme Belanda dengan membantu penyediaan dan perbekalan pasukan Sultan Agung Raja Mataram Islam dalam menyerang Batavia. Nama Kebumen berasal dari kata *Ki-Bumi-An* yang merupakan tempat padepokan/pondok yang dibangun oleh Kyai Pangeran Bumidirjo. Kyai Pangeran Bumidirjo adalah adik Sultan Agung Hanyokro Kusumo yang melarikan diri ke Kebumen karena bersitegang dengan Raja Mataram Islam kala itu yaitu Sunan Amangkurat I.

Kabupaten Kebumen secara resmi terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini Kabupaten Kebumen telah dijabat 37 kepala daerah sejak masa pemerintahan Negara Indonesia, baik kepala daerah yang definitif, pelaksana tugas (Plt) maupun pejabat sementara (Pjs).



Kabupaten Kebumen memiliki beberapa potensi yang harus dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai keunggulan daerah. Kabupaten Kebumen dilalui jalur utama konektivitas nasional berupa jalan nasional, jalan tol yang sedang direncanakan pembangunannya dan jalur rel ganda kereta api. Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo dan Pelabuhan Cilacap juga dapat diakses cukup cepat dari wilayah Kabupaten Kebumen. Wilayah Kabupaten Kebumen berada pada segitiga Yogyakarta-Borobudur-Dieng yang merupakan destinasi pariwisata internasional. Kabupaten Kebumen memiliki kompleksitas struktur geologi yang menjadi warisan geologi bernilai dunia, topografi lengkap terdiri dari wilayah pantai, dataran rendah dan perbukitan serta memiliki jenis tanah yang cocok ditanami berbagai tumbuhan.

Populasi Kabupaten Kebumen cukup besar yaitu berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 tercatat sebesar 1.388.490 jiwa dengan mayoritas masih didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,35% dari total penduduk yang cukup berpeluang untuk menggerakkan perekonomian daerah. Berdasarkan letak dan sejarahnya, Kabupaten Kebumen berada di perbatasan wilayah Mataram (Kedu) dan Banyumas yang menciptakan corak keragaman budaya baik bahasa, adat istiadat maupun tradisi. Dengan keadaan alam, manusia, dan budayanya maka Kabupaten Kebumen potensial untuk dikembangkan secara ekonomi untuk sektor pertanian, UMKM, industri, pariwisata, dan sektor jasa lainnya.



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, permasalahan dan tantangan yang dihadapi terutama terkait kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen cukup signifikan selama tahun 2015-2019 mencapai rata-rata pertumbuhan 5.50 persen per tahun. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen ini belum mampu mendorong penurunan Angka Kemiskinan yang selama tahun 2015-2019 hanya mampu turun rata-rata 0,91 persen per tahun. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia juga masih rendah yaitu sebesar 69,60 pada tahun 2019 yang menempatkannya di posisi 10 besar terbawah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan rendahnya pengeluaran perkapita yaitu sebesar Rp 8.976.000,00 pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi yaitu sebesar 4,76 persen pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Selain dikarenakan perubahan iklim, kerusakan lingkungan juga mulai terjadi dengan semakin sedikitnya tanaman vegetasi penyimpan air, sedimentasi sungai dan menumpuknya sampah dan limbah terutama yang sulit didaur ulang seperti plastik. Sementara di sisi pemerintahan, pelayanan publik masih belum optimal walaupun nilai IKM telah tinggi yaitu sebesar 80,61 pada tahun 2019 namun masih lebih rendah dibandingkan nilai yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 sebesar 57,33 atau masih pada kategori CC. Sedangkan terkait pengelolaan aset



tercatat sampai dengan tahun 2020, masih terdapat 1.073 bidang atau 47,10 persen dari total 2.278 bidang tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat dan 80 persen gedung yang digunakan untuk sekolah dasar merupakan tanah milik desa. Seluruh potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi tersebut akan menjadi agenda pembangunan jangka menengah periode berikutnya.

Pembangunan Kabupaten Kebumen didasarkan pada perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD) maupun menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas-Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Proses penyusunannya melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) persiapan, 2) perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah, 3) perumusan visi dan misi, 4) perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok, 5) perumusan strategi dan arah kebijakan, 6) perumusan program pembangunan daerah, dan 7) penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dan pendanaan daerah.



RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat pada periode RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 adalah “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu: 1) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; 2) mengurangi tingkat kemiskinan penduduk; 3) meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis; 4) mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan; dan 5) menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.

Dokumen RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas-Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2025 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja

tahunan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025.

Penyusunan dokumen RPJMD melewati beberapa tahapan sampai pada akhir tahapan yaitu penetapan RPJMD. Tahapan pertama dari proses penyusunan dokumen RPJMD adalah penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun sebelum ditetapkannya kepala daerah terpilih. Tahapan penyusunan RPJMD secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, 2017

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);



19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten



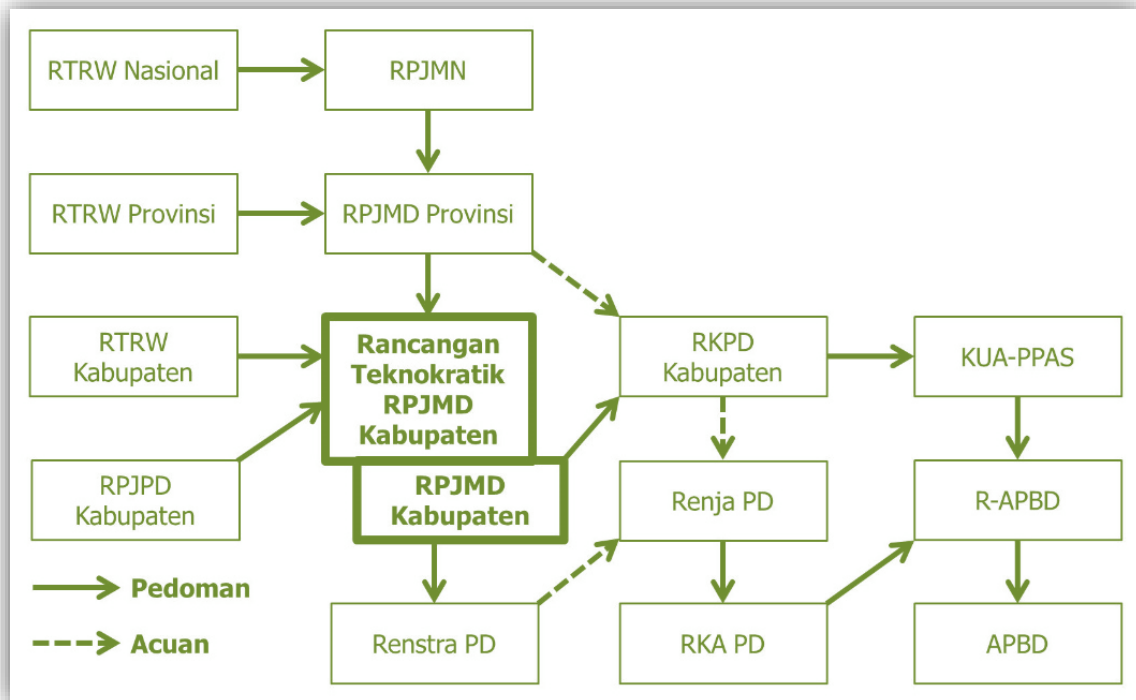
Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); dan

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96).

1.3. Hubungan Antardokumen

Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional maupun provinsi. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Kebumen, RTRW Kabupaten Kebumen, RTRWN dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Rancangan Teknokratik RPJMD dalam prosesnya akan menjadi dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Gambaran keterkaitan dokumen

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Sumber: UU No. 25 Tahun 2004, diolah

Gambar 1.2
Keterkaitan Antardokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Maksud penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 adalah untuk memberikan gambaran kondisi umum dan keuangan daerah Kabupaten Kebumen, serta permasalahan dan isu strategis daerah Kabupaten Kebumen. Permasalahan dan isu strategis daerah

tersebut menjadi pertimbangan bakal calon pasangan Bupati-Wakil Bupati Kebumen untuk menentukan visi dan misi pada saat pencalonan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 adalah:

1. Memperoleh gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kebumen;
2. Memperoleh gambaran keuangan daerah Kabupaten Kebumen; dan
3. Memperoleh gambaran permasalahan dan isu strategis daerah Kabupaten Kebumen.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Kebumen meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing; sebagai dasar

perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun ke depan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Hasil penelusuran dan pengkajian sejarah menemukan bukti pendukung yang kuat tentang asal mula Kabupaten Kebumen. Salah satu peristiwa penting adalah keterlibatan Ki Bodronolo membantu Sultan Agung dalam penyediaan perbekalan untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda di Batavia. Peristiwa ini dinilai memiliki makna heroik yang dapat dijadikan teladan dan semangat patriotisme serta nasionalisme. Secara yuridis formal, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kebumen, telah ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Kebumen pada hari Selasa Wage tanggal 1 Suro atau 21 Agustus 1629. Hari jadi ini merupakan momentum sejarah yang memiliki makna mendalam dan mendasar sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreativitas dan atraktivitas guna mewujudkan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum, Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang terus berkembang dan sangat dinamis, dengan dinamika pembangunan yang terjadi di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya, yang mendorong perkembangan pada setiap sektor kehidupan masyarakatnya. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari aspek geografi dan

demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten yang berada di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, dan sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten Kebumen terletak antara 109°33'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa, dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT).

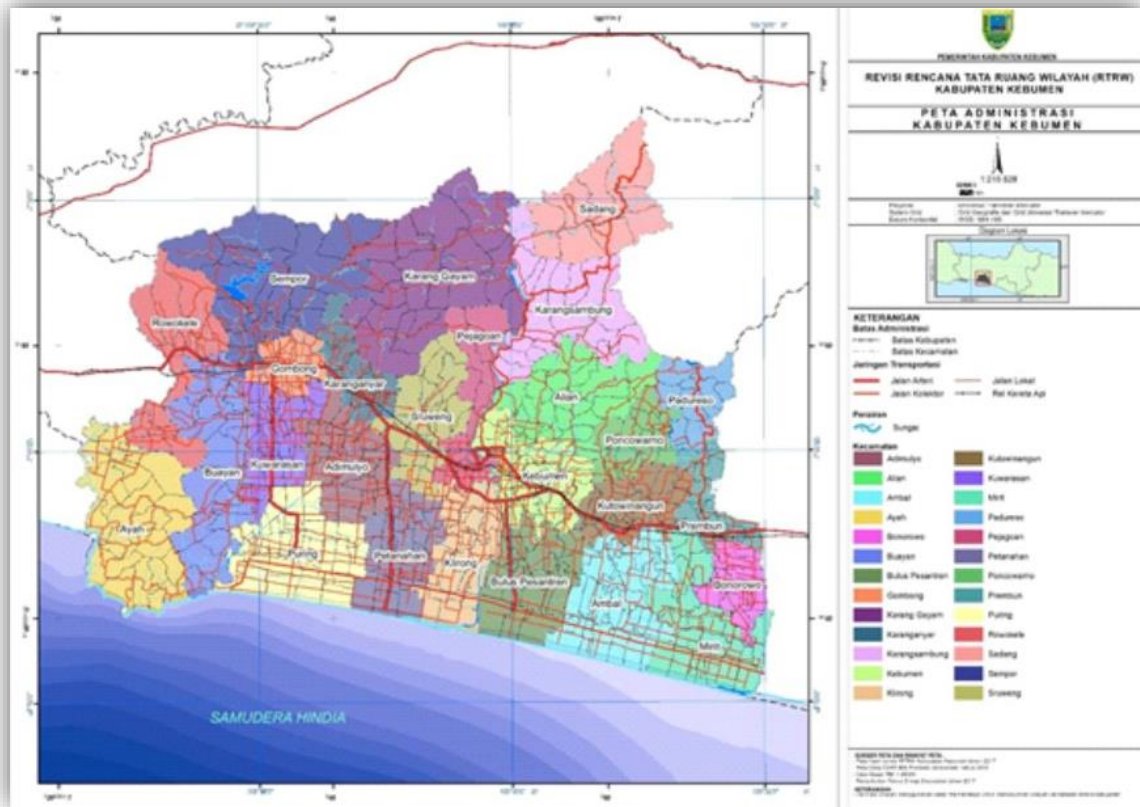
Tabel 2.1
Tabel Luas Wilayah Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Desa	Kelurahan	RW	RT
1	Ayah	76,37	18	-	81	396
2	Buayan	68,42	20	-	90	341
3	Puring	61,97	23	-	98	318
4	Petanahan	44,84	21	-	81	258
5	Klirong	43,25	24	-	107	318
6	Buluspesantren	48,77	21	-	82	386
7	Ambal	62,41	32	-	113	313
8	Mirit	52,35	22	-	70	265
9	Bonorowo	20,91	11	-	42	139
10	Prembun	22,96	13	-	40	130
11	Padureso	28,95	9	-	23	86
12	Kutowinangun	33,73	19	-	80	241
13	Alian	57,75	16	-	73	254
14	Poncowarno	27,37	11	-	34	100
15	Kebumen	42,04	24	5	138	554
16	Pejagoan	34,58	13	-	64	257
17	Sruweng	43,68	21	-	97	332
18	Adimulyo	43,43	23	-	81	227
19	Kuwarasan	33,84	22	-	86	247
20	Rowokele	53,80	11	-	61	294
21	Sempor	100,15	16	-	74	368
22	Gombang	19,48	12	2	81	288
23	Karanganyar	31,40	7	4	61	242
24	Karanggayam	109,29	19	-	76	390
25	Sadang	54,23	7	-	35	131
26	Karangsambung	65,15	14	-	62	252
Jumlah		1281,11	449	11	1930	7127

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2017

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53 persen dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km² atau 7,82 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Keduanya berada di bagian utara Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombang, yaitu 19,48 km² atau setara dengan 1,52

persen dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen Batas wilayah administrasi Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2019

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kebumen

2.1.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan

Topografi Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran rendah, dan kawasan perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0 s.d. 997,5 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2.

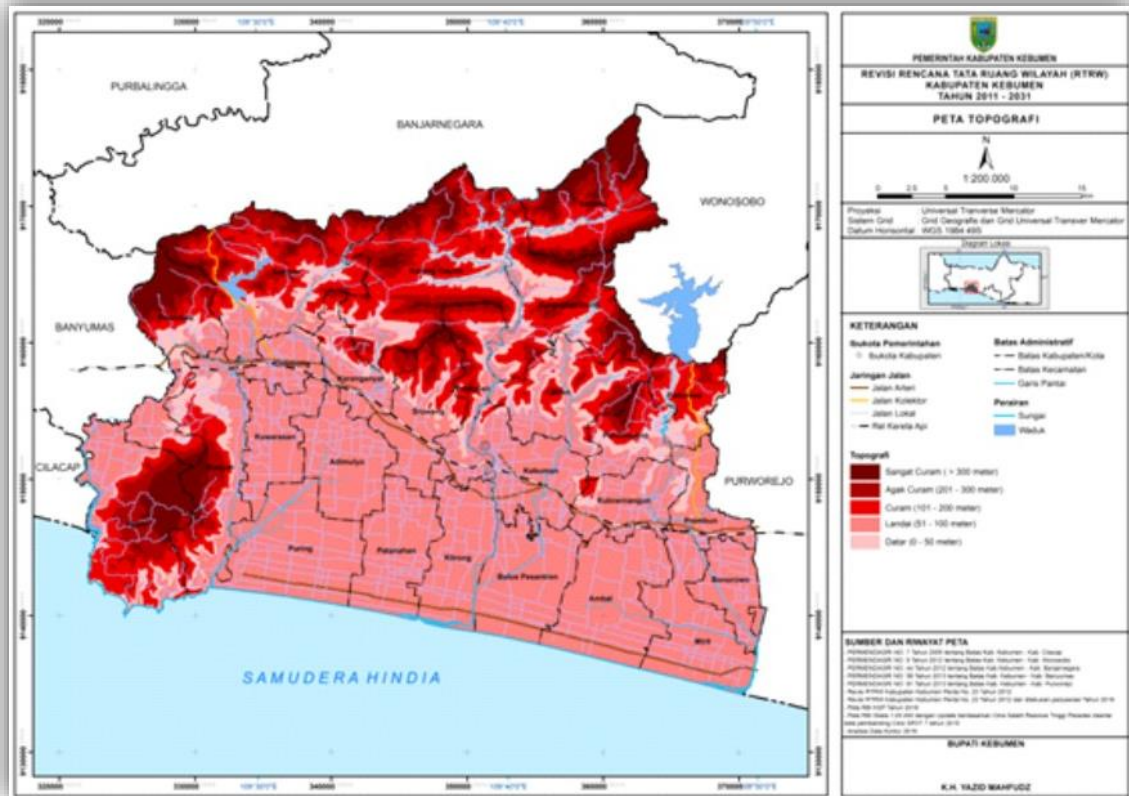
Tabel 2.2
Ketinggian Tanah dari Permukaan Air Laut di Kabupaten Kebumen

No	Ketinggian	Luas (ha)	Persentase (%)
1	0-7 meter	26.378,15	20,59
2	7-18 meter	22.163,28	17,30
3	18-25 meter	15.360,36	11,69
4	25-100 meter	23.316,29	18,20
5	100-500 meter	40.111,17	31,31
6	500-997,5 meter	781,71	0,61

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2017

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 ha atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 ha atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 ha atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 ha atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Kebumen

2.1.3 Geologi dan Tanah

1. Struktur Geologi

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari dua daerah di Pulau Jawa yang tersusun oleh batuan Pra-Tersier (batuan tertua di Jawa berumur lebih dari 60 juta tahun yang lalu) dengan kondisi geologi yang sangat kompleks. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen dapat diketahui bahwa batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (Paleosen) hingga termuda (Pliosen) terdiri dari:

1. *Kompleks Melange Luk Ulo* yang berupa bongkah-bongkah batuan Pra Tersier dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas);
2. *Formasi Karangsambung* yang tersusun oleh batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batupasir, batu gamping dan basal (berumur Eosen). Dalam formasi ini terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa olistolit;
3. *Formasi Totogan* yang tersusun oleh breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Oligo-Miosen);
4. *Formasi Waturanda* yang tersusun oleh batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit, basal dan massa dasar batu pasir tuf. Dalam Formasi ini terdapat anggota tuf yang tersusun oleh perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan dan napal tufaan (berumur Miosen Awal);
5. *Formasi Penosogan* yang terdiri dari perselingan batu pasir gampingan, batu lempung, tuf, napal dan kalkarenit (berumur Miosen Tengah);
6. *Diabas* ialah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (Miosen Tengah);
7. *Formasi Halang* yang tersusun oleh perselingan batu pasir, batu gamping, napal dan tuf dengan sisipan breksi (berumur Pliosen);
8. *Formasi Peniron* yang terdiri dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf;
9. *Endapan Pantai* yang berupa pasir lepas; dan
10. *Alluvium* yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal.

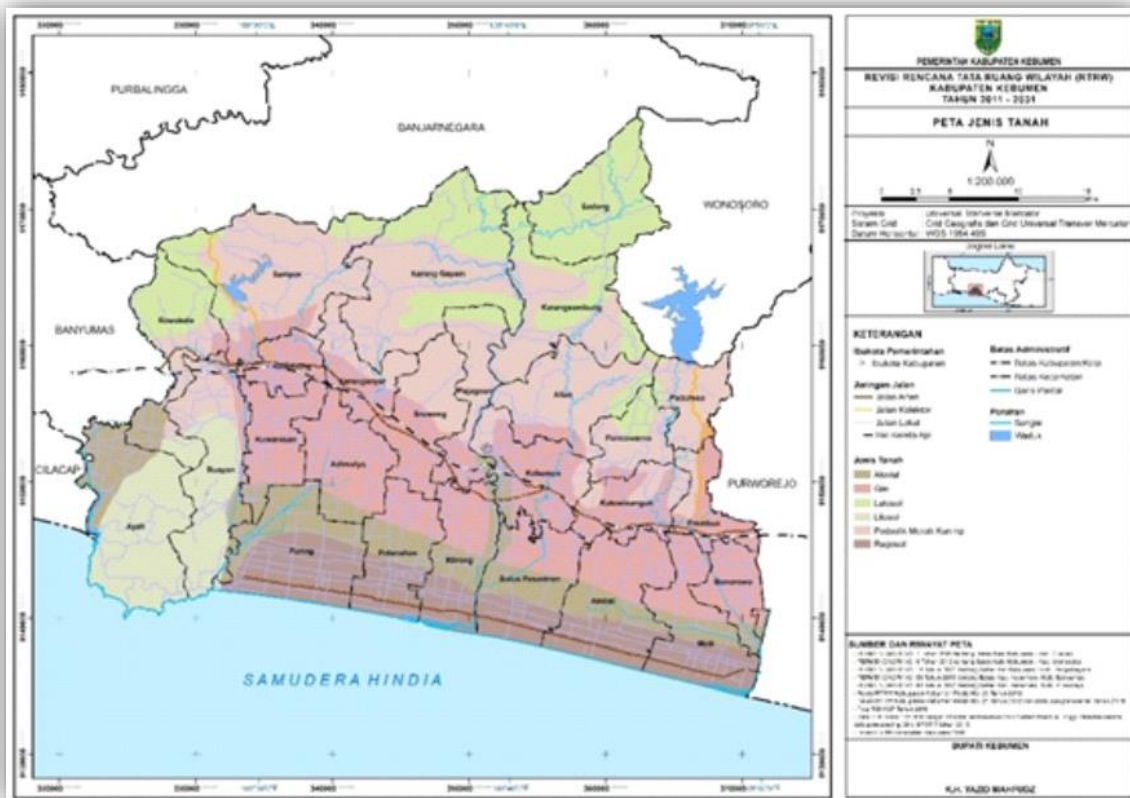
2. Jenis Tanah

Jenis tanah merupakan komponen yang cukup penting dalam menentukan kesesuaian fungsi kegiatan. Potensi tanah yang dimiliki Kabupaten Kebumen menunjukkan sebagian besar wilayahnya tergolong cukup subur, sehingga dapat difungsikan sebagai lahan pertanian. Hanya beberapa bagian wilayah yang kurang mampu untuk ditanami, seperti di sebagian Kecamatan Sempor, Karanggayam, Sadang, dan Alian. Adapun beberapa jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. *Alluvial*. Merupakan tanah yang beraneka ragam sifatnya dengan warna kelabu dan cokelat hitam, tidak peka terhadap erosi, serta mempunyai produktivitas yang rendah sampai tinggi. Biasanya digunakan untuk lahan tanah pertanian dan permukiman. Tanah Aluvial berada di sebagian besar Kecamatan Kaliori, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Bulus Pesantren, Ambal, dan Mirit.
2. *Latosol* atau *Inceptisol*. Merupakan jenis tanah mineral, cukup cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh di tanah latosol atau inceptisol antara lain yaitu tebu, tembakau, coklat, pala, vanili. Tanah latosol berada di sebagian Kecamatan Rowokele, Sadang, Karangsambung, Poncowarno, dan Pejagoan.
3. *Podsolik*. Tanah yang terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan suhu udara rendah. Umumnya, tanah ini berada di daerah pegunungan yang memiliki iklim basah dengan curah hujan lebih dari

2500 mm per tahun. Tanah Padsolik berada di sebagian Kecamatan Sempor, Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karanganyar, Kutowinangun, dan Padureso.

4. *Regosol*. Merupakan tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, coklat kekuning-kuningan, dan coklat kelabu. Tanah ini sangat peka terhadap erosi. Digunakan terutama untuk lahan perkebunan. Tanah regosol berada di sebagian besar terdapat di Kecamatan Prung, Petanahan, Bulus Pesantren, Ambal, dan Mirit.
5. *Glei*. Tanah yang mempunyai ciri adanya lapisan glei berwarna kelabu, terbentuk karena pengaruh genangan air atau drainase yang buruk. Tanah Glei terdapat pada sebagian besar Kecamatan Bonorowo, Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Sruweng, Karanganyar, Gombong, Kuwarasan, dan Adimulyo.
6. *Litosol*. Merupakan jenis tanah berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Penampangnya besar dan berbentuk kerikil, pasir atau batu-batuan kecil, karena sedikit sekali mengalami perubahan struktur atau profil dari batuan asal. Tanah litosol miskin unsur hara. Terdapat pada Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan.



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Kebumen

3. Kualitas Tanah

Keadaan tanah di daerah pesisir Kabupaten Kebumen, secara umum dibedakan dalam 2 satuan lahan yang meliputi hamparan pasir (gumuk pasir) dan dataran aluvial. Hamparan dataran pasir alluvial merupakan daerah yang terletak pada kawasan pantai, yang pemanfaatannya oleh masyarakat lebih banyak digunakan untuk daerah pertanian. Sedangkan hamparan gumuk pasir pasif, terdapat tumbuhan liar (perdu dan semak-semak) dan sebagian juga digunakan untuk areal pertanian. Tanah pasiran tersebut mudah meloloskan air dan kurang subur. Tanah tersebut kurang baik dimanfaatkan untuk areal

tambak secara langsung, sebab sulit untuk membangun tanggul dan kurang baik untuk petak penampungan air karena sifat porositas tanah yang besar.

Tanah pada area dataran aluvial yang diteliti umumnya mempunyai tekstur lempung (*clay*), sebagian bertekstur lempung lanauan (*silty clay*) atau lempung pasir (*sandy clay*). Tanah tersebut mempunyai pH agak asam-netral (5,4-7,2). Tanah tipe seperti itu mampu mengikat kandungan garam atau hara yang lebih banyak dan tidak mudah tercuci air hujan. Tanah lempungan sangat sesuai untuk dibuat pematang dan baik untuk tambak atau kolam penampung air.

4. Kondisi Stratigrafi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen (1992), Lembar Banyumas (1992), Lembar Banjarnegara dan Pekalongan (1996) urutan stratigrafi Kabupaten Kebumen terdiri dari (tua ke muda):

1. Melange (Batuan-batuan Pra tarsier atau PTm)

Merupakan batuan tertua yang tersingkap di Pulau Jawa dengan umur Kapur Tengah - Pleosen. Kelompok batuan ini disimpulkan sebagai kompleks melange (bancuh) yang terdiri dari *graywacke* (Kts), marmer, sekis dan filit (Km), serpentinit (kose), lava basalt berstruktur bantal, gabro, batu gamping merah, rijang (kobe), lempung hitam yang bersifat serpihan. Semuanya merupakan campuran yang bersifat tektonik. Komplek batuan ini tersebar di wilayah utara Kebumen, di sekitar Karangsambung – Sadang – Karanggayam.

- a. Basalt dan Rijang, terdiri dari basal dan rijang coklat, berselingan dengan batu gamping merah, mengandung fosil radiolarian. Basalt merupakan toleid rinjang terdapat berselingan dengan batu gamping merah, beberapa tempat berupa struktur bantal berbentuk memanjang searah pelapisan;
- b. Gabro, berwarna hijau muda berbutir kasar;
- c. Serpentin, merupakan ubahan dari batuan ultramafik berwarna hijau, sebagai sisipan dalam kelompok gabro dan basalt. Serpentin ini terdapat pada zona besar;
- d. Sekis dan Filit, terdiri dari sekis kwarsa serisit sekis amfibol dan filis; dan
- e. Greywake, merupakan batu pasir berwarna abu-abu tua, bila telah mengalami pelapukan berwarna hijau kelabu, berbutir kasar, pelapisan bersusun.

Kelompok tersebut di atas diduga berumur antara kapur abas hingga eosin. Satuan batuan pada unit ini dicirikan oleh struktur yang kacau, adanya percampuran bongkah batuan sedimen, beku dan metamorf dengan masa dasar lempung bersisik. Bongkah-bongkah batuan dalam unit ini berupa *exotic* dan *native block* berukuran centi meter hingga ratusan meter, mengambang di dalam matrik halus yang tersusun dari lempung hitam atau abu-abu dengan bidang gores garis di atasnya.

2. Formasi Karangsambung (Teoka)

Di atas kompleks melange Luk Ulo, secara tidak selaras diendapkan batuan sedimen hasil pelongsoran gaya berat. Kontak antara kompleks melange Luk Ulo

dengan kompleks Olistostrome Karangsambung sulit didapatkan. Kompleks Olistostrome Karangsambung tersusun oleh batuan dengan ukuran dan jenis fragmen sangat bervariasi berupa fragmen konglomerat, batu gamping berfosil, sekis, filit, basal, diabas dan batu pasir di dalam masa dasar lempung abu-abu bersisik. Ukuran fragmen di bagian bawah tengah lebih besar dengan variasi yang lebih heterogen. Pada bagian-bagian tertentu perlapisan batuan dapat dijumpai, namun dengan pola perlapisan yang tidak begitu ideal. Kompleks Olistostrome Karangsambung terdiri dari Formasi Karangsambung dan Formasi Totogan yang hubungan stratigrafinya saling menjemari, terkadang dijumpai bongkah fosil kayu. Formasi Karangsambung terdiri dari batu lempung bersisik dengan bongkahan batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu lempung dan basalt. Singkapan batuan ini terdapat di daerah Karangsambung, terutama sepanjang K. Weleran dan K. Luk Ulo ke arah barat yang membentuk antiklin. Satuan ini membentuk daerah perbukitan bergelombang rendah. Umur formasi ini adalah Eosen Tengah-Oligosen. Lingkungan pengendapannya adalah laut dalam – batial, hal ini ditunjang oleh adanya fosil bentos *Uvegirena sp* dan *Gyroidina soldanii (d'orbigny)*.

3. Formasi Totogan (Tomt)

Terdiri dari breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basalt. Secara setempat didapatkan sekis masa dasar adalah batu lempung bersisik. Secara umum Formasi Totogan terdiri atas:

- a. Bagian bawah: Campuran perulangan tak teratur antara breksi, batu lempung tufaan dan napal;
- b. Bagian tengah: Merupakan breksi, konglomerat dengan komponen basalt;
- c. Bagian atas: Merupakan perselingan batu lempung, batu pasir, tufa, berlapis baik.

Satuan ini tersingkap di daerah utara Kebumen, di sekitar kompleks Luk Ulo. Tebalnya melebihi 150 meter dan menipis ke arah selatan. Formasi ini selaras di atas Formasi Karangsambung, batas antara kompleks Luk Ulo berupa sesar. Umur formasi ini Oligosen Akhir-Miosen Awal. Formasi Totogan dapat dibandingkan dengan batuan sedimen berumur Eosen-Miosen di daerah Banjarnegara dan Pekalongan.

4. Formasi Gabon (Tomg)

Tersusun oleh breksi gunung api, tufa lapili, lava, breksi lahar dengan sisipan konglomerat dan batu pasir. Breksi berwarna abu-abu kehijauan, fragmen terdiri dari andesit dengan masa dasar batu pasir tufa. Tufa lapili abu-abu kehijauan berlapis. Lava dengan komposisi andesit, memperlihatkan struktur "*sheeting*". Batu tersebut pada umumnya telah mengalami serifikasi dan propilitisasi, diduga berumur oligosen akhir miosen awal, mempunyai hubungan tidak selaras dengan formasi Kali Pucang.

5. Formasi Waturada (Tmw) dan Anggota Tuf (Tnwt)

Formasi ini tersusun oleh breksi vulkanik dengan fragmen batuan beku dan lava andesitik sedangkan matriknya berukuran pasir. Pada bagian bawah tersusun oleh batu pasir graywacke, bagian tengah oleh breksi dengan ukuran fragmen sekitar 30 cm dan berstruktur *graded bending*, ke arah atas ukuran fragmen meningkat mencapai lebih dari 50 cm. Formasi ini diendapkan sebagai endapan fluxoturbidite dari kipas bawah laut pada cekungan berarah timur-barat yang turun secara aktif pada bagian depan *fore arc basin* Tersier. Terdapat Anggota Tuf (Tmwt) yang terletak di bagian bawah formasi. Tersebar di bagian utara dengan membentuk morfologi tinggi dengan beberapa puncak gunung seperti Gunung Prahu, Gunung Paras, Gunung Tugel, dan Gunung Watutumpang. Anggota tuf Formasi Waturanda yang terletak di bagian bawah formasi dapat dibandingkan dengan Formasi Andesit Tua yang berumur Oligosen Akhir hingga Miosen Awal di Yogyakarta. Berdasarkan kedudukan stratigrafi satuan batu pasir terhadap satuan lainnya maka ditafsirkan umur formasi ini adalah Miosen Awal, Karena Formasi Penosongan yang menindihnya berumur Miosen Tengah dengan lingkungan laut dalam.

6. Formasi Penosongan (Tnp)

Terdiri dari perselingan antara batu pasir, batu lempung, tufa, napal, kalkarenit. Bagian bawah dari batu pasir jenis *greywacke*, berwarna abu-abu kecokelatan, secara stratigrafis ke atas berubah menjadi batu lanau hingga batu lempung. Pada bagian atas dari formasi ini terdiri dari tufa kaca

berselingan dengan napal tufaan, berstruktur lapisan sejajar, konvolut, dan flute cast. Formasi ini berumur Miosen Tengah, bagian bawah terletak tidak selaras di atas Formasi Waturanda. Satuan ini tersingkap antara lain di sekitar Alian dan Penosogan. Ketebalan terukur di daerah Alian adalah 1146 meter dan di daerah Penosogan 950,5 meter.

7. Formasi Kalipucang (Tmk)

Satuan ini tersusun sebagian besar oleh batu gamping terumbu, setempat dapat dijumpai batug amping klastik, serta batu lempung bitumen pada bagian bawah. Formasi Kalipucang tersebar di bagian barat daya Kabupaten Kebumen yang membentuk morfologi kars Gombong selatan. Batu gamping formasi ini sebagian besar telah mengalami karstifikasi membentuk endapan caliche (batu keprus).

8. Formasi Halang (Tmph)

Penyebaran formasi tersebar di bagian tengah lembar, membentang dari barathingga timur menempati daerah perbukitan. Tebalnya sekitar 400-700 meter. Litologipenyusunan terdiri dari batu pasir gampingan, batu pasir kerikilan, batu pasir tufaan, napal, napal tufaan, batu lempung, batu lempung napalan dan sisipan kalkarenit. Nama formasi ini didasarkan pada lokasi tipe di daerah Geger Halang, Kuningan, Jawa Barat. Sedangkan di Sub Cekungan Kebumen terdapat beberapa kelompok batuan dengan ciri mirip dengan Geger

Halang. Umur formasi adalah Miosen Tengah-Pliosen Awal, Berdasarkan temuan formasi bentos seperti *Gyroidea sp* dan *Epinodes sp*.

9. Formasi Peniron (Tpp)

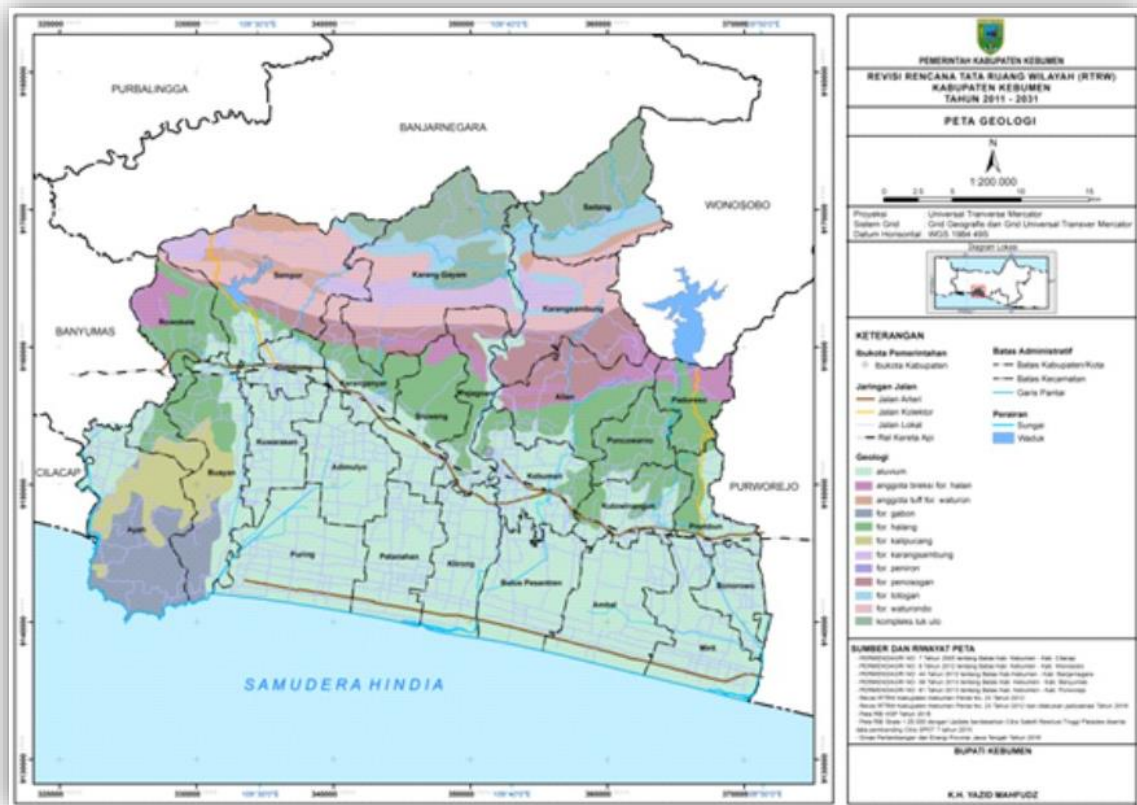
Formasi ini menindih selaras di atas Formasi Halang dan merupakan sedimen turbidit termuda yang diendapkan di zone Pegunungan Serayu Selatan. Litologi terdiri dari breksi aneka bahan (polimik) dengan komponen andesit, batu lempung, batu pasir, dengan massa dasar batu pasir sisipan tufa.

10. Batuan Terobosan (Tma dan Tmd)

Batuan terobosan banyak dijumpai di bagian barat daya serta utara wilayah Kabupaten Kebumen. Di wilayah selatan yang berasosiasi dengan breksi vulkanik Formasi Gabon, semuanya berkomposisi andesitik (Tma). Sedangkan di bagian utara, terutama sekitar Karangsambung dijumpai Diabas (Tmd). Batuan diabas umumnya lebih gelap dan kaya mineral piroksen.

11. Endapan Aluvium (Qa)

Satuan batuan ini tersusun oleh sediment yang belum terkonsolidasi, berukuran lempung hingga gravel, sebagai hasil endapan yang terdapat di sekitar sungai maupun sepanjang pantai. Endapan alluvial ini melampar cukup luas di bagian selatan Kebumen. Endapan alluvial sungai (fluvial) yang paling luas dan tebal endapannya adalah sepanjang Sungai Luk Ulo.



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Kebumen

2.1.4 Hidrologi

Secara hidrogeologis, sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian.

Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (*akuifer*) di bawah permukaan tanah. Potensi air tanah di

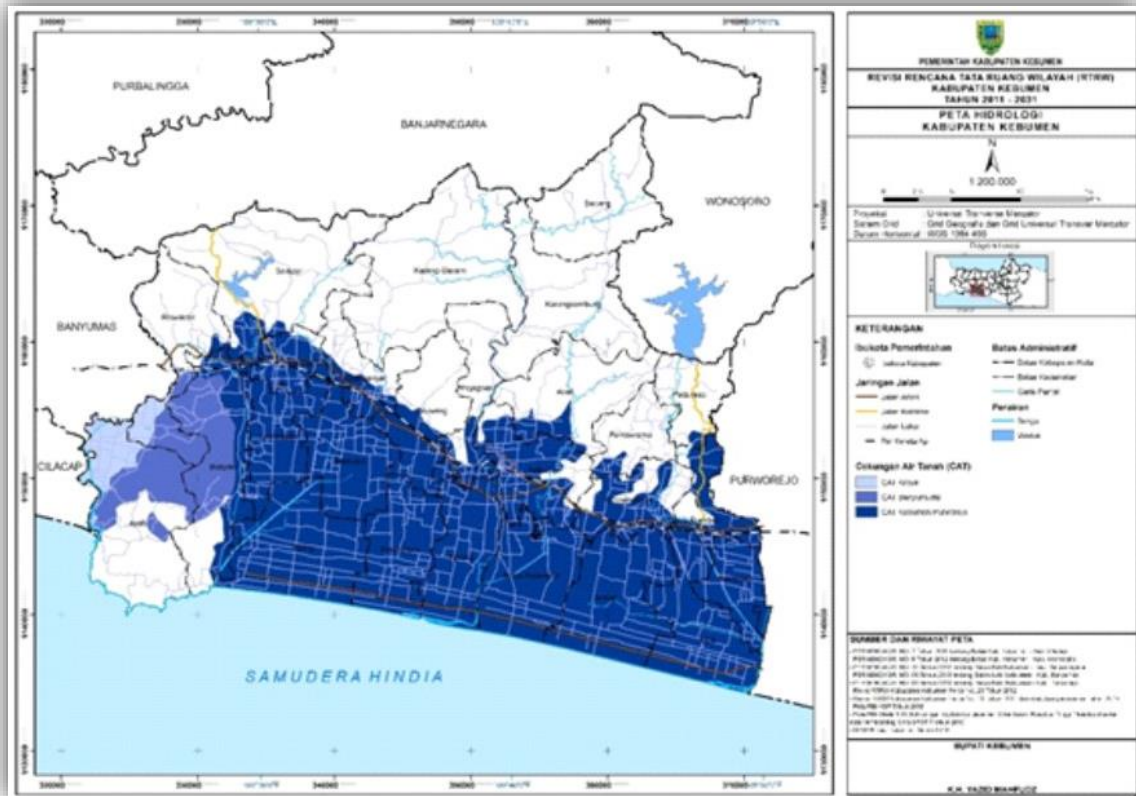
Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral adalah sebesar 5,7 juta m³/tahun. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur.

Salah satu jenis air tanah dalam adalah cekungan air tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Persebaran CAT Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumudal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombong, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

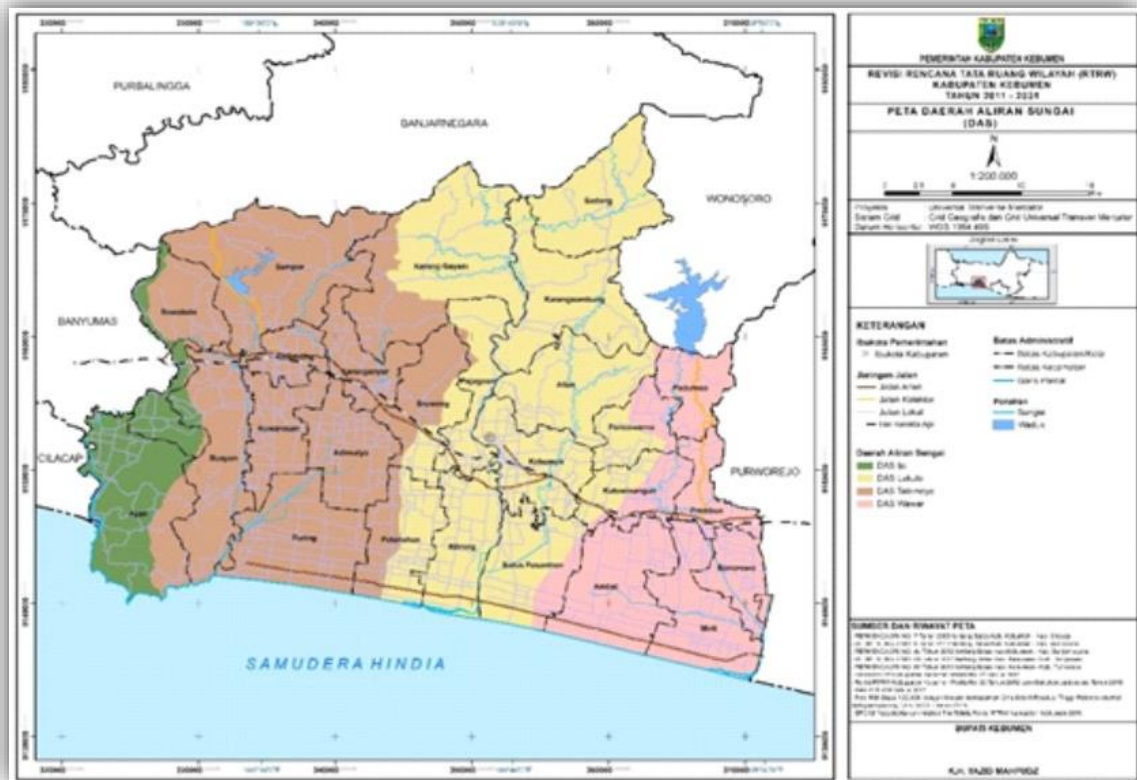
Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2018



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.5
Peta Hidrogeologi Kabupaten Kebumen

Wilayah Kabupaten Kebumen dilalui oleh beberapa sungai/kali yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain Ijo, Lukolo, Telomoyo, dan Wawar. Sebaran DAS tersebut tersaji pada Gambar 2.6.



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.6
Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kebumen

Selain sungai, Kabupaten Kebumen memiliki banyak mata air yang mengalir sepanjang tahun, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Mata Air di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Debit Air (liter/detik)
1	Buayan	37	0,1 s.d. 222
2	Pejagoan	19	0,1 s.d. 6,5
3	Sruweng	25	0,1 s.d. 6,3
4	Ayah	18	0,1 s.d. 3,5
5	Rowokele	27	0,1 s.d. 100
6	Kutowinangun	3	0,1 s.d. 0,5
7	Poncowarno	12	0,1 s.d. 0,9
Jumlah		141	

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2019

Potensi mata air terbesar berada di Kecamatan Buayan dengan jumlah 37 mata air. Selain itu mata air dengan debit terbesar juga berada di Kecamatan Buayan yaitu mata air Desa Sikayu dengan besaran 222 liter/detik.

Potensi air yang berasal dari sungai, air tanah, dan mata air dapat menjadi sumber air baku yang berguna untuk memenuhi kebutuhan air minum. Potensi air baku Kabupaten Kebumen tersaji dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen

No	Sumber Air Baku	Potensi Air Baku
1	DAS Wawar	11.097,38 liter/detik
2	DAS Luk Ulo	31.126,08 liter/detik
3	DAS Telomoyo	25.941,66 liter/detik
4	DAS Ijo	13.018,01 liter/detik
5	Mata Air	± 720 liter/detik

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2019

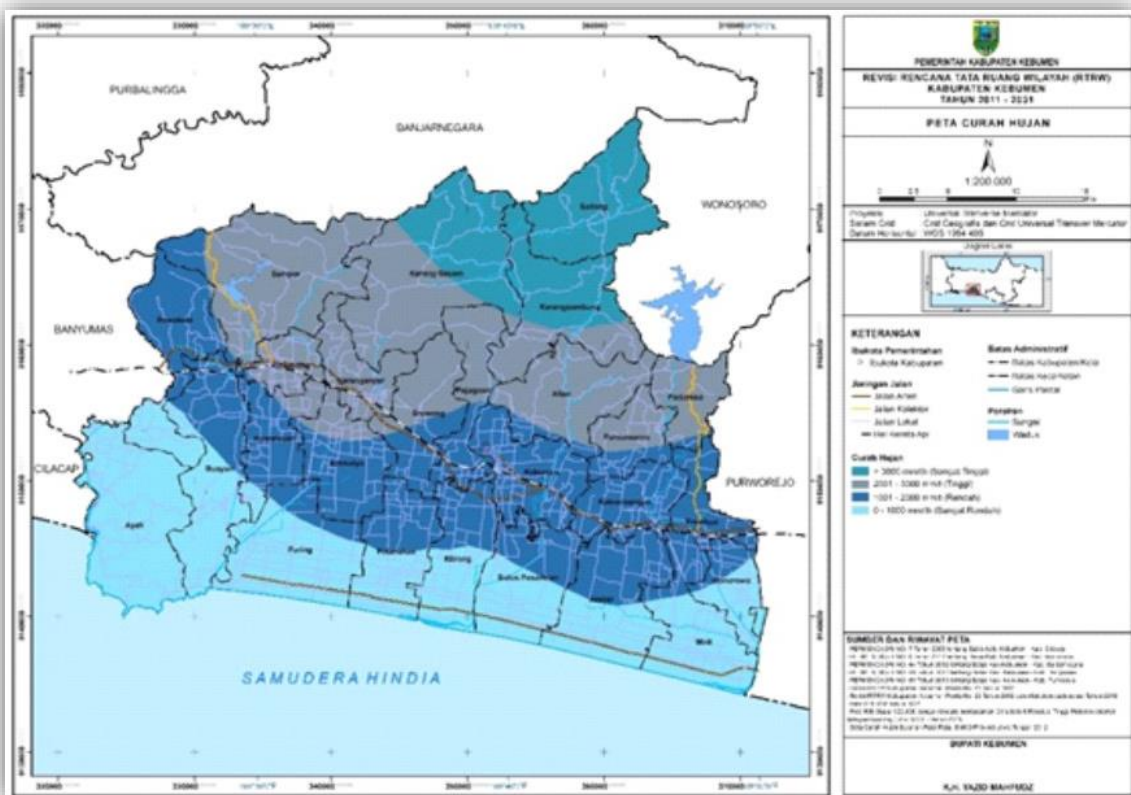
2.1.5 Klimatologi

Secara klimatologis, Kabupaten Kebumen adalah daerah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Curah Hujan di Kabupaten Kebumen terbagi menjadi empat tingkatan yaitu 0-1000 mm/tahun, 1001-2000 mm/tahun, 2000-3000 mm/tahun, >3000 mm/tahun. Menurut Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di Kabupaten Kebumen tahun 2017 berkisar antara 25,10°C sampai dengan 27,20°C. Untuk kelembaban udara berkisar antara 83% sampai dengan 89%. Sedangkan untuk curah hujan selama tahun 2017 sebesar 3.617 mm³ dan hari hujan sebanyak 210 hari.

Tabel 2.6
Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Kebumen

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
1	Januari	465,00	26
2	Februari	407,00	22
3	Maret	513,00	18
4	April	433,00	15
5	Mei	105,00	4
6	Juni	18,00	3
7	Juli	5,00	1
8	Agustus	10,00	3
9	September	35,00	7
10	Oktober	23,00	8
11	November	667,00	20
12	Desember	441,00	22
Total		3.122,00	149

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2017



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.7
Peta Curah Hujan Kabupaten Kebumen

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kebumen berada di wilayah selatan Jawa Tengah dan memiliki garis pantai sepanjang 53 km mulai dari Mirit sampai ke Ayah. Dengan rencana operasional Bandara Internasional Yogyakarta/*New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kulonprogo pada tahun 2019, diharapkan aksesibilitas menuju ke Kebumen menjadi lebih mudah sehingga mampu menarik wisatawan dan investor. Untuk itu Kebumen perlu membuat konsep pengembangan wilayahnya dengan menciptakan gerbong penarik ekonomi wilayah yang memiliki *multiplier effect* tinggi untuk masyarakat dengan didukung infrastruktur yang memadai. Beberapa konsep potensial akan dikembangkan di wilayah Kebumen yaitu:

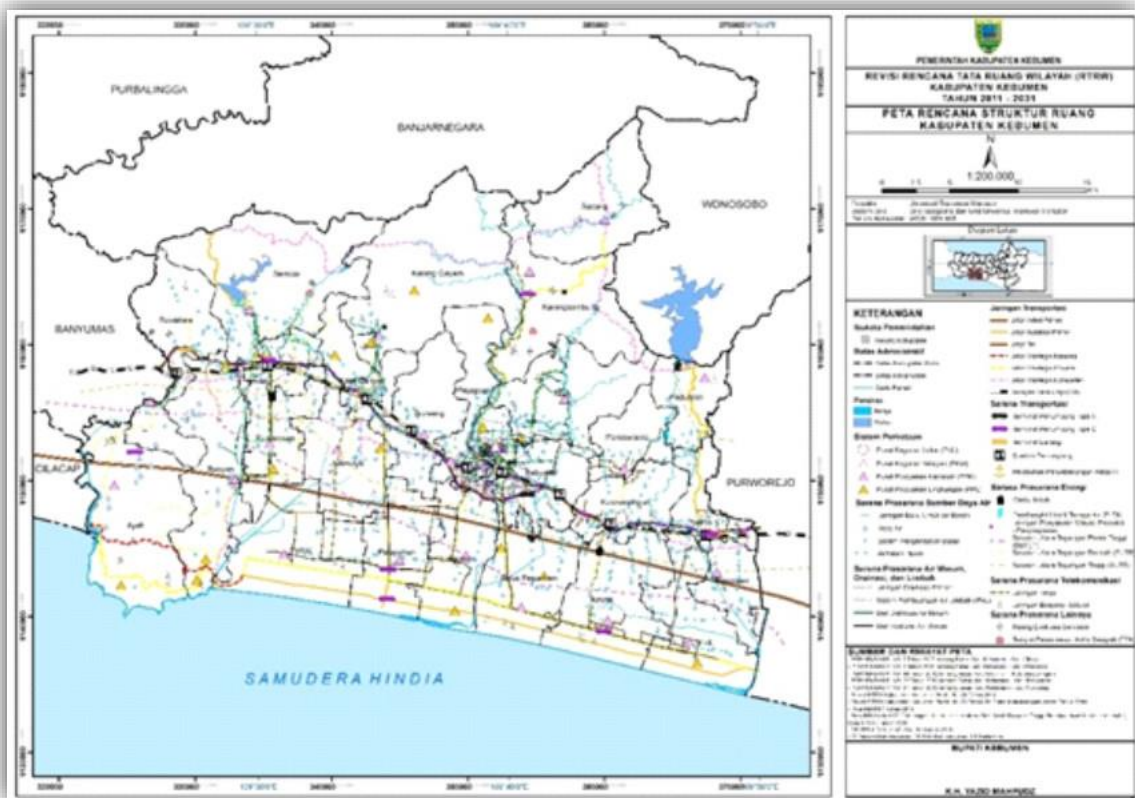
1. Potensi wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen termuat pada Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri dari rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem perkotaan, meliputi Pusat Kegiatan Wilayah di Kawasan Perkotaan Kebumen; Pusat Kegiatan Lingkungan di Kawasan Perkotaan Gombong, Karanganyar dan Prembun; Pusat Kegiatan Kecamatan di setiap ibukota kecamatan; serta Pusat Pelayanan Lingkungan di 19 desa. Adapun rencana sistem jaringan prasarana, meliputi:

- a. rencana sistem jaringan transportasi;

- b. rencana sistem jaringan energi;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.



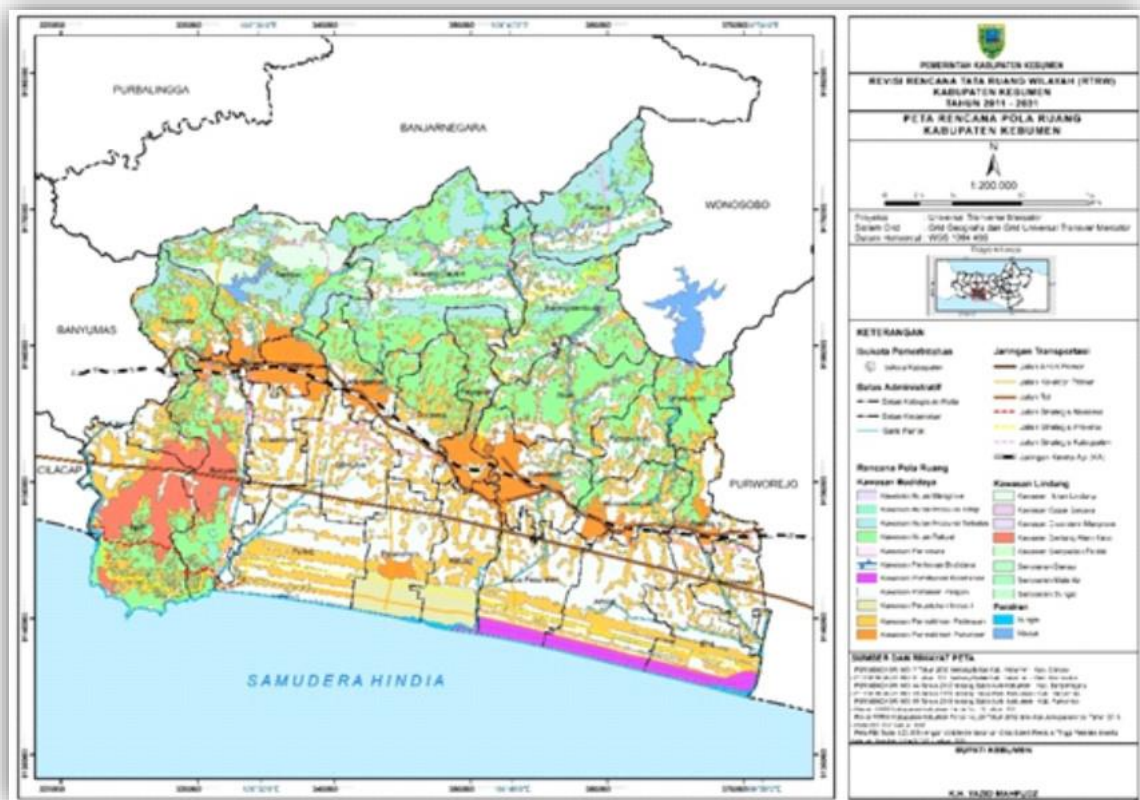
Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.8
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kebumen

Berdasarkan pada rencana sistem jaringan transportasi berupa sistem jaringan jalan, jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk

membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten, meliputi:

1. Jalan Lingkar Gombong
2. Jalan Lingkar Utara Gombong
3. Rencana Jalan Alternatif koridor tengah selatan melalui: Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren (Pujodadi Batas Purworejo – Bonorowo – Tlogorejo – Pekutan – Sinungrejo – Lajer – Ampih – Jogopaten – Klapasawit) Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Rowokele (Aditirto – Kemujan – Melis Banjareja – Rogodono-Pringtutul
4. Rencana Jalan Alternatif koridor tengah utara: Karangpoh — Aditirto — Jabres — Tanggerasi — Plarangan — Karanganyar
5. Peningkatan jalan menuju wisata yang mendukung wisata Geopark Nasional Karangsampung — Karangbolong
6. Rencana Pengembangan Jalur Pesisir Ayah
7. Rencana jalan menuju kawasan industri



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.9
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri dari rencana Kawasan peruntukan lindung dan rencana kawasan peruntukan budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan konservasi; kawasan lindung geologi; kawasan rawan bencana; kawasan cagar budaya; dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun rencana kawasan peruntukan budidaya meliputi:

- kawasan hutan produksi;
- kawasan hutan rakyat;



- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan pertanian meliputi:

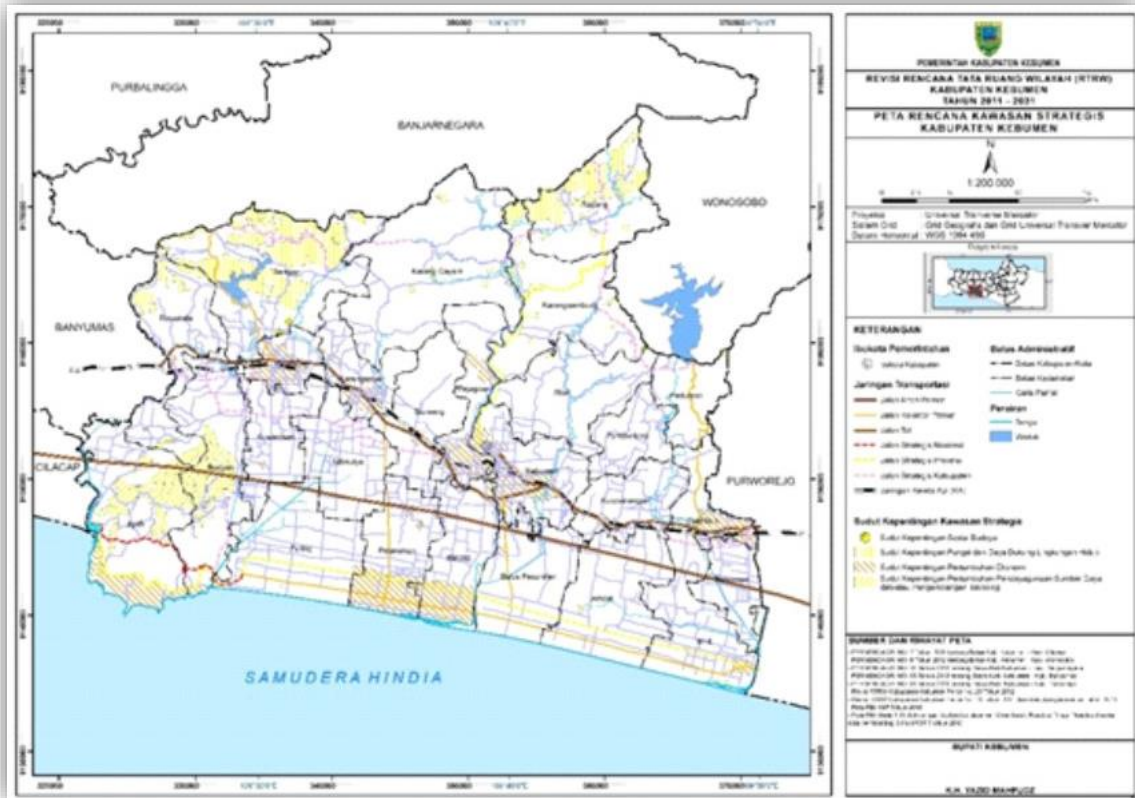
- a. kawasan tanaman pangan, berupa lahan pertanian lahan basah dan lahan kering dengan luas kurang lebih 40.432,40 ha yang lokasinya tersebar di masing-masing wilayah kecamatan, dan
- b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan, berupa kawasan tanaman pangan

Kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 4,69 ha, meliputi:

- 1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), meliputi :
 - a. DPK Karst Gombang dan sekitarnya, meliputi:
 - i. KSPK Karst Gombang dan sekitarnya, meliputi Gua Jatijajar, Gua Petruk, Gua Barat; dan
 - ii. KSPK Gombang – Sempor dan sekitarnya, meliputi Waduk Sempor dan Benteng Van Der Wijck.
 - b. DPK Geologi Karangsambung dan sekitarnya, meliputi:



- i. KSPK Karangsambung dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, dan Kecamatan Sadang; dan
- ii. KSPK Kebumen – Prembun dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun, Kecamatan Alian, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Poncowarno
- c. DPK Pantai Selatan dan sekitarnya, meliputi:
 - i. KSPK Puring – Petanahan dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, dan Kecamatan Adimulyo; dan
 - ii. KPPK Klirong – Mirit dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Ambal,
- 2. Pembangunan daya tarik wisata, meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.10
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen

Kawasan strategis di wilayah kabupaten meliputi: Kawasan Strategis Nasional; Kawasan Strategis Provinsi; dan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Nasional di wilayah kabupaten meliputi: Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan; Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan Strategis Provinsi meliputi: Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup; dan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi: Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi.

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

- a. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun – Kutowinangun – Kebumen – Sruweng – Karanganyar – Gombang;
- b. Kawasan pesisir Ayah;
- c. Kawasan Petanahan dan Kawasan Peruntukan Industri;
- d. Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di seluruh kecamatan
- e. Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit;
- f. Kawasan industri genteng Pejagoan; dan
- g. Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan.

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:

- a. Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombang Kecamatan Gombang;
- b. Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
- c. Masjid Soko Tunggal di Desa Pekuncen Kecamatan Sempor; dan

- d. Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen.

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

- a. Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo;
- b. Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang;

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi, meliputi:

- a. Kawasan Waduk Sempor; dan
- b. Kawasan Waduk Wadaslintang.

2. Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong

Pada tahun 2018, Geopark Karangsambung-Karangbolong telah ditetapkan menjadi Geopark Nasional. Dengan ditetapkan menjadi Geopark Nasional, maka keberadaan kekayaan geologi yang didukung keragaman hayati dan budaya di Kebumen diakui di taraf nasional. Hal ini juga sebagai wujud komitmen Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Penetapan ini sangat strategis, sebagai lokomotif perekonomian Kabupaten Kebumen yang berbasiskan potensi lokal. Untuk itu perlu dukungan kebijakan anggaran untuk fokus pada pengembangan kawasan Geopark dari berbagai aspek.

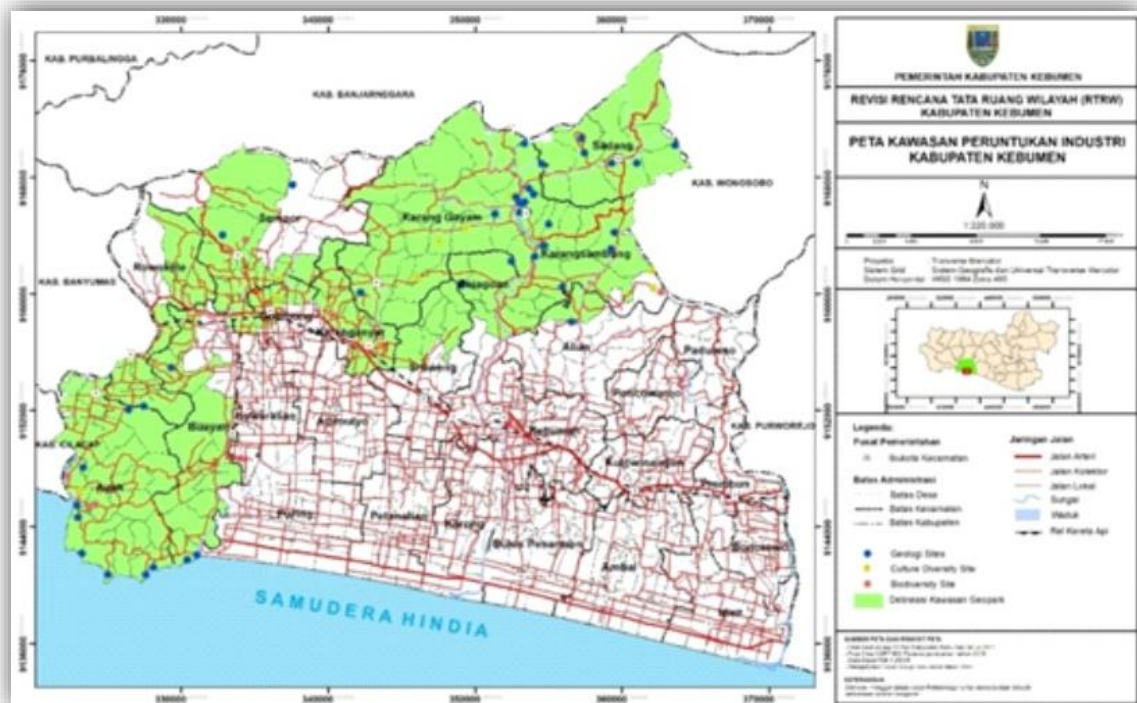
Di wilayah utara, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan yang telah menjadi rujukan bagi para geolog yaitu Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Sementara di wilayah selatan, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan karst Gombang selatan dengan topografi pegunungan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Keindahan alam yang ada di kawasan karst ini sudah tidak perlu diragukan lagi, sehingga kawasan ini lekat dengan wisata alam goa, bukit, dan pantai.

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung memiliki 30 lokasi bentukan geologi (*geodiversity*) yang terdiri dari 28 situs batuan dan 2 situs mata air panas. Kawasan ini merupakan laboratorium alam dan monumen geologi karena menghadirkan variasi struktur dan jenis batuan di kawasan yang relatif tidak luas. Nilai ilmiahnya bertambah penting setelah lahir teori tektonik lempeng, karena menurut para ahli geologi daerah ini pernah menjadi batas lempeng konvergen berupa jalur subduksi pada Jaman Kapur yang berlanjut hingga Pegunungan Meratus, Kalimantan. Batuan-batuan hasil tumbukan tersebut kini terangkat ke permukaan dan dapat diamati dalam kondisi yang relatif segar. Oleh karena penting untuk terus melindungi batuan-batuan langka yang terdapat di Karangsambung dari kerusakan akibat aktivitas penambangan.

Sementara itu, Kawasan Bentang Alam Karst Gombang merupakan sebuah rangkaian pegunungan atau perbukitan karst yang berada di barat daya Kebumen yang mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ayah, Buayan, dan Rowokele. Kawasan ini memiliki luas 4.894 hektar dengan panjang perbukitan

kapur 8 km dan lebar 3 km serta memiliki 182 gua, 2 telaga karst, sungai bawah tanah, ponor, air terjun, dan mata air.

Salah satu tujuan pokok membangun dan mengembangkan geopark adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam tataran pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung kepada daerah dalam bentuk peningkatan mutu kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut. Konsep geopark mengupayakan suatu perubahan dalam pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari eksploitasi menjadi konservasi dengan diambil manfaatnya. Dengan terwujudnya Geopark Nasional di Kabupaten Kebumen, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbong penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka.



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.11
Peta Delineasi Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong

3. Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kebumen direncanakan di Kecamatan Petanahan dan Klirong, dengan pertimbangan:

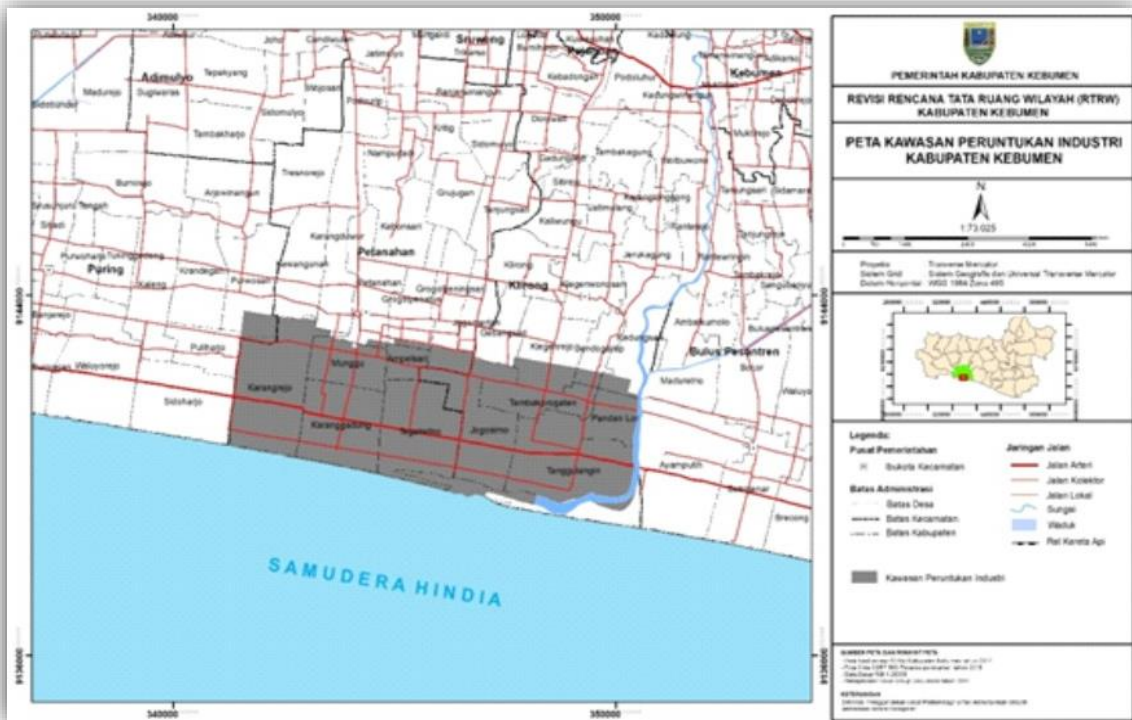
- a. Terletak di Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa (jalur prioritas dengan fasilitas lengkap), sehingga memudahkan akses dan mobilitas barang dan jasa; dan
- b. Tidak jauh dari pusat Kota Kebumen (15-20 km).

Diharapkan kawasan peruntukan industri ini mampu menarik investor sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menampung lebih banyak tenaga kerja di wilayah Kabupaten Kebumen. Rencana pengembangan Kawasan Industri Kebumen sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang serta Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Kawasan Industri Kebumen termasuk program prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Brebes - Tegal



- Pemalang. KIK diproyeksikan sebagai pendukung Kawasan Super Prioritas Nasional Kawasan Industri Brebes, dengan visi: Kawasan Industri Kabupaten Kebumen sebagai Kawasan Industri Berbasis *Eco-Industrial Park* yang Didukung Unit Bisnis Strategis, Berkesinambungan dan Berwawasan Lingkungan. Lahan awal untuk pengembangan Kawasan Industri Kebumen berupa tanah yang telah dimiliki Pemkab seluas 105 hektar, dengan tutupan lahan pertanian lahan kering (tegalan) yang kurang produktif. Lahan berada dekat laut, sehingga memerlukan rencana mitigasi bencana, jalur evakuasi bencana, alat *early warning system*, tempat evakuasi bencana dan daerah penyangga hijau. Dalam rangka mewujudkan Kawasan Industri, Pemkab perlu membangun fasilitas infrastruktur dasar dan sarana penunjang, serta penguatan kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Industri melalui BUMD atau KPBU atau skema kerjasama bisnis lainnya.



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.12
Peta Kawasan Peruntukan Industri di Kec. Petanahan dan Kec. Klirong



Sumber: BED KIK Kemenperin, 2018

Gambar 2.13
Foto Drone Eksisting Kawasan Peruntukan Industri di Kec. Petanahan dan Kec. Klirong

4. Pengembangan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta

Menurut Perda Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Pasal 20b ayat (4) menyebutkan bahwa terdapat rencana pengembangan jalan tol Cilacap – Yogyakarta. Menurut Perda Nomor 23 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 Pasal 12, rencana jaringan jalan di Kabupaten Kebumen meliputi jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud berupa ruas jalan tol Ciamis-Cilacap-Yogyakarta.

Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, direncanakan sebagai infrastruktur yang mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, khususnya di Kawasan Barlingmascakeb dan Purwomanggung dengan melibatkan peran badan usaha/swasta/KPBU. Rencana pembangunan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta diharapkan menjadi salah satu upaya dan strategi untuk:

- a. Mendorong investasi industri strategis;
- b. Sebagai penguat konektivitas dan sistem logistik di sisi selatan Pulau Jawa; dan
- c. Pengembangan sektor kepariwisataan.

Tol Cilacap Yogyakarta sebagai ruas Tol Perencanaan/Prakarsa yang terhubung dengan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Kementerian PUPR di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap

- b. Jalan Tol Tegal-Cilacap
- c. Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo



Sumber: Ditjen Pembiayaan Infrastruktur KemenPUPR, 2020

Gambar 2.14
Rencana Trase Tol Cilacap-Yogyakarta

Tahap studi, pendanaan, dan pengadaan tanah rencana pembangunan tol akan dilakukan pada tahun 2020-2022. Adapun tahap konstruksi fisik direncanakan mulai dari bulan April 2022. Rencana pembangunan proyek KPBU Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta diindikasikan membutuhkan dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pembangunan tol mempunyai karakteristik investasi jangka panjang, risiko bisnis dan risiko teknis rumit, sehingga perlu dikelola sedemikian sehingga memberikan dampak negatif paling minimal pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup Kabupaten Kebumen. Pemerintah kabupaten juga perlu mengatur pergerakan di dalam kawasan

budidaya maupun pada jalan-jalan di kawasan sekitar jalan tol, berdasarkan Pedoman Konstruksi dan Bangunan, serta Pedoman Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Sekitar Jalan Tol yang berlaku, di antaranya melalui pengaturan *exit tol*, *rest area* dan jalan konektor menuju tol dari jalan nasional/ provinsi/kabupaten.

2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

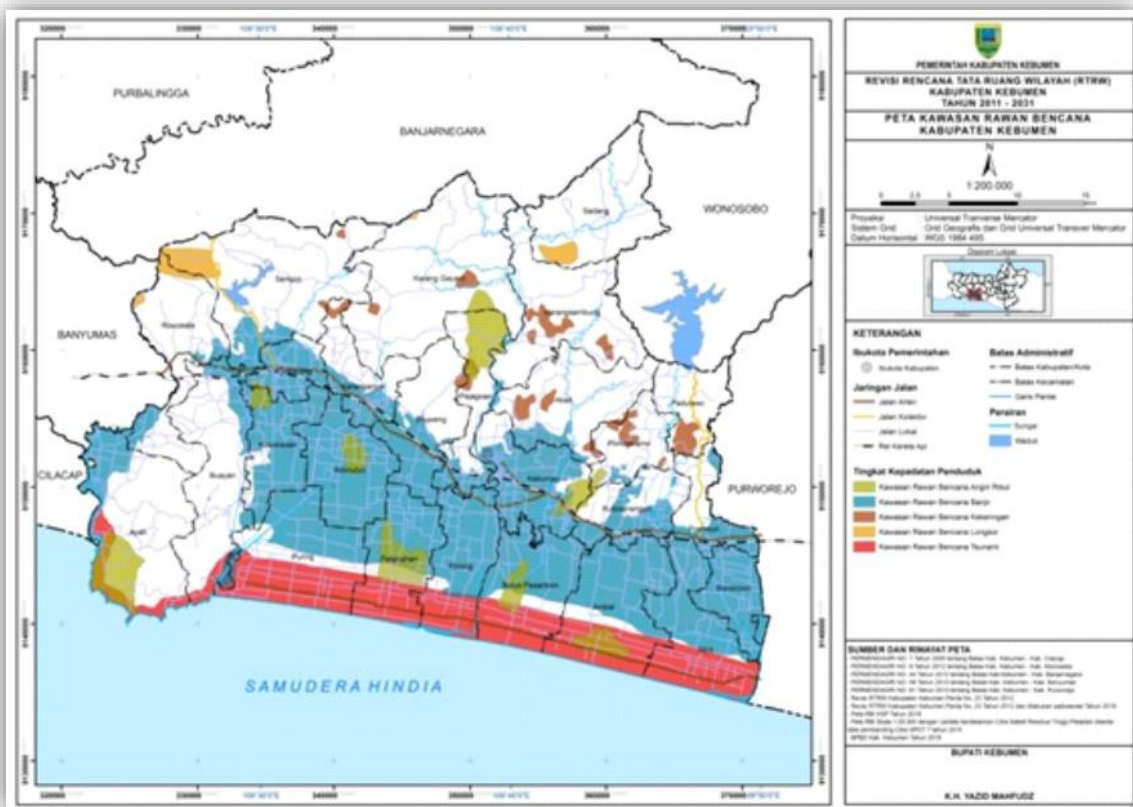
Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Kebumen menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Tabel 2.7
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2018

No	Jenis Bencana	Jumlah	Kerusakan	Kerugian	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi
1	Tanah Longsor	211	1.200.250.000	220.200.000	0	0	0	0
2	Gempa Bumi	1	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0
3	Banjir	53	32.100.000	26.100.000	0	0	0	0
4	Angin	248	299.390.000	173.987.500	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	57	1.819.600.000	212.400.000	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan	64	0	0	0	0	0	0
	Dropping air bersih	1698						

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2019

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Kebumen tersebar di daerah dataran rendah di wilayah selatan, dari Kecamatan Ayah sampai dengan Mirit. Sungai besar di Kebumen timur yang rawan banjir adalah Sungai Telomoyo di daerah Adimulyo, Kuwarasan dan Puring. Di daerah Kebumen tengah, sungai yang rawan banjir adalah Sungai Kedungbener yang melintasi Kecamatan Kebumen dan Buluspesantren. Adapun di daerah Kebumen timur sungai yang rawan banjir adalah Sungai Gentan di daerah Kecamatan Prembun, Mirit, dan Bonorowo.



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2019

Gambar 2.15
Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen

Kawasan rawan bencana angin ribut, tersebar di Kecamatan Gombang, Kuwarasan, Adimulyo, Petanahan, Pejagoan, Kebumen, Buluspesantren, Ambal, Kutowinangun, dan Poncowarno. Angin ribut dapat mengakibatkan pohon tumbang, gangguan lalu-lintas dan aktivitas nelayan. Kejadian angin ribut disertai ombak besar di pesisir pantai selatan pernah terjadi tahun 2017, 2018 dan 2019 berakibat rusaknya objek wisata pantai dan ditutupnya pelabuhan pendaratan nelayan.

Kawasan rawan bencana kekeringan tersebar merata terutama di daerah pegunungan. Kawasan rawan bencana longsor banyak terdapat di wilayah Kebumen utara terutama di daerah pegunungan dengan kemiringan tinggi, yaitu Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor, Karanggayam, dan Sadang. Kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten Kebumen membentang sepanjang pesisir pantai selatan, dengan jarak 3 km dari garis pantai. Antisipasi yang dilakukan salah satunya dengan pembangunan alat deteksi dini sepanjang pantai dan pembentukan Desa Tangguh Bencana tsunami.

Kekeringan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti iklim (pemanasan global), kerusakan lahan, tutupan vegetasi ataupun faktor perilaku manusia. Faktor iklim menjadi variabel yang sangat berpengaruh pada sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Data menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2019 jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan semakin menurun. Hal ini akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi dan produktivitas pertanian. Adanya perubahan dan anomali iklim

yang tidak menentu tentu saja akan memengaruhi turunnya produksi pertanian.

Tabel 2.8
Curah Hujan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2018

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)			Jumlah Hari Hujan (Hari)		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Januari	264	534	465	16	27	26
2	Februari	515	421	407	23	22	22
3	Maret	300	403	513	20	20	18
4	April	382	374	433	23	22	15
5	Mei	454	89	105	23	8	4
6	Juni	407	432	18	18	10	3
7	Juli	141	36	5	13	8	1
8	Agustus	159	14	10	11	4	3
9	September	399	203	35	24	9	7
10	Oktober	663	451	23	25	24	8
11	November	774	329	667	27	27	20
12	Desember	640	331	441	22	20	22
		5098	3617	3122	245	201	149

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.9
**Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2018**

No	Jenis	Jumlah	Satuan
1	EWS Tsunami	10	titik
2	EWS Longsor	4	titik
3	EWS Banjir	3	titik
4	Detektor Gempa BMKG	1	Unit

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2019

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Indikator kunci Desa Tangguh Bencana yaitu penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Perkembangan pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

Tabel 2.10
**Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2019**

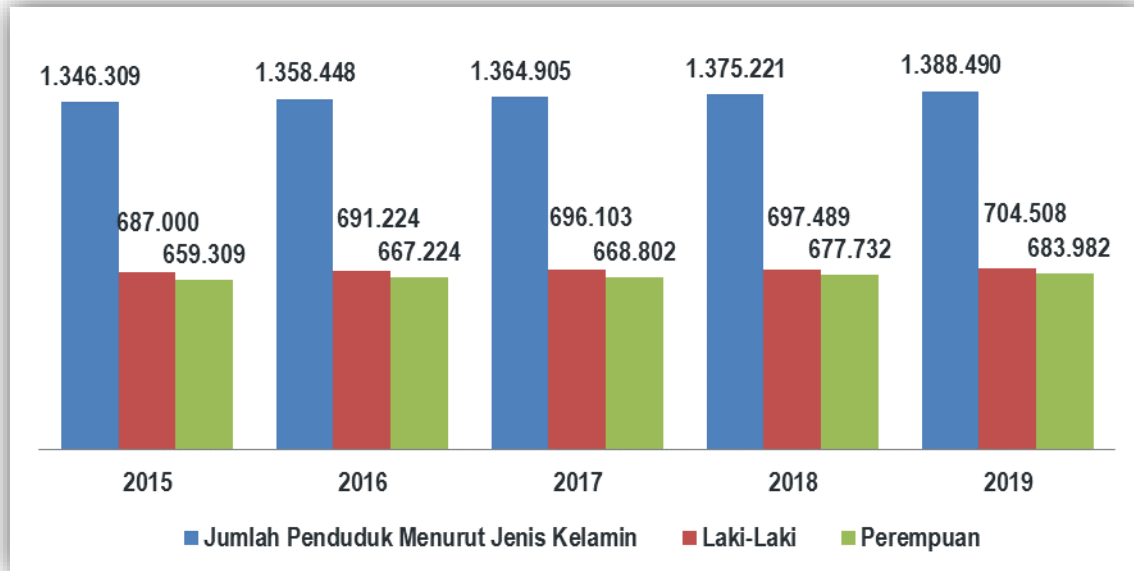
No	Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Tema Desa Tangguh
1	2013	5	Banjir, longsor
2	2014	6	Tsunami, longsor
3	2015	4	Banjir
4	2016	9	Banjir, tsunami, longsor
5	2017	4	Tsunami
6	2018	8	Tsunami, longsor, banjir
7	2019	24	Tsunami, longsor, banjir, air bersih
Jumlah		60	

Sumber: BPBD Kab. Kebumen, 2019

2.1.8 Kondisi Demografi

Keadaan kependudukan sangat memengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai

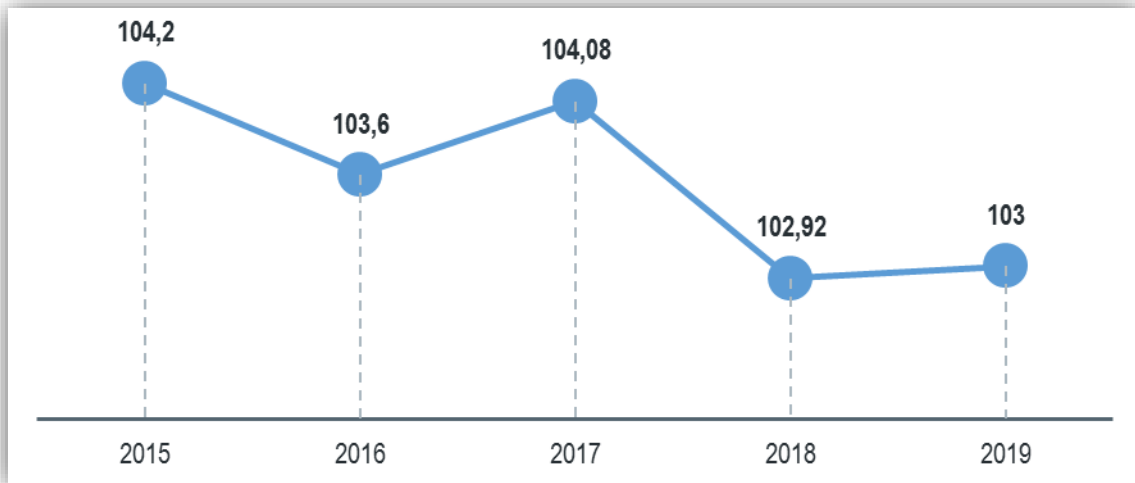
akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen setiap tahunnya terus meningkat (lihat Gambar 2.16).



Sumber: Disdukcapil Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.16
Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

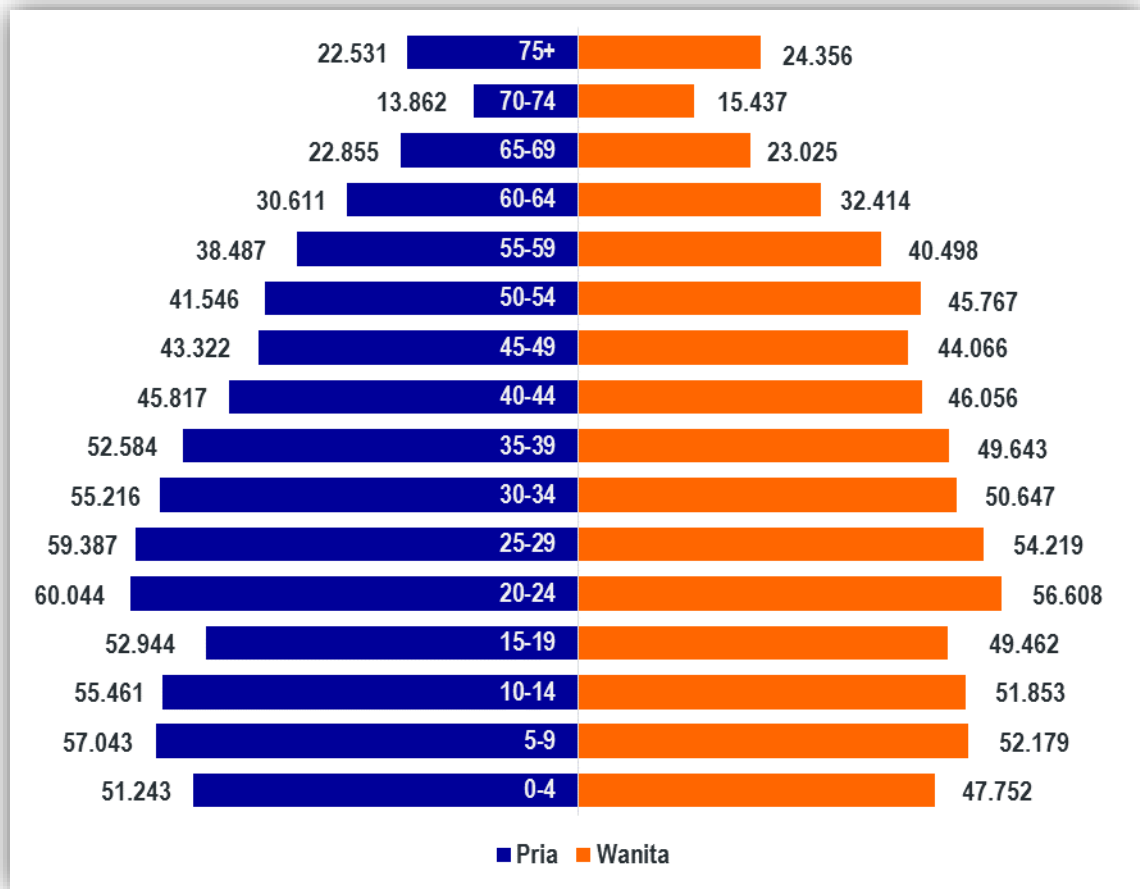
Secara keseluruhan, jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020). Pada tahun 2019, jumlah *sex ratio* sebesar 103 artinya komposisi penduduk perempuan 3 persen lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki (Gambar 2.16). Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.388.490 jiwa terdiri dari 704.508 penduduk laki-laki dan 683.982 perempuan. Data komposisi penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis kelamin dan usia tahun 2019 secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Sumber: Disdukcapil Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.17
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah sebesar 948.983 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tidak produktif (0-14 dan di atas 64 tahun) sebesar 439.507 jiwa. Dari data tersebut maka rasio ketergantungannya adalah sebesar 46,31. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja (produktif) harus menanggung 46 orang yang belum produktif (muda), atau dianggap tidak produktif lagi (tua). Struktur kependudukan Kabupaten Kebumen berdasarkan usia didominasi usia produktif, meskipun di sisi lain penduduk usia lanjut juga cukup besar.

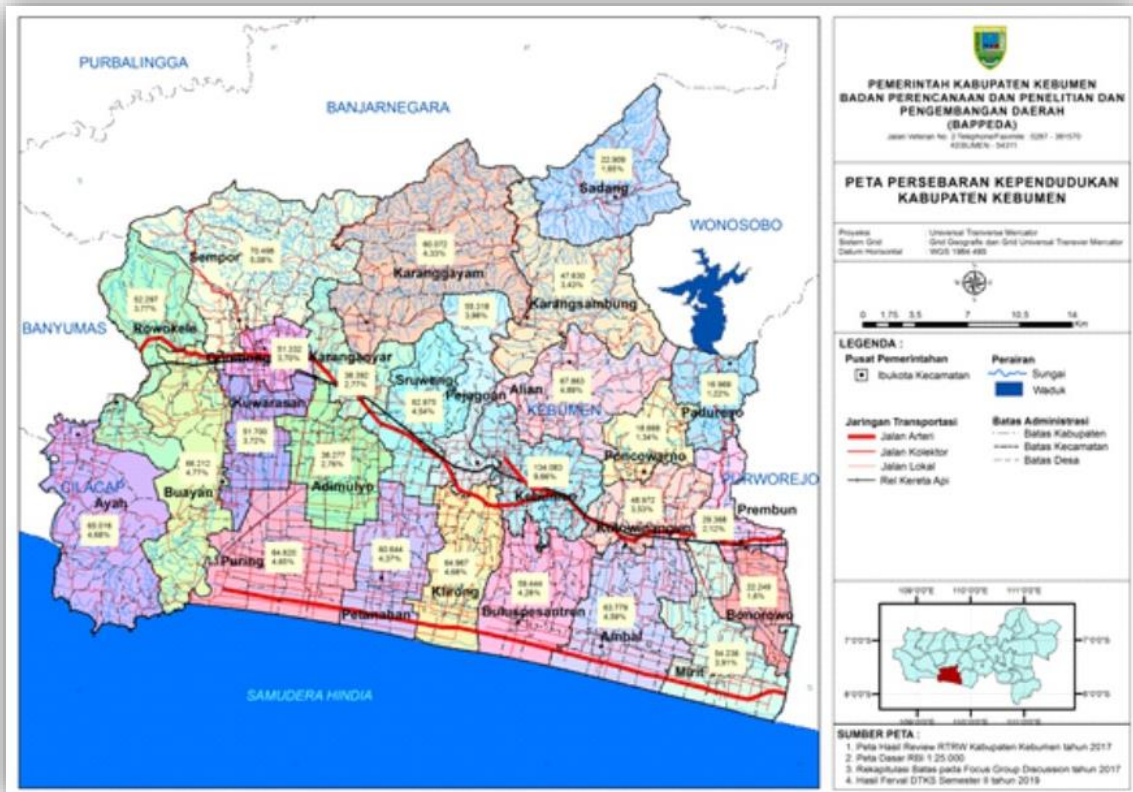


Sumber: Disdukcapil Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.18
Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen Berdasarkan Usia Tahun 2019

Secara internal, jumlah penduduk tersebar secara tidak merata antarkecamatan (Gambar 2.19). Kecamatan Kebumen memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 134.083 jiwa pada tahun 2019. Kebumen sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan wilayah perkotaan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk tinggal di Kecamatan Kebumen. Konsentrasi penduduk yang tinggi juga terlihat di wilayah penyangga yaitu Kecamatan

Alian, Pejagoan, dan Sruweng. Kemudian, pada daerah terluar Kabupaten Kebumen seperti Kecamatan Sempor, Ayah, Buayan, Petanahan, dan Ambal.

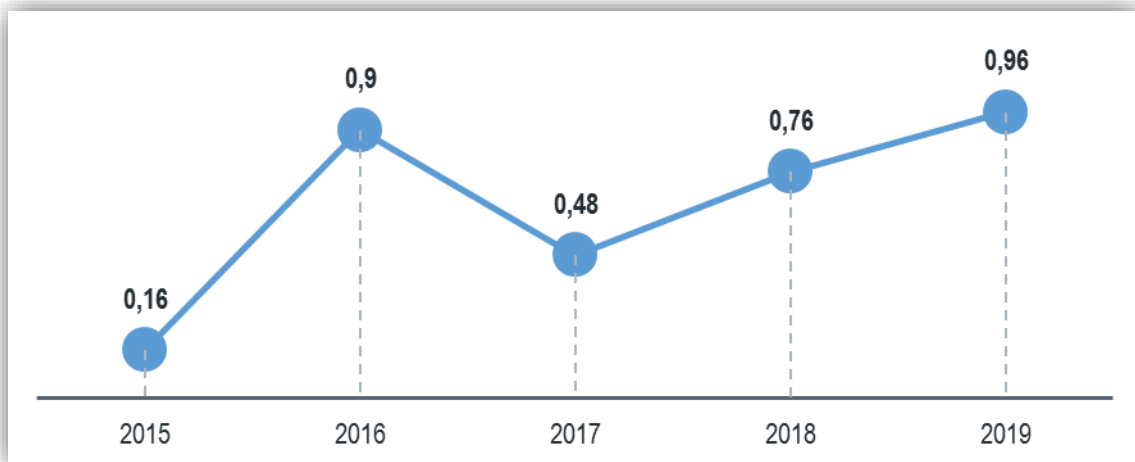


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Gambar 2.19
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Kebumen merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar). Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen cukup terkendali selama kurun waktu lima tahun pertumbuhan penduduk di bawah 1 persen (lihat Gambar 2.20). Jumlah rumah tangga sebanyak 412.294 rumah tangga, dan

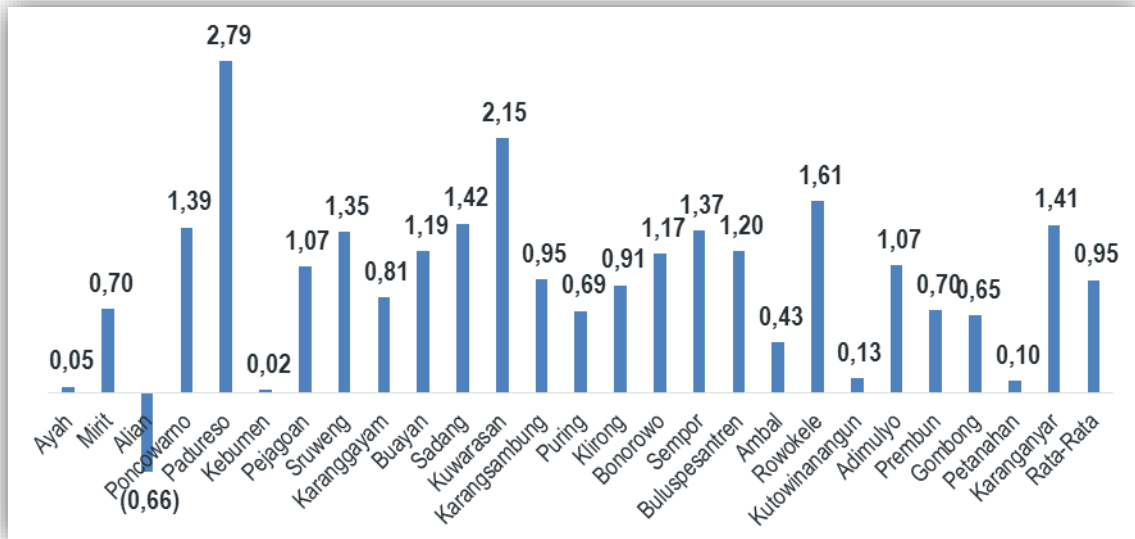
rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa dan kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.084 jiwa/km². Sedangkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2018 sebesar 0,76 persen dan menjadi 0,96 persen pada tahun 2019.



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020

Gambar 2.20
**Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan selama lima tahun terakhir sangat bervariasi. Terdapat tiga kecamatan yang laju pertumbuhannya tinggi, yaitu Kecamatan Padureso, Kuwarasan, dan Rowokele (lihat Gambar 2.21).



Sumber: Kabupaten Kebumen Dalam Angka, 2020

Gambar 2.21
**Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
Selama Periode 2015-2019**

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi kependudukan di suatu daerah. Arah kebijakan pembangunan manusia berorientasi pada penyiapan SDM unggul selaras dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Maju. SDM unggul yaitu SDM yang memiliki kompetensi, *soft skill*, dan berkarakter. Secara rinci potret kondisi kependudukan Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Indikator Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk	1.346.309	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.388.490
Laki-Laki	687.000	691.224	696.103	697.489	704.508
Perempuan	659.309	667.224	668.802	677.732	683.982
Pertumbuhan penduduk (%)	0,16%	0,90%	0,48%	0,76%	0,96%
Kepadatan wilayah/km ²	1.051	1.060	1.065	1.073	1.084
Rasio Jenis Kelamin	104,20	103,60	104,08	102,92	103,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang mencakup aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial, aspek seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah nilai Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tahun 2019, nilai PDRB Kabupaten Kebumen adalah Rp 27.944.041,19 juta (Rp 27 triliun), atau sekitar 2 persen dari PDRB Provinsi Jawa Tengah. Tabel 2.12 menyajikan PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2015 sampai 2019.



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 2.12
PDRB atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Sektor	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,702,913.95	5,533,804.64	5,595,423.24	5,891,457.93	5,954,901.58
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,103,421.76	1,135,529.24	1,223,063.59	1,299,758.75	1,362,202.83
3.	Industri Pengolahan	3,902,177.87	4,453,977.85	4,828,880.22	5,299,769.95	5,803,033.84
4.	Pengadaan Listrik, dan Gas	11,845.12	13,769.93	15,872.83	17,567.42	19,015.99
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,057.31	10,661.44	10,772.28	11,326.06	12,058.72
6.	Konstruksi	1,399,273.25	1,612,221.57	1,726,478.47	1,820,163.76	1,973,339.12
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	2,923,764.18	3,269,443.63	3,580,561.25	3,907,499.01	4,288,353.41
8.	Transportasi dan Pergudangan	784,071.51	889,227.92	972,646.80	1,058,888.39	1,161,122.50
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	400,999.96	455,263.63	500,588.88	547,529.68	606,538.07
10.	Informasi dan Komunikasi	330,427.51	376,301.51	454,160.94	533,257.14	623,994.52
11.	Jasa Keuangan, dan Asuransi	598,763.32	655,486.71	718,870.26	755,284.17	804,299.40
12.	Real Estate	257,776.81	282,312.60	300,676.45	313,946.81	340,990.76
13.	Jasa Perusahaan	62,588.42	72,871.22	84,209.95	93,706.67	106,050.99
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	707,105.21	782,467.62	826,667.23	856,928.86	904,304.56
15.	Jasa Pendidikan	1,908,789.21	2,115,856.39	2,360,950.69	2,625,309.06	2,907,297.36
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	224,512.62	247,638.35	273,746.74	305,072.16	340,268.68
17.	Jasa Lainnya	450,798.11	528,114.51	595,418.66	659,761.94	736,268.86
	PDRB	20,779,286.13	22,434,948.76	24,068,988.49	25,997,227.76	27,944,041.19

Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut mengenai struktur perekonomian Kabupaten Kebumen beserta perkembangannya.

1. Struktur Ekonomi Wilayah

Dari sisi kontribusi sektoral, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh sektor pertanian. Namun sebagaimana tren perekonomian secara umum, terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier. Dalam jangka menengah, nampak bahwa kontribusi sektor pertanian selalu mengalami penurunan setiap tahun dan sebaliknya terjadi peningkatan pada sektor industri, perdagangan, maupun jasa.

Tabel 2.13
Peranan Sektoral dalam PDRB Kabupaten Kebumen
Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2015-2019

No	Sektor	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27.45	24.67	23.25	22.66	21.31
2.	Pertambangan dan Penggalian	5.31	5.06	5.08	5.00	4.87
3.	Industri Pengolahan	18.78	19.85	20.06	20.39	20.77
4.	Pengadaan Listrik, dan Gas	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
6.	Konstruksi	6.73	7.19	7.17	7.00	7.06
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	14.07	14.57	14.88	15.03	15.35
8.	Transportasi dan Pergudangan	3.77	3.96	4.04	4.07	4.16
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.93	2.03	2.08	2.11	2.17
10.	Informasi dan Komunikasi	1.59	1.68	1.89	2.05	2.23
11.	Jasa Keuangan, dan Asuransi	2.88	2.92	2.99	2.91	2.88
12.	Real Estate	1.24	1.26	1.25	1.21	1.22



No	Sektor	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
13.	Jasa Perusahaan	0.30	0.32	0.35	0.36	0.38
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.40	3.49	3.43	3.30	3.24
15.	Jasa Pendidikan	9.19	9.43	9.81	10.10	10.40
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.08	1.10	1.14	1.17	1.22
17.	Jasa Lainnya	2.17	2.35	2.47	2.54	2.63
Jumlah		100	100	100	100	100

Secara kewilayahan dapat juga diamati perkembangan perekonomian antarkecamatan. Tabel 2.14 menyajikan PDRB kecamatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019.



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 2.14
PDRB Kecamatan atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kecamatan Adimulyo	303,074.68	342,383.85	359,201.25	379,512.09	404,833.45
2.	Kecamatan Alian	445,760.64	422,348.15	728,771.64	447,896.17	464,219.41
3.	Kecamatan Ambal	558,340.02	579,166.23	611,299.12	668,922.17	718,512.39
4.	Kecamatan Ayah	1,167,347.90	1,167,383.91	1,255,696.03	1,426,800.24	1,649,879.89
5.	Kecamatan Bonorowo	169,823.29	182,204.66	187,880.23	201,595.84	208,264.24
6.	Kecamatan Buayan	504,537.46	547,924.50	602,557.44	549,673.99	561,676.05
7.	Kecamatan Buluspesantrem	423,733.84	466,552.50	525,633.95	491,256.60	553,954.84
8.	Kecamatan Gombang	706,359.75	661,234.45	736,821.53	954,776.43	1,056,735.11
9.	Kecamatan Karanganyar	462,487.96	505,031.53	576,577.79	684,888.75	702,229.17
10.	Kecamatan Karanggayam	575,100.48	697,975.45	537,045.16	576,703.77	511,086.46
11.	Kecamatan Karangsambung	673,225.47	604,510.37	733,627.70	809,683.40	846,064.93
12.	Kecamatan Kebumen	2,026,043.36	2,248,066.21	2,231,176.62	2,492,006.13	2,644,011.08
13.	Kecamatan Klirong	713,686.82	786,410.36	896,360.83	807,217.14	786,927.21
14.	Kecamatan Kutowinangun	292,404.92	355,701.04	373,106.59	470,892.44	418,926.78
15.	Kecamatan Kuwarasan	395,100.15	424,842.55	449,638.03	489,188.35	535,346.20
16.	Kecamatan Mirit	503,372.80	529,612.54	558,134.78	583,258.31	613,240.52
17.	Kecamatan Padureso	186,419.31	194,382.85	242,188.61	249,230.21	307,489.76
18.	Kecamatan Pejagoan	618,819.49	713,571.59	636,677.85	693,743.99	776,549.22
19.	Kecamatan Petanahan	850,143.07	917,258.14	1,060,926.39	1,117,625.72	1,168,553.60
20.	Kecamatan Poncowarno	169,450.73	165,936.81	174,803.06	189,979.61	216,875.18
21.	Kecamatan Prembun	413,851.14	413,606.51	288,624.94	406,825.42	457,959.96
22.	Kecamatan Puring	524,926.09	587,957.08	639,667.58	588,629.37	603,368.28
23.	Kecamatan Rowokele	469,123.94	490,169.33	555,483.40	548,209.66	553,410.47
24.	Kecamatan Sadang	215,727.81	225,655.10	258,306.01	283,717.43	286,190.87
25.	Kecamatan Sempor	941,466.24	984,112.96	1,086,818.91	1,088,810.27	1,122,248.81
26.	Kecamatan Sruweng	852,764.47	901,555.35	616,694.10	591,421.64	605,279.63

Dari data di atas terlihat bahwa ada dua kecamatan yang memiliki nilai PDRB jauh di atas kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Ayah. Kecamatan Kebumen merupakan ibukota kabupaten sehingga tentu saja menjadi pusat aktivitas perekonomian. Pola aktivitas di kecamatan ini cenderung mirip dengan pola aktivitas perkotaan dimana sektor yang dominan adalah sektor-sektor non-primer yaitu pendidikan, jasa keuangan dan konstruksi. Selanjutnya, Kecamatan Ayah merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi di wilayah barat Kabupaten Kebumen dengan aktivitas yang dominan adalah industri pengolahan, perdagangan, dan jasa lainnya. Beberapa kecamatan lain yang juga merupakan pusat aktivitas seperti Petanahan, Sempor, dan Gombang juga menduduki peringkat atas dalam hal capaian nilai PDRB. Di lain pihak, beberapa wilayah dengan karakteristik pedesaan yang didominasi sektor primer cenderung memiliki capaian PDRB yang rendah yaitu Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Sadang.

Untuk melihat struktur ekonomi, analisis keterkaitan antara sektor produksi hilir terhadap sektor produksi hulunya dan sebaliknya penting untuk dilakukan. Analisis ini dapat dilakukan berdasarkan tabel *Input-Output*. Analisis keterkaitan terbagi menjadi dua yaitu, keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan, baik langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan ke belakang merupakan keterkaitan sektor produksi hilir terhadap sektor produksi hulunya, sedangkan keterkaitan ke depan menunjukkan keterkaitan sektor produksi hulu terhadap sektor produksi hilirnya. Nilai keterkaitan ke belakang menjelaskan

seberapa besar nilai input yang dibutuhkan suatu sektor untuk setiap unit kenaikan permintaan total, baik dari sektor lain maupun sektor itu sendiri. Sedangkan nilai keterkaitan ke depan menjelaskan jika terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar satu satuan, maka output suatu sektor yang dialokasikan ke sektor tersebut dan juga sektor-sektor lainnya akan meningkatkan sebesar nilai keterkaitannya.

Tabel 2.15 yang merupakan tabel keterkaitan ke belakang menunjukkan bahwa sektor kode 17 yaitu pertambangan dan penggalan memiliki nilai keterkaitan langsung, nilai keterkaitan tidak langsung, dan keterkaitan total ke belakang terbesar dengan nilai 0,96, 2,18, dan 3,14. Nilai ini menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada permintaan akhir sebesar satu juta rupiah, maka sektor pertambangan dan penggalan akan meningkatkan permintaan input secara langsung terhadap sektor baik hulunya maupun sektor itu sendiri sebesar 0,96 juta rupiah. Secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan input sebesar 2,18 juta rupiah dan secara total akan meningkatkan permintaan input sebesar 3,14 juta rupiah.

Tabel 2.15
**Nilai Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung dari
Keterkaitan Ke Belakang (*Backward Linkages*)**

Kode	Sektor	Langsung	Tidak Langsung	Nilai
1	Padi	0.81	1.56	2.37
2	Jagung	0.87	1.60	2.47
3	Ubi Kayu dan Ubi Lainnya	0.83	1.56	2.38
4	Bawang	0.78	1.71	2.49
5	Cabe	0.68	1.48	2.16



Kode	Sektor	Langsung	Tidak Langsung	Nilai
6	Sayur Lainnya	0.81	1.56	2.37
7	Pisang	0.89	1.61	2.50
8	Buah-Buahan Lainnya	0.46	1.31	1.77
9	Kopi Robusta	0.78	1.55	2.33
10	Kopi Arabica	0.85	1.63	2.48
11	Tembakau	0.78	1.55	2.33
12	Ikan dan Benihnya	0.15	1.07	1.22
13	Sapi dan Hasil-Hasilnya	0.68	1.51	2.18
14	Domba, Kambing dan Hasil-Hasilnya	0.70	1.48	2.18
15	Unggas, Telur dan Hasil Ternak Lainnya	0.52	1.40	1.92
16	Hasil Perkebunan dan Pertanian Lainnya	0.50	1.55	2.05
17	Pertambangan dan Penggalian	0.96	2.18	3.14
18	Industri Pengolahan Padi	0.93	2.14	3.06
19	Roti dan Kue Kering Sejenisnya	0.90	2.06	2.95
20	Kopi Bubuk dan Penggilingan Kopi	0.95	2.15	3.10
21	Tahu, Tempe dan Olahan Kedelai Lainnya	0.84	2.03	2.88
22	Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	0.75	1.91	2.67
23	Industri Pengolahan Kayu	0.68	1.81	2.49
24	Aneka Kerajinan	0.94	2.14	3.08
25	Aneka Industri	0.29	1.35	1.64
26	Industri Makanan Olahan dan Minuman Lainnya	0.76	1.84	2.59
27	Batu bata, Genting, Gerabah dan Tanah Liat Lainnya	0.88	1.99	2.87
28	Listrik dan Gas	0.95	2.11	3.06
29	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0.92	2.05	2.98
30	Konstruksi	0.85	2.03	2.88
31	PB, PE, Reparasi Mobil dan Motor	0.91	2.08	2.99
32	Transportasi dan Pergudangan	0.94	2.08	3.02
33	Penyediaan Jasa Akomodasi	0.51	1.62	2.13
34	Restoran/Jasa Makan Minum	0.49	1.58	2.07
35	Informasi dan Komunikasi	0.90	1.97	2.88
36	Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya	0.31	1.35	1.66
37	Real Estate	0.36	1.44	1.80

Kode	Sektor	Langsung	Tidak Langsung	Nilai
38	Jasa Perusahaan	0.34	1.46	1.80
39	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jamsos Wajib	0.25	1.24	1.48
40	Jasa Pendidikan Swasta	0.54	1.63	2.17
41	Jasa Kesehatan Swasta	0.95	2.15	3.09
42	Jasa Lainnya	0.88	2.07	2.95
43	Kegiatan yang Tidak Jelas Batasannya	0.87	2.27	3.14

Sumber: Tabel Input-Output Kabupaten Kebumen 2018, diolah

Sedangkan berdasarkan Tabel 2.16 yang merupakan tabel keterkaitan ke depan, menunjukkan bahwa sektor kode 33 yakni penyediaan jasa akomodasi memiliki nilai keterkaitan langsung, nilai keterkaitan tidak langsung, dan keterkaitan total ke depan terbesar dengan nilai 10,54, 15,26, dan 25,80. Nilai ini menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada permintaan akhir sebesar satu juta rupiah, maka sektor penyediaan jasa akomodasi akan meningkatkan output secara langsung terhadap sektor baik hulunya maupun sektor itu sendiri sebesar 10,54 juta rupiah. Secara tidak langsung akan meningkatkan output sebesar 15,26 juta rupiah dan secara total akan meningkatkan output sebesar 25,8 juta rupiah.

Tabel 2.16
Nilai Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung dari Keterkaitan Ke Depan (*Forward Linkages*)

Kode	Sektor	Langsung	Tidak Langsung	Nilai
1	Padi	0.05	1.02	1.07
2	Jagung	0.04	1.02	1.06
3	Ubi Kayu dan Umbi Lainnya	0.01	1.01	1.02
4	Bawang	0.30	1.19	1.49
5	Cabe	0.07	1.03	1.10



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Kode	Sektor	Langsung	Tidak Langsung	Nilai
6	Sayur Lainnya	0.04	1.01	1.05
7	Pisang	0.02	1.01	1.03
8	Buah-Buahan Lainnya	0.11	1.03	1.14
9	Kopi Robusta	0.05	1.02	1.07
10	Kopi Arabica	0.10	1.04	1.14
11	Tembakau	0.06	1.03	1.09
12	Ikan dan Benihnya	0.17	0.94	1.11
13	Sapi dan Hasil-Hasilnya	0.14	1.05	1.18
14	Domba, Kambing dan Hasil-Hasilnya	0.05	1.01	1.06
15	Unggas, Telur dan Hasil Ternak Lainnya	0.28	1.10	1.37
16	Hasil Perkebunan dan Pertanian Lainnya	0.10	0.97	1.06
17	Pertambangan dan Penggalian	0.24	2.26	2.49
18	Industri Pengolahan Padi	0.07	1.01	1.08
19	Roti dan Kue Kering Sejenisnya	0.02	1.09	1.11
20	Kopi Bubuk dan Penggilingan Kopi	0.05	1.00	1.05
21	Tahu, Tempe dan Olahan Kedelai Lainnya	0.06	1.01	1.08
22	Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	0.04	1.03	1.07
23	Industri Pengolahan Kayu	0.35	1.19	1.54
24	Aneka Kerajinan	0.05	1.17	1.22
25	Aneka Industri	1.91	2.03	3.94
26	Industri Makanan Olahan dan Minuman Lainnya	0.03	1.07	1.10
27	Batu bata, Genting, Gerabah dan Tanah Liat Lainnya	0.16	1.14	1.30
28	Listrik dan Gas	0.25	1.39	1.64
29	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0.46	1.96	2.42
30	Konstruksi	1.90	4.80	6.69
31	PB, PE, Reparasi Mobil dan Motor	0.08	1.35	1.43
32	Transportasi dan Pergudangan	0.14	1.19	1.33
33	Penyediaan Jasa Akomodasi	10.54	15.26	25.80
34	Restoran/Jasa Makan Minum	1.07	3.81	4.88
35	Informasi dan Komunikasi	0.16	1.46	1.63
36	Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya	11.13	-6.57	4.56
37	Real Estate	0.00	1.00	1.00

Kode	Sektor	Langsung	Tidak Langsung	Nilai
38	Jasa Perusahaan	0.32	1.99	2.31
39	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	0.06	1.00	1.07
40	Jasa Pendidikan Swasta	0.02	1.00	1.02
41	Jasa Kesehatan Swasta	0.02	1.00	1.02
42	Jasa Lainnya	0.14	1.59	1.73
43	Kegiatan yang Tidak Jelas Batasannya	0.05	1.00	1.06

Sumber: Tabel Input-Output Kabupaten Kebumen 2018, diolah

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data, terlihat bahwa dalam jangka menengah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan tahun awal (2015). Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada 2015 dengan adanya musim kemarau basah sehingga pertumbuhan sektor pertanian sebagai sektor dominan mengalami lonjakan drastis. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kembali normal dan senantiasa mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen terlihat masih selaras dengan tren pertumbuhan di level provinsi, meskipun dengan persentase yang berbeda (lihat Tabel 2.17).

Tabel 2.17

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Pertumbuhan Ekonomi (Kebumen)	6,28	5,01	5,13	5,52	5,58
2	Pertumbuhan Ekonomi (Jawa Tengah)	5,47	5,25	5,26	5,32	5,21

Sumber: BPS, 2020, data diolah

Secara sektoral selama 5 tahun terlihat perbedaan tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan. Secara umum sektor jasa, baik jasa pendidikan, kesehatan, keuangan maupun perdagangan serta industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen. Berkembangnya sektor pendidikan ditandai dengan munculnya beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Kebumen. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar, namun pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan. Jika penurunan pertumbuhan ini tidak diikuti oleh berkurangnya penduduk yang terlibat di sektor pertanian, maka perekonomian Kabupaten Kebumen sesungguhnya sedang berhadapan dengan masalah turunnya produktivitas. Sektor pertambangan yang mengalami pertumbuhan rendah berkaitan dengan semakin menyempitnya sumber hasil tambang di Kabupaten Kebumen. Kinerja pertumbuhan sektoral secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.18.

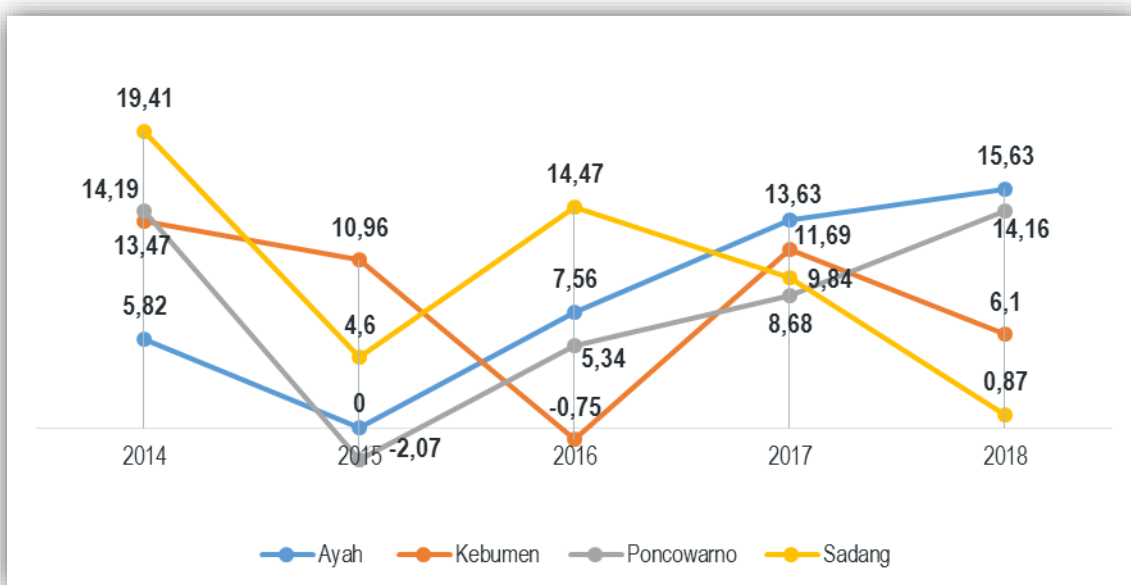
Tabel 2.18
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.75	-5.84	0.51	2.77	-0.54
2	Pertambangan dan Penggalian	2.12	-1.22	4.01	3.18	3.24
3	Industri Pengolahan	4.91	9.55	5.66	5.79	7.18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.18	7.97	6.23	6.76	7.20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.33	2.40	0.23	4.67	4.43
6	Konstruksi	3.47	13.43	4.40	4.20	5.08
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.35	8.67	7.10	6.09	7.29
8	Transportasi dan Pergudangan	10.95	12.47	7.31	5.70	7.78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.25	10.42	8.73	8.20	9.12
10	Informasi dan Komunikasi	9.44	13.62	15.72	17.09	15.48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.93	6.76	5.03	2.18	4.62
12	Real Estate	6.84	7.37	3.87	3.21	6.82
13	Jasa Perusahaan	8.62	11.08	11.06	8.19	10.11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.70	5.03	2.39	2.30	3.95
15	Jasa Pendidikan	8.24	7.02	7.99	9.72	8.24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.73	9.73	8.86	9.49	9.36
17	Jasa Lainnya	3.81	11.98	11.02	9.33	10.78
	Total	6.28	5.01	5.15	5.52	5.58

Sumber: BPS 2020, data diolah

Secara kewilayahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sangat acak dan fluktuatif. Semua kecamatan memiliki pertumbuhan yang fluktuatif pada tahun yang berbeda-beda dengan kecenderungan yang juga sangat beragam. Berikut disajikan contoh dua kecamatan dengan nilai PDRB paling tinggi dan paling rendah di Kabupaten Kebumen (Gambar 2.22).

Dari grafik ini dapat dilihat bahwa fluktuasi pertumbuhan antar kecamatan tersebut tidak terpolara, demikian juga dengan arahnya. Baik kecamatan kaya maupun kecamatan miskin tren pertumbuhannya tidak terprediksi. Data lengkap pertumbuhan setiap kecamatan disajikan dalam Tabel 2.19



Sumber: Bappeda dan data diolah, 2020

Gambar 2.22

Pertumbuhan Ekonomi di Kecamatan Ayah, Kebumen, Poncowarno, dan Sadang, Tahun 2014-2018

Tabel 2.19

Pertumbuhan PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Adimulyo	-0.76	12.97	4.91	5.65	6.67
2.	Alian	26.36	-5.25	72.55	-38.54	3.64
3.	Ambal	5.87	3.73	5.55	9.43	7.41
4.	Ayah	5.82	0.00	7.56	13.63	15.63
5.	Bonorowo	6.07	7.29	3.11	7.30	3.31
6.	Buayan	21.12	8.60	9.97	-8.78	2.18
7.	Buluspesantren	2.55	10.11	12.66	-6.54	12.76
8.	Gombang	5.78	-6.39	11.43	29.58	10.68
9.	Karanganyar	-3.92	9.20	14.17	18.79	2.53



No	Kecamatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2107	2018
10.	Karanggayam	13.98	21.37	-23.06	7.38	-11.38
11.	Karangsambung	14.03	-10.21	21.36	10.37	4.49
12.	Kebumen	13.47	10.96	-0.75	11.69	6.10
13.	Klirong	-8.78	10.19	13.98	-9.95	-2.51
14.	Kutowinangun	-7.73	21.65	4.89	26.21	-11.04
15.	Kuwarasan	-2.48	7.53	5.84	8.80	9.44
16.	Mirit	0.32	5.21	5.39	4.50	5.14
17.	Padureso	7.61	4.27	24.59	2.91	23.38
18.	Pejagoan	-5.77	15.31	-10.78	8.96	11.94
19.	Petanahan	-3.94	7.89	15.66	5.34	4.56
20.	Poncowarno	14.19	-2.07	5.34	8.68	14.16
21.	Prembun	9.76	-0.06	-30.22	40.95	12.57
22.	Puring	13.28	12.01	8.79	-7.98	2.50
23.	Rowokele	8.58	4.49	13.32	-1.31	0.95
24.	Sadang	19.41	4.60	14.47	9.84	0.87
25.	Sempor	5.78	4.53	10.44	0.18	3.07
26.	Sruweng	4.95	5.72	-31.60	-4.10	2.34

Sumber: BPS 2020, data diolah

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya menggambarkan aktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen dapat dikatakan masih memiliki kualitas yang rendah (lihat pada bagian tenaga kerja).

3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah. Pendapatan penduduk sering dijadikan tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi angkanya, berarti semakin makmur penduduknya. Untuk Kabupaten Kebumen pendapatan perkapita selama lima tahun terakhir

senantiasa mengalami peningkatan dari Rp 17.537.008,86 pada tahun 2015 menjadi Rp 23.085.017,44 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kemakmuran penduduk Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun semakin meningkat, walaupun secara nominal masih sangat jauh di bawah level provinsi (Tabel 2.20).

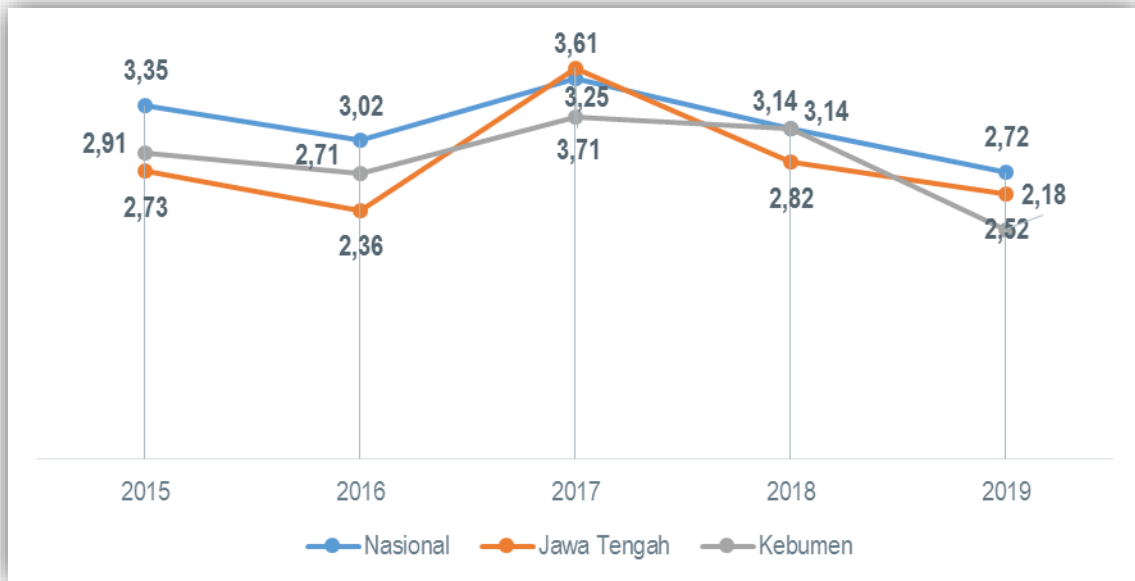
Tabel 2.20
Pendapatan Perkapita Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Pendapatan perkapita (Kebumen)	17.537.008	18.875.056	20.195.160	21.755.941	23.085.017
2	Pendapatan perkapita (Jawa Tengah)	29.933.750	31.961.950	34.222.810	36.783.710	38.928.240

Sumber: BPS 2020, data diolah

4. Inflasi

Inflasi yang dapat mencerminkan efisiensi perekonomian Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang cukup baik (lebih rendah) dibandingkan dengan angka inflasi nasional dan beberapa kali juga lebih rendah dari rata-rata inflasi Jawa Tengah. Artinya di wilayah ini perekonomian berjalan relatif lebih efisien terutama dibandingkan dengan wilayah lain di level nasional. Jaringan transportasi yang relatif tersedia membuat arus barang dan jasa berjalan relatif mudah. Dilihat dari fluktuasinya, inflasi Kabupaten Kebumen terlihat sejalan dengan provinsi dan nasional.



Sumber: BPS 2020, data diolah

Gambar 2.23
Perbandingan Angka Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2019

Meskipun tingkat inflasi di level kabupaten sudah relatif bagus, namun masih terjadi fluktuasi harga beberapa komoditas pokok, terutama di wilayah dengan jalur distribusi barang yang kurang baik seperti di wilayah pegunungan. Apalagi jika dilihat lebih dalam, inflasi Kabupaten Kebumen banyak disumbangkan oleh kelompok pengeluaran makanan maupun bahan makanan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Tabel 2.21
Inflasi berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2018 (Persen)

No.	Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bahan Makanan	10,17	5,83	2,61	0,42	3,69
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	6,42	4,42	3,82	4,67	4,39
3	Perumahan, Air, Gas, Listrik & Bahan	8,36	1,93	1,36	3,52	1,18

No.	Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
	Bakar					
4	Sandang	4,41	4,3	4,77	3,35	4,02
5	Kesehatan	4,59	1,9	6,66	2,72	2,21
6	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,96	2,7	5,7	3,79	1,35
7	Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	10,57	-2,4	-2,08	5,89	3,22
	Umum	7,36	2,91	2,71	3,25	3,01

Sumber: BPS, 2020

5. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Angka yang sering menjadi batasan dari ketimpangan yang dianggap rendah adalah di bawah 0,4. Dari data di Tabel 2.22, terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Kebumen pada posisi yang bagus, bahkan lebih bagus dari capaian rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Kebumen sudah bagus, meskipun pada level pendapatan yang masih rendah.

Tabel 2.22
Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Gini Kabupaten	0,28	0,24	0,23	0,22	0,22
2	Indeks Gini Provinsi	0,382	0,357	0,365	0,357	0,361

Sumber: BPS, 2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

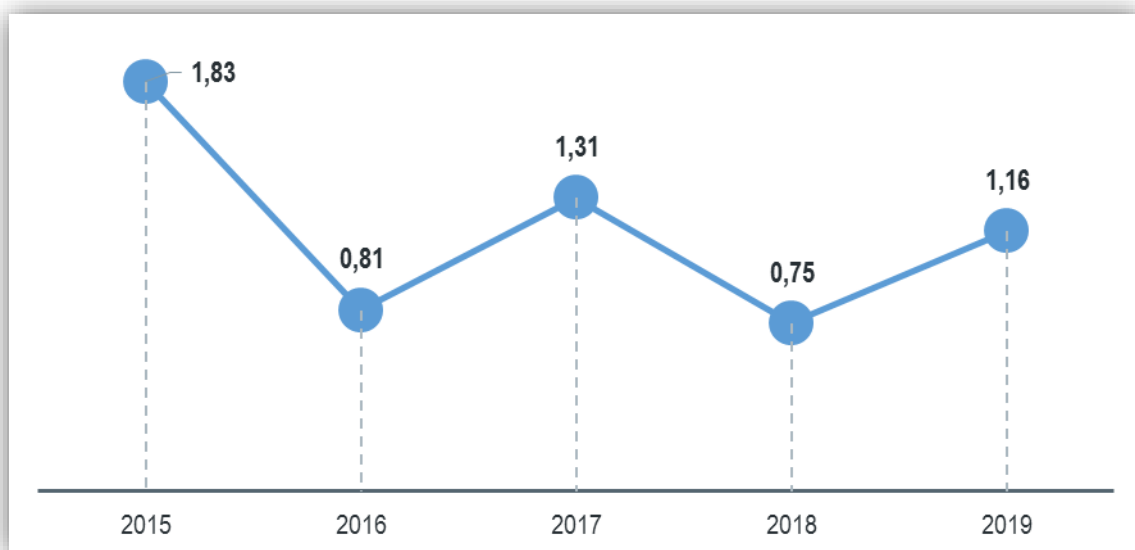
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada ketersediaan dan penggalan potensi sumberdaya alam, tetapi juga sumberdaya manusia sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan daerah. Kualitas sumberdaya manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun atas tiga komposit utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. Pembangunan manusia dinilai berhasil jika penduduknya memiliki umur yang panjang, sehat, memiliki pengetahuan, dan mampu mencukupi standar hidup yang layak.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen 2019, pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen terus mengalami perbaikan. IPM Kabupaten Kebumen naik 2,73 poin dalam jangka waktu 5 tahun, terlihat kenaikan dari tahun 2015 hingga 2019 sebagaimana pada Gambar 2.24. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi semakin membaik. Namun, berdasarkan skala internasional (UNDP), IPM Kabupaten Kebumen berada pada level menengah bawah.

Keberhasilan pembangunan manusia tidak saja diukur dari tingginya capaian angka IPM, tetapi juga kecepatan dalam peningkatan IPM. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi *shortfall* per tahun. semakin rendah kecepatan peningkatan

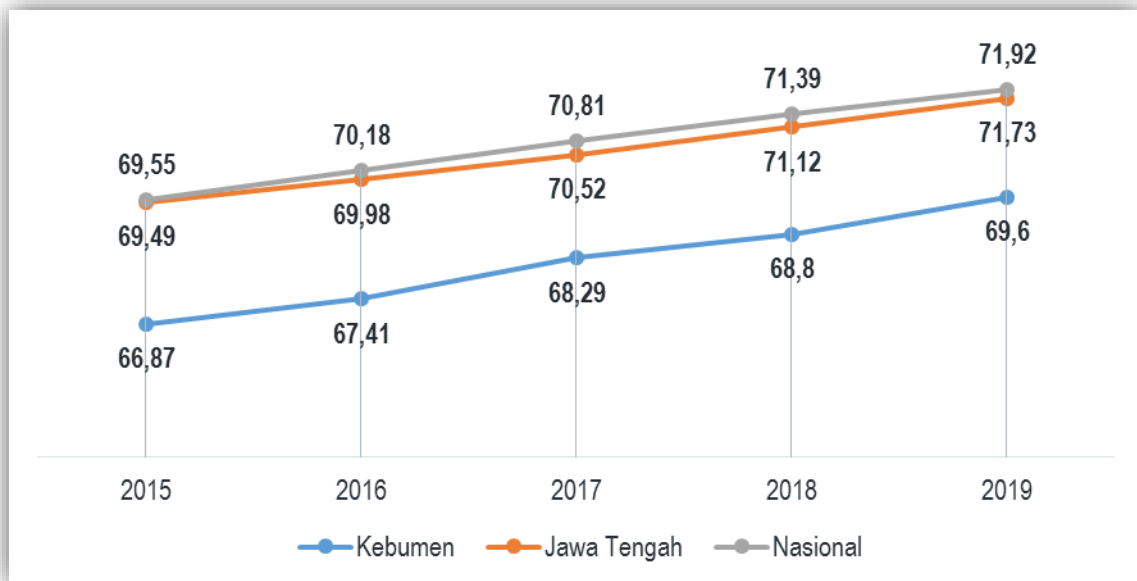
IPM, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal yaitu 100. Kecepatan Kabupaten Kebumen untuk mencapai IPM ideal per tahun berfluktuasi. Kecepatan Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 berkisar pada angka 0,75 sampai 1,83 persen, dengan pertumbuhan tercepat pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,83 persen (lihat Gambar 2.24).



Sumber: BPS, 2020, data diolah

Gambar 2.24
Pertumbuhan IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

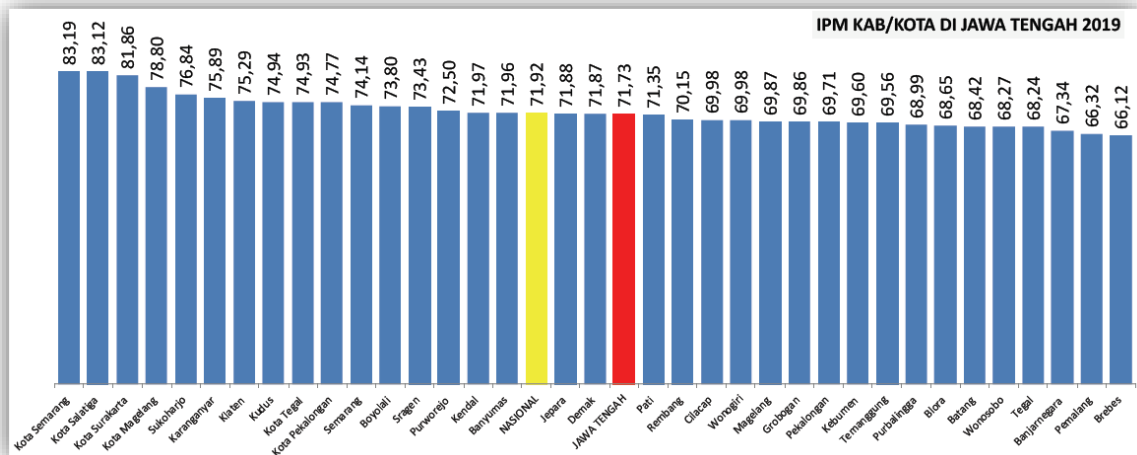
Dalam kurun waktu 2015-2019, IPM Kabupaten Kebumen masih selalu di bawah IPM Jawa Tengah maupun IPM Nasional. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, terlihat tren positif pada angka IPM Kebumen, yaitu dengan semakin menyempit/berkurang jarak antara IPM Kabupaten Kebumen dengan IPM Jawa Tengah maupun Indonesia (lihat Gambar 2.25).



Sumber: BPS, 2020 (data diolah)

Gambar 2.25
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Kabupaten Kebumen merupakan kategori menengah bawah dan merupakan salah satu dari 10 kabupaten terbawah pada tingkat Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat pada Gambar 2.26. Meskipun jika dilihat dari data selama lima tahun tren IPM Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan, namun akselerasinya belum optimal karena komponen pembentuk IPM pada pengeluaran perkapita yang masih cukup tertinggal termasuk jika dibandingkan dengan nasional dan provinsi. Kondisi ini sudah seharusnya menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah dalam fokus pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Kebumen guna menciptakan SDM unggul.



Sumber: BPS, 2020 (data diolah)

Gambar 2.26
**Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019**

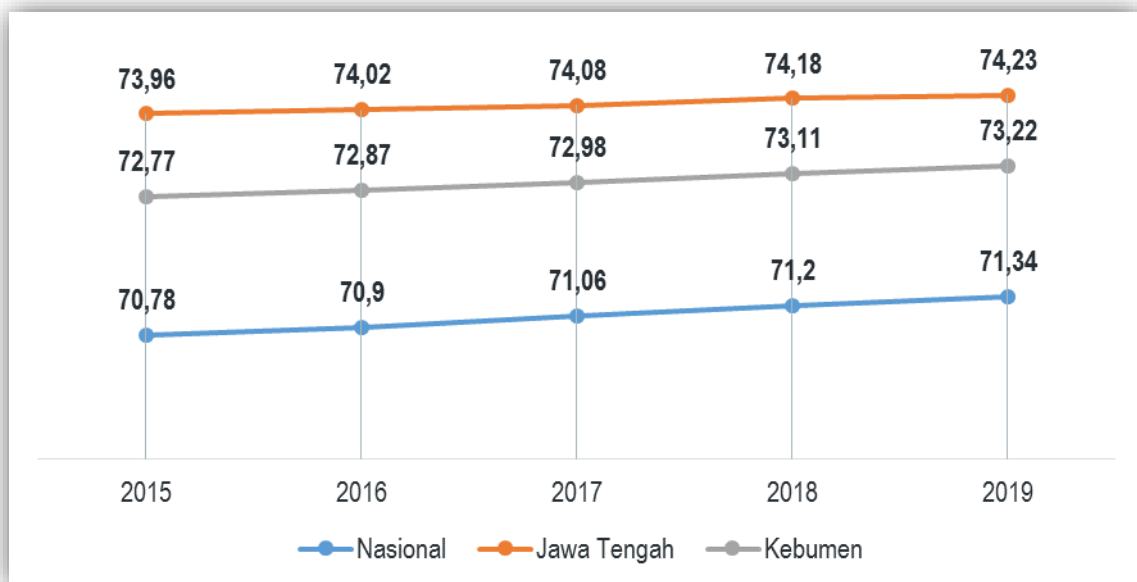
Masyarakat diharapkan mampu memenuhi kondisi peluang hidup yang panjang dan sehat, memiliki pengetahuan yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang baik, dan memiliki ketrampilan sehingga peluang bekerjanya tinggi untuk mendapatkan penghasilan untuk memiliki daya beli dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Secara rinci, komponen IPM akan dijelaskan sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Umur Harapan

Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 adalah 73,22 tahun, rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,93 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan jika kualitas hidup masyarakat dari sisi derajat kesehatan semakin baik, meskipun jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, UHH Kabupaten Kebumen masih lebih rendah, dimana UHH Jawa Tengah adalah sebesar 74,23. Sedangkan jika disandingkan dengan nasional, UHH Kabupaten Kebumen lebih tinggi, dimana UHH Nasional hanya sebesar 71,34 tahun. Perbandingan lengkap UHH Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama kurun 2015-2019 tersaji dalam Gambar 2.27.



Sumber: BPS, 2020 (data diolah)

Gambar 2.27
UHH Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2019

Di sisi yang lain, semakin besar Umur Harapan Hidup suatu daerah berarti memiliki peluang jumlah penduduk lanjut usia semakin tinggi, hal ini selaras dengan struktur penduduk Kebumen yang memasuki *ageing population* yang ditandai dengan proporsi penduduk usia tua di atas 7 persen dari total penduduk Kabupaten Kebumen. Pemerintah harus menyikapi kondisi ini dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemanfaatan penduduk lanjut usia yang potensial agar tetap produktif, karena kesehatan penduduk akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Angka Harapan Hidup didukung dengan ketersediaan tenaga medis dan sarana kesehatan yang ada pada layanan kesehatan dasar maupun rujukan, dan aksesibilitas pada layanan kesehatan. Selain itu upaya preventif promotif menjadi penting mengingat meningkatnya kasus penyakit degeneratif yang disebabkan oleh pola hidup masyarakat seperti rendahnya kesadaran berolahraga, kebiasaan merokok, dan pola hidup tidak sehat yang dapat menyebabkan meningkatnya penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, stroke, jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya. Pentingnya promosi Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), serta penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam upaya meningkatkan Umur Harapan Hidup untuk mendukung penyiapan SDM yang berkualitas.

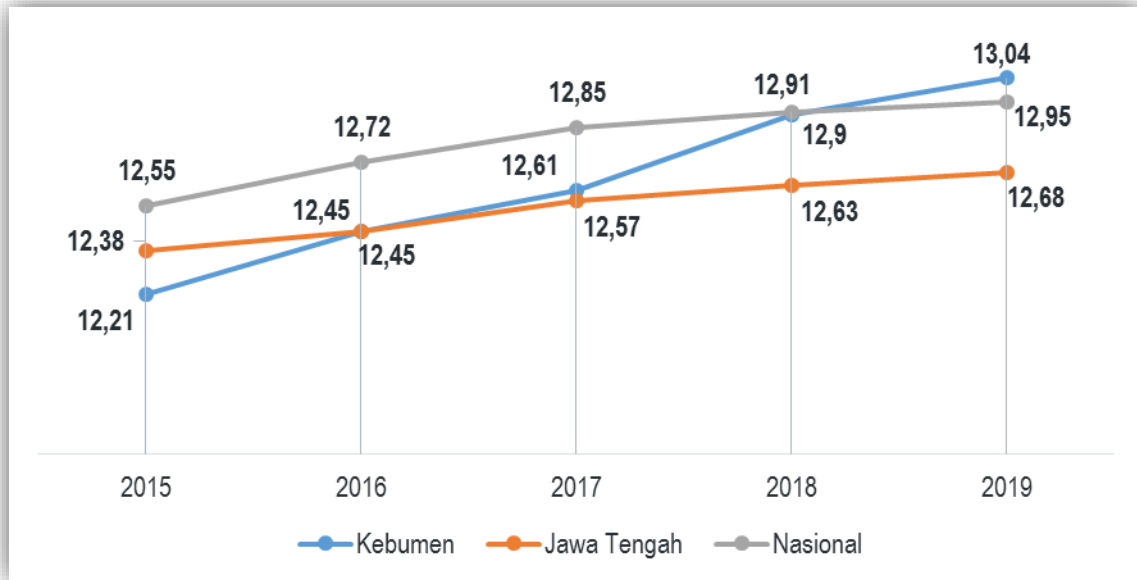
Sementara, dimensi pengetahuan terdiri dari dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Cakupan dalam menghitung Harapan Lama Sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas,

sementara cakupan penduduk untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan indikator *output* pembangunan jangka panjang, sedangkan Harapan Lama Sekolah menggambarkan keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumberdaya manusia berkualitas di suatu wilayah. Kedua indikator ini dikomposisikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM. Dari dua komponen pembentuk IPM dari sektor pendidikan menunjukkan tren positif peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kebumen.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 adalah sebesar 13,04 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari HLS di Jawa Tengah maupun nasional. Kinerja peningkatan HLS di Kabupaten Kebumen mengindikasikan kondisi pembangunan sistem pendidikan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak di Kabupaten Kebumen selama 13,04 tahun. Kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup baik bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana HLS Kebumen sempat lebih rendah dibanding Nasional bahkan Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan Harapan Lama Sekolah menjadi indikasi positif dalam sektor pendidikan, sebab semakin lama seseorang mengenyam sekolah,

artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang dilaluinya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

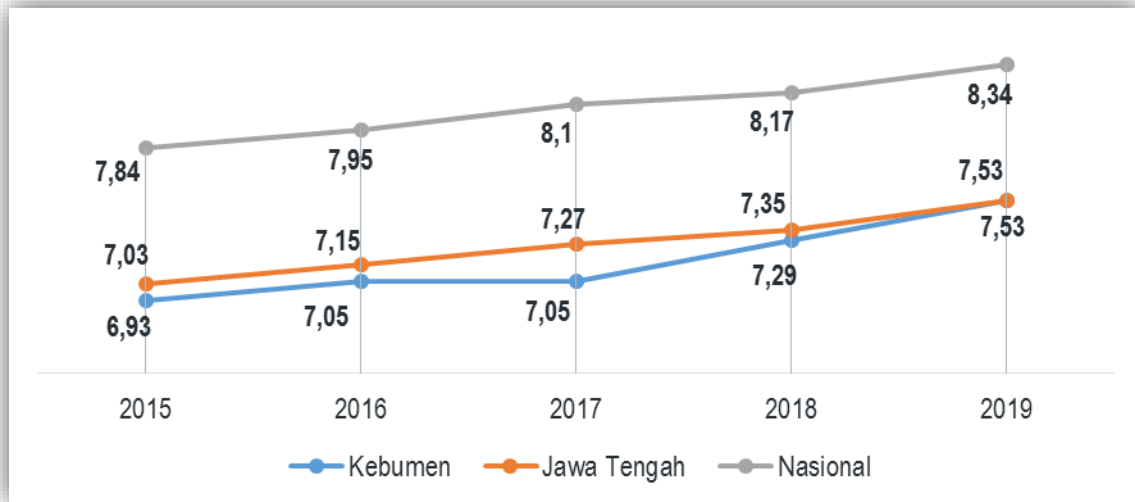


Sumber: BPS, 2020 (data diolah)

Gambar 2.28
**HLS Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2015-2019**

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

RLS Kabupaten Kebumen tahun 2019 adalah sebesar 7,53 tahun, dimana sama dengan RLS Jawa Tengah yang sebesar 7,53 tahun. Namun jika dibandingkan dengan RLS nasional, angka tersebut masih cukup rendah karena RLS nasional telah mencapai angka 8,34 tahun. Artinya penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,53 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP).

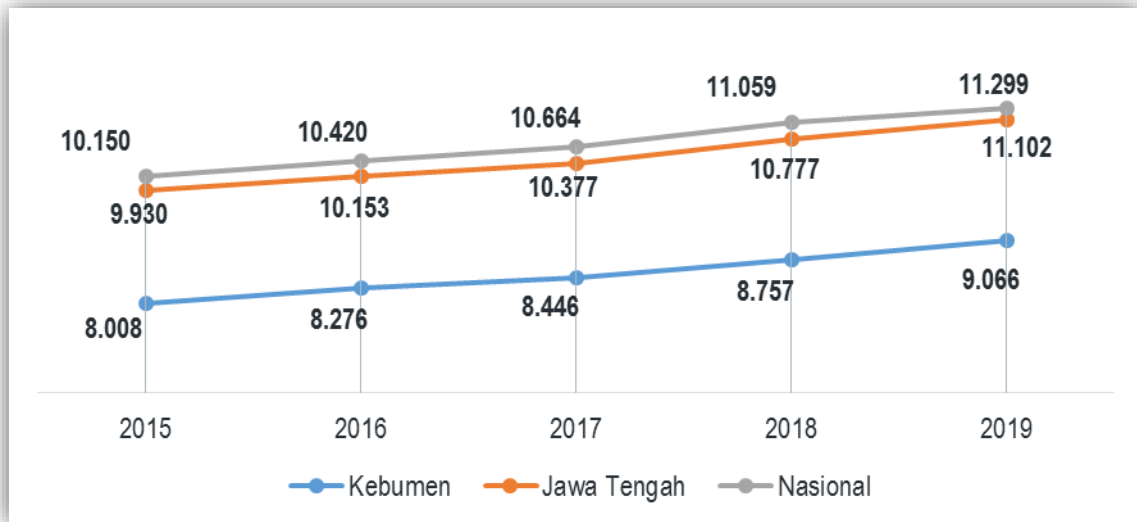


Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.29
**RLS Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2015-2019**

Pengeluaran Perkapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pada aspek standar hidup layak, pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 adalah Rp 9.066.000,- atau naik sebesar Rp 309.000,- dibandingkan dengan tahun 2018. Jika dibandingkan dengan pengeluaran perkapita Jawa Tengah dan Nasional, angka tersebut masih sangat rendah karena pengeluaran perkapita Jawa Tengah telah mencapai angka Rp 11.102.000,- dan Nasional sebesar Rp 11.299.000,-.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.30
Pengeluaran Perkapita (Dalam Ribuan) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2019

Dilihat dari 4 (empat) komponen/indikator pembentuk IPM di atas, Kabupaten Kebumen masih harus berupaya lebih keras untuk meningkatkan IPM agar dapat setara dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah maupun Nasional, terutama dalam meningkatkan pengeluaran perkapitanya. Secara rinci capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat dalam Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertum- buhan (%)
1	Angka Harapan Hidup	70,78	72,87	72,98	73,11	73,22	0,93
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,49	12,61	12,90	12,91	13,04	1,96
3	Rata-Rata Lama Sekolah	7,04	7,05	7,29	7,29	7,53	2,78
4	Pengeluaran perkapita (Rp.000)	9.305,00	8.276,00	8.446,00	8.757,00	8.976,00	4,29
5	IPM	66,87	67,41	68,29	68,8	69,60	1,46

Sumber: BPS, 2020, data diolah.

Dari rata-rata pertumbuhan masing-masing dimensi diketahui bahwa dimensi standar hidup layak sebagai penyumbang terbesar meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kebumen, mengalami peningkatan pengeluaran perkapita sebesar 4,29 persen. Sementara, meskipun Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen menunjukkan tren positif atau terdapat perbaikan derajat kesehatan masyarakat dari kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat kehidupan masyarakat, namun rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu lima tahun terakhir paling lambat dibanding indikator yang lain. Hal ini dikarenakan belum optimalnya faktor-faktor yang memengaruhinya tidak hanya standar kesehatan, akan tetapi juga keadaan lingkungan, dan ketersediaan pangan. Kabupaten Kebumen masih perlu upaya strategis untuk meningkatkan AHH melalui program pembangunan kesehatan

termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi masyarakat dan program sosial lainnya untuk terus meningkatkan derajat hidup masyarakat.

Peningkatan HLS dan RLS harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan. Dimensi pendidikan juga tidak tumbuh secara cepat setelah dimensi kesehatan. Fenomena angka partisipasi sekolah yang cenderung rendah, dan Angka Putus Sekolah yang masih terjadi karena rendahnya kesadaran orangtua dan siswa untuk tetap bersekolah sebagai dampak faktor ekonomi maupun sosial yang terjadi di setiap keluarga maupun lingkungan, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Perlu upaya agar anak-anak putus sekolah untuk kembali bersekolah, termasuk anak-anak terlantar, anak dengan disabilitas dan anak jalanan. Merujuk pada tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu tujuan keempat menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua, Pemerintah Daerah harus memastikan penduduk usia sekolah mendapatkan akses pendidikan.

Meskipun pada komponen pengeluaran perkapita menjadi penyumbang terbesar pada kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen, namun standar hidup layak masih di bawah Jawa Tengah dan secara Nasional. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka serta sebagian besar bekerja pada sektor informal dengan upah yang tidak sesuai dengan UMK menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat yang memengaruhi

rendahnya daya beli masyarakat dalam upaya memenuhi standar hidup layak menjadi masalah lain yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Pandemi COVID-19 akan memengaruhi pengeluaran perkapita masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan memengaruhi IPM pada tahun 2020. Banyaknya usaha sektor mikro bahkan ultra mikro, usaha kecil dan menengah yang menjadi sumber pendapatan masyarakat terdampak cukup signifikan. Pekerja sektor formal dengan mekanisme *work from home*, ataupun sebagian dirumahkan juga terdampak pandemi COVID-19 pada sisi *take home pay* yang berimbas pada pola konsumsi masyarakat. Perlu upaya keras dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus

dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

2. Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2015-2019 mengalami penurunan. Selama kurun waktu 2015-2019 kinerja penurunan persentase penduduk miskin paling tinggi ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13 persen atau sebesar 24.790 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2017. Capaian penurunan kemiskinan pada tahun 2018 dan 2019 telah melampaui target kinerja pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Selama kurun waktu 2015-2019 angka kemiskinan turun 3,62 persen atau sekitar rata-rata 0,91 persen per tahunnya. Jika dilihat dari penurunan penduduk miskin selama kurun waktu 2015-2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 40.560 jiwa atau berhasil mengurangi rata-rata 10.140 jiwa per tahun.

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan. Berikut secara rinci kinerja penanggulangan

kemiskinan Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
**Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2019**

	% Penduduk Miskin					% Penurunan 2015-2019	Rata-rata Penurunan 2015-2019
	2015	2016	2017	2018	2019		
Kebumen	20,44	19,86	19,60	17,47	16,82	3,62	0,72
Jawa Tengah	13,32	13,27	13,01	11,32	10,80	2,52	0,50
Nasional	11,13	10,70	10,12	9,82	9,41	1,72	0,34

Perkembangan profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 secara lebih lengkap disajikan pada Tabel 2.25.

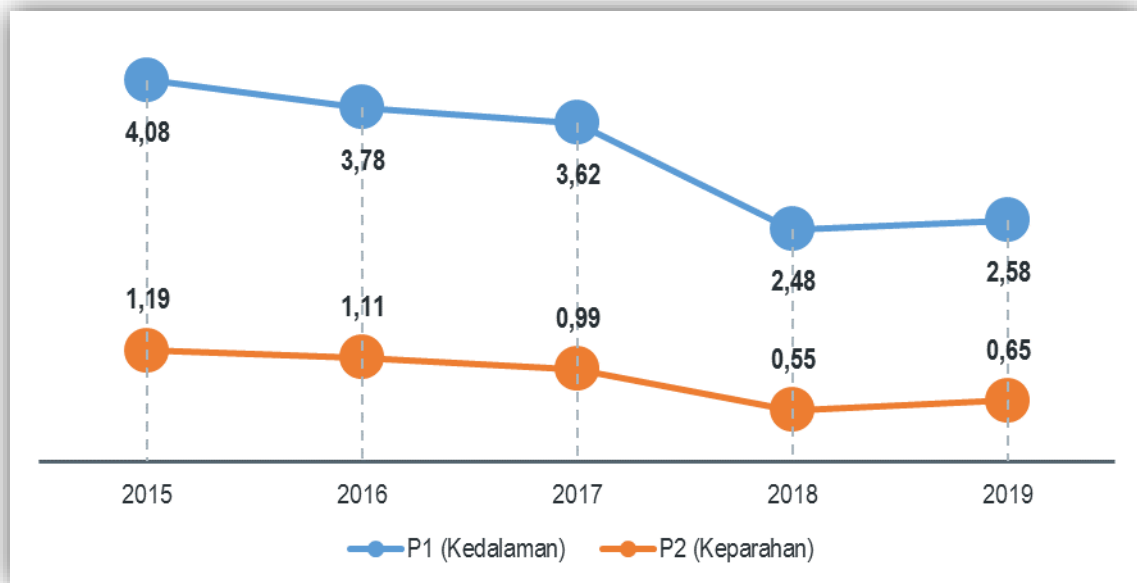
Tabel 2.25
Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Profil Kemiskinan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin	241.900	235.900	233.500	208.700	201.340
Persentase Penduduk Miskin	20,44%	19,86%	19,60%	17,47%	16,82%
Garis Kemiskinan	292.177	313.881	352.819	342.437	362.847
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) %	4,08%	3,78%	3,62%	2,48%	2,58%
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)%	1,19%	1,11%	0,99%	0,55%	0,65%

Sumber: BPS, 2020, data diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2015-2019 juga mengalami tren yang fluktuatif (lihat Gambar 2.31). Pada periode 2015-2018, P1 dan P2 Kabupaten Kebumen terus menurun yang artinya jarak antara pengeluaran

penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin kecil, dan jarak rata-rata pengeluaran antarpenduduk miskin di Kabupaten Kebumen juga semakin dekat atau ketimpangan antarpenduduk miskin cukup baik. Namun pada tahun 2019 P1 dan P2 di Kabupaten Kebumen meningkat. P1 pada tahun 2018 sebesar 2,48 menjadi 2,58 pada tahun 2019, dan P2 pada tahun 2018 sebesar 0,55 menjadi 0,65 pada tahun 2019. Artinya jarak antara pendapatan penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan dan jarak rata-rata pengeluaran antarpenduduk miskin merenggang atau semakin jauh.

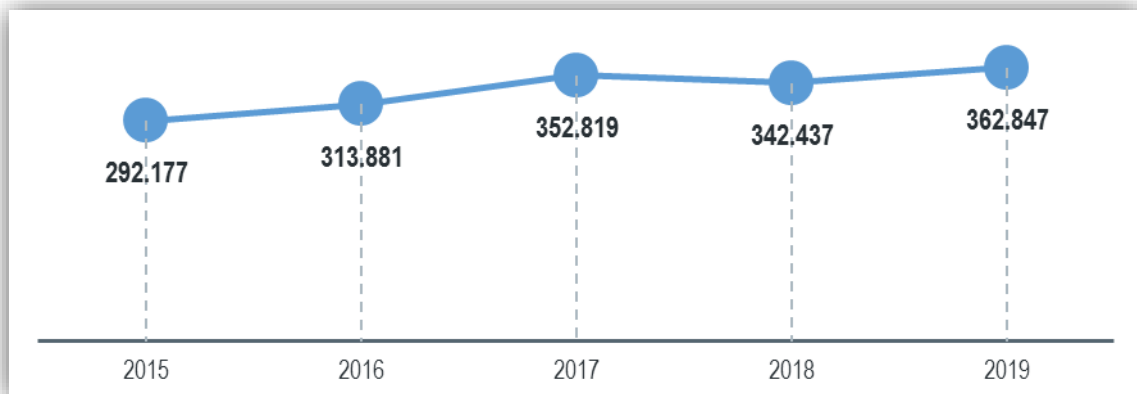


Gambar 2.31
**Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

Kondisi ini mencerminkan bahwa kenaikan Garis Kemiskinan tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin secara linier yang menyebabkan jarak antara pengeluaran masyarakat miskin semakin jauh

dengan Garis Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan ke depan tidak hanya berfokus pada penanggulangan kemiskinan dari sisi mikro pada intervensi program seputar perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan akses kebutuhan dasar, namun perlu optimalisasi intervensi penanggulangan kemiskinan dari sisi makro yaitu penciptaan lapangan kerja, menjaga tingkat inflasi, maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Garis Kemiskinan Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 2.32). Kenaikan Garis Kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan Garis Kemiskinan.



Sumber: BPS 2020

Gambar 2.32
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Adapun komoditas penyumbang Garis Kemiskinan tertinggi pada tahun 2019 berdasarkan data BPS November 2019 yaitu sandang, bahan makanan,

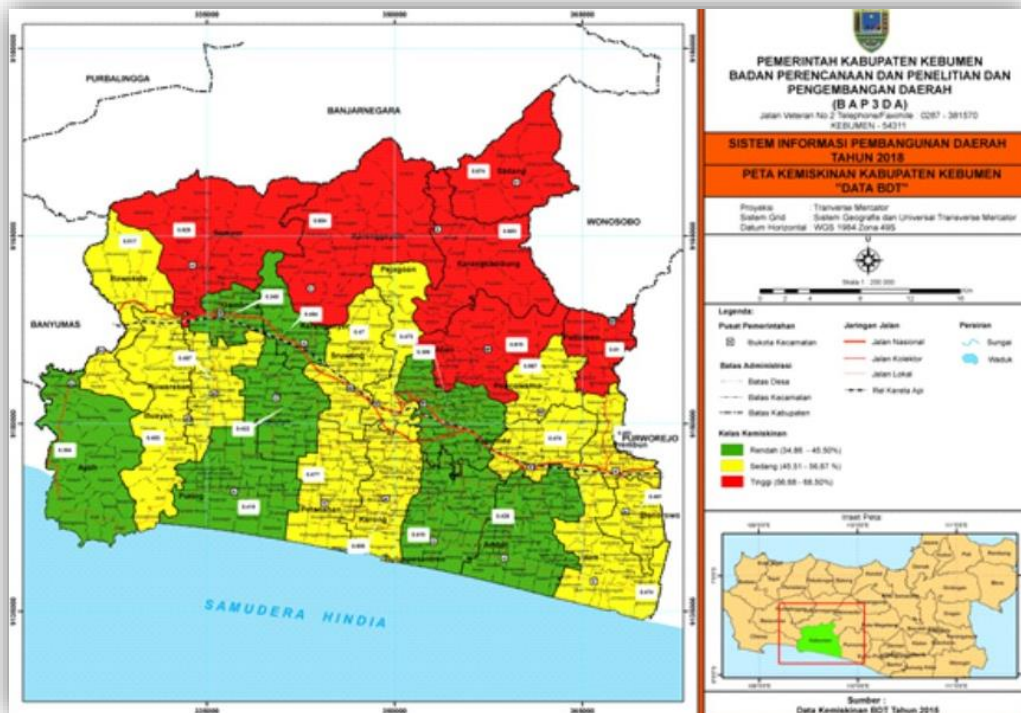
dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Jika diteliti lebih dalam dari komoditas makanan jenis komoditas yang berkontribusi besar yaitu sayur-sayuran, lemak dan minyak serta buah-buahan sebagai sumber utama kebutuhan kalori (Lihat Tabel 2.26).

Tabel 2.26
Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan

Jenis Komoditi	Persentase
Bahan Makanan	3,23
1. Sayur-Sayuran	16,38
2. Lemak dan Minyak	13,80
3. Buah-Buahan	6,70
4. Padi, Ubi, dll.	3,23
5. Ikan Diawetkan	0,69
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	3,27
Non-Makanan	
1. Perumahan, Air, gas, listrik dan bahan bakar rumah tangga	0,26
2. Sandang	5,96
3. Kesehatan	1,71
4. Pendidikan, rekreasi dan Olahraga	1,66
5. Transportasi, Komunikasi, jasa Keuangan	-0,42

Sumber: BPS November 2019

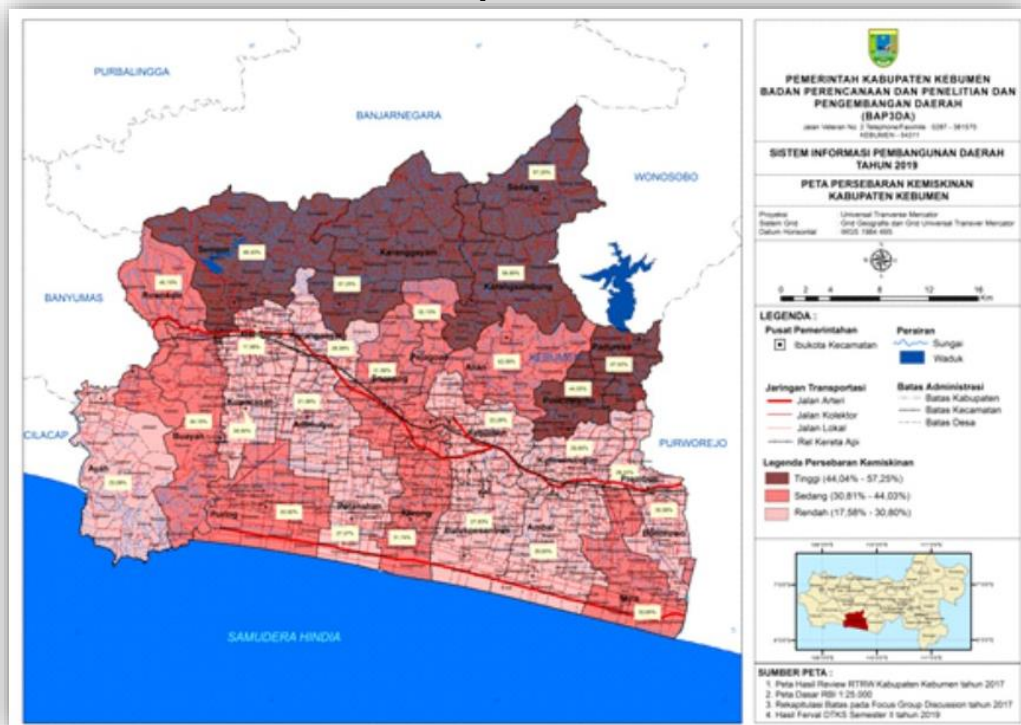
Potret kemiskinan secara mikro Kabupaten Kebumen pada tahun 2018-2019 diketahui bahwa wilayah utara Kabupaten Kebumen merupakan kantong kemiskinan terdiri dari Kecamatan Sempor, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, dan Padureso. Sementara Kecamatan Alian pada tahun 2019 tidak lagi menjadi "Kecamatan Merah" dan meningkat menjadi kecamatan dengan kategori kemiskinan sedang.



Sumber: DTKS 2018, data diolah

Gambar 2.33

Peta Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2018



Sumber: DTKS Semester II 2019, data diolah

Gambar 2.34

Peta Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Persebaran penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester 2 Tahun 2019 berdasarkan Permensos Nomor 84/HUK/2019 di kecamatan se-Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Alian, Buayan, Karanggayam, Karangsambung, Mirit, Padureso, Poncowarno, Rowokele, Sadang, dan Sempor
2. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin di bawah rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Adimulyo, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Pejagoan, Petanahan, Prembun, Puring, dan Sruweng.

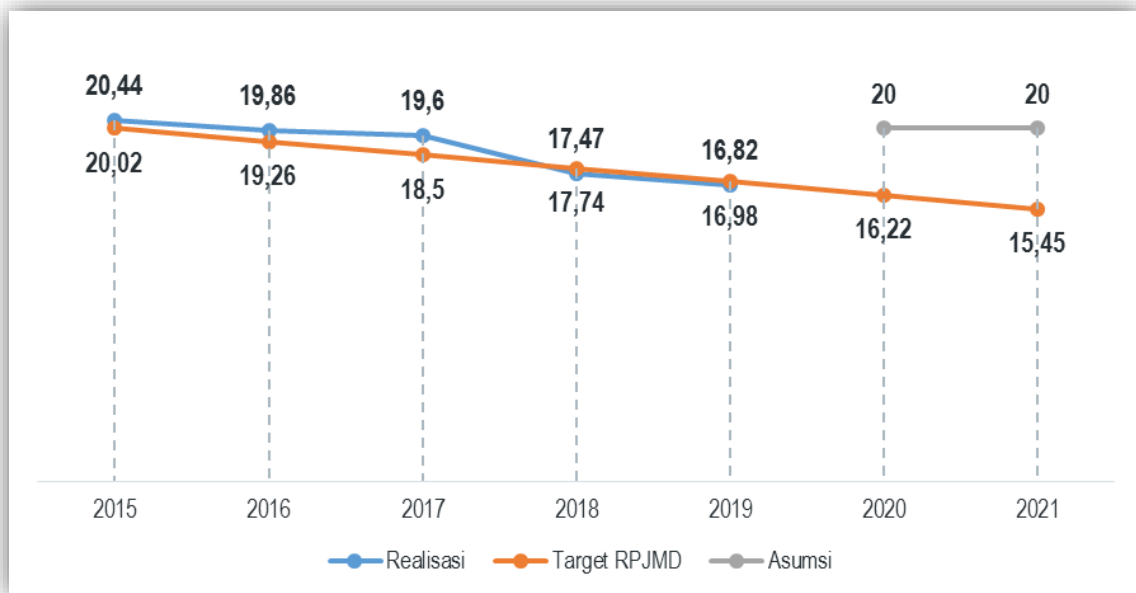
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen mencanangkan beberapa program dan kegiatan unggulan terkait penanggulangan kemiskinan, antara lain:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Angkutan gratis untuk pelajar dan mahasiswa miskin
 - b. Beasiswa untuk siswa kurang mampu SD/MI dan SMP/MTs
2. Bidang Kesehatan
 - a. Kemitraan asuransi kesehatan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi warga miskin
 - b. Penyediaan jamban keluarga untuk meningkatkan akses sanitasi

- c. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih
3. Program pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
4. Pelaksanaan Surat Edaran tentang Peran dan Fungsi ASN dalam pendampingan percepatan pengentasan kemiskinan dan Surat Edaran bagi ASN wajib zakat via Baznas.
5. Sharing APBDes untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
6. Pembangunan jaringan jalan (baru) yaitu Jalan Lingkar Utara Kabupaten sepanjang 60 km untuk membuka akses di wilayah kantong-kantong kemiskinan.
7. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
8. Pembangunan embung untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian

Berdasarkan dokumen RPJMD 2016-2021, peningkatan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan selama dua tahun terakhir mengalami akselerasi yang cukup baik, sehingga mampu melampaui target RPJMD. Angka Kemiskinan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 15,45%. Namun demikian, sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian masyarakat sebagai dampak pembatasan mobilitas masyarakat. Pelemahan dan pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian target kemiskinan dengan meningkatnya PHK dan pembatasan kegiatan yang memengaruhi sektor informal yang banyak melibatkan penduduk rentan miskin

dan hampir miskin. Penduduk rentan miskin dan hampir miskin adalah penduduk yang berada pada desil 3 dan 4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kebumen yang pada tahun 2019 semester II berjumlah 170.954 jiwa.



Gambar 2.35
**Target dan Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021**

Pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat termasuk pada sektor informal tersebut mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin yang sebelumnya merupakan penduduk rentan dan hampir miskin sehingga Angka Kemiskinan pada tahun 2020 diperkirakan bertambah menjadi sekitar 18 - 19 persen dan pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 17 - 18 persen. Oleh karena itu ke depan diperlukan program pemulihan ekonomi terutama bagi penduduk miskin berupa

program jaring pengaman sosial dan ekonomi agar angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen dapat menurun kembali pasca pandemi COVID-19.

2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

1. Seni dan Budaya

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung upaya pembangunan manusia. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya, pengembangan dan pelestarian kesenian serta olahraga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan merupakan penanda jati diri yang menjadi kekhasan dan karakter suatu daerah. Kekayaan budaya seharusnya dikelola dengan baik agar menjadi penggerak dan modal pembangunan manusia.

Pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Kebumen dilakukan dalam beberapa hal yaitu dengan pelestarian kesenian sesuai dengan budaya lokal pada grup kesenian yang ada seperti wayang kulit, *jamjaneng*, kuda lumping dan kesenian lainnya. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi terhadap grup kesenian dengan pemberian bantuan perlengkapan, maupun fasilitasi pada event-event seni budaya dalam daerah maupun di tingkat nasional. Secara rinci jumlah grup kesenian dapat dilihat dalam Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Jumlah Grup Kesenian Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Grup Kesenian	Grup	269	269	311	319	362
a. Kuda Lumping	Grup	125	125	135	140	160
b. Ketoprak	Grup	38	38	38	25	26
c. Wayang Kulit	Grup	29	29	31	35	40
d. Campursari	Grup	8	8	12	12	13
e. Angguk	Grup	2	2	3	5	6
f. Rebana	Grup	40	40	55	60	61
g. Jamjaneng	Grup	21	21	30	35	26
h. Calung	Grup	6	6	7	7	30

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020

Jumlah gedung kesenian dari tahun 2017-2018 tidak mengalami penambahan sebanyak 15 unit sedangkan pada tahun 2019 jumlah gedung kesenian menjadi 20 unit. Pemerintah daerah belum memiliki gedung kesenian khusus yang representatif untuk pengembangan kesenian. Namun para penggiat seni dapat memanfaatkan fasilitas *amptheater* di Ratih TV untuk melakukan pementasan seni budaya dan diliput oleh Ratih TV termasuk pada masa pandemi COVID-19.

Tabel 2.28
Jumlah Gedung Kesenian Tahun 2016-2019

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah Gedung Kesenian	8	15	15	20

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020

Sanggar kesenian merupakan tempat bagi grup-grup kesenian melakukan latihan, dan pengembangan kesenian daerah. Jumlah sanggar kesenian

terbatas, tumbuhnya tidak seprogresif tumbuhnya grup kesenian. Jumlah sanggar seni di Kebumen sampai dengan tahun 2019 berjumlah 16 sanggar seni. Jumlah ini tidak sebanding dengan grup kesenian tahun 2019 berjumlah 350 grup kesenian. Kesenian dari Kabupaten Kebumen cukup banyak yang dikembangkan dan dilestarikan dalam bentuk sanggar seni atau paguyuban maupun kelompok seni, baik yang ada di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten yang masih bisa dinikmati pada event-event tertentu. Event yang menyajikan pagelaran seni asli Kebumen dari mulai tanggapan acara hajatan warga, peringatan hari jadi instansi, acara syukuran, upacara sedekah laut, peringatan Hari Kemerdekaan RI, acara ulang tahun Kabupaten Kebumen dan event lain di tingkat lokal sampai dengan tingkat nasional.

Tabel 2.29
Perkembangan Jumlah Sanggar Seni Kebumen Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun 2015-2019				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Sanggar Seni	10	10	10	14	16

Sumber: Disporawisata, 2020.

2. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga menjadi hal yang penting dilakukan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pembinaan kepemudaan melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan, pengembangan prestasi kepemudaan, pelatihan kewirausahaan kepada pemuda dan kegiatan lain yang dapat mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengembangan prestasi olahraga dilakukan dengan pembinaan klub olahraga yang ada pada tahun 2016-2018 terdapat 86 klub olahraga, dan meningkat signifikan pada tahun 2019 menjadi 153. Peningkatan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat mendorong tumbuhnya klub-klub olahraga baru di Kabupaten Kebumen. Keberadaan klub ini dapat menjadi cikal bakal tumbuhnya prestasi olahraga secara lokal maupun nasional. Adapun database klub olahraga baru terbangun pada 2019 mengingat antusiasme dan peningkatan jumlah klub olahraga secara signifikan.

Tabel 2.30
Jumlah Klub Olahraga

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Klub Olahraga	Klub	86	86	86	86	255
Bola tangan	Klub					6
Futsal	Klub					25
Hockey	Klub					7
Karate	Klub					5
Panjat tebing	Klub					3
Balap motor	Klub					1
Petanque	Klub					7
Bridge	Klub					1
Woodball	Klub					5
Pencak silat	Klub					15
Atlitik	Klub					5
Sepak bola	Klub					32
Bulu tangkis	Klub					5
Bola Voli	Klub					25
Bola basket	Klub					5
Panahan	Klub					2
Sepak takraw	Klub					12
Tenis meja	Klub					8
Tenis lapangan	Klub					10
Softball	Klub					3
Billyard	Klub					1
Senam	Klub					1

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Catur	Klub					7
Renang	Klub					12
Menembak	Klub					4
Judo	Klub					5
Tinju	Klub					3
Binaraga	Klub					2
Sepatu roda	Klub					10
Tae Kwon Do	Klub					19
Yongmodo	Klub					1
NPC	Klub					5
Pordasi	Klub					1
Kempo	Klub					6

Sumber: Disporawisata, 2020.

Pengembangan prestasi olahraga didukung oleh pemerintah dengan penyediaan sarana dan prasarana dan pembinaan terhadap klub olahraga salah satu sarpras yang dibangun adalah gedung olahraga di beberapa kecamatan yang dapat digunakan oleh masyarakat dan klub olahraga dalam latihan rutin untuk mendukung tumbuhnya bibit-bibit atlet daerah. Selain itu gedung olahraga juga beberapa didirikan oleh masyarakat guna menyediakan fasilitas yang mendukung pengembangan atlet dan prestasi olahraga daerah. Kondisi ini memicu meningkatnya inisiasi masyarakat dalam penyelenggaraan event-event olahraga berbasis komunitas. Secara rinci jumlah gedung olahraga dapat dilihat dalam Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Jumlah Gedung Olahraga

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Gedung Olahraga	31	31	32	32	37

Sumber: Disporawisata Kab. Kebumen, 2020.

Cita-cita Kabupaten Kebumen yaitu “Kebumen sebagai gudang atlet berprestasi” merupakan penegasan atas beragam catatan prestasi yang pernah diraih para atlet, terutama atlet beladiri yang di antaranya terdiri dari tinju dan judo yang merupakan “tradisi emas”, pencak silat, taekwondo, karate dan terakhir adalah yongmodo yang meraih satu-satunya medali emas di ajang PORProv Jateng 2018.

Secara tradisional sejak 1990-an, dua cabang olahraga yakni tinju dan judo menjadi andalan Kabupaten Kebumen. Begitu juga dengan cabang judo, tetapi hal ini menjadi tidak menggelora kembali dikarenakan banyaknya atlet binaan yang pindah ke luar kota maupun berpindah jalur profesional. Meskipun begitu, judo diaktifkan kembali oleh pelatihnya di Sekolah Calon Tamtama (Secata) di Gombong. Hal inilah yang kemudian menjadi para judoka terlatih dan mengikuti ajang PORProv. Pada cabang olahraga bridge yang merupakan cabang olahraga otak dan tidak ada batasan umur juga kembali aktif.

Geliat pembinaan atlet diwujudkan dalam satu ajang bertajuk “Kebumen Judo Championship” 2019 yang juga dinamai Kejurprov KU (Kejuaraan tingkat Provinsi JAWA Tengah Kelompok Umur) di GOR Susilo Sudarman Komplek SMKN 1 Gombong pada 26-27 November 2019 dan diikuti oleh 20 pengurus kabupaten/kota (Pengkab/Pengkot) PJSI dan menghadirkan 49 nomor pertandingan. Pengkab PJSI Kebumen menjadi juara umum dengan 12 emas, 12 perak dan 16 perunggu. Kebumen Judo Championship diikuti lebih dari 375 atlet judo se-Provinsi Jawa Tengah.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa faktor strategis pendukung perwujudan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan. Faktor-faktor tersebut menjadi hal penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dituntut untuk terus dapat ditingkatkan sehingga dapat dirasakan dan memenuhi harapan masyarakat. Berbagai keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui media massa dan jejaring sosial dapat segera diproses, ditindaklanjuti dan diselesaikan. Pada era sekarang, tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dalam penanganan keluhan dan pengaduan sangat penting. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Prinsip pelayanan yang mencakup mudah, transparan, dan tepat waktu bukan sekedar slogan saja, melainkan benar-benar dapat terwujud. Upaya

perbaikan pelayanan terlebih dahulu dilakukan dengan melibatkan asesmen kebutuhan masyarakat, sehingga perbaikan layanan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, untuk itu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bagian dari asesmen atas kebutuhan. Dinamika masyarakat selalu berkembang, sehingga perlu upaya untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka upaya penyesuaian itu harus ada identifikasi kritis dalam bentuk umpan balik (*feedback*) dari penerima layanan langsung karena pelayanan publik harus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan. Apabila masyarakat merasa tidak puas terhadap suatu layanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak baik, tidak efektif, dan tidak efisien.

Secara umum kondisi pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai IKM Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebesar 80,61 yang masuk dalam kategori nilai IKM yang tinggi. Perkembangan pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen juga semakin baik. Hal tersebut terlihat dari nilai IKM Kabupaten Kebumen yang terus meningkat pada kurun waktu tahun 2016-2019 dari angka 71,37 menjadi 80,61. Hal ini menunjukkan masyarakat Kabupaten Kebumen semakin

mengapresiasi pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Angka IKM ini diharapkan dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan pada tahun 2020 dan pada tahun-tahun mendatang. IKM Kabupaten Kebumen selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Nilai IKM	71,37	75,15	79,28	80,61	80,61
2	Keterangan	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2020

**) Data asumsi*

Tabel 2.33
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen, dan 4 Kabupaten Sekitar Tahun 2019

No	Uraian Kinerja	2019	Kategori
1	Kabupaten Kebumen	80,61	Tinggi
2	Kabupaten Banjarnegara	79,83	Tinggi
3	Kabupaten Cilacap	82,77	Tinggi
4	Kabupaten Magelang	83,03	Tinggi
5	Kota Magelang	80,82	Tinggi
6	Provinsi Jawa Tengah	82,54	Tinggi

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.34
Rata-Rata Nilai per Unsur Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Unsur SKM	Rata-Rata Nilai Interval	Rata-Rata Nilai Interval Konversi	Kinerja UPP
1	Persyaratan	3,17	79,20	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,15	78,66	Baik
3	Waktu Penyelesaian	3,06	76,38	Kurang Baik
4	Biaya/Tarif	3,48	87,04	Baik

No	Unsur SKM	Rata-Rata Nilai Interval	Rata-Rata Nilai Interval Konversi	Kinerja UPP
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,15	78,71	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,21	80,19	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,24	81,03	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,08	76,90	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,52	88,07	Baik
Rata-Rata		3,22	80,61	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2020

Berdasar data pada Tabel 2.33, IKM Kabupaten Kebumen tahun 2019 meskipun masuk kategori tinggi, namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan 3 kabupaten/kota tetangga (Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang) nilai IKM Kabupaten Kebumen masih lebih rendah. Apabila dilihat dari pembentuk pelayanan, unsur waktu penyelesaian menjadi unsur dengan kinerja terendah yaitu sebesar 76,38 (kategori kurang baik).

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Waktu pelayanan merupakan suatu unsur yang menjadi tolak ukur dari konsep pelayanan prima yang memprioritaskan kepuasan dalam pelayanan. Semakin pendek waktu yang diperlukan dalam pelayanan merupakan indikator utama dalam kepuasan masyarakat atas pelayanan. Beberapa penyebab terkait rendahnya nilai unsur waktu penyelesaian pelayanan, di antaranya:

1. Terdapat beberapa Penyelenggara Pelayanan Publik dalam pelayanan belum mengacu kepada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan;

2. Sistem pelayanan di antaranya masih bersifat manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama; dan
3. Aktivitas pejabat yang sedang tidak di tempat, dinas luar, dinas dalam, rapat serta memiliki kepentingan lain sehingga berkas administrasi pelayanan tidak segera tercukupi sesuai standar waktu yang ditetapkan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan berikut ini:

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor terpenting dalam pembangunan kualitas sumberdaya manusia dan investasi masa depan sumberdaya manusia di Kabupaten Kebumen. Pembangunan urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen tahun 2019 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja program, di antaranya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan dasar.

Tabel 2.35
**Tabel Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

Indikator Sasaran	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Melek Huruf	%	94,33	96,29	96,58	95,15	94,51
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,49	12,61	12,90	12,91	13,04
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,04	7,05	7,29	7,34	7,53
Persentase PAUD Normal Berakreditasi	%	n/a	n/a	4,19	4,25	9,52

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Kebumen, BPS 2020, data diolah

a) Pendidikan Anak Usia Dini

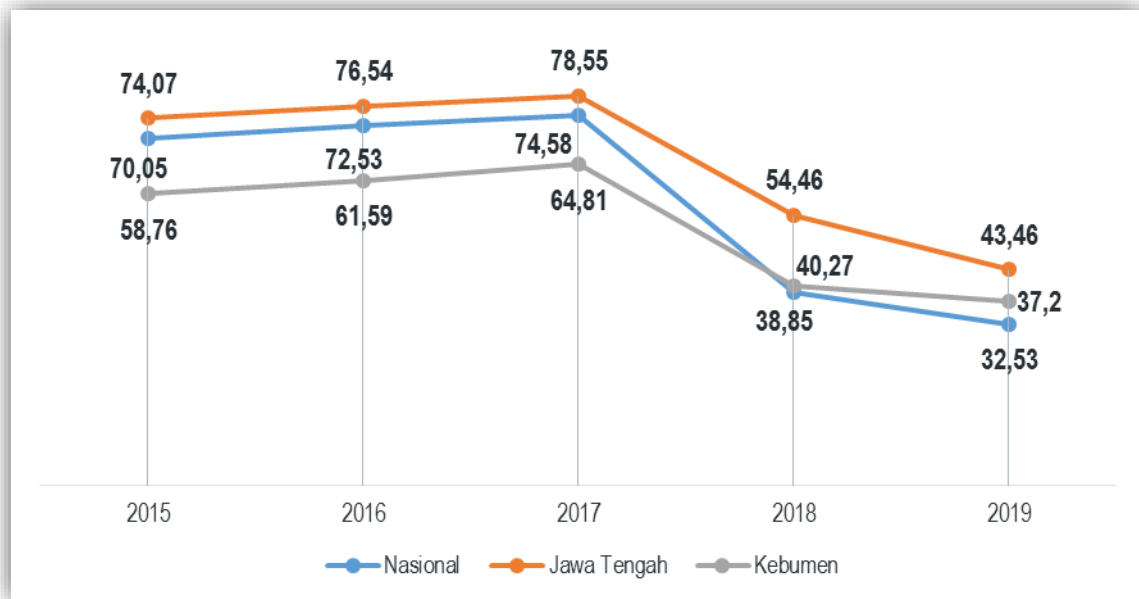
Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, APK PAUD Kabupaten Kebumen sejak lima tahun terakhir cukup fluktuatif dari 2015 sebesar 58,76 sampai dengan tahun 2019 sebesar 37,20. Perubahan capaian APK PAUD terjadi karena perubahan rentang anak usia dini yang sebelumnya dihitung berdasarkan usia 0-6 tahun menjadi 3-6 tahun. Perhitungan ini berlaku nasional dari tahun 2018.

Tabel 2.36
**APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
APK PAUD	58,76	61,59	64,81	38,85	37,20

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Jika dibandingkan dengan capaian APK PAUD tingkat Nasional dan Provinsi Tahun 2019, APK PAUD Kabupaten Kebumen sebesar 37,2 berada di bawah capaian APK PAUD Provinsi sebesar 43,46, namun di atas capaian Nasional sebesar 32,53.



Gambar 2.36
Perkembangan APK PAUD Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.240 unit. Dengan jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang meningkat pada tahun 2019 menjadi 134.000 anak, menyebabkan rasio lembaga PAUD pada tahun 2019 turun menjadi 1:108. Rasio Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2015-2019 disajikan dalam Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Rasio Jumlah Lembaga PAUD Per Siswa Jenjang PAUD Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Σ Lembaga PAUD	1.173	1.132	1.145	1.128	1.240
Σ Penduduk Usia 0-6 Tahun	138.711	137.288	135.290	133.550	134.132
Rasio	1 : 117	1 : 119	1 : 116	1 : 118	1 : 108

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020

b) Pendidikan Dasar

Indikator Kinerja Pendidikan Dasar di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari aksesibilitas masyarakat atas pelayanan pendidikan baik dari sarana, prasarana maupun mutu pendidikan. Gambaran umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat di antaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persentase Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Putus Sekolah (APTS), Rasio Guru/Murid, Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata, Rasio Sekolah dengan penduduk usia sekolah, Persentase Ruang Kelas yang Berkondisi Baik, Persentase Kelulusan sekolah dan Persentase Kualifikasi Guru Berpendidikan Minimal S1 untuk setiap jenjang pendidikan. Secara rinci beberapa indikator kinerja pokok pada pendidikan dasar dapat dilihat dalam Tabel 2.38.

Tabel 2.38
**Perkembangan Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Partisipasi Kasar (APK)						
1	SD/MI (%)	106,19	101,28	99,97	96,81	98,33
	SMP/MTs (%)	98,93	98,92	98,06	96,88	88,92
Angka Partisipasi Murni (APM)						
2	SD/MI (%)	93,08	88,88	88,57	86,72	85,56
	SMP/MTs (%)	81	75,03	74,86	73,39	65,41
Angka Melanjutkan Sekolah						
3	SD/MI (%)	99,90	99,90	99,90	99,90	99,89
	SMP/MTs (%)					
Angka Siswa Putus Sekolah						
4	SD/MI (%)	0,08%	0,06%	0,07%	0,09%	0,09%
	SMP/MTs (%)	0,34%	0,35%	0,26%	0,29%	0,29%
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah						
5	SD/MI (%)	71,37	71,93	71,18	71,57	69,15
	SMP/MTs (%)	30,4	31,35	31,51	32,13	31,82
Rasio Guru/Murid						
6	SD/MI (%)	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 16
	SMP/MTs (%)	1 : 15	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15



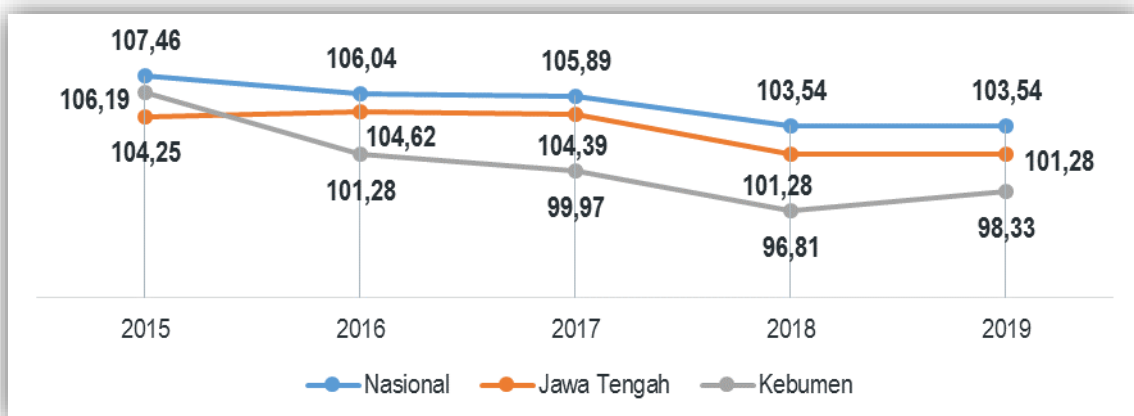
No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Murid per Kelas Rata-Rata						
7	SD/MI (%)	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1 : 22
	SMP/MTs (%)	1 : 29	1 : 29	1 : 28	1 : 28	1 : 28
Rasio Guru Per Kelas Rata-Rata						
8	SD/MI (%)	1 : 1,51	1 : 1,49	1 : 1,50	1 : 1,51	1 : 1,51
	SMP/MTs (%)	1 : 1,99	1 : 2,06	1 : 1,91	1 : 1,91	1 : 1,83
Rasio Guru Per Sekolah						
9	SD/MI (%)	1 : 9,88	1 : 9,84	1 : 9,83	1 : 9,77	1 : 9,03
	SMP/MTs (%)	1 : 22,64	1 : 22,68	1 : 21,10	1 : 20,69	1 : 20,46
Angka Kelulusan						
10	SD/MI (%)	99,32	98,56	98,38	98,38	99,97
	SMP/MTs (%)	98,22	95,75	96,91	96,91	99,97
Jumlah Sekolah yang Telah Terakreditasi						
	Jumlah Sekolah Tingkat SD yang telah terakreditasi (%)	98,63	98,50	97,63	98,00	97,92
	Jumlah Sekolah Tingkat SMP yang telah terakreditasi (%)	91,96	91,96	89,47	95,69	93,10
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV						
11	Jumlah Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV (orang)	7.089	7.527	7.730	7.815	5.663
	Jumlah Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D IV (orang)	3.728	3.903	4.000	3.678	2.167
	Jumlah Guru Tingkat SD yang Telah Sertifikasi (Orang)	Na	4.885	4.881	4.688	3.935
	Jumlah Guru Tingkat SMP yang Telah Sertifikasi (Orang)	Na	2.414	2.496	2.515	1.679
Persentase Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi baik						
12	SD/MI (%)	12,42	24,10	25,20	22,10	20,00
	SMP/MTs (%)	22,59	33,30	34,50	35,80	34,10
Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Ringan (%RKrr)						
13	SD/MI (%)	74,2	57,6	60	61,6	61,3
	SMP/MTs (%)	68,73	59,8	56,9	58,2	57,1
Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Sedang (%RKrs)						
14	SD/MI (%)	10,6	7,7	7,6	7,4	7,9
	SMP/MTs (%)	6,31	5	4,6	3	5,1
Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Berat (%RKrb)						
15	SD/MI (%)	2,78	10,6	7,2	8,9	10,8
	SMP/MTs (%)	2,37	1,9	4	3	3,7

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020 Data diolah

Angka Partisipasi Kasar (APK)

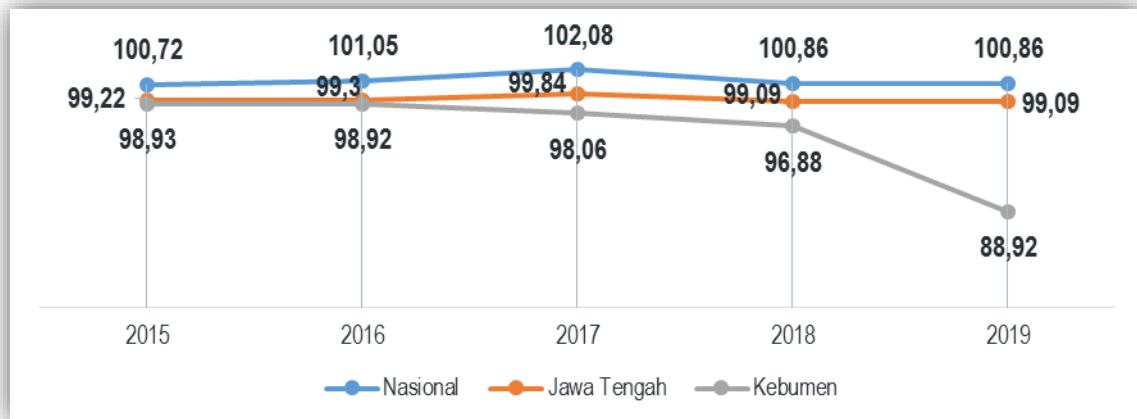
Selama tahun 2015-2019, APK ditunjukkan pada jenjang SD/ sederajat menunjukkan penurunan yang signifikan setiap tahunnya dengan angka 96,81 pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 98,33. Sementara itu, APK SMP/ Sederajat juga menurun namun tidak terlalu signifikan dan berada di angka 88,92 pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan pada jumlah murid yang berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya atau anak usia sekolah yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Kebumen.

Jika dibandingkan dengan APK Jawa Tengah dan Nasional, APK SD/ sederajat dan SMP/ sederajat Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 masih berada di bawahnya, dimana APK SD dan SMP Jawa Tengah berturut-turut di angka 101,28 dan 99,09 sedangkan Nasional berada di angka 103,54 dan 100,86.



Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020.

Gambar 2.37
**APK SD Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2019**



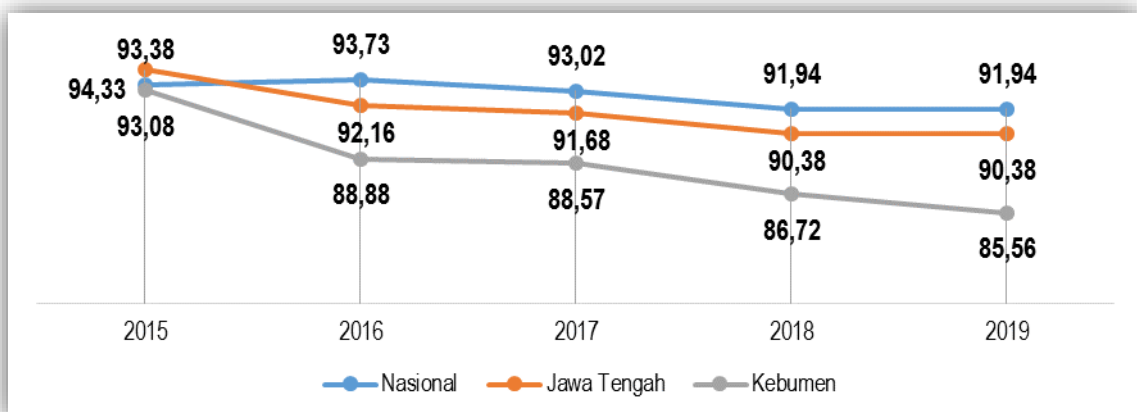
Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020.

Gambar 2.38

APK SMP Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Angka Partisipasi Murni (APM)

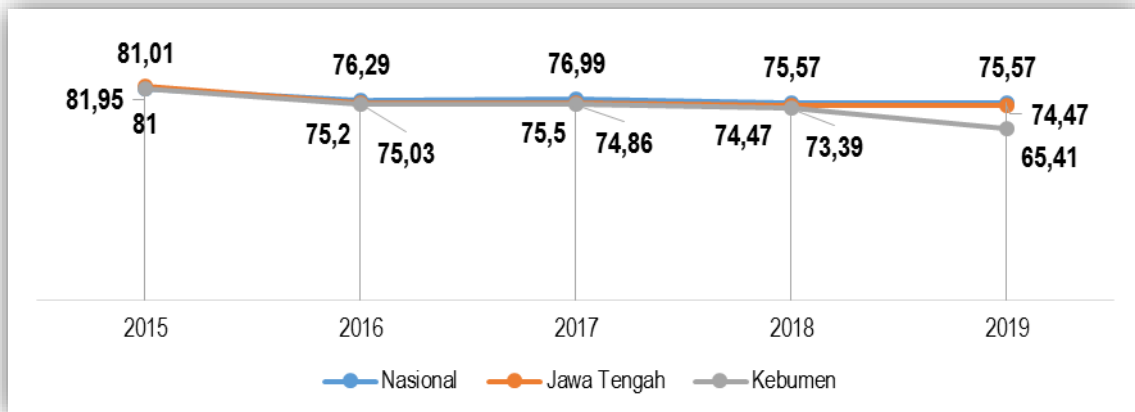
APM pada jenjang pendidikan dasar selama kurun 2015-2019 APM terus mengalami penurunan yang berarti bahwa penduduk usia sekolah 7-12 tahun, maupun 13-15 tahun di Kabupaten Kebumen yang bersekolah pada jenjang SD/ Sederajat dan SMP/Sederajat ada penurunan. Tren penurunan APM tersebut juga terjadi di Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020.

Gambar 2.39

APM SD/MI Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020.

Gambar 2.40

APM Jenjang SMP/MTs Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka mengelola potensi yang ada pada anak usia sekolah melalui pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Selain itu, penduduk non-usia sekolah juga mendapatkan pelayanan pendidikan melalui pendidikan non-formal maupun pendidikan kesetaraan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kinerja APS tahun 2019 (Tabel 2.39) menunjukkan angka yang menurun dibanding tahun sebelumnya cukup untuk semua jenjang usia dan berada di bawah angka APS Jawa Tengah dan Nasional. Capaian angka partisipasi sekolah selama tahun 2015-2019 secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2.39.

Tabel 2.39
APS Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Usia	APS	2015	2016	2017	2018	2019
7 - 12 Tahun	Kebumen	99,20	100,14	100,18	98,25	95,83
	Jawa Tengah	99.56	99.58	99.62	99.62	99,76
	Nasional	99.09	99.09	99.14	99.14	99,22
13 - 15 Tahun	Kebumen	101,59	98,52	98,56	95,91	88,90
	Jawa Tengah	95.30	95.41	95.48	95.48	95,76
	Nasional	94.72	94.88	95.08	95.08	95,35
16 - 18 Tahun	Kebumen	63,14	69,60	69,64	81,09	68,78
	Jawa Tengah	67.66	67.95	68.48	68.48	69,02
	Nasional	70.61	70.83	71.42	71.42	71,99

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2020

Berdasarkan capaian APS, dapat diketahui bahwa masih cukup banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Pola pelayanan sekolah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menyebabkan anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus, anak terlantar, anak jalanan tidak mengenyam pendidikan sesuai dengan usianya. Di sisi lain, keengganan untuk kembali bersekolah bagi mereka yang putus sekolah maupun untuk menempuh pendidikan kesetaraan merupakan tugas berat dari Pemerintah Daerah. Kecenderungan orangtua menyekolahkan anak mereka pada sekolah madrasah dan sekolah non-formal di luar Kebumen menjadi penyumbang angka partisipasi sekolah cenderung menurun. Perlu peningkatan upaya lintas sektor dalam meminimalkan faktor ekonomi, sosial dan budaya dalam memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan dengan baik.

Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah dilihat dari persentase anak melanjutkan jenjang SD ke jenjang SMP/MTs yang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Rata-rata selama kurun waktu 2015-2019 anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs sebanyak 21 anak. Faktor akses, ekonomi maupun sosial menjadi penyebab anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya. Di sisi lain anak memilih melanjutkan ke jenjang pendidikan madrasah dan/atau pendidikan non-formal daripada melanjutkan pendidikan di sekolah formal. Jenjang pendidikan dasar 9 tahun merupakan pondasi dasar pembangunan manusia. Perlu upaya untuk mewujudkan akses pelayanan pendidikan dasar kepada seluruh masyarakat.

Tabel 2.40
Jumlah Siswa SD/MI Melanjutkan ke SLTP/MTs Kebumen Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Siswa SD lulus	21.388	21.279	20.640	20.640	21.250
Siswa Melanjutkan	21.367	21.257	20.619	20.619	21.227
Tidak Melanjutkan	21	22	21	21	23
Persentase (%)	99,90	99,90	99,90	99,90	99,89

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020

(1) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mengalami peningkatan selama tahun 2016-2019 di jenjang SD/MI. Sementara pada jenjang SMP/MTs kembali mengalami

peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Angka Putus Sekolah dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI					
Σ Siswa Putus Sekolah	112	82	93	112	112
Σ Seluruh Siswa	132.111	131.337	130.002	130.002	129.091
% Anak Putus Sekolah	0,08%	0,06%	0,07%	0,09%	0,09%
SMP/MTs					
Σ Siswa Putus Sekolah	217	220	164	183	183
Σ Seluruh Siswa	64.361	63.192	62.293	62.293	61.061
% Anak Putus Sekolah	0,34%	0,35%	0,26%	0,29%	0,29%

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2020

Tingginya Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs menunjukkan adanya ketimpangan akses pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen. Faktor ekonomi dan non-ekonomi diindikasikan memengaruhi tingginya Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kebumen.

(2) Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI terus mengalami perbaikan sejak tahun 2016 dari 71,93 menjadi 69,15 di tahun 2019. Namun demikian pada jenjang SMP/MTs justru mengalami kenaikan rasio dari 31,35 pada tahun 2016 menjadi 31,82 pada tahun 2019. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah. Rasio

ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI					
Jumlah Sekolah	910	912	911	916	885
Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	127.507	126.782	127.980	127.980	127.980
Rasio ketersediaan sekolah	1 : 140	1 : 139	1 : 140	1 : 140	1 : 145
SMP/MTs					
Jumlah Sekolah	196	200	202	206	204
Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	64.465	63.793	64.115	64.115	64.115
Rasio ketersediaan sekolah	1 : 329	1 : 319	1 : 317	1 : 311	1 : 314

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2020



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 2.43

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015-2019 Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI					Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTS				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ayah	1 : 112	1 : 112	1 : 115	1 : 115	1 : 152	1 : 177	1 : 166	1 : 180	1 : 180	1 : 209
2	Buayan	1 : 149	1 : 148	1 : 149	1 : 149	1 : 170	1 : 766	1 : 609	1 : 608	1 : 608	1 : 542
3	Puring	1 : 126	1 : 126	1 : 127	1 : 130	1 : 154	1 : 422	1 : 419	1 : 420	1 : 420	1 : 513
4	Petanahan	1 : 143	1 : 142	1 : 146	1 : 145	1 : 163	1 : 330	1 : 328	1 : 334	1 : 334	1 : 377
5	Klirong	1 : 156	1 : 155	1 : 156	1 : 156	1 : 155	1 : 292	1 : 289	1 : 291	1 : 291	1 : 311
6	Buluspesantren	1 : 140	1 : 139	1 : 141	1 : 141	1 : 137	1 : 428	1 : 424	1 : 429	1 : 429	1 : 390
7	Ambal	1 : 153	1 : 152	1 : 152	1 : 152	1 : 156	1 : 419	1 : 415	1 : 415	1 : 415	1 : 430
8	Mirit	1 : 136	1 : 133	1 : 133	1 : 133	1 : 139	1 : 422	1 : 396	1 : 393	1 : 393	1 : 406
9	Prembun	1 : 114	1 : 112	1 : 113	1 : 113	1 : 108	1 : 170	1 : 168	1 : 167	1 : 167	1 : 175
10	Kutowinangun	1 : 140	1 : 139	1 : 139	1 : 136	1 : 128	1 : 290	1 : 287	1 : 286	1 : 286	1 : 297
11	Alian	1 : 164	1 : 160	1 : 159	1 : 159	1 : 142	1 : 306	1 : 277	1 : 276	1 : 276	1 : 291
12	Kebumen	1 : 200	1 : 197	1 : 203	1 : 202	1 : 164	1 : 322	1 : 321	1 : 315	1 : 315	1 : 232
13	Pejagoan	1 : 152	1 : 151	1 : 157	1 : 156	1 : 143	1 : 499	1 : 495	1 : 511	1 : 511	1 : 491
14	Sruweng	1 : 145	1 : 144	1 : 144	1 : 144	1 : 147	1 : 511	1 : 381	1 : 381	1 : 381	1 : 400
15	Adimulyo	1 : 118	1 : 116	1 : 117	1 : 117	1 : 123	1 : 319	1 : 314	1 : 315	1 : 315	1 : 363
16	Kuwarasan	1 : 134	1 : 133	1 : 137	1 : 133	1 : 135	1 : 393	1 : 389	1 : 398	1 : 398	1 : 385
17	Rowokele	1 : 122	1 : 121	1 : 122	1 : 122	1 : 146	1 : 296	1 : 294	1 : 292	1 : 292	1 : 328
18	Sempor	1 : 140	1 : 140	1 : 140	1 : 140	1 : 151	1 : 456	1 : 454	1 : 452	1 : 452	1 : 509
19	Gombang	1 : 150	1 : 149	1 : 149	1 : 149	1 : 147	1 : 332	1 : 330	1 : 329	1 : 329	1 : 326
20	Karanganyar	1 : 131	1 : 130	1 : 131	1 : 131	1 : 128	1 : 266	1 : 262	1 : 263	1 : 263	1 : 286
21	Karanggayam	1 : 127	1 : 127	1 : 127	1 : 127	1 : 144	1 : 323	1 : 320	1 : 248	1 : 248	1 : 332
22	Sadang	1 : 108	1 : 106	1 : 108	1 : 108	1 : 141	1 : 281	1 : 274	1 : 273	1 : 273	1 : 393
23	Bonorowo	1 : 100	1 : 99	1 : 100	1 : 100	1 : 94	1 : 342	1 : 334	1 : 334	1 : 334	1 : 350
24	Padureso	1 : 94	1 : 91	1 : 93	1 : 93	1 : 116	1 : 195	1 : 187	1 : 186	1 : 186	1 : 287
25	Poncowarno	1 : 110	1 : 108	1 : 110	1 : 110	1 : 119	1 : 211	1 : 203	1 : 203	1 : 203	1 : 315
26	Karangsambung	1 : 116	1 : 115	1 : 116	1 : 116	1 : 139	1 : 178	1 : 198	1 : 197	1 : 197	1 : 300

Berdasarkan data ketersediaan sekolah, diperoleh gambaran jika rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen secara rata-rata maupun per kecamatan didapatkan rasio yang masih memadai atau cukup ideal. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas fasilitas pelayanan pendidikan dasar pada setiap kecamatan telah memadai.

Rasio Guru/Murid

Rasio Guru/Murid pada jenjang SD/MI tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 1:17. Sedangkan rasio guru/murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 1:16. Jika dilihat dari rasio ideal guru per murid yaitu satu guru untuk 32 siswa, maka jumlah guru di Kabupaten Kebumen secara agregat telah tercukupi. Kondisi rasio guru terhadap murid Kabupaten Kebumen pada tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI					
Jumlah Guru	8.992	8.975	8.957	8.957	7.997
Jumlah Murid	132.111	131.337	130.002	130.002	130.002
Rasio Guru/Murid	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 16
SMP/MTs					
Jumlah Guru	4.439	4.536	4.263	4.263	4.147
Jumlah Murid	64.361	63.192	62.293	62.293	62.293
Rasio Guru/Murid	1 : 15	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020 dan SIPD, 2019

Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata

Rasio Kelas/Guru pada jenjang SD/MI tahun 2019 adalah 1:1,51, sedangkan pada jenjang SMP/MTs tahun 2019 adalah 1:1,85. Rasio Kelas/Murid pada jenjang SD/MI tahun 2019 adalah 1:22, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas/Murid yaitu 32 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SD/MI telah mencukupi. Adapun rasio Kelas/Murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2019 adalah 1:27, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas/Murid yaitu 36 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SMP/MTs telah mencukupi. Kondisi rasio guru dan murid terhadap kelas di Kabupaten Kebumen pada tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
**Rasio Guru Per Kelas Rata-Rata Terhadap Murid
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI					
Jumlah Guru	8.992	8.975	8.957	8.957	7.997
Jumlah kelas	5.937	5.997	5.932	5.932	5.867
Rasio Kelas/Guru	1 : 1,51	1 : 1,49	1 : 1,50	1 : 1,51	1 : 1,51
Jumlah Murid	132.111	131.337	130.002	130.002	130.002
Rasio Kelas/Murid	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1 : 22	1 : 22
SMP/MTs					
Jumlah Guru	4.439	4.536	4.263	4.263	4.174
Jumlah Kelas	2.228	2.192	2.227	2.227	2.259
Rasio Kelas/ Guru	1 : 1,99	1 : 2,06	1 : 1,91	1 : 1,91	1 : 1,83
Jumlah Murid	64.361	63.192	62.293	62.293	62.293
Rasio Kelas/Murid	1 : 29	1 : 29	1 : 28	1 : 28	1 : 28

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020 dan SIPD, 2019



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 2.46

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015-2019 Menurut Kecamatan Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Rasio Guru dan Murid SD/MI					Rasio Guru dan Murid SMP/MTS				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ayah	1 : 16	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 19	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 17
2	Buayan	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 20	1 : 21	1 : 20	1 : 21	1 : 21	1 : 24
3	Puring	1 : 17	1 : 18	1 : 18	1 : 17	1 : 19	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 21
4	Petanahan	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 17	1 : 11	1 : 11	1 : 13	1 : 13	1 : 16
5	Klirong	1 : 16	1 : 17	1 : 16	1 : 17	1 : 19	1 : 13	1 : 13	1 : 15	1 : 15	1 : 16
6	Buluspesantren	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 17	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 18
7	Ambal	1 : 17	1 : 18	1 : 17	1 : 17	1 : 20	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 18
8	Mirit	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 15	1 : 12	1 : 12	1 : 13	1 : 13	1 : 23
9	Prembun	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 16	1 : 13	1 : 13	1 : 15	1 : 15	1 : 17
10	Kutowinangun	1 : 15	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 16	1 : 15	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 19
11	Alian	1 : 18	1 : 17	1 : 17	1 : 16	1 : 18	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 19
12	Kebumen	1 : 18	1 : 18	1 : 17	1 : 17	1 : 19	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 15	1 : 18
13	Pejagoan	1 : 17	1 : 17	1 : 16	1 : 16	1 : 20	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 21
14	Sruweng	1 : 17	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 17	1 : 18	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 20
15	Adimulyo	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 18
16	Kuwarasan	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 18	1 : 19	1 : 18	1 : 18	1 : 18	1 : 22
17	Rowokele	1 : 19	1 : 19	1 : 19	1 : 19	1 : 19	1 : 17	1 : 18	1 : 20	1 : 20	1 : 23
18	Sempor	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 16	1 : 18	1 : 19	1 : 17	1 : 19	1 : 19	1 : 19
19	Gombang	1 : 18	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 20	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 18
20	Karanganyar	1 : 16	1 : 16	1 : 15	1 : 15	1 : 17	1 : 19	1 : 18	1 : 19	1 : 19	1 : 19
21	Karanggayam	1 : 18	1 : 18	1 : 18	1 : 17	1 : 18	1 : 15	1 : 14	1 : 12	1 : 12	1 : 19
22	Sadang	1 : 17	1 : 17	1 : 16	1 : 16	1 : 17	1 : 15	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 18
23	Bonorowo	1 : 12	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 14	1 : 12	1 : 11	1 : 16	1 : 16	1 : 18
24	Padureso	1 : 12	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 16	1 : 9	1 : 9	1 : 10	1 : 10	1 : 18
25	Poncowarno	1 : 13	1 : 14	1 : 13	1 : 13	1 : 15	1 : 14	1 : 14	1 : 13	1 : 13	1 : 14
26	Karangsambung	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 19	1 : 15	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 17

Berdasarkan data rasio jumlah guru per murid pada jenjang pendidikan dasar, didapatkan gambaran jika rasio guru dibandingkan dengan jumlah siswa di Kabupaten Kebumen secara rata-rata maupun per kecamatan didapatkan rasio yang memadai atau ideal. Standar ideal rasio guru/murid untuk jenjang SD/MI adalah 1:29 sementara untuk jenjang SMP/MTs adalah 1:24, sedangkan kondisi di Kabupaten Kebumen menunjukkan rasionya termasuk kategori ideal. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan dasar pada setiap kecamatan telah memadai.

Rasio Guru Per Sekolah

Rasio Guru terhadap sekolah di Kebumen tahun 2015 sebesar 9,88 dan tahun 2019 sebesar 9,03. Rasio guru per sekolah dalam kurun waktu terakhir rata-rata dalam satu sekolah dasar memiliki 9 orang guru. Sedangkan rasio pendidikan SMP/MTs tahun 2015 sebesar 22,64 dan tahun 2019 sebesar 20,46. Rasio guru per sekolah dalam kurun waktu terakhir rata-rata memiliki guru sebanyak 20 orang. Namun rasio ini belum melihat mengenai status guru apakah termasuk ASN atau GTT. Secara rinci rasio guru per sekolah dapat dilihat dalam Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Rasio Guru Per Sekolah Kebumen Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI					
Jumlah Guru	8.992	8.975	8.957	8.957	7.997
Jumlah Sekolah	910	912	911	916	885



	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio	1 : 9,88	1 : 9,84	1 : 9,83	1 : 9,77	1 : 9,03
SMP/MTs					
Jumlah Guru	4.439	4.536	4.263	4.263	4.174
Jumlah Sekolah	196	200	202	206	204
Rasio	1 : 22,64	1 : 22,68	1 : 21,10	1 : 20,69	1 : 20,46

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020 dan SIPD, 2019

Persentase Kelulusan Siswa

Persentase kelulusan di Kebumen pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan angka yang cukup baik, hampir 100 persen siswa jenjang pendidikan dasar lulus sekolah. Artinya kualitas pembelajaran di Kabupaten Kebumen untuk jenjang pendidikan dasar dalam kondisi baik.

Tabel 2.48

Persentase Kelulusan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI					
Jumlah Siswa Lulus Sekolah	21.388	21.279	20.640	20.640	21.250
Jumlah Seluruh Siswa Kelas VI	21.535	21.589	20.979	20.979	21.257
Persentase Kelulusan Siswa	99,32 %	98,56%	98,38%	98,38%	99,97 %
SMP/MTs					
Jumlah Siswa Lulus Sekolah	21.707	20.718	20.328	20.328	20.366
Jumlah Seluruh Siswa Kelas IX	22.101	21.638	20.976	20.976	20.373
Persentase Kelulusan Siswa	98,22 %	95,75%	96,91%	96,91%	99,97 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan SIPD semester 1, 2019

(3) Akreditasi Sekolah

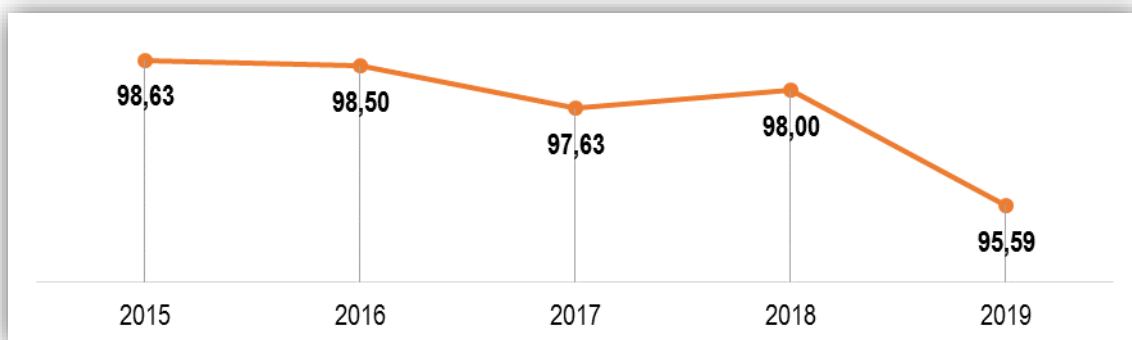
Jumlah sekolah SD/MI yang terakreditasi di Kebumen tahun 2015 sebanyak 801 sekolah dan tahun 2019 sebanyak 771 sekolah. Berkurangnya

jumlah sekolah karena dilakukan *regrouping* pada jenjang SD untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Di tahun 2019 masih ada 30 sekolah yang belum terakreditasi menunggu penjadwalan. Persentase SD terakreditasi selama kurun waktu lima tahun terakhir cukup baik, meskipun sebagian besar dari sekolah yang terakreditasi 503 sekolah di antaranya terakreditasi B dan 218 sekolah terakreditasi A.

Tabel 2.49
Perkembangan Sekolah Terakreditasi jenjang SD/MI Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Akreditasi	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Total Sekolah	801	802	801	801	771
Jumlah Sekolah Terakreditasi	790	790	782	785	737
Persentase Sekolah Terakreditasi	98,63	98,50	97,63	98,00	95,59

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020

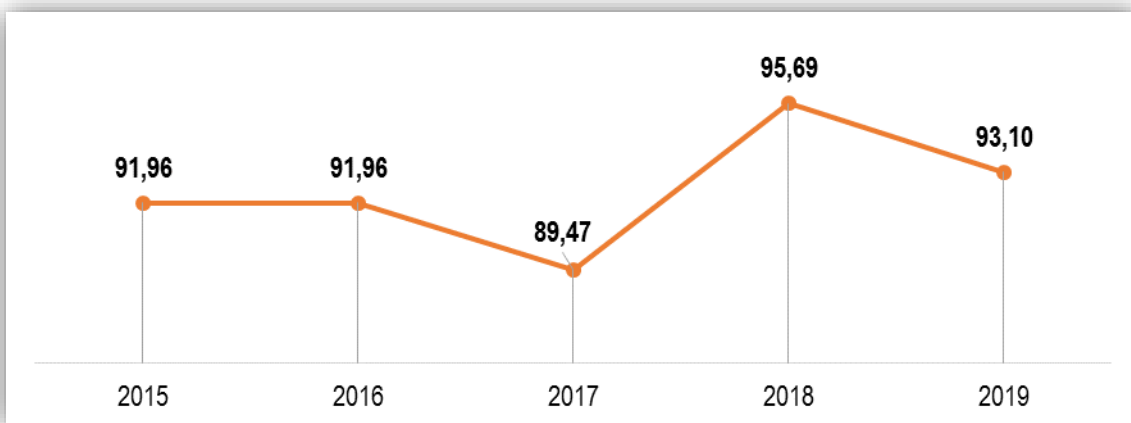


Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.41
Perkembangan Sekolah Terakreditasi Jenjang SD/MI Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Akreditasi sekolah jenjang SLTP/MTs di Kabupaten Kebumen tahun 2019 sebanyak 116 sekolah telah terakreditasi. Jumlah akreditasi A sebanyak 48

sekolah, yang terakreditasi B sejumlah 35 sekolah, sejumlah 25 sekolah berakreditasi C dan terdapat 8 sekolah tidak terakreditasi.



Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.42
**Perkembangan Sekolah Terakreditasi Jenjang SLTP/MTs
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

Tabel 2.50
Perkembangan Akreditasi SLTP/MTs Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Akreditasi	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Terakreditasi	103	103	102	111	108
Jumlah Sekolah	112	112	114	116	116
Persentase Sekolah Terakreditasi	91,96	91,96	89,47	95,69	93,10

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2020

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik

Persentase ruang kelas kondisi baik untuk jenjang SD/MI maupun SMP/MTs diupayakan dalam rangka mendukung kenyamanan belajar mengajar. Kondisi ruang kelas jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen mayoritas dalam kondisi rusak ringan. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik di

Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Persentase Kelas Kondisi Baik Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI					
Jumlah seluruh ruang kelas	5784	5.863	6.026	6.026	5.867
Jumlah ruang kondisi baik	717	1.407	1.507	1.326	1.173
Jumlah ruang kondisi rusak ringan	4280	3342	3616	3676	3579
Ruang rusak sedang	578	410	458	446	463
Jumlah ruang kelas rusak berat	208	704	446	578	651
% kondisi baik	12,40	24,00	25,01	22,00	19,99
% rusak ringan	74,00	57,00	60,01	61,00	61,00
% rusak sedang	9,99	6,99	7,60	7,40	7,89
% rusak berat	3,60	12,01	7,40	9,59	11,10
SMP/MTs					
Jumlah seluruh ruang kelas	2.223	2.281	2.296	2.296	2.259
Jumlah ruang kondisi baik	489	760	792	822	770
Jumlah ruang kondisi rusak ringan	1528	1364	1306	1336	1290
Ruang rusak sedang	140	43	106	69	115
Jumlah ruang kelas rusak berat	66	77	92	69	84
% kondisi baik	22,00	34,19	35,63	36,98	34,64
% rusak ringan	68,74	61,36	58,75	60,10	58,03
% rusak sedang	6,30	1,93	4,77	3,10	5,17
% rusak berat	2,97	3,46	4,14	3,10	3,78

Sumber: Disdik Kab. Kebumen dan SIPD, 2020

2. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat vital. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Secara umum, derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat

dari jumlah kasus Balita Gizi Buruk (BGB), Balita Kurang Gizi (BKG), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Oleh karena itu, UHH memiliki korelasi yang sangat erat dengan Angka Kematian Bayi atau *infant mortality rate* (AKB/IMR). Kemudian angka kematian bayi dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan neonatal dan status gizi bayi (0-11 bulan). Secara umum capaian kinerja bidang kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.52.

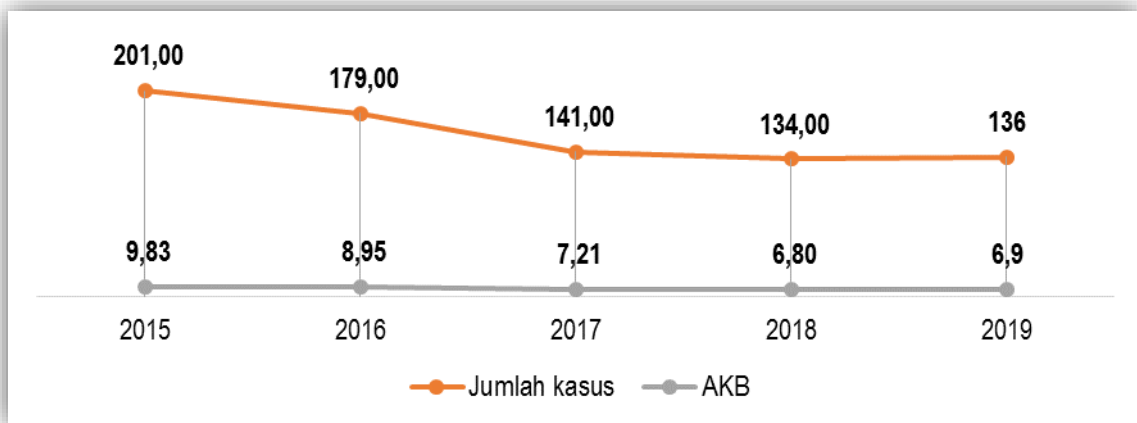
Tabel 2.52
**Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2019**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	% Balita Gizi Kurang	0,31%	0,28 %	0,29%	0,8%
2	% Balita Gizi Buruk	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
3	Ibu hamil KEK	0,63%	0,63%	0,67%	8,97%
4	Angka Melahirkan Ibu Hamil	20.020	19.583	19.812	19.629
5	AKI (per 100.000 kelahiran hidup)	80	61,38	50,5	45.86
6	Angka Kelahiran Bayi	20.145	19.697	19.952	19.626
7	AKB (per 1.000 kelahiran hidup)	8,95	7,21	6,8	6,9
8	UHH	72,81	72,81	72,81	73,22
9	Cakupan Ibu hamil K1	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan Ibu hamil K4	94,19%	95,50%	96,15%	99,90%
11	Cakupan persalinan oleh Nakes	99,70%	99,80%	99,86%	99,90%
12	Jumlah penderita Stunting	-	-	5019	14.057
13	Jumlah Desa ODF	36	67	109	422

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2020

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah salah satu indikator yang menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab seperti pelayanan sebelum kelahiran, status gizi ibu hamil, kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat. Berdasarkan jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 memiliki tren yang fluktuatif. Tahun 2019 terjadi 136 kasus kematian bayi dari 19.626 kelahiran hidup atau sebesar 6,9/1.000 kelahiran hidup.



Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.43
**Perkembangan Jumlah Kasus dan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

Tabel 2.53
**Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ayah	9	5	5	5	10
2	Buayan	8	8	5	2	2
3	Puring	12	8	14	6	6
4	Petanahan	5	11	14	6	4
5	Klirong	10	7	9	12	8
6	Buluspesantren	6	13	5	5	9
7	Ambal	15	13	10	11	10

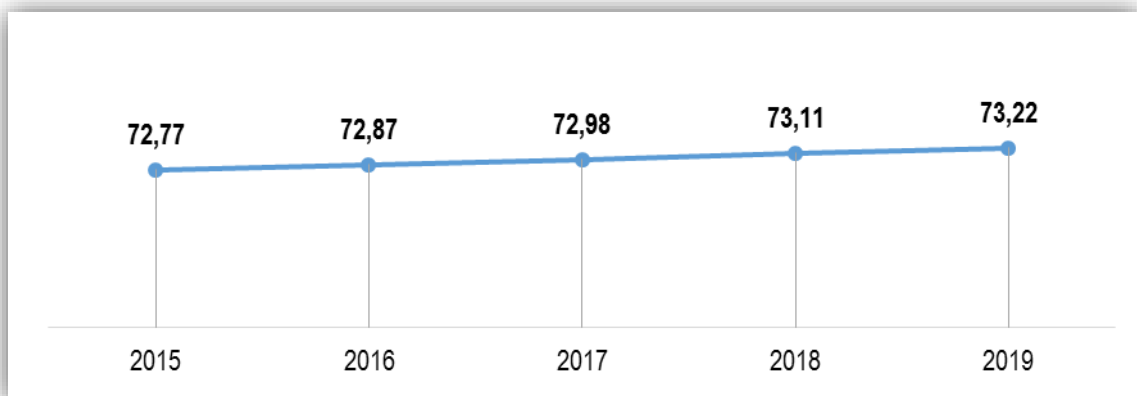
No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
8	Mirit	4	9	7	7	6
9	Bonorowo	3	1	3	3	4
10	Prembun	6	6	4	8	4
11	Kutowinanangun	2	1	4	7	2
12	Alian	3	9	5	6	6
13	Padureso	12	4	2	4	3
14	Poncowarno	2	5	2	0	6
15	Kebumen	22	11	10	5	10
16	Pejagoan	3	1	3	0	1
17	Sruweng	11	7	5	4	7
18	Adimulyo	5	8	2	2	0
19	Kuwarasan	9	7	2	4	5
20	Rowokele	2	6	6	6	4
21	Sempor	14	10	8	4	6
22	Gombong	4	3	3	2	4
23	Karanganyar	9	2	0	0	1
24	Karanggayam	14	11	6	14	9
25	Sadang	2	4	5	4	2
26	Karangsambung	9	9	2	7	7
Total		201	179	141	134	136

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2020

Berdasarkan data per kecamatan didapatkan gambaran kecenderungan angka kematian bayi tinggi selama kurun waktu 2015-2019 antara lain Kecamatan Kebumen, Ambal, dan Karanggayam. Ketiga kecamatan tersebut hampir selalu menempati jumlah kasus kematian bayi tertinggi selama 2015-2019. Faktor penyebab kematian bayi antara lain disebabkan oleh keterlambatan penanganan, penyakit penyerta, kondisi kesehatan serta status gizi ibu dan bayi. Upaya penurunan AKB antara lain melalui peningkatan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mengetahui adanya kelainan, penyakit, pemeliharaan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas bayi. Selain itu pendampingan kelas ibu dan balita, optimalisasi peran Posyandu, intervensi gizi terhadap bayi, termasuk penanganan kasus gizi buruk.

Usia Harapan Hidup (UHH)

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari Usia Harapan Hidup masyarakat. UHH tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, artinya derajat kesehatan masyarakat semakin baik. Masyarakat memiliki peluang hidup yang lebih panjang dan sehat. Meskipun peningkatan UHH berkontribusi pada peningkatan proporsi penduduk usia lanjut karena kondisi kesehatan yang semakin baik. Pemerintah seharusnya menyusun kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat usia lanjut, agar tetap produktif pada usia lanjut.



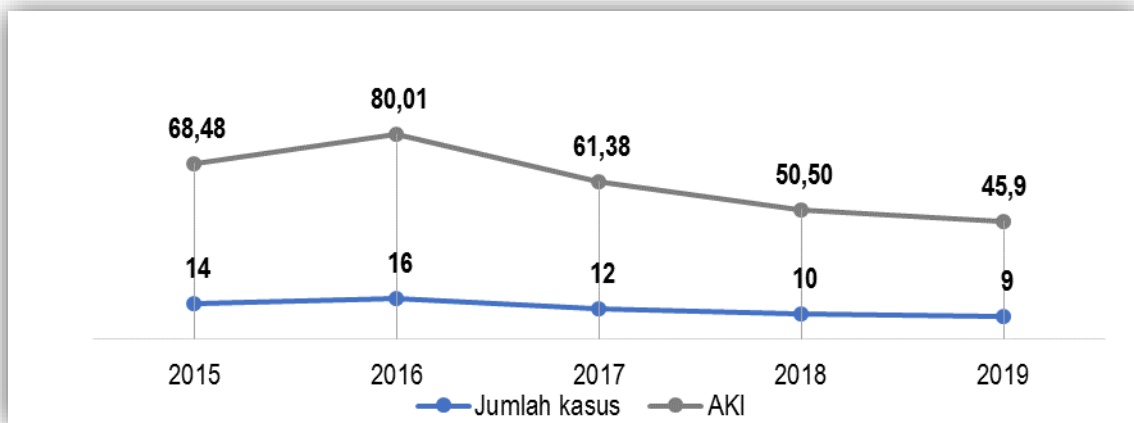
Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.44
Usia Harapan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Angka Kematian Ibu (AKI)

Selama periode tahun 2015-2019 capaian kinerja urusan kesehatan, pada ibu dan anak secara umum adalah tingginya AKI meskipun kinerjanya terlihat semakin baik dengan indikasi tren yang menurun. Kematian ibu menunjukkan jumlah wanita yang meninggal dikarenakan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas. Dilihat

dari perkembangan kasus kematian ibu cenderung mengalami penurunan kasus dari 12 kasus pada tahun 2017, menjadi 10 kasus tahun 2018 dan 9 kasus pada tahun 2019. Penurunan kasus ini menandakan terjadi peningkatan pelayanan antenatal cukup baik pada pelayanan ibu hamil K1, K4, maupun cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan. Prevalensi risiko KEK pada ibu hamil tahun 2019 sebesar 8,97 persen, dengan kata lain risiko yang cukup tinggi.



Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.45
**Perkembangan Jumlah Kasus dan Angka Kematian Bayi
 Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

Tabel 2.54
**Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan
 Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ayah	0	1	0	1	0
2	Buayan	1	0	0	1	0
3	Puring	1	0	1	1	0
4	Petanahan	1	1	1	0	1
5	Klirong	1	0	1	1	1
6	Buluspesantren	1	2	1	0	0
7	Ambal	0	3	1	1	1
8	Mirit	0	0	0	0	0
9	Bonorowo	0	0	0	0	0
10	Prembun	2	1	1	0	1



No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
11	Kutowinanangun	0	0	0	0	0
12	Alian	1	1	1	0	1
13	Padureso	1	0	0	0	0
14	Poncowarno	0	0	0	0	0
15	Kebumen	2	3	1	2	1
16	Pejagoan	1	1	2	0	1
17	Sruweng	0	0	2	0	1
18	Adimulyo	0	0	0	0	0
19	Kuwarasan	0	1	0	0	0
20	Rowokele	0	0	0	0	0
21	Sempor	0	1	0	1	0
22	Gombong	0	0	0	0	0
23	Karanganyar	1	0	0	0	0
24	Karanggayam	0	0	0	2	0
25	Sadang	1	1	0	0	0
26	Karangsambung	0	0	0	0	1
Total		14	16	12	10	9

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2020

Berdasarkan data per kecamatan didapatkan gambaran kecenderungan terjadi kasus angka kematian ibu selama 2015-2019 antara lain Kecamatan Kebumen, Ambal, Pejagoan, dan Prembun. Faktor penyebab kematian bayi antara lain disebabkan oleh penyakit penyerta, keterlambatan penanganan, dan faktor sosial ekonomi masyarakat. Penyebab kematian ibu melahirkan dan nifas lainnya adalah pendarahan, hipertensi, infeksi, dan pengetahuan ibu hamil mengenai jaga jarak kelahiran, maupun usia ideal hamil dan melahirkan. Selain itu ketersediaan layanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial/ Emergensi Komprehensif) dalam rangka penyelamatan ibu dan anak baru lahir melalui program rujukan berencana dalam satu wilayah masih terbatas. Kabupaten Kebumen baru memiliki 2 fasilitas layanan PONEK yaitu RSUD dr. Soedirman dan RSUD PKU Gombong.

Angka Kematian Ibu salah satunya dapat ditekan dengan pertolongan ibu bersalin oleh tenaga kesehatan. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2016 persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 96,08 persen meningkat menjadi 99,90 persen di tahun 2019. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
**Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	20.488	19.236	19.538	18.508	19.610
Jumlah total Ibu Bersalin	20.533	20.020	19.583	18.535	19.626
Persentase	99,78	96,08	99,77	99,85	99,90

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2020

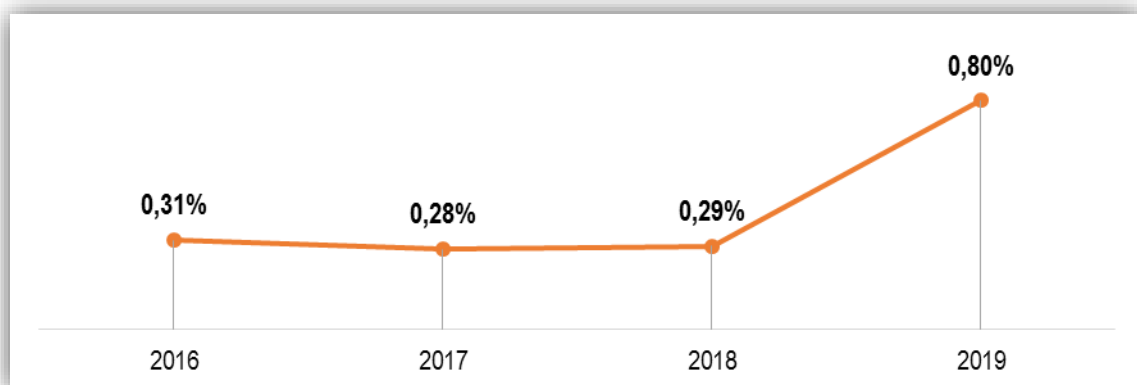
Upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, selain dengan meningkatkan upaya cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 hingga K4 sesuai standar, jaminan persalinan, optimalisasi kelas ibu hamil, juga perlu upaya promotif mengenai kesehatan ibu hamil seperti kunjungan rumah. Dari sisi sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan di setiap desa telah tersedia Poskesdes dan Posyandu untuk optimalisasi pelayanan antenatal.

Status Gizi

Selain AKI dan AKB, masalah gizi masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Kebumen hal ini ditandai masih ditemukannya kasus gizi

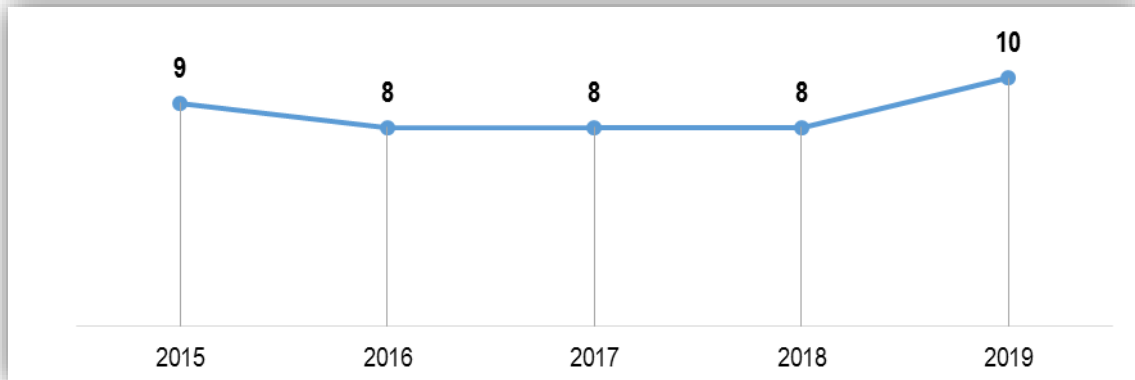
kurang, gizi buruk dan tingginya angka stunting. Kecukupan gizi menjadi salah satu hal yang penting guna mempersiapkan generasi sumberdaya manusia yang gemilang di masa yang akan datang. Pemenuhan gizi tidak melulu dapat diselesaikan dengan pemberian makanan tambahan dan vitamin. Namun perlu upaya edukasi dalam pola asuh pada anak mulai dari 1000 HPK. Optimalisasi peran PKD dan Posyandu sebagai wadah edukasi pada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan, selain itu kader kesehatan menjadi agen *screening* awal kejadian kasus di sekitarnya.

Persentase balita gizi kurang pada tahun 2016 mencapai 0,31 persen dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,80 persen. Peningkatan persentase gizi kurang tahun 2019 meningkat cukup drastis salah satunya disebabkan karena faktor ekonomi yang mengakibatkan asupan nutrisi yang diberikan kepada bayi kurang dari kebutuhan bayi. Faktor lain penyebab gizi kurang dan gizi buruk adalah penyakit penyerta pada bayi dan yang paling penting adalah pola asuh yang kurang baik mengakibatkan peningkatan kasus gizi buruk dan gizi kurang.



Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.46
Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2016-2019



Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.47
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2015-2019

Jumlah kasus balita gizi buruk pada tahun 2015 mencapai 9 kasus dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 10 kasus. Peningkatan jumlah kasus gizi buruk salah satunya disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung bawaan, TB paru, gagal tumbuh kembang, *down syndrome*, kelainan kongenital, dan HIV. Selain itu asupan nutrisi yang kurang yang disebabkan antara lain faktor ekonomi keluarga dan pola asuh yang memengaruhi tingkat gizi pada anak.

Isu stunting adalah isu strategis bidang kesehatan yang juga harus menjadi perhatian seluruh pihak karena akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Stunting disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang terkait dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Pada Februari 2020 berdasarkan data EPPGBM tercatat 15,39 persen anak termasuk dalam kriteria stunting di Kabupaten Kebumen.

Penanganan stunting telah melibatkan seluruh *stakeholder* mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Besarnya prevalensi stunting menjadikan Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten prioritas nasional dalam penanganan stunting.

Angka Kesakitan

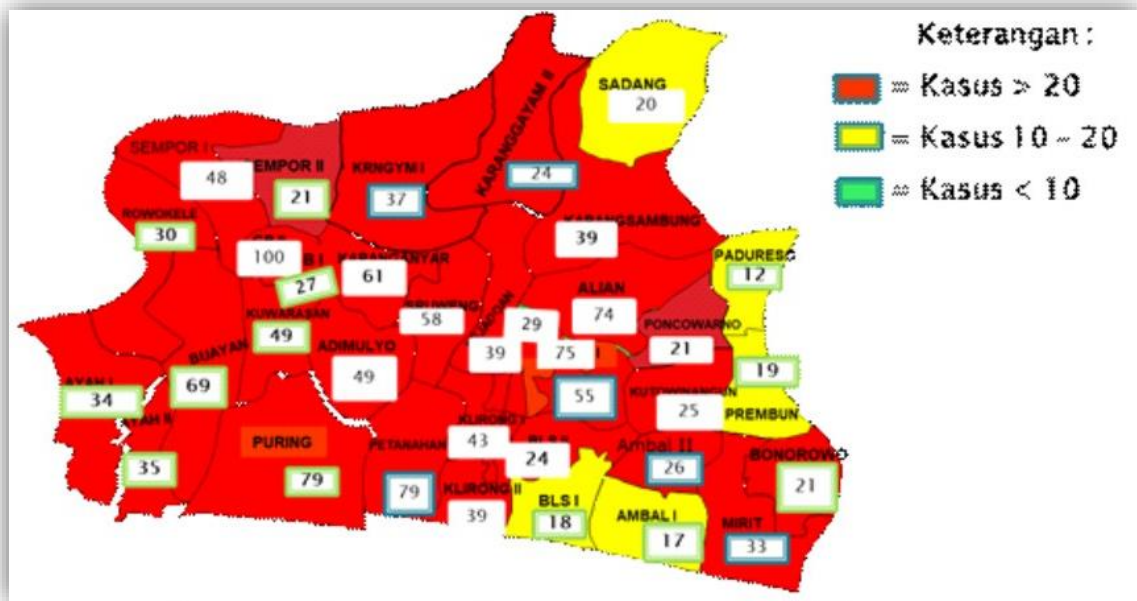
Hasil Susenas 2019 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 20,19 persen atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 sebesar 13,16 persen. Angka Kesakitan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi. Semakin tinggi Angka Kesakitan menunjukkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pengendalian penyakit baik penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Prevalensi penyakit menular utama di Kebumen adalah kasus HIV/AIDS, TB, dan Demam Berdarah di Kebumen masih tinggi. Faktor penyebabnya antara lain adalah kurangnya kesadaran akan kesehatan reproduksi, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan yang tidak sehat.

Tabel 2.56
Perkembangan Kasus Penyakit Menular 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Case Notification Rate</i> semua kasus TB per 100.000 penduduk	129	135	156	145	180
Kasus baru HIV AIDS	107	178	267	219	184
Angka Kesakitan DBD	52,7	52,7	4,26	3,0	17,8

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2020

Perkembangan penemuan HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2003 sampai dengan Mei 2020 tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah kasus terbesar ada di Kecamatan Gombang, Kebumen, Alian, dan Buayan. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kebumen termasuk yang terbesar di wilayah Jawa Tengah. Sebaran kasus HIV/AIDS per kecamatan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.48
**Sebaran Kasus HIV/AIDS per Kecamatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

Kasus persebaran penyakit TB yang terdaftar dan diobati serta angka kesakitan DBD berdasarkan kecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.57.



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 2.57
Perkembangan Kasus Penyakit Menular (TB dan DBD) per Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD
1	Ayah	21	5	20	19	16	4	28	6	28	2
2	Buayan	13	4	7	118	3	2	20	4	27	9
3	Puring	18	5	22	44	12	0	19	0	28	5
4	Petanahan	22	4	20	3	29	2	32	0	37	2
5	Klirong	13	16	8	20	7	3	22	1	22	6
6	Buluspesantren	11	5	8	14	7	1	10	0	11	4
7	Ambal	31	5	9	14	28	0	30	0	30	2
8	Mirit	15	4	14	4	31	0	14	0	14	26
9	Bonorowo	9	0	21	0	19	0	22	0	22	7
10	Prembun	11	2	3	0	7	0	9	0	8	14
11	Kutowinanangun	17	1	1	5	20	1	10	1	14	3
12	Alian	13	7	20	16	2	1	31	2	41	10
13	Padureso	5	0	12	2	9	1	9	0	9	14
14	Poncowarno	7	0	7	1	8	0	9	0	9	1
15	Kebumen	38	52	16	34	32	6	46	3	43	26
16	Pejagoan	15	16	16	5	18	5	12	0	14	10
17	Sruweng	6	14	2	16	18	0	17	4	17	13



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

No	Kecamatan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD	Jumlah Kasus TB Yang Terdaftar dan Diobati	DBD
18	Adimulyo	10	5	10	7	10	3	11	3	11	6
19	Kuwarasan	13	14	11	0	17	2	30	2	30	12
20	Rowokele	21	3	10	11	11	0	9	1	13	4
21	Sempor	32	17	26	88	18	5	23	7	14	21
22	Gombong	22	32	16	124	28	15	16	6	17	12
23	Karanganyar	5	4	16	27	17	1	18	1	18	14
24	Karanggayam	31	0	29	3	33	4	33	0	33	14
25	Sadang	4	0	4	0	1	1	8	0	8	2
26	Karangsambung	7	0	11	13	8	1	15	0	17	8
Total		410	215	339	588	409	58	503	41	535	247

Upaya yang telah dilakukan untuk menekan Angka Kesakitan penyakit menular adalah dengan menggiatkan konseling dan penyuluhan, *screening* calon pengantin, pemeriksaan VCT di Puskesmas dan rumah sakit, serta bekerjasama dengan NGO dalam pengawasan minum obat dan penemuan kasus baru untuk TB. Deteksi dini menjadi hal yang penting dalam penanganan HIV/AIDS dan TB yang seperti fenomena gunung es penyakit yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari estimasi kasus yang ada di masyarakat.

Pola hidup masyarakat yang kurang sehat dan rendahnya kesadaran untuk menjaga kebugaran dengan berolahraga meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas, stroke, jantung, kanker dan diabetes. Selain itu kebiasaan merokok menjadi salah satu pemicu penyakit tidak menular seperti gangguan pernafasan, kanker, penyakit paru dan jantung. Peningkatan kasus penyakit tidak menular menimbulkan dampak ekonomi dan produktivitas karena kasus PTM ditemukan pada penduduk usia produktif. Cakupan pemeriksaan PTM oleh tenaga kesehatan baru dilakukan ketika sudah dalam kondisi lanjut, upaya preventif untuk PTM masih kurang.

Upaya yang telah dilakukan antara lain optimalisasi Posbindu di desa, Puskesmas, maupun di lingkungan kerja. Jumlah Posbindu PTM di Kabupaten Kebumen sebanyak 500 pos tersebar di seluruh kecamatan. *Screening* PTM menjadi hal yang terus diupayakan melalui pendekatan keluarga melalui Posbindu. Peningkatan kasus PTM mengakibatkan penurunan produktivitas penduduk dan berdampak pada kondisi ekonomi daerah. Selain itu GERMAS

menjadi salah satu gerakan promotif preventif yang seyogyanya menjadi budaya bagi masyarakat demi generasi yang sehat dan unggul. Tahun 2019 di temukannya kasus ODGJ sebanyak 34 kasus, hal ini perlu mendapatkan perhatian. Data penyakit menular tersaji dalam tahun 2015-2018 dan tahun 2019 menggunakan format laboratorium baru dengan sajian berbeda. Secara rinci jumlah kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Penyakit Tidak Menular Kebumen Tahun 2015-2019

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ca servik	21	6	45	444	-
2	Ca Mamae	44	40	243	380	-
3	Ca Hepar	1	4	12	9	-
4	Ca Paru	0	2	11	11	-
5	ID DM	230	210	273	915	-
6	ND DM	1.986	1.586	7.001	48.824	-
7	AMI	12	14	148	168	-
8	Dekom Kordis	467	190	871	1.019	-
9	Hemoragik	78	40	552	297	-
10	Non-Hemoragik	59	132	1.496	1.322	-
11	PPOK	119	175	1.877	1.755	-
12	Asma Bronkial	2.085	1.101	3.214	3.274	-
13	Psikosis	431	589	406	904	-
14	Hipertensi	-	-	-	-	112.990
15	Diabetes	-	-	-	-	12.571
16	Tumor Benjolan	-	-	-	-	35
17	ODGJ	-	-	-	-	34
18	Iva positif	-	-	-	-	88

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2020

Kesehatan Lingkungan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu dasar menjaga kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kesehatan

lingkungan. Kesehatan lingkungan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya kasus stunting di daerah. Akses air bersih dan sanitasi yang baik meminimalisir infeksi yang mungkin terjadi pada masyarakat termasuk anak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) salah satunya mencapai target *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Bebas BABS).

Pencapaian Desa ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten Kebumen cukup bagus. Program ini telah dimulai sejak tahun 2015 dan masuk dalam gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jumlah desa ODF di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 adalah 11 desa dan untuk tahun 2019 adalah 419 desa (91,08 persen). Angka ODF yang sudah tinggi di Kabupaten Kebumen baru menggambarkan akses sanitasi. Meskipun demikian, Kabupaten Kebumen masih perlu meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

Tabel 2.59
Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen Sampai dengan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Desa					Total
		s/d 2015	2016	2017	2018	2019	
1	Ayah	0	0	0	5	13	18
2	Buayan	0	0	5	4	5	14
3	Puring	0	1	2	5	15	23
4	Petanahan	1	0	3	4	13	21
5	Klirong	4	0	3	7	11	25
6	Buluspesantren	3	2	2	8	7	22
7	Ambal	3	1	4	8	16	32

No	Kecamatan	Jumlah Desa					Total
		s/d 2015	2016	2017	2018	2019	
8	Mirit	2	0	2	0	18	22
9	Bonorowo	1	0	0	2	8	11
10	Prembun	0	0	5	5	3	13
11	Padureso	1	2	1	2	3	9
12	Poncowarno	3	1	1	1	4	10
13	Kutowinangun	1	0	1	7	10	19
14	Alian	1	0	1	3	11	16
15	Kebumen	1	0	8	11	9	29
16	Adimulyo	2	1	4	0	16	23
17	Pejagoan	0	1	4	4	4	13
18	Sruweng	2	1	2	5	11	21
19	Kuwarasan	0	4	9	3	6	22
20	Rowokele	2	0	0	3	6	11
21	Sempor	0	0	0	8	2	10
22	Gombong	0	1	7	6	0	14
23	Karanganyar	1	1	3	3	3	11
24	Karanggayam	0	0	0	2	5	7
25	Karangsambung	1	0	0	1	0	2
26	Sadang	0	0	0	1	0	1
Total		29	16	67	108	199	419

Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Pelayanan Kesehatan yang prima perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Pandemi COVID-19 menyadarkan bahwa sistem kesehatan pemerintah daerah masih sangat lemah. Dari sisi sarana kesehatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan masih jauh dari ideal, rasio dokter, perawat pun dalam kondisi jauh dari ideal. Ketika terjadi krisis maka sektor Kesehatan seperti gagap menghadapi pandemi. Pemerintah Daerah perlu segera menyusun kebijakan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan kesehatan termasuk pendukungnya. Salah satu pelayanan dasar

kesehatan adalah Posyandu. Rasio Posyandu dan balita di Kabupaten Kebumen cukup baik yaitu 1 : 25 per 1000 balita. Total Posyandu yang aktif pada tahun 2019 adalah 1.909 atau sekitar 90,2 persen. Rasio Posyandu dan balita di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60
Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Posyandu	2.115	2.114	2.119	2112	2.117
Jumlah Balita	88.200	87.636	85.612	85.239	85.271
Rasio Posyandu per 1000 balita	1 : 24	1 : 24	1 : 25	1 : 25	1 : 25

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen dan SIPD, 2020

Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen cenderung menurun pada kurun waktu 2015-2019. Rasio Puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk relatif stagnan. Pada tahun 2015 sebesar 1 : 38.465 penduduk atau 1 Puskesmas melayani 38.465 penduduk menurun menjadi 1 Puskesmas melayani 39.671 penduduk di tahun 2019. Nilai rasio tersebut masih belum dalam kondisi ideal rasio Puskesmas per satuan penduduk, yaitu 1 : 30.000. Meskipun demikian, keberadaan Pustu dan Poliklinik yang tersebar secara merata dapat membantu masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Rasio Puskesmas dan klinik per satuan penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
**Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Puskesmas	35	35	35	35	35
2	Jumlah Puskesmas Keliling	91	91	35	35	30
3	Jumlah Poliklinik/PKD/ Polindes	347	347	385	385	385
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	74	76	76	76	65
5	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	456	458	496	496	485
6	Jumlah Penduduk	1.346.309	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.388.490
7	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 38.465	1 : 38.812	1 : 38.997	1 : 39.292	1 : 39.671

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020

Jika dilihat dari sebarannya, terutama pada wilayah terluar perlu dikembangkan Puskesmas rawat inap untuk mendekatkan pelayanan rujukan pada masyarakat. Selain itu dalam mendukung pelaksanaan sistem rujukan berjenjang perlu peningkatan pelayanan Puskesmas dan pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen stabil selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 1 rumah sakit melayani lebih dari 120.000 penduduk. Meskipun demikian jumlah rumah sakit berkurang dari 12 unit pada tahun 2015 menjadi 11 unit di tahun 2019. Rasio rumah sakit per

satuan penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62
**Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah RSUD	1	2	2	2	2
Jumlah RS Swasta	11	11	9	9	9
Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh RS	12	13	11	11	11
Jumlah Penduduk	1.346.309	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.388.490
Rasio	1 : 112.192	1 : 104.496	1 : 124.082	1 : 125.020	1 : 126.226

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020

Rasio dokter dan penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 cukup fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2019 rasionya dapat menurun 1 : 6.493 atau sekitar 1 dokter melayani 6.493 di tahun 2018 menjadi 1 : 7.307 atau 1 dokter melayani 7.307 penduduk. Nilai rasio pada tahun 2019 tersebut masih jauh dari kondisi ideal rasio dokter dan penduduk yaitu 1 : 2.500. Perlunya investasi sumberdaya manusia kesehatan terutama dokter untuk mencapai rasio ideal guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen. Rasio dokter dan penduduk di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63

Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Dokter Umum	238	277	222	211	190
Jumlah Dokter Gigi	50	56	27	40	49
Jumlah Penduduk	1.346.309	1.358.448	1.364.905	1.370.157	1.388.490
Rasio Dokter/Penduduk	1 : 4.674	1 : 4.079	1 : 5.481	1 : 7.307	1 : 6.493

Sumber: Dinkes Kab. Kebumen, 2020, data diolah

Jaminan Kesehatan

Salah satu komponen penting dalam sistem kesehatan adalah penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan bantuan pembayaran premi PBI JKN maupun penyediaan jaminan kesehatan daerah. Program ini merupakan salah satu program bantuan sosial yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari goncangan, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin. Meskipun program ini belum menyentuh seluruh kelompok rentan, dan masih memiliki beberapa kelemahan dari sisi data penerima yang belum terintegrasi secara optimal dengan data kemiskinan, kepatuhan pemberi kerja, dan jumlah peserta yang tidak aktif karena iuran masih cukup banyak.

Tabel 2.64

Jaminan Kesehatan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PBI	644.386	719.233	764.783	803.523	802.532
PPU	86.051	71.635	77.681	80.739	205.551
PBPU/Mandiri	36.368	74.407	93.339	120.733	124.789

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Bukan Pekerja	30.000	29.689	29.216	29.301	23.846
Total	796.805	894.964	965.019	1.034.296	1.156.718
Jumlah Penduduk	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.385.577	1.395.969
Persentase	58,66	65,57	70,17	74,65	82,86

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan Prasarana Umum

a) Jalan dan Jembatan

Untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera dibutuhkan penyediaan infrastruktur jalan yang baik. Infrastruktur jalan di Kabupaten Kebumen terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 60,72 km, Jalan Provinsi sepanjang 30,09 km, Jalan Kabupaten sepanjang 960,358 km dan jalan non-satus sepanjang 60 km.

Sementara itu, kondisi Jalan Kabupaten semakin membaik selama 5 tahun terakhir. Hal itu dapat dilihat proporsi jalan kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 45,96 persen meningkat menjadi 54,69 persen di tahun 2019. Panjang dan proporsi jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Kondisi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Panjang Jalan (Km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kondisi Baik	447,82	590,56	508,71	523,36	525,233
2	Kondisi Sedang	199,61	89,720	177,45	160,11	187,625
3	Kondisi Rusak Ringan	150,21	126,57	121,13	114,24	121,138

No	Uraian	Panjang Jalan (Km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Kondisi Rusak Berat	176,69	168,30	153,07	162,65	126,362
5	Jalan secara keseluruhan	974,33	975,15	960,36	960,36	960,358
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	45,96	60,56	52,97	54,50	54,69
7	Proporsi Kondisi Sedang (%)	20,49	9,20	18,48	16,67	19,54
8	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	15,42	12,97	12,61	11,90	12,61
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	18,13	17,25	15,94	16,94	13,16

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2020

Jenis permukaan jalan kabupaten sebagian besar sudah berupa aspal (82,40 persen), diikuti kerikil (11,64 persen), beton (2,95 persen), tanah (2,54 persen) dan belum dirinci (0,47 persen).

Tabel 2.66
Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Uraian	Aspal	Beton	Kerikil	Tanah	Tidak Dirinci	Jumlah
1	Panjang (km)	791,3265	28,371	111,8125	24,372	4,476	960,358
2	Persentase	82,40%	2,95%	11,64%	2,54%	0,47%	

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2020

Kondisi jembatan kabupaten semakin membaik selama 5 tahun terakhir. Adapun kondisi jembatan tahun 2019 dalam kondisi baik 67,32 persen, kondisi sedang 20,86 persen, kondisi rusak ringan 9,46 persen dan kondisi rusak berat 2,36 persen.

Tabel 2.67
Kondisi Jembatan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Jembatan	432	432	719	719	719
2	Persentase Jembatan Kondisi Baik	67,36	70,83	64,26	63,14	67,32
3	Persentase Jembatan Kondisi Sedang	23,38	22,69	20,31	20,58	20,86
4	Persentase Jembatan Kondisi Rusak Ringan	7,41	6,25	12,66	13,21	9,46
5	Persentase Jembatan Kondisi Rusak Berat	1,85	0,23	2,78	3,06	2,36

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2020

b) Jaringan Irigasi

Kabupaten Kebumen memiliki daerah irigasi kewenangan kabupaten seluas 8.621 ha dengan jumlah 172 buah Daerah Irigasi (PermenPUPR 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi). Selain itu Kabupaten Kebumen juga memiliki daerah irigasi kewenangan pusat yaitu DI Sempor (6.478 ha), DI Serayu (380 ha) dan DI Waduk Wadaslintang (21.422 ha). Terdapat juga daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Buniayu (180 ha). Daerah irigasi di Kabupaten Kebumen secara lengkap disajikan pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen

No	Daerah Irigasi	Luas (ha)	Persentase
1	172 DI Kabupaten	8621	23,2%
2	Sempor (Pusat)	6478	17,5%
3	Wadaslintang (Pusat)	21422	57,8%
4	Serayu (Pusat)	380	1,0%
5	Buniayu (Prov)	180	0,5%
		37081	100,0%

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2020

Sementara itu, jika dilihat kondisi jaringan irigasi Kabupaten Kebumen, pada tahun 2019 kondisinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik yang meningkat dari 60,00 persen di tahun 2018 menjadi 68,18 persen pada tahun 2019. Selain itu, proporsi jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat juga menurun dari 30,09 persen pada tahun 2018 menjadi 27,65 persen di tahun 2019. Panjang saluran irigasi Kabupaten Kebumen tahun 2018-2019 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69
Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen

No	Uraian	2018	2019
1	Irigasi Teknis Sekunder (m)	184.418	184.418
2	Irigasi Teknis Tersier (m)	28.300	28.300
3	Irigasi Kondisi Baik (%)	60,00	68,18
4	Irigasi Kondisi Sedang (%)	3,79	3,20
5	Irigasi Kondisi Rusak Ringan (%)	1,05	0,97
6	Irigasi Kondisi Rusak Berat (%)	30,09	27,65

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2020

Penataan Ruang

Dalam rangka mengikuti dinamika pembangunan dan amanat UU Tata Ruang, Kabupaten Kebumen melakukan Proses Penyusunan Revisi RTRW. Pada tahun 2019, Dokumen Revisi RTRW sudah memperoleh rekomendasi peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, kemudian pada tahun 2020 diharapkan untuk memperoleh Persetujuan Substansi Gubernur serta Kementerian ATR/BPN, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda Revisi RTRW pada tahun 2021 atau

2022. Dalam Dokumen Revisi RTRW, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen bertujuan mewujudkan wilayah kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan, aman, nyaman, dan produktif, kemudian dijabarkan menjadi rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan rencana kawasan strategis wilayah.

Tabel 2.70
Kondisi Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Uraian	Doku- men Evalu- asi	Penin- jauan Kem- bali	Materi Teknis	Reko- mendasi Peta BIG	Proses Rekom Gub	Proses Persub ATR	Proses Evalu- asi Gub	Perda Baru
1	Revisi RTRW Kebumen	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
2	RDTR Perkotaan Kebumen	-	-	✓	-	-	-	-	-
3	RDTR Perkotaan Gombong	-	-	✓	-	-	-	-	-
4	RDTR Perkotaan Karanganyar	-	-	✓	-	-	-	-	-
5	RDTR Perkotaan Pembun	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RDTR Perkotaan Kutowinangun	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kajian Strategis Tata Ruang - Kota Pusaka - Geopark - Kawasan Industri	-	-	✓	-	-	-	-	-

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2020

Berdasarkan amanat UU No. 26/2007, mewajibkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen. Amanat

tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan ruang perkotaan yang nyaman bagi masyarakat. Luasan RTH publik di Kabupaten Kebumen tahun 2017 sebesar 2.267 ha atau sebesar 14,68 persen dari luas perkotaan di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.71
Kondisi RTH Publik Di Kawasan Perkotaan Kebumen Tahun 2017

Luas Perkotaan (ha)	Luas RTH (ha)	Persentase	Luas Kebutuhan RTH Publik	Kekurangan (ha)
15.444,03	2.267,79	14,68	3.088,81	821,02

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2017

Tabel 2.72
Peruntukan Ruang di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan luas wilayah per HPL/HGB	-	-	-	-	-
2	Persentase Ruang Terbuka Hijau	17,16	17,18	17,18	17,18	17,45*
3	Persentase Ruang Publik yang berubah Peruntukannya	-	-	-	-	-

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2020

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.73
Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,2423	0,2463	0,2508	0,2511	0,2540*
2	Rasio luas permukiman layak huni	0,9863	0,9869	0,9884	0,9900	0,9909*

3	Persentase Luas Permukiman Kumuh	0,35	0,33	0,29	0,25	0,23*
---	----------------------------------	------	------	------	------	-------

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2020 *) Data perkiraan

a) Kepemilikan Rumah

Status *backlog* kepemilikan rumah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 angka *backlog* sebesar 28.145 meningkat menjadi 49.887 di tahun 2019. *Backlog* yang besar di tahun 2019 tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Status *backlog* kepemilikan rumah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2018-2019 secara lengkap tersaji pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74
**Status Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen
Tahun 2018-2019**

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah			296.854	321.597
Jumlah Rumah Tangga			324.999	371.484
<i>Backlog</i>	19.142	20.562	28.145	49.887

Sumber: Susenas, 2018 dan Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2020

b) Permukiman dan Kawasan Kumuh Perkotaan

Penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen selama dua tahun terakhir berjalan semakin baik. Hal ini terlihat dari persentase wilayah kumuh perkotaan dari 7,28 persen di tahun 2017 menurun menjadi 5,58 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat 322,356 ha kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen yang memerlukan penanganan.

Capaian kinerja penanganan kawasan kumuh perkotaan secara lebih lengkap tersaji pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75
**Perkembangan Kawasan Kumuh Perkotaan yang Tertangani
Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019**

No	Uraian Luas (ha)	2017	2018	2019
	Luas Area Permukiman	32.217,82	32.217,82	32.217,82
1	a. Permukiman Perkotaan	5.776,96	5.776,96	5.776,96
	b. Permukiman Perdesaan	26.440,85	26.440,85	26.440,85
2	Luas Permukiman Kumuh perkotaan	442,072	420,606	372,601
3	Luas Permukiman kumuh perkotaan yang tertangani	21,466	48,005	50,245
4	Luas permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani	420,626	372,601	322,356
5	Persentase wilayah kumuh perkotaan	7,28%	6,45%	5,58%

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2020

c) Persentase Rumah Layak Huni

Penanganan rumah tidak layak huni selama kurun waktu 2015-2019 di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari persentase rumah tidak layak huni yang berkurang dari 7,95 persen di tahun 2015 berkurang menjadi 1,96 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019 masih ada 6.012 rumah tidak layak huni dan diharapkan tuntas pada tahun 2021.

Tabel 2.76
Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rumah	306.885	306.885	306.885	306.885	306.885
2	Jumlah rumah layak huni	282.494	288.009	293.614	299.720	300.873
3	Persentase rumah layak huni	92,05*	93,85*	95,68*	97,67*	98,04*
4	Persentase rumah tidak layak huni	7,95*	6,15*	4,32*	2,33%*	1,96*

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2020 *) angka sementara

Kebutuhan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena adanya faktor geografi yaitu bencana alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Kabupaten Kebumen termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban terdampak bencana di Kabupaten Kebumen tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77
**Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana
di Kabupaten Kebumen Tahun 2018**

Jumlah Kejadian	Rusak berat	Rusak sedang	Rusak ringan	Rumah mendapat bantuan perbaikan akibat bencana
32	10	25	139	44

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2018

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kesinambungan dan kesuksesan pembangunan daerah membutuhkan prasyarat terjaganya kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi

ketenteraman di Kabupaten Kebumen selama periode 2016-2020 cukup kondusif. Hal ini terlihat dari jumlah tindak kriminal yang secara umum terus menurun. Pada tahun 2016, jumlah tindak kriminal di Kabupaten Kebumen adalah 229 kasus, dan menurun menjadi 152 kasus pada tahun 2019. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kebumen masih perlu melakukan usaha yang keras untuk menurunkan kasus narkoba yang angkanya cenderung meningkat dari 20 kasus pada tahun 2016 menjadi 35 kasus pada tahun 2019.

Berdasarkan rilis BNN pada tahun 2019, pada kasus penyalahgunaan narkoba, usia muda (remaja) merupakan usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, karena pada posisi ini, taraf pencarian jati diri dan cenderung masih bersifat labil. Pola pikir kaum muda kadangkala hanya bersifat instan, dan mencari yang termudah manakala menghadapi sesuatu yang sulit. Ada beberapa faktor sebagai penyebab atau yang memengaruhi perilaku seorang remaja, di antaranya: faktor pertemanan, perkembangan teknologi informasi, pengaruh budaya, dan gaya hidup hedonisme.

Beberapa faktor di atas adalah pemicu dalam setiap pola hidup maupun dasar pemikiran seseorang, termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba. Seringkali seorang anak muda terjebak dalam penyalahgunaan narkoba hanya karena faktor pertemanan sehingga memunculkan keinginan coba-coba. Pengaruh teman sebaya menjadi metode paling ampuh untuk urusan peredaran gelap narkoba. Seseorang begitu mudah terpengaruh oleh teman yang dianggap selevel. Selain itu perkembangan teknologi yang semakin canggih,

dari sisi negatifnya juga memunculkan potensi-potensi negatif pula. Pada masa seperti saat ini adalah boleh dibilang *"the nations without state"*, arus informasi begitu deras masuk tanpa melalui filter sehingga batas pergaulan boleh dibilang bebas tanpa batas.

Kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami dinamika yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini merupakan dampak terjadinya pandemi COVID-19 yang diperkirakan menyebabkan terjadinya krisis di berbagai aspek kehidupan. Menurunnya aktivitas perekonomian menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran ini akan berdampak pada aspek sosial, khususnya meningkatnya angka kriminalitas yang perlu diantisipasi. Angka kriminalitas di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2019 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78
Angka Kriminalitas Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kasus narkoba	20	18	23	35
2	Jumlah kasus pembunuhan	1	2	2	1
3	Jumlah kejahatan seksual	40	28	21	27
4	Jumlah kasus penganiayaan	3	7	7	9
5	Jumlah kasus pencurian	121	177	99	74
6	Jumlah kasus penipuan	44	32	17	6
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	1	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	229	264	170	152
9	Jumlah penduduk	1.358.448	1.364.905	1.370.157	1.385.577
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%

Sumber: Polres Kebumen, 2020 *) Data per 30 April 2020

Ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kebumen berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dan persentase penegakan Perda sebesar 100 persen selama tahun 2016-2020. Hal ini berarti setiap pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Kebumen selalu dilakukan penegakan untuk menimbulkan efek jera sehingga ketertiban umum di Kabupaten Kebumen senantiasa terjaga dengan baik. Namun demikian pada tahun 2019, terdapat kasus gangguan ketertiban umum yang cukup menyita perhatian publik, di antaranya:

- a. Bentrok antara warga dan TNI di wilayah Urut Sewu. Hal ini dipicu kegiatan pemagaran oleh TNI di wilayah pesisir selatan Kebumen sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Sesuai rencana, pemagaran akan dilaksanakan sepanjang sekitar 22,5 km di wilayah Urut Sewu, Kecamatan Buluspesantren yang diklaim sebagai tanah negara itu. Hingga kini, konflik perebutan tanah antara TNI dan warga pun terus berlanjut dan belum menemui titik temu meski sudah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak.
- b. Konflik penolakan kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di wilayah Kecamatan Adimulyo. Hal ini dipicu perbedaan ajaran, perbedaan ideologi, dan budaya menjadi salah satu masalah dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat, hingga menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat.

Sementara itu pada tahun 2019 juga terdapat permasalahan dalam menerapkan dan menegakkan peraturan daerah di Kabupaten Kebumen. Salah satu contoh konkritnya adalah peraturan daerah terkait retribusi pelayanan pasar, yang sudah ditetapkan pada awal tahun 2019 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati pelaksanaannya pada akhir 2019, namun dalam implementasinya di tahun 2020, terkendala karena adanya penolakan dari objek sasaran retribusi pelayanan pasar tersebut. Terjadi tarik ulur dan negosiasi terhadap penerapan besaran tarif retribusi tersebut, sehingga potensi pendapatan yang seharusnya bisa didapatkan tidak tercapai.

Tabel 2.79
Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penegakan Perda	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satpol PP Kab. Kebumen, 2020 *) Data asumsi/proyeksi

Pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk perlindungan masyarakat cenderung menurun pada tahun 2016-2020. Hal ini terlihat dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja per jumlah 10.000 penduduk yang menurun selama kurun waktu tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, rasio jumlah Polisi Pamong Praja sebesar 1,11. Nilai tersebut menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,45. Penurunan rasio ini disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan kenaikan jumlah aparaturnya Polisi Pamong Praja.

Sebaliknya, jumlah Polisi Pamong Praja semakin menurun karena pensiun. Sampai dengan tahun 2020, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) Satpol PP berjumlah 81 orang yang terdiri dari 55 ASN di Satpol PP dan 26 ASN pejabat Kasi Trantib di 26 kecamatan. Ketersediaan SDM Satpol PP sejumlah ini masih belum ideal apabila didasarkan pada Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, dimana jumlah ideal Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kebumen serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 orang. Angka ini didapatkan dari perhitungan total skor Kabupaten Kebumen sebesar 736 (masuk kategori interval 500-750). Untuk menutup kekurangan jumlah tenaga Satpol PP tersebut, diadakan tenaga Banpol sejumlah 91 orang, sehingga total ketersediaan tenaga Satpol PP sejumlah 172 orang. Meskipun demikian, masih terdapat selisih kurang ketersediaan ideal tenaga Satpol PP sejumlah 79 orang (minimal) sampai dengan 178 orang (maksimal).

Tabel 2.80
Perhitungan Jumlah Kebutuhan Tenaga Satpol PP
Berdasar Permendagri Nomor 60 Tahun 2012

No	Kriteria	Jumlah	Interval	Skala	Bobot	Nilai
A Kriteria Umum						116
1	Jumlah Penduduk	1.385.577	< 10 juta	400	6	24
2	Luas Wilayah	1.281,115 km ²	< 50.000 km ²	400	6	24
3	Jumlah APBD	Rp 2,8 Trilyun	> Rp 800 Milyar	1000	4	40
4	Rasio Belanja Aparatur	40%	30 – 50%	700	4	28
B Kriteria Teknis						620
1	Klasifikasi Besaran OPD	28	< 40	400	15	60
2	Jumlah Perda	> 100	> 100	1000	15	150
3	Jumlah Perbup	> 100	> 100	1000	15	150
4	Jumlah Desa/Kelurahan	460	> 100	1000	10	100

No	Kriteria	Jumlah	Interval	Skala	Bobot	Nilai
5	Tingkat Potensi Konflik Sosmas	88	Rendah	400	10	40
6	Jumlah Kecamatan	26	26	1000	5	50
7	Aspek Karakteristik Daerah	Nasional	Nasional	700	5	35
8	Kondisi Geografis	Kelautan	Kelautan	700	5	35
Jumlah Total (A + B)						736

Sumber: Data primer, diolah

Di tengah keterbatasan SDM aparatur, kinerja perlindungan masyarakat Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penanganan kebakaran masih baik dengan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK sebesar 15 menit pada tahun 2016-2020. Nilai tersebut merupakan nilai minimal waktu tanggap sesuai peraturan yang berlaku. Agar kinerja pelayanan umum perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen berjalan mantap, penurunan jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kebumen diimbangi dengan peningkatan jumlah Linmas. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk pada tahun 2016 sebesar 9.636 menjadi 10.033 di tahun 2020.

Tabel 2.81
**Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,11	0,58	0,49	0,47	0,45
2.	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	9.636	8.832	8.832	10.033	10.033
3.	Rasio Pos Kamling per jumlah desa/kelurahan	9	9	9	9	9
4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

Sumber: Satpol PP Kab. Kebumen, 2020 *) Data asumsi/proyeksi

6. Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa standar pelayanan pada SPM Sosial di Kabupaten/Kota meliputi:

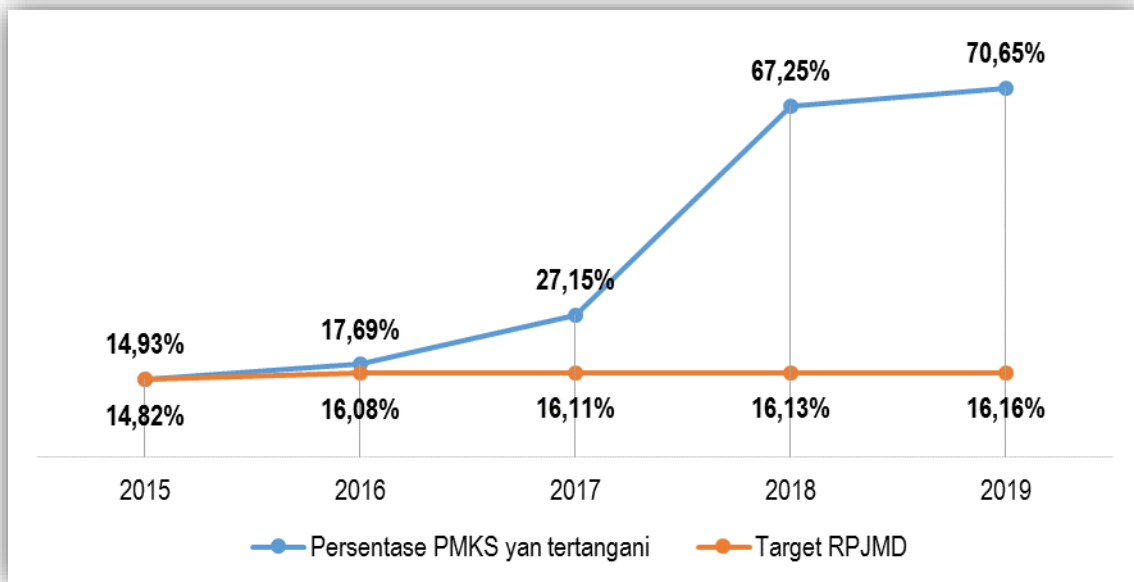
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

PMKS menjadi sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Selain juga, memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan yang mengancam tatanan hidup masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

SPM tersebut juga mengamanatkan adanya pusat kesejahteraan sosial yang memiliki paling sedikit satu orang relawan sosial yang tersertifikasi. Memiliki tempat sebagai pusat kegiatan bersama, tenaga pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan. SPM bidang sosial juga mengatur mengenai pengumpulan dan pengelolaan data sosial. Perlunya ada semacam sistem layanan rujukan terpadu sebagai pusat data, informasi dan pelayanan dalam upaya pemenuhan SPM sosial. Jika melihat ketersediaan PSKS masih belum mencukupi layanan pemenuhan SPM sosial dengan optimal. Selain itu PSKS seringkali bertugas ganda sebagai pengumpul dan pengelola data. Keterbatasan ini seyogyanya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan SPM bidang Sosial

Penanganan bidang sosial di Kabupaten Kebumen berfokus pada Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diselenggarakan melalui penanganan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 yang membagi kewenangan penanganan PMKS, sesuai peraturan tersebut kewenangan Kabupaten Kebumen menangani PMKS hanya yang ada di luar panti. Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS non-produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan pasca kejadian bencana di Kebumen. Sedangkan program rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS. Salah satu indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama dalam cakupan penanganan PMKS dari tahun ke tahun yaitu Capaian Indikator Kinerja Penanganan PMKS Tahun 2019 telah melampaui target RPJMD 2016-2021.



Sumber: Dinsos BPKB. Kab. Kebumen, 2020.

Gambar 2.49
Realisasi dan Target Penanganan PMKS Kebumen Tahun 2015-2019

Tabel 2.82

Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	14,93%	17,69%	27,14%	67,25%	70,65%
2.	Persentase PMKS yang tertangani	14,93%	17,69%	27,15%	67,25%	70,65%
3.	Jumlah PMKS yang ditangani	31.393	35.151	51.970	119.282	450.848
4.	Jumlah PMKS	210.208	198.651	191.430	195.564	638.092
5.	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial		7,40	7,40	22,22	22,22

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen, 2020

Jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi PMKS. Pada tahun 2016 PMKS yang tertangani 17,69 persen dari jumlah PMKS yang ada dan tahun 2019 meningkat 70,65 persen dari PMKS. Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan jaminan sosial tahun 2016 sebanyak 148 orang, tahun 2019 meningkat menjadi menjadi 400 orang. Pendataan PMKS telah diintegrasikan dengan basis data kesejahteraan sosial dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG). Adapun tabel perkembangan penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dilihat dalam Tabel 2.83.

Tabel 2.83

Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2015

No	Jenis PMKS	2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Balita Terlantar	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	222	
2	Anak dengan Kedisabilitas (ADK): Disabilitas Fisik dan Mental (Disabilitas Ganda)	152		152	153	
3	Anak dengan Kedisabilitas (ADK): Tuna Netra	55		55	55	
4	Anak dengan Kedisabilitas (ADK): Mental eks psikotik (Tuna Laras)	38		38	38	
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK): Mental Reterdasi (Tuna Grahita)	369		369	364	
6	Anak dengan Kedisabilitas (ADK): Tuna Rungu/Wicara (bisu tuli)	74		74	74	
7	Anak dengan Kedisabilitas (ADK): Tubuh (Tuna Daksa)	565		565	566	
8	Anak Jalanan	11		11	66	
9	Anak Terlantar	394		394	397	
10	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	21		21	21	
11	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	12		12	13	
12	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	4		4	4	
13	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	356		356	357	
14	Fakir Miskin	185.786		185.786	185.648	
15	Gelandangan	63		63	64	
16	Kelompok Minoritas	11		11	11	
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	86		86	91	
18	Komunitas Adat Terpencil	15		15	15	
19	Korban Bencana Alam	1.581		1.581	1.583	
20	Korban Bencana Sosial	1		1	1	
21	Korban Penyalahgunaan NAPZA	41		41	41	
22	Korban Tindak Kekerasan	1		1	1	
23	Korban <i>Trafficking</i>	2		2	2	
24	Lanjut Usia Terlantar	1.466		1.466	1.474	
25	Pekerja Migran Bermasalah	8		8	8	

No	Jenis PMKS	2015	2016	2017	2018	2019
Sosial (PMBS)						
26	Pemulung	391		621	393	
27	Pengemis	52		391	52	
28	Penyandang Disabilitas: Disabilitas Fisik dan Mental (Disabilitas Ganda)	271		271	273	
29	Penyandang Disabilitas: Mata (Tuna Netra)	92		92	92	
30	Penyandang Disabilitas: Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	172		172	173	
31	Penyandang Disabilitas: Mental Reterdast (Tuna Grahita)	780		780	784	
32	Penyandang Disabilitas: Bisu Tuli (Tuna Wicara)	86		86	86	
33	Penyandang Disabilitas: Tubuh (Tuna Daksa)	1.476		1.476	1.479	
34	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2.382		2.382	2.385	
35	Tuna Susila	11		11	11	

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen, 2020

Sementara itu, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah Tagana menjadi 45 orang pada tahun 2019 dan jumlah pendamping PKH menjadi 259 orang pada tahun 2019, walaupun jumlah PSM menurun menjadi 71 orang pada tahun 2019. Keberadaan PSKS diharapkan dapat membantu menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen lebih baik. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dimiliki masih belum cukup untuk menangani keseluruhan masalah sosial yang ada di Kabupaten Kebumen. Sinergitas semua *stakeholder* terkait, dan aksi kolaboratif menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan masalah sosial.

Tabel 2.84

Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kebumen

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	98	98	98	98	71
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	460	460	460	460	460
Pelaku Usaha kesejahteraan sosial	26	26	26	26	27
Keperintisan dan Kepahlawanan	1	1	1	1	1
Jumlah Tagana	11	11	11	11	45
Jumlah Pendamping PKH	113	162	146	236	259

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen, 2020

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non-Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan:

1. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan telah teratasi. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi output produksi.

Angkatan Kerja

Menurut BPS penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun

sementara tidak bekerja dan pengangguran. Berdasarkan data Sakernas Tahun 2019 terdapat 616.494 penduduk termasuk dalam angkatan kerja terbuka, 587.170 penduduk bekerja atau sebesar 65,22 persen dan 29.324 atau 3,26 persen adalah pengangguran terbuka. Dari jumlah penduduk yang bekerja di dalamnya termasuk yang bekerja paruh waktu maupun tidak. Secara rinci data mengenai angkatan kerja, penduduk bekerja dan pengangguran dapat dilihat dalam Tabel 2.85. Persentase penduduk bekerja cukup fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, demikian juga terkait pengangguran terbuka.

Tabel 2.85
Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Pengangguran

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja		Pengangguran	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2015	616.089	590.568	67,51	25.521	2,92
2016	617.637	593.002	67,79	24.635	3,99
2017	593.658	560.548	63,11	33.110	3,73
2018	586.034	553.677	61,91	32.357	3,62
2019	616.494	587.170	65,22	29.324	3,26

Sumber: BPS, 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK menurut BPS adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja dan mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Lebih lanjut semakin tinggi TPAK menunjukkan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Persentase TPAK

pada tahun 2019 sebesar 68,48 persen yaitu sebesar 65,22 persen bekerja dan 3,26 persen penganggur terbuka. TPAK naik sebesar 2,95 persen jika dibandingkan tahun 2018. Angka ini menjadi peluang untuk peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Secara lebih rinci perkembangan persentase TPAK dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 2.86 (data tahun 2016 tidak tersedia karena BPS tidak melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional tingkat Kabupaten Kebumen).

Tabel 2.86
Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase TPAK 2015-2019

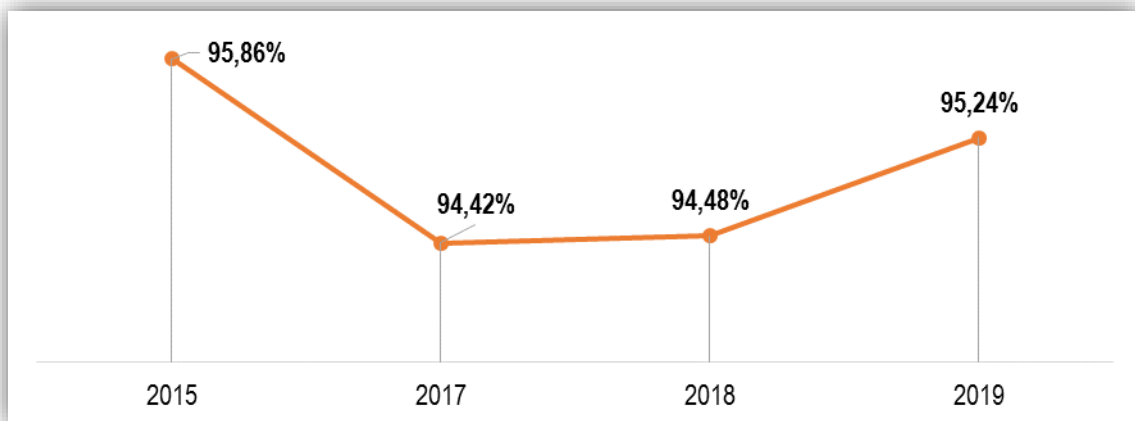
No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Persentase TPAK
1	2015	616.089	70,43
2	2017	593.658	66,84
3	2018	586.034	65,53
4	2019	616.494	68,48

Sumber: BPS, 2020

Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja adalah persentase dari penduduk bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kemampuan seseorang dapat terserap oleh pasar kerja. Data tahun 2019 menunjukkan peningkatan keterserapan angkatan kerja bekerja dibandingkan pada tahun 2018, meskipun angka ini lebih rendah dari tahun 2015 (lihat Gambar 2.50; data tahun 2016 tidak tersedia karena BPS tidak melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional tingkat Kabupaten Kebumen). Semakin baik kesempatan kerja di suatu wilayah menggambarkan kondisi

ketenagakerjaan di suatu daerah semakin baik. Meskipun kesempatan kerja semakin baik, namun berdasarkan Sakernas Tahun 2019, masih terdapat sekitar 36 persen atau sebesar 210.297 orang bekerja paruh waktu, dan sekitar 64 persen atau sejumlah 376.873 orang bekerja purna waktu.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.50
Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

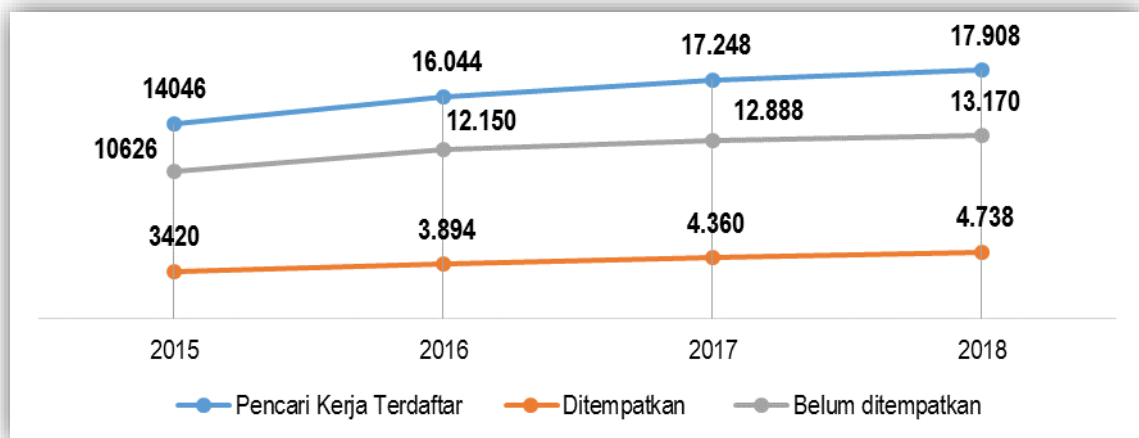
Seperti terlihat pada Tabel 2.87 yang menunjukkan setiap tahun Kabupaten Kebumen meluluskan angkatan kerja baru berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Jumlah pencari kerja terdaftar dalam empat tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2019, jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 17.908 orang dengan rata-rata berkualifikasi pendidikan SLTA/ sederajat dengan jumlah 14.542. Jumlah tenaga kerja yang dapat disalurkan sebanyak 4.738 pencari kerja atau sekitar 26,45 persen.

Tabel 2.87
**Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	SD	76	314	52	349
2	SLTP	825	1282	54	978
3	SLTA	11.465	12.570	14.800	14.542
4	S1	1.680	1.878	2.342	2.039
Jumlah		14.046	16.044	17.248	17.908

Sumber: Kebumen Dalam Angka, 2019

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kebumen pada Dinas Tenaga Kerja dan KUKM dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada Gambar 2.23 dapat dilihat bahwa dari jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan ada sekitar 74 persen - 75 persen dari total pencari kerja terdaftar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen masih sangat rendah.



Gambar 2.51
**Jumlah Pencari Kerja Terdaftar, Ditempatkan dan Belum Ditempatkan
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018**

Kesenjangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja mendorong tingginya angka migrasi dari desa ke kota besar dan Angka Pengangguran Terbuka (akan dijelaskan pada bagian Tingkat Pengangguran Terbuka). Sedangkan, tenaga kerja yang terserap oleh pasar kerja didominasi oleh lulusan SD/MI yaitu mencapai 271.858. Selain itu, lulusan SMP/MTs sebanyak 110.556 orang, SMA/MA sebanyak 44.312 orang, diploma 10.381 dan universitas 36.076 orang dan hal ini masih didominasi tenaga kerja dengan pendidikan tertinggi menamatkan SD/MI.

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2019, penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, kemudian disusul oleh sektor perdagangan restoran dan perhotelan, serta sektor manufaktur. Sektor-sektor tersebut berkarakter padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, namun kelemahannya sektor-sektor tersebut tidak memberikan upah yang layak. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan sektor utama dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88
**Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kebumen 2015-2019**

Sektor	2015	2017	2018	2019
Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perikanan	36,82	23,3	23,83	33,71
Pertambangan dan Penggalian	1,11	1,05	0,98	0,37
Manufaktur	20,13	20,09	22,69	21
Listrik Gas dan Air	0,24	0	0,21	0,54
Konstruksi	7,22	8,78	9,86	6,3

Sektor	2015	2017	2018	2019
Perdagangan Restoran dan Perhotelan	22,01	24,08	23,94	24,37
Transportasi Pergudangan dan Komunikasi	2,21	2,56	2,13	2,51
Keuangan dan Asuransi	0,82	2,4	1,65	1,59
Jasa Masyarakat Sosial dan Personal	9,45	17,75	14,73	9,63

Penduduk bekerja menurut status pekerjaan selama kurun waktu 2015-2019 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, berusaha sendiri, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Status pekerjaan ini memengaruhi besaran pendapatan yang akan diterima oleh pekerja. Status pekerjaan sebagai buruh dan pekerja keluarga/tidak dibayar memiliki upah yang kurang layak atau di bawah UMK, selain itu pekerjaan tersebut seperti pekerjaan paruh waktu atau musiman seperti di sektor pertanian. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
Kabupaten Kebumen 2015-2019

Status Pekerjaan	2015	2017	2018	2019
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	3,41	4,22	4,36	3,47
Pekerja bebas di non-pertanian	7,77	10,29	12,8	8,56
Buruh/karyawan/pegawai	21,87	30,38	25,43	24,97
Pekerja bebas di pertanian	5,13	5,47	2,95	6,02
Berusaha sendiri	19,27	18,8	20,37	19,11
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	25,42	17,8	20,68	21,3
Pekerja keluarga/tidak dibayar	17,13	13,04	13,41	16,58

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2019, penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi didominasi oleh pekerja tidak sekolah/tidak tamat SD, SD, dan SMP sebesar 70,85 persen. Sedangkan 29,17 persen memiliki kualifikasi pendidikan menengah dan tinggi. Artinya tenaga kerja yang terserap bukan pada level manajerial dengan tingkat pendapatan yang rendah. Secara rinci jumlah penduduk bekerja berdasarkan pendidikan tertinggi dapat dilihat pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90
**Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
Kabupaten Kebumen 2015-2019**

Tingkat Pendidikan	2015	2017	2018	2019
Tidak/belum sekolah atau tamat SD	19,13	14,32	16,26	17,89
SD	36,31	35,74	32,84	32,69
SMP	19,05	20,71	19,97	20,27
SMA	9,09	7,99	8	8,64
SMK	11,12	13,11	14,54	14,85
Diploma	1	2,36	1,87	1,76
Sarjana	4,03	5,53	6,19	3,74
Pascasarjana	0,26	0,23	0,32	0,18

Tingkat Pengangguran

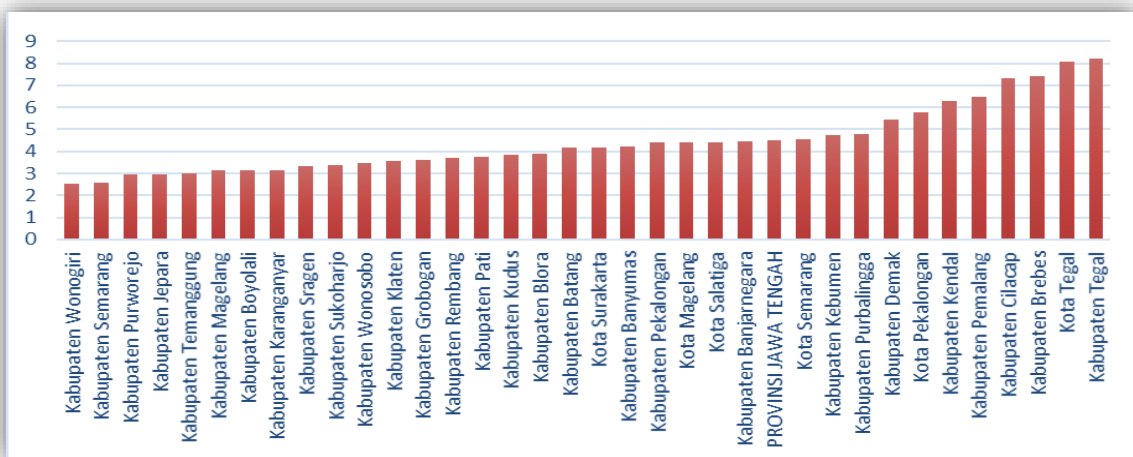
Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran sebagai masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Tingginya angka pengangguran disebabkan utamanya oleh kesenjangan jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada di daerah. Besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat tidak serta merta diikuti dengan peningkatan

kesempatan kerja atau lapangan kerja baru. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian. Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumberdaya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumberdaya yang ada termasuk sumberdaya manusia.

Adapun klasifikasi seseorang dikatakan telah memasuki usia kerja yaitu ketika seseorang tersebut telah berusia 15 tahun atau lebih. Manakala seseorang tersebut terlibat dalam suatu pekerjaan atau terkategori sebagai pengangguran, maka seseorang itu termasuk dalam angkatan kerja. Yang dimaksud dengan pengangguran di sini ialah seseorang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, sudah merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebesar 4,76 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,52 persen. Jika dibandingkan dengan TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Kebumen termasuk dalam 10 kabupaten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Jawa Tengah. Belum adanya industri

manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja menjadi salah satu penyebab tingginya TPT di Kabupaten Kebumen, artinya adanya keterbatasan lapangan kerja yang mampu menyerap jumlah angkatan kerja. Selain itu sebagian besar masyarakat Kabupaten Kebumen bekerja pada sektor informal.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.52
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota

Berdasarkan data Sakernas Tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 67,41 persen dari total pengangguran terbuka atau 19.768 penduduk. Jika dipilah jumlah pengangguran SMA sebanyak 7,38 persen atau sejumlah 2.164 orang, SMK sebanyak 60,03 persen atau 17.604 orang, sementara 16.503 di antaranya sedang mencari pekerjaan. Data tahun 2016 tidak tersedia karena BPS tidak melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional tingkat Kabupaten Kebumen.

Banyaknya lulusan SMK yang belum terserap pasar kerja perlu menjadi evaluasi salah satunya dalam penyusunan kurikulum pendidikan termasuk sekolah vokasi agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi, ketrampilan termasuk *soft skill* yang baik agar dapat terserap pada pasar kerja. Perlunya *link and match* antara kurikulum yang disediakan oleh sekolah vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, meskipun jenjang pendidikan SMK sekarang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi. Selain itu pentingnya pembekalan *soft skill* pada lulusan SMK agar mampu bersaing di pasar kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyusun *roadmap* pengembangan kurikulum sekolah vokasi termasuk SMK guna mendukung kebijakan nasional dalam menciptakan SDM unggul melalui perbaikan kurikulum, *link and match* jurusan sekolah vokasi, maupun pengembangan sertifikasi profesi guna mendukung alumni sekolah vokasi menjadi tenaga kerja siap pakai dan dapat terserap oleh industri.

Tabel 2.91
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015-2019**

No	Tingkat Pendidikan	2015	2017	2018	2019
1	Tidak/belum sekolah atau tamat SD	2,45%	8,73%	4,54%	1,54%
2	SD	10,87%	11,72%	18,14%	5,16%
3	SMP	29,09%	10,93%	10,62%	14,97%
4	SMA	12,90%	12,18%	9,86%	7,38%
5	SMK	43,15%	45,16%	50,91%	60,03%
6	Diploma	1,54%	2,51%	3,81%	3,38%
7	Sarjana	0%	8,76%	2,12%	7,54%

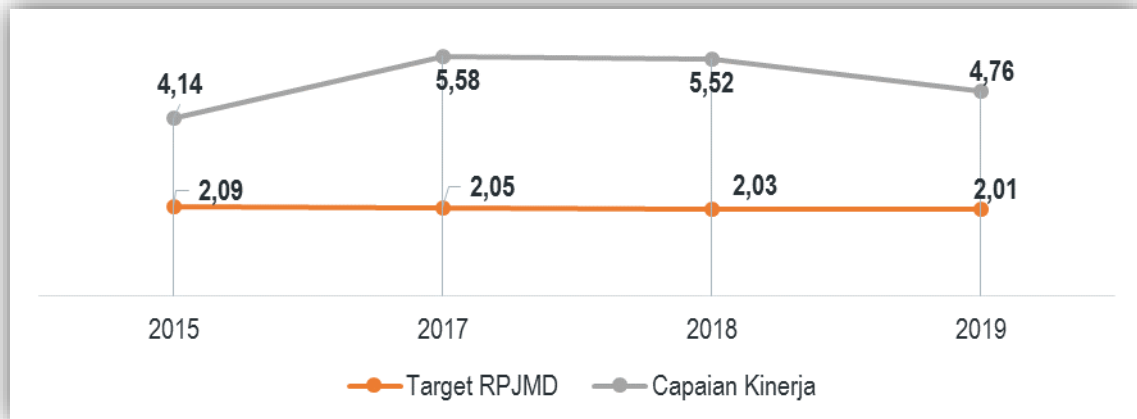
Sumber: BPS, 2020

Jika dilihat pada komposisi Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kelompok usia dapat dilihat jika di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu lima tahun rata-rata didominasi pada rentang usia 20-24 tahun, 25-29 tahun, dan 15-19 tahun atau usia sekolah. Dari 29.324 penduduk yang menganggur terdapat 66 persen atau sekitar 19.436 di antaranya adalah pemuda. Tingkat Pengangguran Terbuka pada usia 20-24 tahun dapat mengindikasikan penduduk usia tersebut menganggur karena tidak terserap oleh lapangan pekerjaan dikarenakan ketrampilan dan tingkat pendidikan yang dimiliki ketika berhenti pada jenjang SMA/SMK mengakibatkan tidak terserap dalam pasar kerja. Tingginya angka pengangguran terbuka didominasi oleh kelompok usia muda dengan latar belakang tingkat pendidikan tertentu seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah.

Tabel 2.92
**Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda
Kabupaten Kebumen 2015-2019**

No	Kelompok Usia	2015	2017	2018	2019
1	15 - 19	26,35%	25,2%	24,03%	23,36%
2	20 - 24	36,62%	29,11%	35,08%	42,92%
3	25 - 29	19,04%	3,99%	19,28%	16,28%
4	35 - 39	7,52%	5,01%	3,14%	1,04%
5	40 - 44	1,8%	6,4%	2,69%	4,81%

Sumber: BPS, 2020



Gambar 2.53

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Pada Tahun 2019 angka pengangguran Kabupaten Kebumen mencapai 4,76 persen dari total kerja. Kinerja penurunan tingkat pengangguran selama kurun waktu 2017-2019 cukup baik. Namun pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 ini memperparah kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen akan meningkat karena berhenti bekerjanya buruh tidak tetap di Kabupaten Kebumen akibat sektor ekonomi yang mempekerjakannya berhenti beroperasi akibat pandemi COVID-19. Angka pengangguran di Kabupaten Kebumen juga meningkat akibat pulangnya penduduk asli Kebumen yang merantau bekerja di kota besar (pekerja migran). Mereka berhenti bekerja karena diterapkannya kebijakan *lockdown* di tempat bekerjanya akibat pandemi COVID-19 dan memilih pulang ke Kebumen untuk mengurangi beban ekonomi kehidupannya.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021, angka pengangguran pada tahun 2020 ditargetkan akan menurun sebesar 1,99 persen dan menjadi 1,97 persen

pada tahun 2021. Namun, akibat pandemi COVID-19 diprediksi angka pengangguran meningkat sebesar $4,00 \pm 1$ persen. Diperlukan suatu program padat karya untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran yang berasal dari buruh tidak tetap dan pekerja migran di Kabupaten Kebumen agar dapat membantu memperbaiki kondisi ekonominya.

BPS mencatat angka pengangguran per Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang, naik 0,88 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 6,82 juta orang. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2020 masih tercatat menurun tipis dari 5,01 persen menjadi 4,99 persen. Adapun total Angkatan kerja per Februari 2020 mencapai 137,91 juta orang. Jumlah penduduk usia kerja, pada Februari 2020 mencapai 199,4 juta atau naik 2,92 juta. Sementara dari sisi angkatan kerja, jumlah orang bekerja mencapai 131,03 juta. Jumlah pekerja penuh waktu tercatat 91,59 juta orang, bertambah 1,09 juta orang dari periode yang sama tahun lalu. Capaian indikator kinerja pada urusan tenaga kerja secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.93.

Tabel 2.93
**Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran
 Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020**

Karakteristik	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	7 kasus	9 kasus	7 kasus	14 kasus	2 kasus s.d bulan Mei
Pencari kerja yang ditempatkan	24,27%	25,60%	28,72%	25,63%	
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,14	5,58	5,52	4,76	

Karakteristik	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Keselamatan dan perlindungan	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	
Upah Minimum Kabupaten (Rp)	1.157.500	1.324.600	1.433.900	1.560.000	1.835.000

Sumber: Disnaker KUKM, 2020

Perselisihan antara pengusaha dengan pekerja dan perselisihan antara buruh, tenaga kerja dengan pengusaha relatif sedikit, hal ini menunjukkan penyelesaian pekerja dengan pengusaha dan antarburuh dapat diselesaikan secara internal di perusahaan, akan tetapi cenderung meningkat sehingga perlu peningkatan kesepakatan perjanjian kerja yang lebih baik. Demikian juga terkait dengan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak pernah terjadi, mengindikasikan kerjasama tripartit antara pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja berjalan dengan baik. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kebumen setiap tahun terus meningkat. UMK Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebesar Rp 1.686.000,00. Kenaikan UMK diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang unggul seharusnya memperhatikan kesetaraan gender dan anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Kabupaten Kebumen

melakukan upaya penanganan, rehabilitasi, bantuan hukum hingga pemulangan dan reintegrasi kembali ke masyarakat. Adapun cakupan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dalam Tabel 2.94.

Tabel 2.94

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	120	129	85	117	135
2	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	41	65	62	66	71
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	19	24	9	24	35
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	22	27	9	24	36
5	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	4	2	2	2	4

Sumber: Dispermades P3A, 2020

Proses pembangunan harus memperhatikan keseimbangan pembangunan berbasis gender, namun kadangkala pembangunan yang dilakukan tidak membawa keberuntungan bagi kaum perempuan. Bias gender di Kabupaten Kebumen masih tampak dalam beberapa kebijakan. Diskriminasi gender dalam

berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Isu gender menjadi salah satu poin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan kelima TPB yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Untuk melaksanakan TPB, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam mengukur kesetaraan gender, terdapat beberapa indeks yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknis. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Tabel 2.95
IPM dan IPG Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,87	67.41	68.29	68,8	69.60
	Laki-Laki	70,19	<i>n/a</i>	72	72,49	73,15
	Perempuan	65,62	<i>n/a</i>	66,73	67,48	68,28
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,48	<i>n/a</i>	92,68	93,09	93,34

Sumber: BPS, 2020

IPG Kabupaten Kebumen tahun 2018 sebesar 93,09 dan meningkat menjadi 93,34 pada tahun 2019. Namun jika diperhatikan dalam data pilah gender menunjukkan bahwa IPM laki-laki jauh lebih tinggi dibanding IPM perempuan, artinya masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Secara rinci data pilah gender terhadap IPM adalah sebagai berikut:

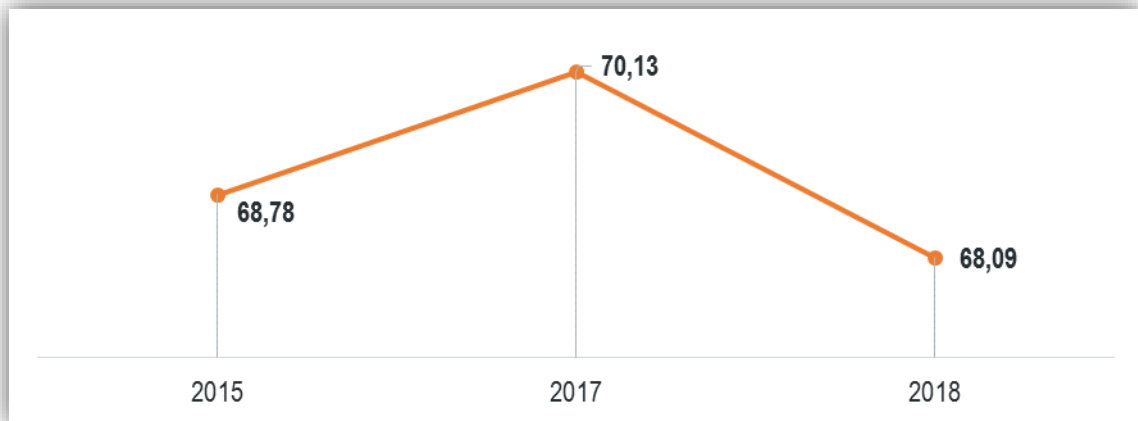
Tabel 2.96
Tabel IPM Pilah Gender Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Pembangunan Manusia	66,87	67.41	68.29	68,8	69.60
	Laki-Laki	70,19	<i>n/a</i>	72	72,49	73,15
	Perempuan	65,62	<i>n/a</i>	66,73	67,48	68,28
2.	Harapan Lama Sekolah	12,49	12,61	12,90	12,91	13,04
	Laki-Laki	12,02	<i>n/a</i>	12,87	12,88	13,01
	Perempuan	12,81	<i>n/a</i>	12,94	13,35	13,48
3.	Rata-Rata Lama Sekolah	7,04	7,05	7,29	7,34	7,53
	Laki-Laki	7,67	<i>n/a</i>	7,90	7,94	7,97
	Perempuan	6,45	<i>n/a</i>	6,82	6,87	7,09
4.	Angka Harapan Hidup	72,77	72,87	72,98	73,11	73,22
	Laki-Laki	70,80	<i>n/a</i>	71,02	71,15	71,26
	Perempuan	74,62	<i>n/a</i>	74,83	74,96	75,06
5.	Pengeluaran Perkapita	8.008	8.276	8.446	8.757	9.066
	Laki-Laki	10.462	<i>n/a</i>	10.988	11.396	11.904
	Perempuan	7.596	<i>n/a</i>	7.895	8.037	8.305

Sumber: BPS, 2020

Hampir seluruh komposit pembentuk IPM menunjukkan bahwa nilai capaian IPM Laki-Laki lebih baik jika dibandingkan dengan perempuan. Hanya pada komposit Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki terdapat selisih 4,20 tahun, sedangkan 2 komposit pembentuk IPM lainnya menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Namun meskipun Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, namun Rata-rata Lama Sekolah perempuan jauh berada di bawah laki-laki. Artinya kesempatan perempuan mengenyam pendidikan tidak sama besarnya dibandingkan dengan laki-laki. Dari analisis kesetaraan gender dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Kebumen masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumberdaya ekonomi. IDG Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 adalah 68,78 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 1,35 menjadi 70,13. Tetapi pada tahun 2018 IDG Kabupaten Kebumen mengalami penurunan sebesar 2,04 menjadi 68,09. Artinya ketimpangan gender di Kabupaten Kebumen semakin besar pada tahun 2018.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.54
Perkembangan IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018

IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non-pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berdasarkan data perkembangan komposit IDG, ketimpangan gender terlihat menonjol pada kontribusi pendapatan perempuan, dan keterlibatan perempuan pada pengambilan kebijakan. Sementara perempuan dewasa ini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjadi tenaga profesional.

Tabel 2.97
Komposit Pembentuk IDG Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019

No.	Indikator Kinerja	Capaian		
		2017	2018	2019
1.	Keterlibatan Perempuan di parlemen (%)	28	27,6	26
2.	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	46,71	46,53	n/a
3.	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	25,20	25,59	n/a

Sumber: BPS, 2019, Dispermades P3A, data diolah

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan (non-diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik.

Tindakan afirmasi merupakan sarana/cara yang dapat dan harus digunakan untuk mengatasi masalah ketidakberuntungan. Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik terjadi setelah diberlakukannya Perubahan UUD 1945 yaitu Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Selain ketentuan dalam UUD 1945, CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), ICCPR (*International Convention Civil and Political Right*), dan Konvensi Hak-hak politik perempuan, terdapat juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum pada paragraf Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Pasal 173 ayat 2 (e) menyebutkan bahwa “partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai”, Pasal 245 berbunyi: “Daftar bakal calon sebagaimana dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.

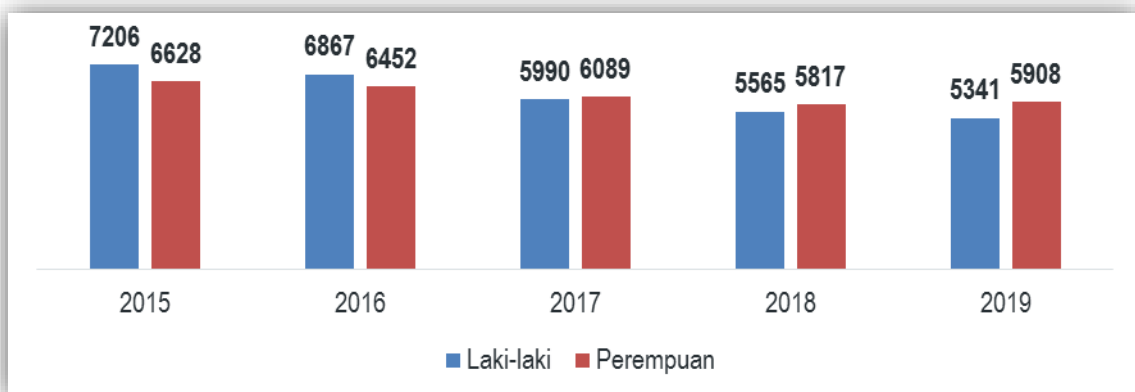
Di Kabupaten Kebumen upaya *affirmative action* dapat dilihat pada data keterwakilan perempuan dalam parlemen (Tabel 2.98), dimana pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 keterwakilan perempuan dalam lembaga politik baru mencapai 28 persen dari keterwakilan perempuan dan parlemen dan menurun menjadi 26 persen pada 2018, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 24 persen dan pada tahun 2020 menurun menjadi 22 persen. Apabila kuota perempuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut mampu dicapai secara optimal, tentu akan membawa dampak yang positif dalam pemberdayaan perempuan, mengingat kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isu-isu gender.

Tabel 2.98
**Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

No	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019
1	Laki-Laki	36	36	36	34	34
2	Perempuan	14	14	14	13	12
Total		50	50	50	47	46

Sumber: Dispermades P3A 2020

Sementara itu keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan dapat dilihat dari jumlah PNS yang menunjukkan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam lembaga pemerintahan dan tren peningkatan partisipasinya positif. Pada tahun 2015 jumlah partisipasi perempuan sebesar 47,91 persen dari 13.834 pegawai pemerintah di Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2017 jumlah partisipasi perempuan meningkat sebesar 1,96 persen menjadi 50,40 persen dan hal ini menjadi sama posisi antara partisipasi laki-laki dan perempuan, dan pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 1,42 persen menjadi 52,52 persen dari total jumlah pegawai 11.249.



Sumber: Data profil gender, Dispermas P3A dan BKPPD, 2019

Gambar 2.55
Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Partisipasi perempuan yang dapat berperan dalam pengambilan kebijakan di lembaga pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah perempuan yang menempati posisi Eselon II-IV. Berdasarkan data perkembangan

partisipasi perempuan pada posisi strategis di pemerintahan menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki jabatan Eselon II mengalami peningkatan mulai tahun 2017. Sementara untuk pejabat Eselon III jumlah perempuan yang menduduki jabatan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun dari tahun 2016 sebanyak 15 orang menjadi 49 orang pada tahun 2019. Pada Eselon IV pejabat partisipasi perempuan cenderung fluktuatif, pada tahun 2015 sejumlah 226 orang dan menjadi 212 pada tahun 2019.

Tabel 2.99
**Pegawai Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2020**

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perempuan yang menempati Jabatan Eselon II	4	2	5	5	5	5
Jumlah Perempuan yang menempati Jabatan Eselon III	9	15	42	45	49	48
Jumlah Perempuan yang menempati Jabatan Eselon IV	226	132	227	223	212	220

Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2019

Budaya patriarki meletakkan perempuan dalam kelas yang lebih inferior dibanding laki-laki. Patriarki membentuk konstruksi struktural yakni penundukan berbasis kelas yang kemudian membuat relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan menjadi timpang sehingga kekerasan terjadi pada kelompok yang memiliki kekuasaan lebih rendah dibanding kelompok lainnya. Dalam hal ini perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan mengalami kekerasan dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun demikian terdapat beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh laki-laki yang dilakukan oleh perempuan. Adapun

empat faktor penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan, khususnya secara fisik dan seksual yang dilakukan pasangan, yaitu individu, pasangan, sosial budaya dan ekonomi (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional, 2016). Namun budaya timur seolah memandang bahwa KDRT adalah masalah ranah pribadi hubungan suami dan istri, bukan merupakan permasalahan sosial yang bisa dicampuri, hingga kasus KDRT ini seolah fenomena gunung es, karena keengganan untuk mengungkapkan serta dianggap tabu.

Sementara itu tindak kekerasan yang terjadi pada anak dalam berbagai bentuk dan dilakukan oleh berbagai pihak. Secara umum tipikal tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi (1) kekerasan verbal, (2) kekerasan fisik, dan (3) kekerasan emosional (*psychological maltreatment*). Ketiga jenis kekerasan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik individual anak. Faktor eksternal meliputi (1) pengaruh media, (2) pola asuh orang tua, (3) karakteristik dan latar belakang sekolah, (4) teman sebaya, serta (5) tekanan lingkungan.

Tingginya angka kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kebumen baik kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap anak menjadi keprihatinan tersendiri. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tetapi angka kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kebumen dengan variasi jenis kasus yang

cukup bervariasi terutama kasus kekerasan yang terjadi pada anak, menjadikan Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya keras untuk menanganinya.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan daerah tersebut juga dibentuk unit pelayanan terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 72 Tahun 2013 tentang Monitoring dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Kasus Kekerasan terhadap Anak. Di dalam penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kebumen ditangani oleh P2TP2A KARTIKA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan) yang terdiri dari Tim Koordinator dan Tim Pelaksana Harian yang terdiri dari lintas sektor termasuk di dalamnya pelibatan instansi vertikal (TNI, POLRI) dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.100

Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menurut tempat kejadian dan lokasi lembaga layanan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Lokasi Lembaga	Jumlah Korban / TKP	2015		2016		2017		2018		2019	
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
P2TP2A KARTIKA	Jumlah Korban	80	24	81	40	60	20	61	43	68	60
	Rumah Tangga	61	20	41	36	37	16	23	35	43	42
	Tempat Kerja	0	0	0	0	0	0	1	0	3	10
	Sekolah	15	0	16	0	0	0	15	0	8	0
	Fasilitas Umum	12	4	15	4	0	0	22	7	11	6
	Lainnya	8	0	17	0	14	1	0	1	3	2

Sumber: P2TP2A "KARTIKA" (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak "Kebumen Adil Gender anti Kekerasan"), 2019

Jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Kebumen setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 terdapat 104 kasus kekerasan berbasis gender dan anak yang terdiri dari 80 kasus kekerasan terhadap anak dan 24 kasus kekerasan berbasis gender dengan 120 tempat kejadian perkara di antaranya terjadi di rumah tangga, tempat kerja, sekolah, fasilitas umum, dan lainnya (pekarangan/perkebunan, gudang mesin, rumah kosong dan tepi sungai). Sebanyak 96 kasus kekerasan terhadap anak sebagian besar kasus yang terjadi adalah kasus kekerasan seksual dan 24 kasus kekerasan berbasis gender (dewasa) yang sebagian besar adalah kekerasan fisik.

Pada tahun 2016 jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak yang ditangani oleh Tim P2TP2A Kartika sebanyak 121 kasus dengan tempat kejadian perkara di 129 tempat. Hal ini dikarenakan adanya satu kasus baik kekerasan berbasis gender maupun kasus kekerasan terhadap anak yang terdapat dua atau lebih tempat kejadian perkara. Sebanyak 89 tempat kejadian perkara kasus kekerasan terhadap anak dan 40 tempat kejadian perkara kasus kekerasan berbasis gender.

Pada tahun 2017 jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak mengalami penurunan kasus kekerasan berbasis gender dan anak, dengan jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak sebanyak 80 kasus dengan 68 tempat kejadian perkara. Sebagian besar kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi pada tahun 2017 adalah kekerasan fisik dengan 17 tempat kejadian perkara yang di antaranya adalah di rumah tangga, tempat kerja dan fasilitas umum dan kasus kekerasan terhadap anak sebagian besar adalah kasus kekerasan seksual dengan 51 tempat kejadian perkara di antaranya yaitu pekarangan/perkebunan, gudang mesin, rumah kosong dan tepi sungai.

Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak sebanyak 104 terdiri dari 61 kasus kekerasan berbasis anak dan 43 kasus kekerasan berbasis gender dan 104 tempat kejadian perkara yang sebagian besar untuk kasus kekerasan berbasis gender terjadi di rumah tangga, tempat kerja, dan fasilitas umum dan tempat kejadian perkara untuk anak sebagian besar adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kejadian perkara

di antaranya sekolah, pekarangan, perkebunan, rumah, gudang mesin, rumah kosong, tepi sungai.

Pada tahun 2019 terdapat 128 kasus kekerasan berbasis gender dan anak terdiri dari 68 kasus kekerasan terhadap anak dan 60 kasus kekerasan berbasis gender dengan 128 tempat kejadian perkara dengan kasus kekerasan berbasis gender terjadi di rumah tangga, tempat kerja, dan fasilitas umum dan tempat kejadian perkara untuk anak Sebagian besar adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kejadian perkara di antaranya sekolah, pekarangan, perkebunan, rumah, gudang mesin, rumah kosong, tepi sungai.

Selain itu perkembangan kasus kekerasan yang terjadi dengan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum dan Berkonflik dengan Hukum. Kasus anak berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses penanganan sampai pada pelaksanaan hukuman, adanya keadilan restoratif dan diversifikasi. Diversifikasi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah dan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi

untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Merujuk pada pengertian diversifikasi di atas, dapat diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Di sinilah sebenarnya hukum adat memainkan peran untuk mengisi bentuk-bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai nilai-nilai lokal. Adat masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dianggap memberikan nilai positif terhadap penyelesaian kasus anak secara bermartabat dan dapat menciptakan kepuasan tersendiri oleh masyarakat adat. Atas dasar pemikiran ini seyogyanya melihat dan membandingkan bagaimana masyarakat menyelesaikan kasus anak.

Tabel 2.101
**Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

Jenis Kasus AKH	2015	2016	2017	2018	2019	Keterangan
Fisik	12	6	3	8	0	Perkelahian, Pengeroyokan
Psikis	0	0	0	1	2	Perundungan, Pengancaman melalui HP
Pencurian	4	3	2	4	4	Pencurian Sepeda motor, Bensin, HP, Rokok
Pembunuhan	0	0	0	0	1	Pembunuhan bayi baru lahir (di luar nikah)
Jumlah	16	9	5	13	7	

Sumber: P2TP2A KARTIKA, Dispermades, 2019

Dari Tabel 2.101 dapat dilihat bahwa kasus anak berkonflik dengan hukum sangat memprihatinkan. Kasus pembunuhan anak (usia 16 tahun) ke bayinya yang baru dilahirkan. Hal lain yang memprihatinkan kasus anak berkonflik dengan hukum lainnya adalah pencurian sepeda motor, pencurian bensin dan pencurian rokok. Diperlukan komitmen pelaksanaan kebijakan yang benar-benar memperhatikan kepentingan dan kondisi masyarakat, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan spesifik, pelayanan kesehatan jiwa, penanganan dan pendampingan bagi korban kekerasan serta peningkatan ekonomi pemberdayaan perempuan.

3. Urusan Pangan

Dilihat dari jumlah produksi dibandingkan kebutuhan, ketersediaan pangan utama Kabupaten Kebumen dari tahun 2015 hingga tahun 2019 relatif aman meskipun terjadi fluktuasi dengan tren yang meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan utama (beras) yang selalu dapat memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.102
**Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Jiwa	Kebutuhan Pangan (Ton)	Produksi (kg)	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (kg)	Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (ton)	Ketersediaan Pangan (ton)
2015	1.343.216	108.397,69	323.399,33	323.399,33	-	323.399,33
2016	1.346.606	108.671,10	273.761,33	273.761,33	-	273.761,33
2017	1.358.448	109.626,75	273.650,62	273.650,62	-	273.650,62
2018	1.375.221	110.980,33	282.199,89	282.199,89	-	282.199,89
2019	1.385.377	111.816,06	290.693,39	290.693,39	-	290.693,39

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2020

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, terlihat bahwa terjadi fluktuasi jumlah desa rawan pangan se-Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 sampai 2019. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kerawanan pangan sangat mudah berubah dikarenakan pengaruh faktor internal maupun eksternal (kemiskinan, tenaga kesehatan, air bersih, sarana pangan, tenaga kesehatan) sehingga sangat penting untuk diintervensi.

Tabel 2.103
Data Jumlah Desa Rawan Pangan

Tahun	2016	2017	2018	2019
Jumlah Desa Rawan Pangan Prioritas 1, 2 dan 3	249	170	293	131

Terkait dengan cadangan pangan daerah, sampai dengan tahun 2019, jumlah cadangan pangan daerah adalah berjumlah 10,17 ton dari jumlah ideal berjumlah 100 ton. Lumbung Pangan Masyarakat se-Kabupaten Kebumen berjumlah 694 Unit. Namun dari 460 desa se-Kabupaten Kebumen, yang memiliki lumbung pangan masih 259 desa (56,30 persen), berarti masih 201 desa (43,69 persen) yang belum memiliki lumbung pangan.

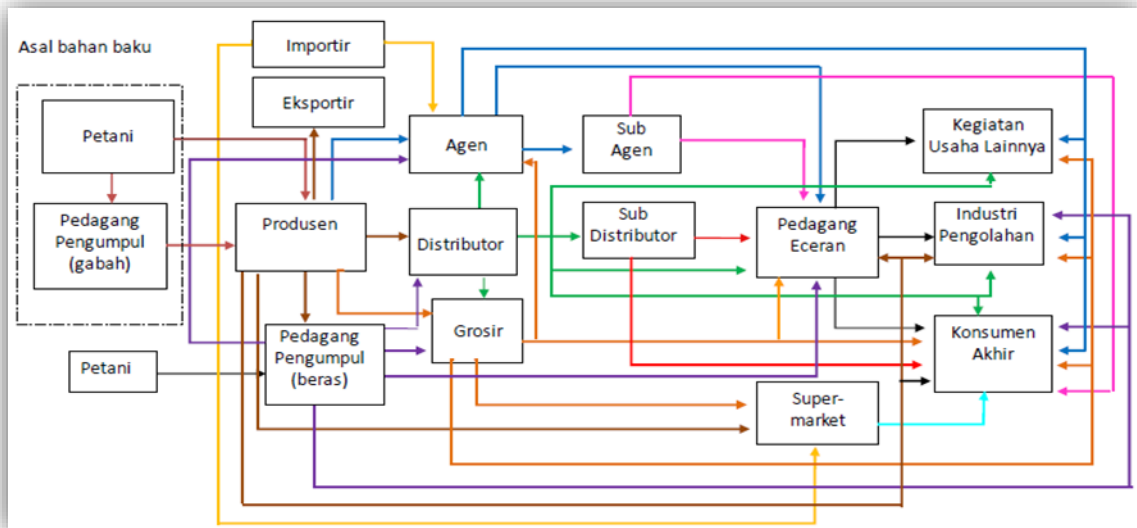
Stabilitas harga pangan bisa dilihat berdasarkan koefisien variasi (CV) dari data harga secara runtun waktu. Semakin kecil nilai koefisien variasi dapat diinterpretasikan bahwa harga relatif stabil atau memiliki fluktuasi yang rendah. Secara umum, harga komoditas pangan di Kabupaten Kebumen berada pada posisi stabil, namun masih terjadi fluktuasi pada beberapa komoditas seperti beras dan bawang merah.

Tabel 2.104
Harga Rata-Rata Pangan Strategis Tahun 2017-2019

No	Komoditas	2017		2018		2019	
		Koefi-sien Variasi	Kete-rangan	Koefi-sien Variasi	Kete-rangan	Koefi-sien Variasi	Kete-rangan
1	Beras	3,2	Stabil	3,3	Stabil	6,34	Tidak Stabil
2	Jagung	17,9	Stabil	5,0	Stabil	3,22	Stabil
3	Kedelai	0,0	Stabil	0,8	Stabil	0,99	Stabil
4	Cabe Merah Keriting	33,9	Tidak stabil	32,0	Tidak stabil	48,71	Tidak Stabil
5	Bawang Merah	26,5	Tidak stabil	15,1	Stabil	20,41	Stabil
6	Telur Ayam Ras	7,4	Stabil	8,1	Stabil	5,78	Stabil
7	Daging Ayam Ras	5,3	Stabil	8,9	Stabil	4,35	Stabil
8	Daging Sapi	1,3	Stabil	2,3	Stabil	2,58	Stabil
9	Gula Pasir	4,8	Stabil	2,8	Stabil	4,86	Stabil
10	Minyak Goreng	4,5	Stabil	3,8	Stabil	1,01	Stabil
11	Tepung Terigu	0,6	Stabil	3,6	Stabil	0	Stabil

Salah satu penyebab tingginya harga pangan adalah rantai pasok yang terlalu panjang dimana pihak yang menikmati keuntungan besar adalah para pedagang perantara. Untuk sampai ke konsumen akhir, komoditas melewati beberapa tahapan dari mulai petani, pengepul/tengkulak, pedagang besar/ penggilingan, grosir, pedagang eceran dan konsumen akhir. Lemahnya kelembagaan pemasaran khususnya gabungan kelompok tani/kelompok tani menyebabkan petani tidak memiliki posisi tawar dalam penentuan harga jual sehingga petani menjadi pihak yang dirugikan. Kondisi tersebut menyebabkan

harga di tingkat konsumen menjadi tinggi sedangkan harga yang diterima petani relatif rendah.



Sumber: BPS-Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi (VPDP 2009)

Gambar 2.56
Diagram Rantai Distribusi Pangan

Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penguatan ketahanan pangan mandiri. Data memperlihatkan bahwa jumlah kelompok yang telah dibina dan diberi stimulan pemanfaatan pekarangan masih sangat kecil yaitu 36,3 persen dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.105
Data Kelompok yang Telah Dibina dan Memperoleh Bantuan Stimulan Pemanfaatan Pekarangan

Tahun	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kelompok	46	40	41	40

Terkait dengan keamanan pangan, di Kabupaten Kebumen masih ditemukan adanya bahan pangan segar yang mengandung bahan berbahaya (pestisida). Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan terus-menerus kepada pelaku usaha pertanian.

Tabel 2.106
Data Hasil Rapid Tes PSAT (Positif Pestisida)

Tahun	2016	2017	2018	2019
Jumlah Temuan pada Sampel	6	4	7	2

4. Urusan Pertanahan

Tabel 2.107
Kinerja Pertanahan di Kabupaten Kebumen

No.	Indikator Kinerja	Capaian			
		2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	28,40	28,45	37,00	43,66
2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	0	100	0	0
3.	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	11,90	9,23	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2020

Permohonan sertifikat di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat selama kurun waktu 2015-2019. Peningkatan tersebut meliputi permohonan hak milik, hak guna bangunan, hak tanggungan dan roya. Hanya permohonan hak pakai yang menurun terutama pada kurun waktu 2018-2019 dari 285 permohonan menjadi 40 permohonan. Sementara itu, tren penyelesaian permohonan sertifikat juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

Peningkatan penyelesaian meliputi permohonan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak tanggungan. Persentase luas lahan bersertifikat masih rendah meskipun terdapat peningkatan. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat (mengurus legalitas tanah) masih cukup rendah.

Jumlah permohonan dan penyelesaian sertifikat di Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 secara detail disajikan pada Tabel 2.108.

Tabel 2.108
**Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat
di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

No	Jenis Sertifikat	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Permohonan					
	a. Hak milik	1.877	1.667	1.507	1.423	2.405
	b. Hak guna bangunan	57	279	205	282	361
	c. Hak pakai	18	71	71	285	40
	d. Hak tanggungan	2.441	3.615	3.615	3.582	4.085
	e. Roya	1.561	2.010	2.010	2.160	2.263
2	Penyelesaian					
	a. Hak milik	1.669	1.398	1.398	1.166	2.375
	b. Hak guna bangunan	50	168	168	306	350
	c. Hak pakai	32	85	85	292	35
	d. Hak tanggungan	2.707	3.642	3.642	3.538	4.134
	e. Roya	1.705	2.034	2.034	2.130	2.157

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2020

Dari Tabel 2.108, terlihat bahwa tingkat penyelesaian masih lebih rendah dengan permohonannya, hal ini disebabkan karena perhitungan permohonan yang masuk berdasarkan tahun berjalan sesuai dengan jumlah berkas yang masuk di tahun tersebut, sedangkan untuk permohonan yang masuk memerlukan waktu penyelesaian yang berbeda-beda, contohnya permohonan hak milik terdiri dari:

- a. Permohonan penerbitan sertifikat dari Letter C, membutuhkan waktu kurang lebih 98 hari, selama waktu tersebut proses yang berjalan adalah pengukuran, pengumuman, dan penerbitan sertifikat. Jangka waktu tersebut belum termasuk apabila terdapat kendala dan permasalahan di lapangan.
- b. Pemecahan dan penggabungan sertifikat, membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari, termasuk proses pengukuran dan penerbitan sertifikatnya.
- c. Peralihan hak (meliputi jual beli, hibah, waris, APHB, lelang) memerlukan waktu kurang lebih 5 hari.

Untuk penyelesaian pekerjaan dihitung berdasarkan pekerjaan yang selesai pada tahun tersebut termasuk pekerjaan tahun sebelumnya yang jangka waktu penyelesaiannya masuk tahun berikutnya. Sehingga jumlah penyelesaian pekerjaan pada tahun berjalan tersebut tidak menggambarkan jumlah penyelesaian pekerjaan di tahun yang dimaksud. Sebagai contoh permohonan Hak Tanggungan (yang memerlukan waktu 7 hari) dan Roya (yang memerlukan waktu 5 hari), penyelesaian pekerjaannya lebih banyak dari permohonan yang masuk.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dibangun dari komponen kualitas air, udara, tanah, dan penanganan sampah.

a) Pencemaran

Berdasarkan analisis kualitas air sungai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, 50 persen sungai yang dipantau di wilayah Kabupaten Kebumen masuk kategori memenuhi syarat, 33 persen cemar ringan dan 17 persen cemar sedang.

Beberapa parameter pemantauan yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, yakni:

- a. Pada Sungai Kedung Bener, Sungai Ketek, dan Sungai Gombong melebihi baku mutu Parameter BOD.
- b. Pada bagian hilir Sungai Wawar, hilir Sungai Luk Ulo dan Sungai Pucang melebihi baku mutu Parameter TSS.
- c. Pada Sungai Mawar Bagian Tengah, Hilir Sungai Wawar melebihi baku mutu Parameter Fosfat.
- d. Pada Sungai Wawar bagian tengah melebihi baku mutu Parameter Fecal Coli.
- e. Pada Sungai Luk Ulo (hilir), Sungai Wawar (tengah dan hilir) melebihi baku mutu Parameter Total Coliform.

b) Persentase Penanganan Sampah

Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal itu dapat dilihat dari persentase sampah terangkut yang meningkat dari 50,74 persen di tahun 2015 menjadi

51,57 persen pada tahun 2019. Peningkatan persentase sampah terangkut tersebut diikuti pula dengan penurunan rasio daya tampung, terutama pada kurun waktu 2018-2019 dari 1,67 di tahun 2018 menjadi 1,61 pada tahun 2019. Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 selengkapnya tersaji pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109
Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase sampah terangkut (%)	50,74	37,80	45,97	48,50	51,57
2	Jumlah TPSS (unit)	56	56	56	56	56
3	Daya Tampung TPS (ton)	14	14	14	14	14
4	Jumlah volume sampah yang terangkut (m3)	-	-	98,55	112,342	316,15
5	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3)	-	-	214,81	216,356	613,01
6	Jumlah penduduk perkotaan (jiwa)	-	-	-	273.096	284.457
7	Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk	n/a	n/a	n/a	1,67	1,61

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.110
Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,56	68,67	72,25	75,89	76*
2	Indeks Kualitas Air	51,25	56,67	56,67	63,33	74*
3	Indeks Kualitas Udara	75	93,3	87,83	88,44	78*
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,21	59,21	70,66	70,66	

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.111
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah yang ditangani (m ³)		98,55	112,342	516,15	
2	Jumlah Volume produksi sampah (m ³)		214,81	216,356	613,01	
3	Persentase tidak tertangani		116,26	104,014	96,86	
4	Persentase tertangani	37,8	45,97	51,92	51,57	68,88*

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.112
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TPS	56	56	56	56	56
2	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	14	14	14	14	14
3	Jumlah Penduduk	1.188.622	1.192.007	1.195.092	1.197.982	1.200.977
4	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	1,1778	1,1749	1,1715	1,1686	1,1657

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2020

c) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Air minum adalah salah satu kebutuhan hidup dasar manusia. Pelayanan air minum di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, dan masyarakat. Sedangkan swasta belum terlibat dalam melakukan pelayanan air minum. PDAM melayani penyediaan air minum

perkotaan sedangkan Dinas Pekerjaan Umum melayani pembangunan sistem penyediaan air minum pedesaan. Capaian akses air minum Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 masih mencapai 89,63 persen, belum mencapai target 100 persen sesuai RPJMN 2019-2024.

Penyehatan lingkungan/sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat berisiko menimbulkan penyakit seperti diare, tipus, kolera dan lain-lain. Dari data uji pencemaran air di Kabupaten Kebumen dalam lima tahun terus mengalami peningkatan (lihat Tabel 2.113)

Tabel 2.113
Uji Pencemaran Air Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Uji pencemaran air	51,25	56,67	56,67	63,33	74*

Sumber: Disperkim-LH Kab. Kebumen, 2020

Apabila dirinci persentase akses terhadap air minum di Kabupaten Kebumen tahun 2018 terdiri dari akses perpipaan 10,70 persen; akses non-

perpipaan 78,94 persen dan tidak memiliki akses air minum sebanyak 10,37 persen (lihat Tabel 2. 114).

Tabel 2.114
Persentase Akses Terhadap Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2018

No	Kecamatan	Memiliki Akses		Tidak Memiliki Akses
		Perpipaan	Non-Perpipaan	
1	Ayah	20,87	65,91	13,21
2	Buayan	8,34	72,76	18,90
3	Puring	1,32	93,22	5,46
4	Petanahan	0,28	94,03	5,70
5	Klirong	0,26	88,88	10,86
6	Buluspesantren	0,00	87,58	12,42
7	Ambal	0,56	86,17	13,27
8	Mirit	0,00	98,22	1,78
9	Bonorowo	9,50	78,17	12,33
10	Prembun	5,98	84,24	9,77
11	Kutowinangun	2,81	97,19	0,00
12	Alian	16,56	66,43	17,01
13	Padureso	19,91	76,18	3,91
14	Poncowarno	100,00	0,00	0,00
15	Kebumen	20,26	76,82	2,91
16	Pejagoan	11,25	79,26	9,49
17	Sruweng	9,22	86,79	3,99
18	Adimulyo	0,00	84,61	15,39
19	Kuwarasan	6,27	85,41	8,32
20	Rowokele	16,81	70,80	12,39
21	Sempor	5,51	68,23	26,27
22	Gombong	18,67	68,91	12,41
23	Karanganyar	9,83	81,92	8,24
24	Karanggayam I	8,54	76,39	15,07
25	Sadang	3,58	71,95	24,47
26	Karangsambung	12,25	67,42	20,33
Kab. Kebumen		10,70	78,94	10,37

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018 (data diolah)

Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki upaya meningkatkan akses layanan air minum baik sistem perpipaan maupun non-perpipaan, yaitu:

1. Melakukan pembangunan/pengembangan sistem air minum perpipaan (PDAM/Pamsimas) yang sudah memiliki 57.937 sambungan rumah, terutama pada daerah perkotaan dan daerah sulit air.
2. Melakukan penyuluhan pembangunan sumber air terlindung (baik sumur maupun mata air atau sumber air lainnya) dengan jarak minimal 10 m dari *septic tank*.

Pada tahun 2019, capaian indikator akses air minum layak Kabupaten Kebumen lebih rendah dibanding provinsi maupun nasional. Pada indikator akses sanitasi layak, pada tahun 2019, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Kebumen lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional. Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Kebumen tahun 2019, sebanyak 87,49 persen rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan perdesaan (lihat Tabel 2.115). Indikator Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dalam SPM adalah Prosentase warga negara yang mendapatkan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (100 persen), dengan capaian pada tahun 2019 adalah 76,69 persen, sehingga belum mencapai target SPM 79,34 persen.

Tabel 2.115

Kinerja Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Indikator	Capaian Kabupaten 2019	Capaian Provinsi 2019	Capaian Nasional 2019
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak			89,72%
	a. Perkotaan	57,25%	86,15	
	b. Perdesaan	8,36%	76,30	
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	87,49%	80,31%	77,44%

Sumber: DPUPR, PDAM, Dinkes 2020, data diolah

Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi layanannya sehingga tercapai akses layak dan berkelanjutan. Saat ini sebagian wilayah di Indonesia belum mampu memberikan akses layak bagi semua (100 persen) termasuk juga di Kabupaten Kebumen. Data jumlah rumah tangga menurut jenis sanitasinya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.116.

Tabel 2.116

Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2019

No	Kecamatan	JSP	JSSP	BABS	IPAL Komunal	Sharing	Jumlah Total (unit)
1	Adimulyo	8807	1396	0	0	348	10551
2	Alian	13075	379	0	0	1239	14693
3	Ambal	12519	1372	0	0	767	14658
4	Ayah	9886	4735	0	0	1332	15953
5	Bonorowo	3141	1639	0	0	258	5038
6	Buayan	13063	2530	0	0	1866	17459
7	Buluspesantren	12188	1814	0	0	332	14334
8	Gombong	12913	579	0	12	917	14421
9	Karanganyar	9684	77	0	5	466	10232
10	Karanggayam	8188	1866	0	0	3273	13327

No	Kecamatan	JSP	JSSP	BABS	IPAL Komunal	Sharing	Jumlah Total (unit)
11	Karangsambung	6985	840	0	0	2421	10246
12	Kebumen	30099	452	0	20	704	31275
13	Klirong	11834	2989	0	0	1159	15982
14	Kutowinangun	10231	232	0	0	1792	12255
15	Kuwarasan	10284	2515	0	0	1430	14229
16	Mirit	9954	1710	0	0	2526	14190
17	Padureso	3608	200	0	0	166	3974
18	Pejagoan	9718	2560	0	0	845	13123
19	Petanahan	14186	1019	0	0	844	16049
20	Poncowarno	2083	2118	0	0	93	4294
21	Prembun	6858	463	0	0	626	7947
22	Puring	15232	1237	0	0	618	17087
23	Rowokele	14385	3552	0	0	2542	20479
24	Sadang	3510	749	0	0	1502	5761
25	Sempor	12069	1368	0	0	2306	15743
26	Sruweng	12280	1326	0	0	3416	17022

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kebumen, 2019

Keterangan: JSP=jamban sehat permanen, JSSP= jamban sehat semi permanen, BABS=buang air besar sembarangan

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan akta-akta kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang.

Capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Indikator rasio penduduk ber-KTP, rasio bayi berakta kelahiran, cakupan penerbitan KTP, dan cakupan penerbitan akta kelahiran selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan. Hal ini

menggambarkan meningkatnya kualitas pelayanan urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan, sekaligus juga menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 secara lebih lengkap disajikan pada Tabel 2.117.

Tabel 2.117
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019**

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019
1	Rasio penduduk ber-KTP	90%	92,52%	96,05%	99,88%
2	Rasio bayi berakta kelahiran	92,39%	97,76%	98,33%	96,80%
3	Cakupan penerbitan KTP	45,44%	93,86%	98,61%	99,88%
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	90%	93,50%	98,27%	97,41%
5	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kebumen, 2020

Dari Tabel 2.117, secara umum dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Indikator rasio penduduk ber-KTP, rasio bayi berakta kelahiran, cakupan penerbitan KTP, dan cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2016-2019, meskipun fluktuatif, cenderung meningkat. Hal ini menggambarkan meningkatnya kualitas pelayanan urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan, sekaligus juga menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan.

Peningkatan kinerja ini juga didukung beberapa inovasi yang dilakukan di antaranya program KeTaPel-17 dan Baladewa Lahir. KeTaPel-17 merupakan inovasi dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kebumen yang diperuntukan bagi wajib KTP pemula atau usia 17 tahun, dimana pada saat usia 17 tahun, langsung menerima KTP-el sebagai hadiah ulang tahun dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sedangkan Baladewa Lahir merupakan inovasi penerbitan akta kelahiran cepat bagi bayi yang lahir di bangsal, rumah sakit atau Puskesmas bekerjasama dengan 40 rumah sakit dan Puskesmas di Kabupaten Kebumen.

Permasalahan penting yang juga terjadi pada urusan ini adalah belum optimalnya pemanfaatan serta sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan untuk penanganan masalah-masalah pembangunan daerah. Contohnya adalah sinkronisasi data kependudukan/NIK dengan data terpadu kesejahteraan sosial untuk penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan ini juga sangat penting dalam rangka optimalisasi upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 serta antisipasi ancaman pandemi lain di masa yang akan datang.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, yang menitikberatkan

pada penguatan kelembagaan di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para *stakeholder* di desa melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Pemberdayaan masyarakat, penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, dan kemasyarakatan menjadi penting dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membangun sinergitas pembangunan desa dan pembangunan daerah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Kinerja pemberdayaan masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satunya keaktifan dalam berorganisasi.

Sementara itu, perkembangan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK sudah dilakukan dengan berbagai kegiatan di beberapa desa yang menjadi contoh di Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.118.

Tabel 2.118
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Pemberdayaan Masyarakat	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan pemberdayaan masyarakat (LPM)	200	200	354		
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	48	50	50	50	
3.	Jumlah LSM	216	202	234	240	
4.	LPM Berprestasi	-	-	-	-	
5.	PKK aktif	487	487	487	487	
6.	Posyandu aktif	2.105	1.945	1.914	1.909	
7.	Penilaian BUMDes tingkat dasar				186	124

No	Pemberdayaan Masyarakat	2016	2017	2018	2019	2020
8	Penilaian BUMDes Tingkat Tumbuh				115	246
9	Penilaian BUMDes Tingkat Berkembang dan Maju				9	19
10	IDM Kategori Sangat Tertinggal dan Tertinggal		176	66	22	
11	IDM Kategori Berkembang		253	327	357	
12	IDM Kategori Maju		19	53	69	
13	IDM Kategori Mandiri		1	3	1	

Sumber: Dispermades P3A dan Dinkes Kab. Kebumen, 2020

Lahirnya Undang-Undang Desa memberikan dorongan yang luar biasa terhadap perkembangan desa. Selain dalam pembangunan infrastruktur dasar, desa juga dapat membangun ekonomi desa salah satunya melalui BUMDes. Penilaian kategori BUMDes baru dimulai pada tahun 2019 karena BUMDes secara massif baru mulai berdiri di desa pasca lahirnya undang-undang desa. Tahun 2019 seluruh desa di Kabupaten Kebumen telah mendirikan BUMDes dengan jenis usaha yang sangat bervariasi. Dalam perkembangannya pertumbuhan BUMDes semakin membaik jika dibandingkan tahun 2019, namun kontribusi BUMDes terhadap perekonomian desa masih belum optimal, karena BUMDes yang ada masih dalam tahap awal pembentukan, masih lemahnya perencanaan bisnis, dan belum sepenuhnya mampu menggali potensi yang dimiliki oleh desa. Selain itu kurangnya keberpihakan kebijakan pengembangan BUMDes dari Pemerintah. Baru ada 19 BUMDes yang dapat berkembang dengan baik dan sedikit di antaranya sudah dikategorikan maju usahanya.

Kemandirian desa dipotret melalui Indeks Desa Membangun yang menggambarkan kemandirian desa berdasarkan konsepsi bahwa desa maju

mandiri mengedepankan pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan saling mengisi dalam menjaga potensi desa untuk mensejahterakan kehidupan desa (DitjenKemendes PDTT, 2020). Sebagian besar desa di Kabupaten Kebumen dalam tahapan desa berkembang, terdapat 22 desa dengan kategori tertinggal, 69 desa dengan kategori maju dan baru 1 desa dengan kategori mandiri.

Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kebumen semakin baik dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Hal ini dapat dilihat dari Organisasi Kemasyarakatan (Orkesmas) yang terus mengalami peningkatan baik berdasarkan profesi, agama, maupun umum. Jumlah total LSM dari 206 di tahun 2015 bertambah menjadi 240 pada tahun 2019. Perkembangan jumlah Orkesmas di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 secara lengkap disajikan pada Tabel 2.119.

Tabel 2.119
**Perkembangan Jumlah Orkesmas Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Orkesmas Berdasarkan Profesi	20	25	0	26	26
2.	Orkesmas Berdasarkan Agama	38	40	42	44	44
3.	Orkesmas Umum	148	151	160	164	170
Jumlah Total Orkesmas		206	216	202	234	240

Sumber: Kesbangpol Kab. Kebumen, 2020

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Selama 4 tahun terakhir tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan. Hal itu terlihat dari persentase Keluarga Sejahtera II yang meningkat dari 13,4 persen pada tahun 2016 menjadi 60,07 persen di tahun 2019. Peningkatan tersebut juga diikuti dengan penurunan persentase Keluarga Pra Sejahtera dari 13,48 persen di tahun 2016 menjadi 13,37 persen di tahun 2019.

Tabel 2.120
**Persentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Keluarga Pra Sejahtera	13,48	61,85	13,35	13,37
2.	Keluarga Sejahtera I	13,4	62,69	59,92	60,07
3.	Keluarga Sejahtera II	13,41	60,69	26,73	26,56

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen, 2020

b) Keluarga Berencana

Kinerja Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Kebumen mengalami penurunan selama kurun waktu tahun 2015-2019. Hal ini dapat dilihat dari rasio akseptor KB dari 72,31 pada 2015 menurun menjadi 71,00 di tahun 2019. Perlu peningkatan pelaksanaan program KB agar pengendalian penduduk lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.121.

Tabel 2.121
**Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

Uraian Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,7	2,7	2,7	3	2,08
Jumlah Pasangan Usia Subur	214.553	208.841	206.543	199.509	198.315
Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	155.134	155.134	154.502	142.389	141.441
Jumlah Pasangan Usia Subur tidak ber-KB	59.419	53.707	52.041	51.360	56.874
Rasio Akseptor KB	72,31	74,28	74,80	71,37	71,00

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen, 2020

c) Pengendalian Penduduk

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan tidak hanya pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja, namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain itu, dalam upaya mensukseskan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita) terutama Nawacita ketiga, kelima dan kedelapan. Salah satu dari tiga agenda prioritas ini adalah Nawacita ketiga yaitu membangun masyarakat dari wilayah pinggiran dengan program pembentukan Kampung KB pada tingkatan paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Desa, yang dicanangkan pertama kali pada tingkat nasional pada bulan Februari tahun 2016 oleh Presiden RI (Ir. Joko Widodo).

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kebumen, kini telah mencanangkan 69 Kampung KB dan 1 Kampung KB percontohan (*Centre of Excellent*) yang tersebar di 26 kecamatan. Penetapan Kampung KB bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat desa atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Tabel 2.122
**Pencanangan Kampung KB Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2019**

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kampung KB	7	26	35	1

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.123
Rincian Lokasi Kampung KB Kabupaten Kebumen

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tanggal Dicanangkan
1.	Ayah	Argosari	10-May-17
		Kalipoh	09-May-18
		Jatiroto	17-May-17
2.	Buayan	Sikayu	09-May-18
		Rangkah	18-Jul-18
3.	Puring	Sidobunder	13-Jul-17
		Sidoharjo	08-Aug-18
4.	Petanahan	Kebonsari	20-Oct-16
		Ampelsari	19-Jul-17
		Tegalretno	28-Aug-18
5.	Klirong	Tanggulangun	10-May-17
		Pandanlor	18/07/2018
6.	Buluspesantren	Tanjungrejo	10-Aug-16
		Jogopaten	16-May-17
		Rantewringin	19-Jul-18
		Indrosari	11-Jul-18
7.	Mirit	Winong	24-May-17
		Tlogopragoto	12-Jul-18
		Wergonayan	19-Jul-18
8.	Ambal	Benerkulon	29-Dec-16
		Kaibon	23-May-17
		Kaibon Petangkuran	19-Jul-18
		Plempukan kembaran	08-May-18
9.	Prembun	Kabuaran	23-Nov-16
		Sidogede	18-May-17
		Tunggalroso	30-Jun-18
10.	Kutowinangun	Pejagatan	23-May-17
		Ungaran	30-Apr-18
11.	Alian	Kalijaya	13-Jul-17
		Kemangguan	04-Jul-18
12.	Kebumen	Depokrejo	13-Aug-16
		Bandung	20-May-17
		Roworejo	08-May-18
13.	Pejagoan	Kuwayuhan	24-May-17
		Karangpoh	10-Jul-18
		Kebagoran	04-Jul-18
14.	Sruweng	Klepusanggar	13-Jul-17
		Sidoagung	26-Jul-18
15.	Adimulyo	Sidomukti	23-May-17
		Sugihwaras	03-Jul-18



No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Tanggal Dicanangkan
16.	Kuwarasan	Temanggal	05-Jul-18
		Harjodowo	08-Aug-17
		Sidomukti	08-Aug-18
17.	Rowokele	Wonoharjo	18-May-17
		Giyanti	14-May-18
18.	Sempor	Sidoharum	23-May-17
		Semali	31-Jul-18
		Donorojo	26-Jul-18
19.	Gombang	Kedungpuji	26-Jul-16
		Kalitengah	23-May-17
		Klopogodo	14-May-18
20.	Karanganyar	Sidomulyo	12-Jul-17
		Candi	04-Jul-18
21.	Karanggaram	Logandu	24-Feb-16
		Wonotirto	28-Sep-16
		Karanggayam	24-May-17
		Pagebangan	08-May-18
		Kalibening	14-May-18
22.	Sadang	Wonosari	04-Oct-17
		Pucangan	12-Dec-18
23.	Bonorowo	Balorejo	24-May-17
		Patukrejo	05-Jul-18
		Bonorowo	27-Aug-18
24.	Padureso	Rahayu	22-May-17
		Kalijering	26-Apr-18
25.	Poncowarno	Jatipurus	24-May-17
		Tegalrejo	12-Jul-18
26.	Karangsambung	Kaligending	18-May-17
		Tlepok	12-Jul-18

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen, 2020

Selain itu, di setiap Kampung KB yang dicanangkan terdapat Rumah Data Kependudukan yang dibentuk untuk meningkatkan tata kelola pembangunan tingkat desa berbasis data. Keberadaan rumah data terintegrasi dengan sumber data lain, baik data demografi maupun data yang digunakan untuk melakukan intervensi program-program pembangunan di Kampung KB melalui pelibatan lintas guna pengentasan kemiskinan dan pencapaian program KKBPK.

Tabel 2.124
**Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,31	0,29	0,26	0,24	
2.	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	3,721	3,404	3,085	1,190	
3.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	2,70	2,70	3,00	2,08	
4.	Rasio Akseptor KB	74,86%	72,21%	71,75%	71,42%	70,77%

Sumber: DDA Kebumen, 2019, data diolah

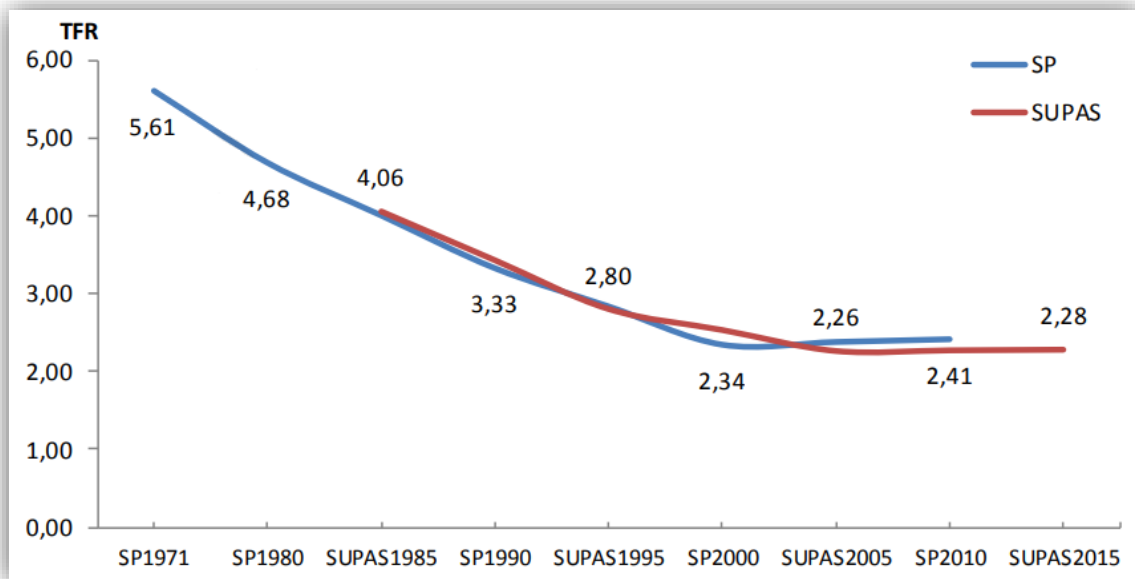
Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk memiliki kecenderungan menurun. Penurunan ini antara lain disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat dalam upaya masyarakat melaksanakan program pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana. Laju Pertumbuhan Penduduk apabila tidak dikendalikan berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan sumber data dari SUPAS 2015, dalam waktu lima tahun terakhir (2010-2015) laju pertumbuhan penduduk Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 1,43 persen, sementara laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah 2010-2015 mengalami penurunan menjadi 0,83. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kebumen mengalami peningkatan rata rata 0,28 persen per tahun.

Proyeksi Indonesia tahun 2015-2045 disusun menggunakan 2 (dua) alternatif. Kedua alternatif tersebut diterapkan pada kedua skenario proyeksi penduduk Indonesia sebagai berikut:

- Skenario A adalah skenario kebijakan, yaitu Angka Kelahiran Total (TFR) mulai stagnan pada tahun 2020. Pencapaian $TFR = 2,1$ terjadi pada tahun 2020 dan selanjutnya stagnan dalam periode 2020-2045 sebesar 2,1.
- Skenario B adalah skenario tren, yaitu TFR Indonesia menurun sesuai dengan kecenderungan di masa lampau, dan diproyeksikan akan mencapai *Net Reproduction Rate* (NRR) = 1 atau setara $TFR = 2,1$ pada tahun 2020 dengan menggunakan rumus fungsi logistik.

TFR adalah jumlah dari angka kelahiran menurut kelompok umur dan merupakan ringkasan ukuran dari tingkat fertilitas. Angka ini menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita pada akhir masa reproduksinya. TFR untuk setiap provinsi dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

- Pada skenario A, seperti halnya pada tingkat nasional, apabila provinsi telah mencapai situasi $NRR = 1$ atau setara $TFR = 2,1$, maka kecenderungan TFR akan ditahan/dipagu pada angka 2,1 tersebut. Untuk provinsi yang telah mencapai $NRR=1$ atau di setara $TFR = 2,1$ dan bahkan telah berada di bawah nilai "*replacement level*" tersebut, TFR akan dibuat konstan atau bahkan akan cenderung meningkat secara perlahan.
- Pada skenario B, TFR diasumsikan menurun dengan kecepatan yang berbeda sesuai dengan tren di masa lampau masing-masing provinsi. Kemudian besarnya diproyeksikan dengan menggunakan rumus fungsi logistik seperti proyeksi TFR Indonesia.



Sumber: SP 1971, SP 1980, SP 1990, SP 2000, SP 2010, SUPAS 1985, SUPAS 1995, SUPAS 2005, SUPAS 2015

Gambar 2.57
Estimasi Angka Kelahiran Total (TFR) Indonesia

Tingkat fertilitas Indonesia hasil Sensus Penduduk 1971 – 2010 maupun SUPAS seperti terlihat pada Gambar 2.57 yang menyajikan hasil estimasi perhitungan TFR dengan Metode Anak Kandung (*Own Children Method*). Estimasi TFR yang dihitung menggambarkan keadaan tiga tahun sebelum tahun sensus/survei yaitu tahun 1968, 1977, 1987, 1997, 2017 dan 2012. TFR secara nasional menunjukkan tren yang terus menurun, dari angka 5,61 anak pada tahun 1971 menjadi 2,41 anak pada tahun 2010 dan menurun lagi menjadi 2,28 anak pada tahun 2015. TFR Indonesia berdasarkan hasil SUPAS 2015 sebesar 2,28. Capaian rata rata per keluarga tahun 2016 sampai tahun 2018 cenderung tinggi, terlihat bahwa rata-rata setiap keluarga mempunyai anak 3 orang dan pada tahun 2019 rata rata keluarga memiliki 2 anak. Kondisi rata-

rata jumlah anak per keluarga sudah sesuai dengan target pemerintah dan konsep Keluarga Berencana 2 Anak Lebih Baik. Rasio sebagai akseptor KB dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, meskipun bila dilihat dari *Total Fertility Rate* (TFR) angka kelahiran cenderung menurun rata-rata perempuan usia 15-49 tahun selama masa suburnya rata-rata memiliki 1 orang anak. Asumsi fertilitas dibuat berdasarkan tren tingkat fertilitas di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan tingkat fertilitas. Selain menggunakan data kecenderungan tingkat fertilitas masa lalu, juga digunakan informasi mengenai target pencapaian tingkat fertilitas di masa yang akan datang.

Tabel 2.125
**Pencanangan Kampung KB Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2019**

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kampung KB	7	26	35	1

Sumber: Dinsos PPKB Kab. Kebumen, 2020

9. Urusan Perhubungan

Dalam rangka menghubungkan antartempat atau dari satu daerah ke daerah lain, perlu suatu hal yang dapat membantu masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Salah satu cara yang dapat menghubungkan antardaerah yaitu dengan lalu lintas.

Rambu-rambu Lalu Lintas

Adanya kompleksitas pada lalu lintas menyebabkan pengelolaan lalu lintas harus dijalankan dengan baik, salah satunya yaitu dengan menyediakan fasilitas rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Kebumen tersebar di beberapa jalan, seperti jalan nasional, provinsi, dan kota. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen tahun 2020, fasilitas rambu-rambu lalu lintas di Kebumen menunjukkan kondisi yang baik (lihat Tabel 2.126).

Tabel 2.126
Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Jenis Jalan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Tidak Baik	
1	Nasional	116	13	129
2	Provinsi	117	28	145
3	Kota	86	4	90

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Keberadaan lalu lintas beserta fasilitas rambu-rambu lalu lintas berdampak pada kemudahan masyarakat untuk berpindah tempat. Selain menggunakan kendaraan milik pribadi, masyarakat juga dapat bepergian dengan menggunakan kendaraan umum.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Kebumen mengalami tren peningkatan dari tahun 2016-2020. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat Kebumen meningkat. Secara umum,

penumpang angkutan umum didominasi oleh penumpang bis. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127
**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penumpang Bis	289.931	298.687	304.661	310.661	316.969
2	Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
3	Jumlah Penumpang ASDP	-	-	-	-	-
4	Jumlah Penumpang Klotok, Kapal Motor, Kapal Wisata	-	-	-	-	-
5	Jumlah penumpang Speed Boat	-	-	-	-	-
	Total Jumlah Penumpang	289.931	298.687	304.661	310.661	316.969

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Uji Kir Angkutan Umum

Dalam rangka menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang, maka dilakukan uji kir pada kendaraan umum untuk menjamin persyaratan dan kelayakan kendaraan. Persentase uji kir kendaraan umum di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020**

No	Angkutan umum	2016	2017	2018	2019	2020 *
1	Mobil penumpang umum	343	349	349	349	201
2	Mobil bus	1265	1328	1348	1352	662
3	Mobil barang	5070	5135	5320	5504	3861
4	Kereta tempelan	-	-	3	3	3
5	Kereta Gandengan	-	-	1	1	1
	Jumlah	6678	6812	7021	7206	4748

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Kinerja pelayanan untuk transportasi umum di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah uji kir angkutan umum yang meningkat dari 6.686 kali di tahun 2015 menjadi 7.206 kali pada tahun 2019. Adapun lama waktu dalam uji kir untuk angkutan umum di Kabupaten Kebumen berlangsung selama 30 menit.

Tabel 2.129
**Lama Waktu Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020**

Jenis Angkutan	2016	2017	2018	2019	2020
Semua Jenis Angkutan	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Biaya Uji Kir Kendaraan Umum

Biaya uji kendaraan umum diatur dengan Peraturan Bupati. Biaya uji kir angkutan umum di Kabupaten Kebumen dibedakan sesuai jenis angkutan umum. Biaya uji kir angkutan umum mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.130.

Tabel 2.130
Biaya Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Angkutan Umum	2016	2017	2018	2019	2020 *
1	Mobil Penumpang Umum					
	JBK s/d 4.999 kg	23.500	23.500	23.500	23.500	80.000
	JBK 5000 s/d 9.999 kg	27.000	27.000	27.000	27.000	83.000
	JBK 10.000 s/d 14.999 kg	30.500	30.500	30.500	30.500	88.000
	JBK 15.000 kg keatas	34.000	34.000	34.000	34.000	91.000
2	Mobil Bus					
	JBK s/d 4.999 kg	23.500	23.500	23.500	23.500	80.000

No	Angkutan Umum	2016	2017	2018	2019	2020 *
	JBK 5.000 s/d 9.999 kg	27.000	27.000	27.000	27.000	83.000
	JBK 10.000 s/d 14.999 kg	30.500	30.500	30.500	30.500	88.000
	JBK 15.000 kg keatas	34.000	34.000	34.000	34.000	91.000
	Mobil Barang					
	JBK s/d 4.999 kg	23.500	23.500	23.500	23.500	80.000
3	JBK 5.000 s/d 9.999 kg	27.000	27.000	27.000	27.000	83.000
	JBK 10.000 s/d 14.999 kg	30.500	30.500	30.500	30.500	88.000
	JBK 15.000 kg keatas	34.000	34.000	34.000	34.000	91.000
	Kereta Tempelan					
4	JBK 5.000 s/d 9.999 kg	27.000	27.000	27.000	27.000	83.000
	JBK 10.000 s/d 14.999 kg	30.500	30.500	30.500	30.500	88.000
	JBK 15.000 kg keatas	34.000	34.000	34.000	34.000	91.000
	Kereta Gandengan					
5	JBK 5.000 s/d 9.999 kg	27.000	27.000	27.000	27.000	83.000
	JBK 10.000 s/d 14.999 kg	30.500	30.500	30.500	30.500	88.000
	JBK 15.000 kg keatas	34.000	34.000	34.000	34.000	91.000
	Biaya Pengganti Tanda Uji Baut Kawat & Segel	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Denda Terlambat 2% Perbulan	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Penggantian Buku Uji yang hilang	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Penggantian Stiker tanda samping	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Sumberdaya Uji Kir

Sumberdaya uji kir Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 (lihat Tabel 2.131) telah diadakan peremajaan alat uji kir, peningkatan SDM penguji sehingga sudah dapat melayani uji kir kendaraan dua sumbu (kereta tempelan dan kereta gandengan) dan bus. Volume uji kir semakin banyak, bahkan ada kendaraan dari luar Kebumen yang melakukan uji kir di Dishub Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.131

Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Jenis Alat Uji	Tahun Pengadaan	Ket.
1	Alat uji kincup roda depan (side slip tester)		Fungsi
2	Alat uji rem (brake tester)	2020	Fungsi
3	Alat uji penunjuk kecepatan (speedometer tester)	2020	Fungsi
4	Alat uji lampu utama (headlight tester)	2016	Fungsi
5	Alat uji berat (axle load tester)	2020	Fungsi
6	Alat uji emisi CO/HC (gas analyzer)	2014	Fungsi
7	Alat uji ketebalan asap (smoke tester)	2014	Fungsi
8	Alat uji tingkat suara (sound level)	2016	Fungsi
9	Alat uji kegelapan kaca (tint tester)	2016	Fungsi

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

Jenis terminal

Jenis terminal terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Mayoritas terminal bus di Kabupaten Kebumen merupakan terminal Tipe C. Terminal Tipe C merupakan terminal yang berfungsi untuk melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.132.

Tabel 2.132

Jumlah Terminal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Jenis Kegiatan	Jumlah Terminal				
	2016	2017	2018	2019	2020
TNB Type C Kebumen	1	1	1	1	1
TNB Type C Gombong	1	1	1	1	1
TNB Type C Karanganyar	1	-	-	-	-
Terminal Bus Gombong	1	1	1	1	1
TNB Type C Prembun	1	1	1	-	-
Terminal Bus Kebumen	1	1	1	1	1
TNB Type C Kutowinangun	1	-	-	-	-
TNB Type C Karanggayam	-	-	-	1	1
Total	7	5	5	5	5

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020

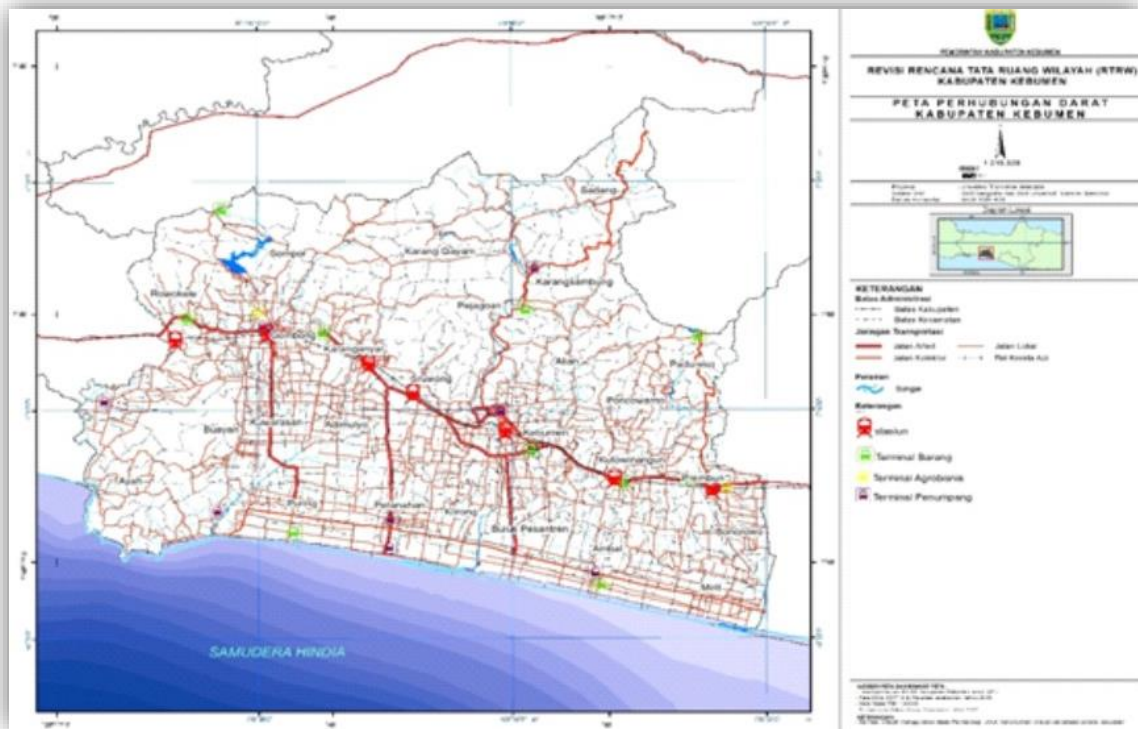
Jumlah Angkutan Umum

Kendaraan angkutan umum di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 didominasi oleh angkutan perdesaan 50,2 persen, sedangkan bus (AKDP, AKAP) sebesar 32,3 persen. Jalur trayek bus melalui jalan nasional di tengah kabupaten, sedangkan jalur angkutan perdesaan menghubungkan antar-kecamatan dalam kabupaten. Peta perhubungan darat Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Gambar 2.62.

Tabel 2.133
**Jumlah Angkutan Umum dan Izin Trayek di Kabupaten Kebumen
Tahun 2020**

No	Uraian	2020
1	Jumlah angkutan umum	1.016
	• Angkutan perdesaan <i>seat</i> 12	291
	• Angkutan perdesaan <i>seat</i> 16	241
	• Angkutan kota dalam provinsi	173
	• Angkutan kota antarprovinsi	155
	• Angkutan pariwisata	138
	• Taksi	5
	• Antar jemput antarprovinsi	13
2	Jumlah izin trayek	90*

Sumber: Dishub Kab. Kebumen, 2020



Sumber: Peta Revisi RTRW Kab. Kebumen Tahun 2011-2031, 2018

Gambar 2.58
Peta Perhubungan Darat Kabupaten Kebumen

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari indikator nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengalami peningkatan dari 2,11 pada tahun 2018 menjadi 2,64 pada tahun 2019. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, Kehandalan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Capaian nilai SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.134.

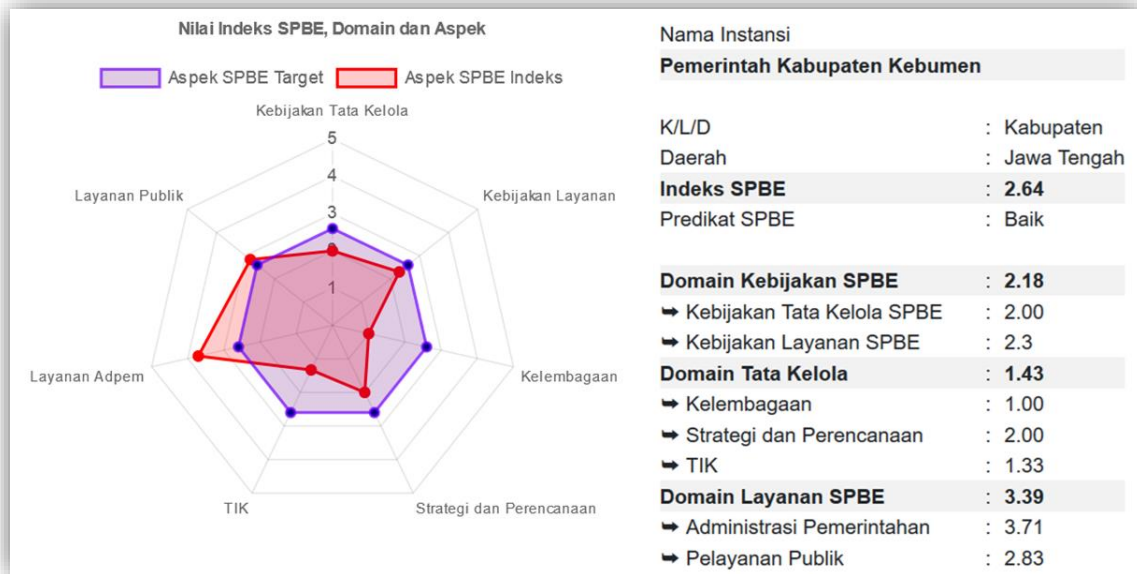
Tabel 2.134
**Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020**

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020*
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	2,11	2,64	3,00

Sumber: Diskominfo Kab. Kebumen, 2020

*) Data proyeksi

Pada tahun 2019, dari 3 (tiga) domain pembentuk indeks SPBE Kabupaten Kebumen pada tahun 2019, domain tata kelola menjadi domain yang nilainya paling rendah. Rendahnya nilai tata kelola ini disebabkan dasar aturan penerapan aplikasi, *Term of Reference* (ToR) penerapan aplikasi pemerintah berbasis elektronik sebagian besar belum ada. Sebagai contoh aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), dasar penerapan dan ToR yang mengatur di dalamnya apa saja, serta diagram alur aplikasinya belum ada. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kelembagaan, strategi dan perencanaan serta keandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



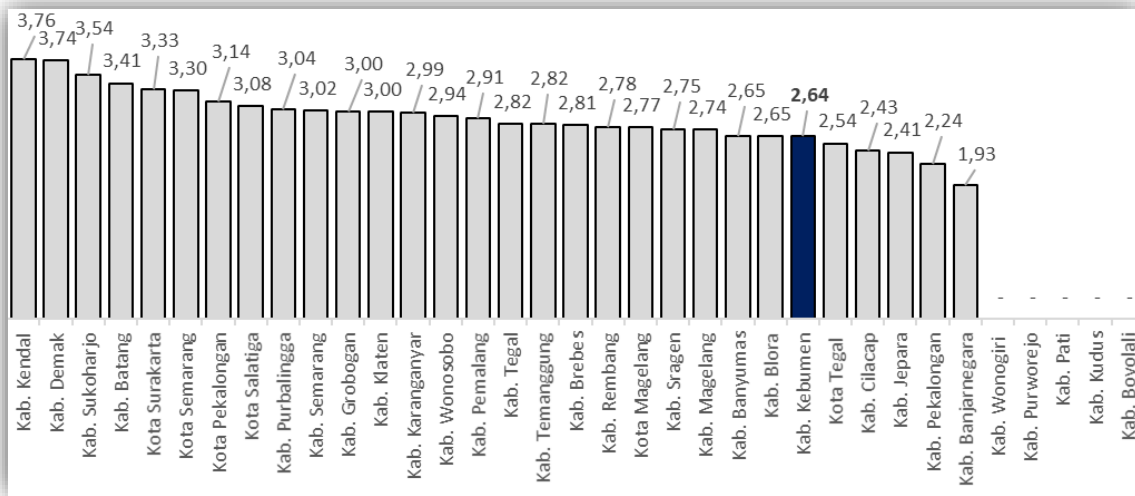
Sumber: Portal SPBE Nasional (spbe.go.id), 2020

Gambar 2.59
**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 Kabupaten Kebumen Tahun 2019**

Tabel 2.135
**Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Kategori	No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Kategori
1	Kab. Kendal	3,76	Sangat Baik	19	Kab. Rembang	2,78	Baik
2	Kab. Demak	3,74	Sangat Baik	20	Kota Magelang	2,77	Baik
3	Kab. Sukoharjo	3,54	Sangat Baik	21	Kab. Sragen	2,75	Baik
4	Kab. Batang	3,41	Baik	22	Kab. Magelang	2,74	Baik
5	Kota Surakarta	3,33	Baik	23	Kab. Banyumas	2,65	Baik
6	Kota Semarang	3,30	Baik	24	Kab. Blora	2,65	Baik
7	Kota Pekalongan	3,14	Baik	25	Kab. Kebumen	2,64	Baik
8	Kota Salatiga	3,08	Baik	26	Kota Tegal	2,54	Cukup
9	Kab. Purbalingga	3,04	Baik	27	Kab. Cilacap	2,43	Cukup
10	Kab. Semarang	3,02	Baik	28	Kab. Jepara	2,41	Cukup
11	Kab. Grobogan	3,00	Baik	29	Kab. Pekalongan	2,24	Cukup
12	Kab. Klaten	3,00	Baik	30	Kab. Banjarnegara	1,93	Cukup
13	Kab. Karanganyar	2,99	Baik	31	Kab. Wonogiri	-	-
14	Kab. Wonosobo	2,94	Baik	32	Kab. Purworejo	-	-
15	Kab. Pemalang	2,91	Baik	33	Kab. Pati	-	-
16	Kab. Tegal	2,82	Baik	34	Kab. Kudus	-	-
17	Kab. Temanggung	2,82	Baik	35	Kab. Boyolali	-	-
18	Kab. Brebes	2,81	Baik				

Sumber: Bagian Organisasi Setkab Kebumen, 2020



Sumber: Bagian Organisasi Setkab Kebumen, 2020

Gambar 2.60
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Dari Tabel 2.135 dan Gambar 2.60, nilai indeks SPBE Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 masih cukup tertinggal dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan menempati peringkat ke 25 dari 35 kabupaten/kota.

Tabel 2.136
Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Operator	Jumlah Menara
1	PT. Telkomsel	175
2	PT. Indosat	2
3	PT. XL Axiata	33
4	PT. Hutchinson Cp Tel. (Three)	62
5	PT. Telkom (Flexy)	0
6	PT. Indosat-StarOne DMA	0
7	PT. Mobile 8 (fren)	0
Jumlah		272

Sumber: Diskominfo Kab. Kebumen, 2020

Kabupaten Kebumen telah menerapkan *e-government* melalui aplikasi-aplikasi yang diterapkan di perangkat daerah. Penerapan *e-government* ini

diharapkan dapat mendukung efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, mendukung reformasi birokrasi, mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya praktik KKN karena keberadaan TIK mampu memfasilitasi pemerintah untuk memecahkan berbagai kelemahan birokrasi di dalam menjalankan tugasnya yang menyangkut perencanaan, penganggaran, koordinasi dan pengawasan.

Tabel 2.137
**Daftar Aplikasi/Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019**

No.	OPD	Nama Aplikasi	URL/Alamat
1	Bagian Hukum	JDIH	https://jdih.kebumenkab.go.id/
2	Bagian Kesra	Sistem Informasi Tempat Ibadah	
3	Bagian Kesra	E-KKN	
4	Bagian Organisasi	e-SAKIP	http://e-sakip.kebumenkab.go.id/kebumenlp/
5	Bagian Organisasi	E-LETTER	http://eletter.kebumenkab.go.id
6	Bagian Pembangunan	SIMPEL	http://simpel.kebumenkab.go.id/dashboard
7	Bagian Pembangunan	SIMADA	http://ulp.kebumenkab.go.id/
8	Bagian Tata Pemerintahan	SIGADA	http://sigada.kebumenkab.go.id/
9	Bagian Tata Pemerintahan	LPPD	http://sigada.kebumenkab.go.id/
10	BAP3DA	SIMPER	http://simper.kebumenkab.go.id/index.php/web
11	BAP3DA	SIDATENAN	http://sidatenan.kebumenkab.go.id/index.php/login
12	BAP3DA	SIMDALEV	http://simdalev.kebumenkab.go.id/
13	BAP3DA	INFRASTRUKTUR	http://infrastruktur.kebumenkab.go.id/
14	BAP3DA	SIMTARU	
15	BAP3DA	SIMTAKIN	
16	BAPPENDA	Aplikasi BPHTB	



No.	OPD	Nama Aplikasi	URL/Alamat
17	BAPPENDA	Aplikasi E-Localtax	http://e-localtax.kebumenkab.go.id/
18	BAPPENDA	SIKOPAT	http://sikopat.kebumenkab.go.id/
19	BAPPENDA	SIM PBB	http://simpbb.kebumenkab.go.id/ index.php/login
20	BAPPENDA	SIMPADA OFFLINE	
21	BAPPENDA	SIMPADA CONVERTER REPORT	
22	BAPPENDA	SISMIOP	
23	BAPPENDA	Aplikasi SIG	
24	BKPPD	SIMPEG	http://simpeg.kebumenkab.go.id/
25	BKPPD	E-KINERJA	http://tukin.kebumenkab.go.id/
26	BKPPD	E-Presence	http://e-presence.kebumenkab.go.id/
27	BPBD	e-JITUPASNA	localhost
28	BPBD	ABBA	
29	BPBD	Aplikasi iCLBK	http://clbk.kebumenkab.go.id/
30	BPKAD	SIMDA KEUANGAN	Dekstop
31	BPKAD	SIM GAJI	
32	BPKAD	SIMDA BMD	
33	BPKAD	SIPPAS	Localhost
34	BPKAD	SIDAT KEDATON	https://sidatkedaton.kebumenkab.go.id/
35	BPKAD	SIPATMA	http://10.101.0.10/
36	BPKAD	SIMKASDA	http://simkasda.kebumenkab.go.id/
37	BPKAD	SIM BAPER	Localhost
38	DINKES	SPGDT	http://spgdt.kebumenkab.go.id/
39	DINKES	SIKDA	http://sikda.kebumenkab.go.id/ sikkebumen
40	DINKES	SIMPUS	
41	DINLUTKAN	SIMUSPER	
42	DINLUTKAN	SARANA TANGKAP IKAN	
43	DINLUTKAN	Laporan Produksi Perikanan	
44	DINSOSPPKB	Aplikasi BDT (Basis Data Terpadu) SIKNG	
45	DINSOSPPKB	Aplikasi PKH	
46	DINSOSPPKB	Aplikasi Statistik Rutin BKKBN	http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/
47	DINSOSPPKB	ODGJ	
48	DINSOSPPKB	Pendataan Keluarga	
49	DINSOSPPKB	SIMPANTI ONLINE	



No.	OPD	Nama Aplikasi	URL/Alamat
50	DISARPUS	SIM ARSIP	http://arsip.kebumenkab.go.id
51	DISARPUS	SIKD	http://arsip.kebumenkab.go.id/
52	DISARPUS	INISLITE	
53	DISARPUS	KUNANG-KUNANG	
54	DISARPUS	KLA	http://kla.kebumenkab.go.id/
55	DISDIK	SIPA-PTK DISDIK KEBUMEN	https://disdik.kebumenkab.go.id/sipa-ptk/
56	DISDIK	PROFIL PENDIIDIKAN	http://dapodik.kebumenkab.go.id/e-profil/index.php/web
57	DISDIK	SITAPAK GURU	https://disdik.kebumenkab.go.id/sitapak-guru/
58	DISHUB	SIMITRA	http://simitra.perhubungan.kebumenkab.go.id/
59	DISHUB	KERIS UBKB	http://pkbkebumen.keriss.id
60	DISKOMINFO	PPID	http://ppid.kebumenkab.go.id/
61	DISKOMINFO	Kebumen On News	http://kebumenonnews.kebumenkab.go.id/
62	DISKOMINFO	KDA	http://kda.kebumenkab.go.id/
63	DISKOMINFO	SIMPEL FAX	http://kominfo.kebumenkab.go.id/santel/simpelfax/
64	DISKOMINFO	PORTAL DESA	http://portaldesa.kebumenkab.go.id
65	DISKOMINFO	PEMERINGKATAN SUBDOMAIN	https://rating.kominfo.kebumenkab.go.id/
66	DISKOMINFO	LAPORBUP	http://laporbup.kebumenkab.go.id/
67	DISNAKER KUKM	BURSA KERJA ONLINE	http://bursakerja.kebumenkab.go.id/
68	DISPENDUK CAPIL	Pelayanan Online	http://pelayanan-kependudukan.kebumenkab.go.id/
69	DISPERINDAG	SKRD PASAR	skrdpasar.kebumenkab.go.id
70	DISPERINDAG	SP2KP	https://ews.kemendag.go.id/dalam-pengembangan.aspx
71	DISPERINDAG	SiHaTi	http://hargajateng.org/
72	DISPERKIM LH	SIRUMAH	sirumah.kebumenkab.go.id/
73	DISPERKIM LH	SILHD	http://disperkimlh.kebumenkab.go.id/silhd/
74	DISPERMADES P3A	SID	http://sid.kebumenkab.go.id/
75	DISPERMADES P3A	SI PROFIL DESA	
76	DISPERMADES P3A	SID SUPRA DESA	http://sid.kebumenkab.go.id/
77	DISPERMADES P3A	SIGA	
78	DISPERMADES P3A	SISKEUDES	
79	DISPORAWISATA	SIDORA	http://sidora.kebumenkab.go.id
80	DISPORAWISATA	E-TIKET WISATA	http://e-tiketwisata.kebumenkab.go.id/
81	DISTAPANG	Sistem Persuratan	
82	DPMPTSP	SIPERI	perizinan.kebumenkab.go.id

No.	OPD	Nama Aplikasi	URL/Alamat
83	DPRD	Website DPRD Kebumen	http://dprd-kebumenkab.go.id
84	DPUPR	REMAJA	http://remaja.kebumenkab.go.id/
85	DPUPR	SIMATJAGAT	
86	DPUPR	SIJARI	
87	DPUPR	SIBIMA	http://sibima.kebumenkab.go.id/
88	KECAMATAN KEBUMEN	PATEN	
89	RSUD dr. Soedirman	Antrian Touch Screen	
90	RSUD dr. Soedirman	Pendaftaran Online	http://36.66.172.73/hospital/public/
91	RSUD dr. Soedirman	SIM RS	
92	RSUD dr. Soedirman	Survei Kepuasan	
93	RSUD dr. Soedirman	TV MEDIA RSUD KEBUMEN	
94	RSUD dr. Soedirman	SIMIKIR	
95	RSUD dr. Soedirman	SISMADAK	
96	RSUD PREMBUN	SIMRS Khanza	
97	SATPOLPP	E-SKD	
98	SATPOLPP	SIMPEL	http://simpl.kebumenkab.go.id/ dashboard
99	TP PKK KEBUMEN	SIM PKK	http://pkk.kebumenkab.go.id

Sumber: Diskominfo Kab. Kebumen, 2020

Sampai dengan tahun 2019 terdapat 99 aplikasi *e-government* yang telah diterapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dari 99 aplikasi tersebut, 87 aplikasi berbasis web dan sisanya 12 aplikasi berbasis desktop. Namun, dari sedemikian banyak aplikasi yang ada tersebut, mayoritas dari masing-masing aplikasi tersebut masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi satu dengan lainnya, sehingga OPD masih harus menginput data di masing-masing aplikasi.

Gambaran kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Kebumen juga dapat dilihat dari ketersediaan prasarana pendukung teknologi,

komunikasi dan informatika. Sampai dengan tahun 2019, prasarana TIK yang tersedia dapat dilihat pada Tabel 2.138.

Tabel 2.138
**Kondisi Infrastruktur Digital
Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2019**

No.	Komponen	Nilai Kondisi
1.	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	100% area telah tercover jaringan internet minimal 3G
2.	Tersedianya jaringan <i>broadband acces</i> untuk masyarakat	Tersedia
3.	Jumlah lokasi wireless untuk publik	Di setiap OPD/Kantor/kecamatan/ kelurahan terdapat hotspot baik untuk internal pemerintah maupun publik, di samping itu juga terdapat hotspot di area publik seperti Pasar Tumenggungan dan Taman Kota
4.	Akses internet terpusat (didistribusikan)	Kapasitas 300Mbps akses internasional Kapasitas 800Mbps akses domestik
5.	Jaringan antar-SKPD	<ul style="list-style-type: none"> a. 36 OPD terkoneksi <i>Fiber Optic</i> (FO) b. 2 OPD terkoneksi jaringan LAN c. 1 OPD terkoneksi wireless d. 8 Kantor Camat terkoneksi FO e. 17 Kantor Camat terkoneksi wireless f. 10 Puskesmas terkoneksi FO g. 5 Puskesmas terkoneksi wireless h. 6 Kantor Kelurahan terkoneksi dengan FO i. 26 Kantor Desa terkoneksi FO j. 3 Kantor Desa terkoneksi <i>wireless</i>

Sumber: *Masterplan Smartcity Kabupaten Kebumen, 2019 dan Diskominfo Kab. Kebumen, 2020*

Dari data pada Tabel 2.138, dapat dikatakan bahwa sampai dengan tahun 2019, infrastruktur digital di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi dimana tidak ada daerah/wilayah di Kabupaten Kebumen yang sama sekali tidak terkoneksi dengan jaringan internet (*blank spot area*), seluruh OPD dan kecamatan telah terkoneksi jaringan internet. Namun demikian masih ada permasalahan ketersediaan jaringan internet di

kantor desa/kelurahan, dimana dari 460 desa/kelurahan yang ada, baru 35 kantor desa/kelurahan (atau 7,61 persen) yang terkoneksi jaringan internet.

Sementara itu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguasai teknologi dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen masih sangat terbatas, hanya sekitar 0,43 persen (47 orang) dari seluruh ASN yang berjumlah 11.000 orang. Persebarannyapun belum merata ke seluruh perangkat daerah. Perangkat daerah yang memiliki SDM TIK baru sekitar 62 persen (16 PD) dari 26 PD yang ada. Beberapa perangkat daerah yang menangani langsung pelayanan publik kepada masyarakat seperti Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan kecamatan belum memiliki SDM TIK. Berikut persebaran ASN yang memiliki kompetensi TIK di Perangkat Daerah Kabupaten.

Tabel 2.139

Persebaran ASN yang Memiliki Kompetensi TIK di Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

No.	Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi TIK
1	BKPPD	5
2	BPPD	1
3	Barenlitbangda	1
4	Setda	7
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2
10	Dinas Pendidikan	14
11	Dinas Perhubungan	1
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
13	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, UMKM	2
14	Inspektorat	3
15	Kantor Kesbangpol	1
16	RSUD	1

Sumber: BKPPD Kabupaten Kebumen, 2020

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja daerah di bidang Koperasi menunjukkan perkembangan yang relatif positif. Indikator berupa persentase jumlah koperasi aktif terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, kenaikan persentase koperasi aktif tampaknya tidak linier dengan nilai omsetnya. Nilai omset per koperasi menunjukkan fluktuasi. Kinerja koperasi ini sangat erat berkaitan dengan masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan dari koperasi yang bersumber dari kurangnya jiwa kewirausahaan dari para pengurus koperasi. Permasalahan lain yang dihadapi oleh koperasi adalah rumitnya mekanisme pembubaran koperasi sehingga sekalipun terdapat koperasi yang secara fisik tidak ditemukan alamat, baik kantor maupun pengurus dan pengawasnya, namun tetap tercatat ada koperasi dan tidak dapat dibubarkan.

Tabel 2.140
Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	77	80	80	84	85*
2	Omset Koperasi (Rp 000)	<i>n/a</i>	461.095.191	373.460.829	461.458.055	<i>n/a</i>
3	Omset per koperasi (Rp 000)	<i>n/a</i>	5.763.689,88	4.668.260,36	5.493.548,27	<i>n/a</i>
4	Usaha Mikro dan Kecil	43.134	44.017	44.467	45.715	45.470
5	Jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina	<i>n/a</i>	2.894	2.357	2.744	<i>n/a</i>
6	Usaha Mikro dan Kecil yang naik kelas	<i>n/a</i>	17	25	31	<i>n/a</i>

Sumber: Disnaker-KUKM Kab. Kebumen, 2020

Dalam hal usaha mikro dan kecil, jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, namun demikian kemampuan untuk melakukan pembinaan masih sangat rendah (kurang dari 10 persen) dan menunjukkan kemampuan yang terus menurun. Sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan adalah meningkatnya status usaha, terlihat bahwa jumlah UMK yang naik kelas meningkat, walaupun secara proporsi masih sangat kecil (sekitar 1 persen dari UMK yang dibina). Pada sisi lain pembinaan yang berbasis usaha formal menyulitkan sebab sebagian besar UMK adalah usaha non-formal.

Permasalahan permodalan dan kurangnya jiwa kewirausahaan sebagai akibat dari rendahnya kapasitas dan pendidikan pelaku usaha selalu menjadi masalah dalam pengembangan UMK. Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan belum memenuhi standar, kurangnya inovasi produk serta lemahnya jaringan pemasaran. Kondisi tersebut menimbulkan akibat lebih lanjut yaitu sulitnya membuka akses pasar.

Berkaitan dengan Lembaga keuangan mikro (LKM), ketersediaan data series berkaitan dengan LKM dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Kebumen masih sangat terbatas. Pada tahun 2020, terdapat 8 (delapan) LKM, enam di antaranya sudah mendapatkan ijin dari OJK sedangkan dua lainnya masih dalam proses pengurusan ijin. Sedangkan jumlah BPR sebanyak 7 (tujuh) dengan status kepemilikan 2 (dua) BPR merupakan milik Pemerintah Kabupaten Kebumen, 1 (satu) BPR milik Pemerintah Provinsi dan 4 (empat) BPR dimiliki oleh swasta.

12. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu kunci pengungkit pembangunan ekonomi. Dalam perekonomian nasional besaran investasi yang muncul dalam sebuah wilayah tercatat dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sementara itu dalam pemerintahan yang tercatat dalam data investasi adalah investasi yang dilakukan oleh penanam modal nasional maupun asing tanpa melibatkan investasi yang dilakukan oleh masyarakat banyak. Tabel 2.136 menyajikan data data terkait investasi di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.141
Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	PMTB (Rp juta)	4.192.306,06	4.709.037,99	5.109.008,51	5.511.028,64	6.001.726,67
2	Pertumbuhan PMTB	0,34	8,65	5,93	5,52	4,37
3	Jumlah nilai investasi Dalam Negeri (PMDN) (Rp juta)	329.871,82	406.971,63	332.629,15	487.967,82	887.552,60
4	Persentase PMDN terhadap PMTB	7.86	8,64	6,51	8,85	14.78
5	Pertumbuhan PMDN	n/a	23,37	-18,26	46,70	81,88
6	Jumlah nilai investasi Luar Negeri (PMA)	0	0	0	0	0
7	Jumlah Investor Dalam Negeri (PMDN)	818	656	576	705	895
8	Jumlah Investor Luar Negeri (PMA)	0	0	0	0	0
9	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	3.540	5.206	3.423	5.790	9.257

Sumber: Kebumen Dalam Angka dan DPMPTSP Kab. Kebumen, 2020

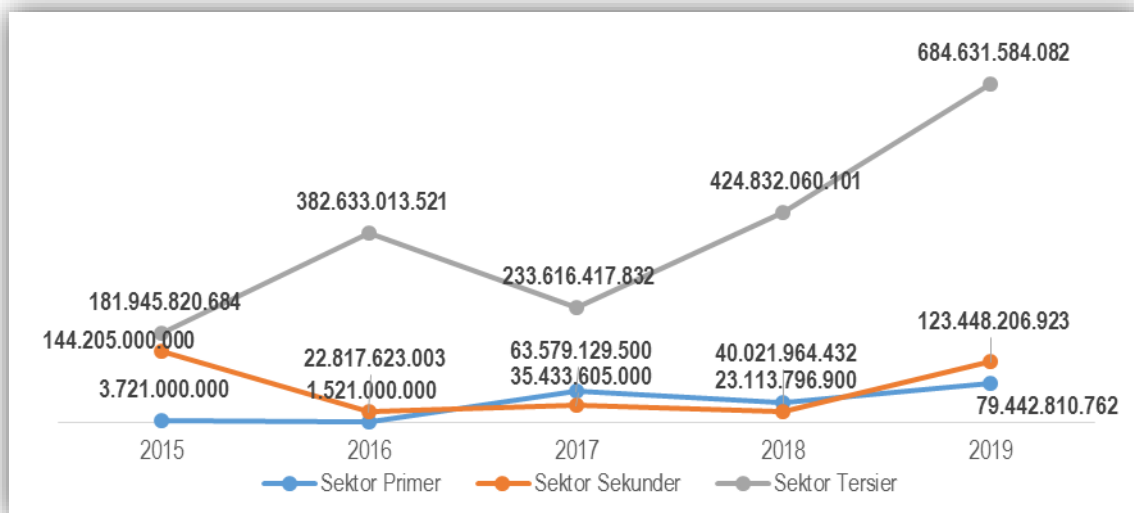
Realisasi investasi PMDN di Kabupaten Kebumen pada periode tahun 2015-2019 menunjukkan tren yang meningkat meskipun sempat mengalami

penurunan, dimana tahun 2015 realisasi investasi yaitu sebesar Rp 329,87 milyar meningkat menjadi Rp 406,97 milyar dan kemudian turun menjadi Rp 332,63 milyar di tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 realisasi investasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada Tabel 2.141 dapat juga dilihat bahwa jumlah nilai investasi PMDN tidak berbanding lurus dengan jumlah investornya.

Adanya investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kebumen. Dengan tingkat penyerapan saat ini yang hanya mencapai 9.257 orang masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 568.034 (tahun 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas investasi di Kabupaten Kebumen belum seperti yang diharapkan. Selain itu dari sisi kualitas investasi, masih banyak terdapat investasi yang berupa proyek infrastruktur dan bukan investasi yang bersifat usaha kontinu. Investasi tersebut masih dapat menyerap tenaga kerja tapi tidak ada kontinuitas karena setelah proyek selesai maka tenaga kerja akan kembali menganggur.

Nilai investasi yang tercatat dalam bidang penanaman modal dan investasi nilainya berkisar pada angka 10 persen. Angka ini mengirimkan pesan bahwa investasi yang dilakukan masyarakat yang tidak tercatat jumlahnya jauh lebih tinggi. Dilihat dari pertumbuhannya pertumbuhan investasi yang tercatat lebih tinggi namun lebih fluktuatif. Gambar 2.61 menunjukkan bahwa sektor tersier menjadi sektor yang memiliki nilai investasi dan pertumbuhan yang paling

tinggi dibandingkan dua sektor lainnya. Lebih jauh dapat dilihat bahwa sub-sektor tersier yang memiliki nilai investasi paling tinggi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sub-sektor perdagangan dan reparasi.



Sumber: DPMPTSP Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.61
**Perkembangan Nilai Investasi Per Sektor Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

Tabel 2.142
**Perkembangan Nilai Investasi Sektor Tersier
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

Sub-sektor Tersier	2015	2016	2017	2018	2019
Listrik, Gas, dan Air	300.000.000	-	-	-	350.000.000
Konstruksi	46.123.853.024	58.441.906.345	42.904.710.000	45.470.821.552	78.230.155.564
Perdagangan & Reparasi	104.937.226.563	200.174.472.124	128.814.587.570	216.721.704.046	96.456.851.277
Hotel dan Restoran	13.421.365.032	12.728.667.042	18.055.548.575	17.998.710.000	19.150.442.735
Transportasi, Gudang & Komunikasi	1.900.000.000	2.394.100.000	8.806.350.000	16.684.710.000	9.432.100.000
Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	20.000.000	78.965.000.000	895.000.000	13.043.146.000	-
Jasa Lainnya	15.243.376.065	29.928.868.010	34.140.221.687	114.912.968.503	281.012.034.506

Sumber: DPMPTSP Kab. Kebumen, 2020

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kebumen masih cenderung rendah dimana jumlah organisasi pemuda yang aktif di tahun 2019 berjumlah 42 organisasi pemuda dibandingkan dengan jumlah pemuda yang ada. Jumlah organisasi kepemudaan mengalami penurunan sebesar 100 persen di tahun 2019. Penurunan jumlah organisasi pemuda berdampak pada kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan. Jumlah organisasi olahraga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sejumlah 32 organisasi di tahun 2019 berjumlah 40 organisasi. Melihat perkembangan jumlah organisasi pemuda tahun 2017 sampai tahun 2019 cenderung tidak ada perkembangan organisasi olahraga yang ada.

Namun peningkatan jumlah wirausaha muda yang cukup drastis pada tahun 2019 mengindikasikan pemuda Kabupaten Kebumen mulai mencoba memanfaatkan peluang di tengah perkembangan teknologi informasi, dan industri kreatif yang cukup massif. Peningkatan jumlah wirausaha muda ini diharapkan akan dapat mengurangi angka pengangguran usia muda di Kabupaten Kebumen, dan secara lebih luas mampu menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Kebumen. Bibit-bibit atlet berprestasi di Kabupaten Kebumen yang berkembang cukup pesat selama kurun waktu 2 tahun terakhir menjadi sebuah peluang untuk peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.143
Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	86	86	42	42	42
2.	Persentase wirausaha muda	77	77	35	80	310
3.	Jumlah organisasi olahraga	39	39	40	40	35
4.	Jumlah prestasi olahraga	19	19	20	20	19
4.	Jumlah atlit berprestasi	278	278	91	144	259

Sumber: Disporawisata Kab. Kebumen, 2020

14. Urusan Statistik

Data/informasi statistik (dokumen statistik) adalah salah satu instrumen analisis yang sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan dokumen statistik yang baik akan memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Kinerja urusan statistik pada tahun 2016-2019 meliputi tersusunnya Buku Daerah Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto, Buku Profil Daerah, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan dan Buku Studi Nilai Tukar Petani. Hal lainnya adalah mampu mewujudkan kemudahan mengakses data statistik melalui penyusunan berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil pembangunan daerah,

seperti SIM Pengentasan Kemiskinan, Sistem Informasi Profil Daerah, SIM Keuangan Daerah, SIM Perencanaan, SIM Pengendalian, SIM Pelaporan, SIMBADA, dan lain-lain.

Tabel 2.144
Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan	1	1	1	2
a. Kebumen Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada
b. PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada
c. Profil Daerah (SIPD)	Ada	Ada	Ada	Ada
d. Studi Ketimpangan Pendapatan	-	Ada	-	Ada
e. Studi Nilai Tukar Petani	Ada	-	Ada	-

Sumber: Diskominfo dan Bappeda Kab. Kebumen, 2020

Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan statistik ini adalah belum optimalnya penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan *update*. Koordinasi antarlembaga dan antar-OPD terkait data statistik ini juga belum berjalan secara optimal. Meskipun kewenangan terkait pengelolaan data statistik ini sudah dibagi dan diatur melalui peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja serta peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala.

15. Urusan Persandian

Capaian urusan persandian Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi (dalam hal ini *digital*

signature) dalam komunikasi antarperangkat daerah. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sampai dengan tahun 2019, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kebumen, telah menggunakan *digital signature* dalam komunikasi antarperangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen sangat memperhatikan keamanan dokumen serta mendukung pemalsuan dokumen dan hoaks. *Digital signature* dapat menghasilkan keterandalan dokumen, dimana setiap dokumen atau tulisan yang dikeluarkan bisa dicek oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa itu asli atau tidak.

Permasalahan yang dihadapi pada urusan ini adalah meskipun *digital signature* telah diterapkan melalui aplikasi *e-letter* Kabupaten Kebumen, namun belum optimal. Hal disebabkan beberapa hal di antaranya:

- a. Tidak stabilnya kondisi jaringan internet pada OPD Kecamatan khususnya wilayah kecamatan yang berada di daerah pegunungan; dan
- b. Budaya pemakaian *e-letter* dalam komunikasi kedinasan belum optimal.

16. Urusan Kebudayaan

Peninggalan situs warisan budaya di Kebumen cukup banyak mengingat Kebumen merupakan bekas dari sebuah pemerintahan setingkat kabupaten di masa sebelum penjajahan Belanda. Sebagian besar situs warisan budaya yang ada bercorak Kerajaan Yogyakarta. Penggalan dan pelestarian situs peninggalan purbakala mulai dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Tahun 2015 jumlah situs cagar budaya yang ditemukan dan didata serta dikelola sebanyak 46 situs cagar budaya, jumlah ini berkembang sampai tahun 2019 jumlah situs cagar budaya yang dipelihara sebanyak 82 situs cagar budaya. Sebanyak 92 situs atau 89,13 persen telah dikelola dan 10,87 persen situs cagar budaya masih belum terkelola dengan baik. Pada tahun 2019 masih terdapat 10 situs cagar budaya belum dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Penggalan situs peninggalan budaya terus dilakukan sebagai upaya melindungi warisan budaya daerah.

Kegiatan festival seni dan budaya secara rutin diselenggarakan di Kabupaten Kebumen, setidaknya pada tahun 2019 diselenggarakan 15 festival seni dan budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Kegiatan revitalisasi seni budaya juga dilakukan di Kebumen dalam rangka mengembangkan kesenian rakyat. Tahun 2015 jumlah seni budaya yang direvitalisasi sebanyak 46 karya budaya, tahun 2019 meningkat 82 karya budaya. Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya juga dilaksanakan dalam rangka pelestarian seni budaya daerah yang ada di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.145
Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	11	11	11	15	15

2.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	46	47	53	60	82
3.	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	46	47	53	60	82

Sumber: Disporawisata Kab. Kebumen, 2020

17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wahana penyediaan bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Kualitas bahan pustaka dan kuantitas perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Hal ini juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Selama 5 tahun terakhir, kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan tren kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah koleksi buku di perpustakaan yang meningkat dari 30.112 buku pada tahun 2015 menjadi 38.561 buku di tahun 2019. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama satu tahun juga meningkat dari 77.751 orang di tahun 2015 menjadi 142.833 orang pada tahun 2019. Capaian kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 selengkapnya tersaji pada Tabel 2.146.

Tabel 2.146
**Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku
di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	114.714	137.771	139.165	142.833
2	Rasio perpustakaan per 1.000 jumlah penduduk	0,59	0,54	0,60	0,58
3	Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan Daerah	19.958	21.923	23.278	25.735
4	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0%	0%	0%	33,4%

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen, 2020

Kinerja urusan perpustakaan pada tahun 2020 juga terdampak pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari data pada Tabel 2.146, dimana sampai dengan semester I tahun 2020, capaian kunjungan perpustakaan menurun karena baru melayani pengunjung selama 3 bulan (sampai dengan Maret). Setelah itu perpustakaan tidak melayani kunjungan maupun melaksanakan perpustakaan keliling karena adanya pandemi COVID-19. Persentase pustakawan yang bersertifikat rendah karena sesuai dengan ketentuan yang dapat mengikuti sertifikasi hanya pustakawan, sedangkan pustakawan yang tersedia di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan tahun 2020 hanya 1 orang.

18. Urusan Kearsipan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengertian mengenai arsip atau kintaka adalah rekaman kegiatan

atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip sangat berbeda dengan bahan pustaka yang terdapat dalam perpustakaan. Arsip mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan bahan pustaka di antaranya adalah arsip harus otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, informasinya utuh, dan berdasarkan asas asal usul (*principle of provenance*) dan aturan asli (*principle of original order*).

Pelayanan urusan kearsipan mempunyai tujuan meningkatkan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip pada instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Manajemen kearsipan yang tertata dengan baik akan memudahkan penyimpanan maupun pengambilan data, sehingga data dapat dikelola dengan lebih efektif, efisien dan aman.

Kinerja pengelolaan arsip di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016-2020. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku yang meningkat dari 16,09 persen pada tahun 2016 menjadi 36,02 persen di tahun 2020. Perkembangan capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Kebumen selama tahun 2015-2019 secara lengkap disajikan pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147

Kinerja Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	16,09%	22,61%	29,31%	36,02%

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen, 2020

Meskipun persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku terus meningkat, namun jumlahnya belum optimal (masih di bawah 50 persen).

Beberapa hal menjadi penyebabnya antara lain:

- Kurangnya pengertian terhadap pentingnya arsip. Dengan belum atau kurang dipahaminya pengertian terhadap pentingnya arsip, mengakibatkan berfungsinya arsip sebagai pusat ingatan organisasi tidak tercapai, dan ahirnya tugas-tugas di bidang kearsipan dipandang rendah;
- Kualifikasi persyaratan pegawai tidak dipenuhi. Hal ini terbukti dengan dengan adanya penempatan pegawai yang disertai tugas tanggung jawab mengelola arsip tidak didasarkan pada persyaratan yang diperlukan, bahkan banyak yang beranggapan cukup dipenuhi pegawai yang berpendidikan rendah. Pegawai kearsipan yang kurang cakap dan kurang terbimbing secara teratur mengakibatkan tidak dapat mengimbangi perkembangan dalam pengarsipan dokumen aset; dan
- Bertambahnya volume arsip secara terus-menerus mengakibatkan prasarana dan sarana yang tersedia tidak dapat menampung arsip lagi untuk memfasilitasi 522 unit kerja yang terdiri dari 32 OPD, 26 kecamatan, 449 desa, 11 kelurahan, dan 4 BUMD.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kinerja produksi dan konsumsi perikanan serta kaitannya dengan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan. Berikut disajikan kinerja urusan perikanan dan kelautan di Kabupaten Kebumen yang meliputi produksi ikan dan produksi garam serta kesejahteraan nelayan yang diwakili oleh Nilai Tukar Nelayan. Kinerja urusan perikanan dan kelautan secara makro dapat dilihat pada Tabel 2.148.

Tabel 2.148
Kinerja Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB Sub-sektor Perikanan atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	104.826,54	94.996,77	114.976,08	125.135,20	135.987,12
2	PDRB Sub-sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah)	82.207,18	71.679,57	83.894,19	87.796,10	92.696,10
3	Pertumbuhan (Persen)	21,16	-12,81	17,04	4,65	5,58

No.	Uraian	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Produksi Ikan Tangkap (Ton)	7.598,47	5.585,09	9.068,46	17.987,36	8.915,8
5	Nilai Produksi Ikan Tangkap (Juta Rupiah)	85.827,52	121.354,09	128.210,83	110.051,42	208.409,45
6	Produksi Ikan Budidaya (Ton)	2.028,32	2.933,59	2.572,80	2.607,41	2.876,10
7	Nilai Tukar Nelayan	168,19	84,22	113,40	144,53	150,94
8	Jumlah Nelayan (Orang)	3,751	3,905	3,361	3,050	-
9	Konsumsi Ikan (Kilogram/Kapita/Tahun)	15,10	19,63	21,12	22,17	24,57
10	Produksi Garam (Ton)	-	-	-	26	83
11	Nilai Produksi Garam (Juta Rupiah)	-	-	-	65	207,5

Sumber: Dinlutkan Kab. Kebumen, 2020

Dilihat dari pertumbuhan PDRB, capaian kinerja perikanan menunjukkan fluktuasi dan tren kinerjanya cenderung menurun, demikian juga dengan produksi yang secara umum menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Dilihat dari pertumbuhan produksi dan nilai PDRB, terlihat kecenderungan bahwa ketika produksi meningkat tinggi, justru nilainya turun. Angka ini menunjukkan bahwa ketika produksi meningkat, justru terjadi penurunan harga. Hal ini dapat diartikan bahwa permintaan atas perikanan ini relatif tetap, karena permintaan baru muncul dari konsumen akhir, artinya belum terdapat industri pengolahan ikan yang memadai yang mampu menyerap produksi yang melimpah. Namun

demikian dilihat dari NTN yang dihasilkan nelayan, data menunjukkan bahwa nelayan masih menikmati kesejahteraan dengan menggunakan kriteria NTN.

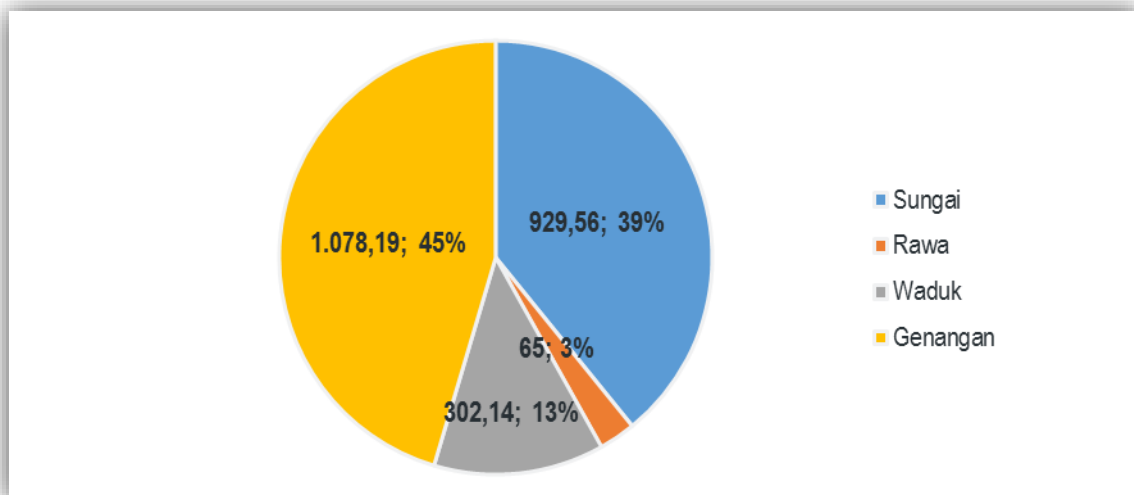
Kabupaten Kebumen memiliki panjang pantai 57.5 km mulai dari Kecamatan Ayah sampai dengan Kecamatan Mirit. Perikanan laut wilayah Kebumen termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 573, yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat. Mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPP RI 573 memiliki potensi sebesar 1.267.540 ton, namun masih ada beberapa komoditas yang tingkat pemanfaatannya belum optimal.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap di laut antara lain disebabkan oleh belum tersedianya sarana penangkapan ikan yang dapat menjangkau sumberdaya ikan yang jauh dari pantai. Dari sisi kompetensi nelayan, dari jumlah nelayan laut yang ada saat ini, belum satu pun yang memiliki sertifikat kompetensi kapal perikanan baik Surat Keterangan Kecakapan Kapal (SKK) maupun Sertifikat Nautika dan Teknik Kapal Perikanan. Selain itu, baru ada 100 nelayan yang memiliki dasar keselamatan berlayar (*Basic Safety Training/BST*). Di Kabupaten Kebumen juga terdapat SMK

Kelautan (Nautika dan Teknik), akan tetapi lulusannya tidak ada yang bekerja sebagai nelayan di Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya terkait dengan tata kelola pelelangan ikan, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan saat ini belum mampu melayani nelayan secara maksimal. Sebagai contoh, pada saat produksi melimpah harga ikan masih mengalami penurunan drastis dan pembayaran oleh pedagang ikan tersendat dikarenakan kemampuan keuangan pedagang yang masih terbatas. Selain itu, TPI juga belum memiliki gudang penyimpanan beku (*cold storage*) yang memadai.

Selain perairan laut, Kabupaten Kebumen juga memiliki perairan umum berupa waduk, rawa, sungai dan genangan yang luas seluruhnya mencapai 2.374,89 Ha. Rincian luasan per jenis perairan umum sebagai berikut:



Gambar 2.62
Luas Perairan Umum Daratan Kabupaten Kebumen (ha)

Terkait dengan sumberdaya ikan dan ikan lokal di PUD, terjadi penurunan yang disebabkan adanya sedimentasi dari hulu dan pencemaran limbah pertanian dan rumah tangga serta adanya penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan sumberdaya ikan, menyebabkan punahnya beberapa ikan lokal/endemik.

Kabupaten Kebumen memiliki potensi budidaya perikanan darat yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari lahan yang sudah dikelola khususnya lahan tambak, masih terjadi ketidaktertiban dimana masih banyak terdapat di sempadan pantai, belum memiliki pengolahan limbah yang benar, belum memiliki perijinan/pendaftaran, belum memiliki saluran yang baik serta belum menunjukkan kawasan yang terintegrasi yang mengakibatkan produktivitasnya rendah dan rawan gagal panen. Dari 497 petak tambak yang ada saat ini, baru 25 petak yang telah tertata sehingga masih ada 472 petak tambak yang belum tertata.

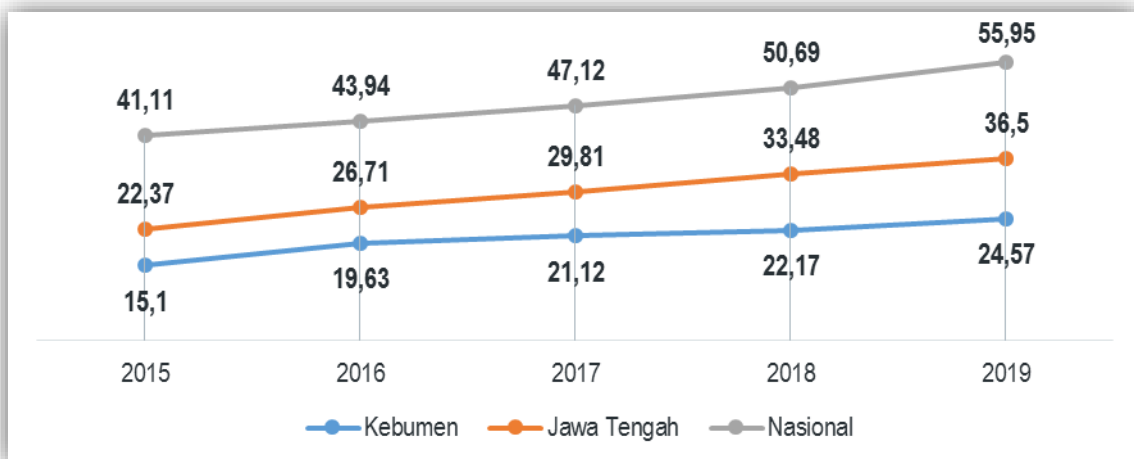
Produksi perikanan budidaya juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Beberapa tahun terakhir curah hujan di Kabupaten Kebumen tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan berkurangnya ketersediaan air ketika musim kemarau, terlebih lagi kemarau pada tahun 2019 terjadi cukup lama. Selain itu, cuaca yang cukup ekstrim juga sering terjadi dan menjadi kendala karena suhu air yang berubah-ubah sangat berdampak pada produksi benih maupun pembesaran. Faktor iklim dan cuaca tersebut juga sangat erat kaitannya dengan tingginya ancaman hama dan penyakit pada ikan.

Tingkat kematian ikan dapat mencapai 40 persen dari jumlah benih yang ditebar. Penyediaan benih juga perlu menjadi perhatian, dimana pada saat ini tingkat kebutuhan benih ikan belum dapat dipenuhi oleh pembenih lokal, baik oleh Balai Benih Ikan (BBI) maupun Unit Perbenihan Rakyat (UPR). Tingkat penyediaan benih ikan saat ini baru mencapai kisaran 70 persen dari kebutuhan.

Selain faktor iklim dan cuaca, kondisi sarana dan prasarana serta kualitas sumberdaya manusia juga memegang peranan penting dalam budidaya perikanan. Dilihat dari kondisi kualitas sarana dan prasarana budidaya, dari 43 ha kolam ikan air tawar yang sudah ada sebagian besar adalah kolam ikan tradisional yang secara teknis kurang layak untuk budidaya ikan baik jenis kolamnya maupun luasannya. Minimnya luasan kolam akan menentukan apakah usaha budidaya memenuhi skala ekonomis atau tidak. Minimnya skala usaha ini disebabkan salah satunya oleh kurangnya permodalan yang dimiliki oleh pembudidaya skala kecil. Dari sisi kapasitas SDM, dari total 8.415 pembudidaya ikan di Kabupaten Kebumen baru 90 pembudidaya ikan yang memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP.

Di luar aspek produksi yang merupakan variabel penawaran, sisi permintaan yaitu tingkat konsumsi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Produksi akan menjadi nilai tambah bagi nelayan dan pembudidaya hanya jika hasil produksinya dibeli oleh konsumen. Dari sisi permintaan, masyarakat Kabupaten Kebumen cenderung tidak banyak mengonsumsi ikan, baik karena

faktor kebiasaan maupun kurangnya daya beli. Hal ini dapat dilihat dari Angka Konsumsi Ikan (AKI) yang selalu lebih rendah dari rata-rata provinsi maupun nasional. Selain sebagai variabel permintaan bagi produksi perikanan, konsumsi daging/ikan juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi vital terutama di Kabupaten Kebumen yang saat ini merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Selain angka konsumsi ikan yang rendah, potensi pasar di luar daerah juga belum dapat dioptimalkan karena sulitnya akses pemasaran.



Sumber: Dinlutkan Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.63

Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (kg perkapita)

Selain produk perikanan, garam juga menjadi komoditas yang dikembangkan pada sektor kelautan. Pengembangan garam di Kabupaten Kebumen baru dilakukan pada beberapa tahun terakhir, dengan cakupan wilayah yang masih terbatas. Salah satu kendala yang dihadapi dalam

pengembangan usaha garam adalah keterbatasan lahan, dimana sebagian wilayah pantai di Kabupaten Kebumen merupakan wilayah karst, dan ada sebagian wilayah yang menjadi zona pertahanan yang dikelola oleh militer. Pengembangan usaha masih bisa dilakukan di luar batas wilayah pertahanan, namun dengan konsekuensi adanya penambahan biaya produksi. Selain kendala tersebut, teknologi dan metode yang digunakan saat ini juga belum menerapkan teknologi terbaru, mengingat bahwa usaha garam ini masih bersifat rintisan. Pengembangan kapasitas SDM dan penyediaan sarana pendukung menjadi faktor yang harus diperhatikan agar dapat meningkatkan produktivitas yang saat ini belum optimal. Meskipun ada beberapa kendala yang harus dihadapi, namun garam menjadi salah satu komoditas yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, selain karena nilai ekonomisnya yang tinggi, juga dari potensi pasar dimana tingkat produksi saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan lokal yang diperkirakan mencapai 1.000-3.000 ton per tahun dan masih didatangkan dari luar daerah. Selain itu, kualitas garam di Kabupaten Kebumen juga berada di atas rata-rata, dan dapat dipasarkan pada segmen yang lebih tinggi daripada garam konsumsi, yaitu garam kesehatan dan garam industri.

Sebagaimana dijelaskan di atas, lemahnya industri perikanan membawa pada fluktuasi harga yang sangat tinggi. Hingga tahun 2019 tingkat pemenuhan kebutuhan yang disangga dari produksi olahan ikan hanya berada pada kisaran sepertiga dari kebutuhan yang ada.

Tabel 2.149
**Produksi dan Kebutuhan Ikan Olahan Kabupaten Kebumen
Tahun 2018-2019**

Tahun	Kebutuhan	Produksi	Produksi/ Kebutuhan
2018	773.283	257.450	33,29%
2019	802.125	288,985	36,03%

Sumber: Dinlutkan Kab. Kebumen, 2020

Dilihat dari kapasitas SDM pengolah ikan, dari jumlah 121 Unit Pengolah Ikan yang ada saat ini belum ada satu pun yang memiliki ijin edar dari Badan POM Provinsi Jawa Tengah, dan baru ada 35 Unit Pengolah Ikan yang memiliki Produk Industri Rumah Tangga. Kemudian dari jumlah 1.327 pengolah ikan di Kabupaten Kebumen, baru ada 90 pengolah ikan yang memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP. Di Kabupaten Kebumen juga terdapat SMK Kelautan (Pengolahan Ikan), akan tetapi belum ada lulusan yang bekerja sebagai pengolah ikan di Kabupaten Kebumen.

2. Urusan Pariwisata

Kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Angka kunjungan wisata meningkat secara signifikan, baik kunjungan ke objek pariwisata yang dikelola Pemerintah Daerah maupun non-Pemerintah Daerah. Selain itu, indikator lain berupa lama kunjungan wisata juga senantiasa meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.150
Kinerja Sektor Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kunjungan wisata	<i>n/a</i>	1.486.939	1.770.136	2.020.878	2.927.444
2	Pertumbuhan kunjungan wisata (%)	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	14,16	19,04	44,86
3	Lama kunjungan wisata	<i>n/a</i>	0,41	0,51	0,57	1,03
4	Perumbuhan lama kunjungan wisata (%)	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	24,39	11,76	80,70

Sumber: Disporawisata Kab. Kebumen, 2020

Dari Tabel 2.150 dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah kunjungan wisata maupun rata-rata lama kunjungan memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Capaian kinerja pariwisata tersebut dipengaruhi oleh kondisi 4 pilar pariwisata yaitu: Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan.

a. **Industri Pariwisata**

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Saat ini, terdapat 85 usaha sudah mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan 2 usaha yang sudah mendapatkan Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, sehingga dapat dikatakan kualitas Usaha Jasa dan

Sarana Pariwisata masih rendah dan kurang berdaya saing karena rendahnya usaha yang terakreditasi oleh asesor yang berkompeten.

b. Destinasi Pariwisata

Secara topografi Kabupaten Kebumen memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Wilayah pantai sebelah timur berpasir besi, pantai sebelah barat berupa gunung karst berpasir putih yang memiliki banyak goa serta daerah utara berupa pegunungan. Dari 103 potensi wisata yang ada, sejumlah 62 destinasi sudah mulai dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Terkait sarana dan prasarana, akses dan amenitas yang ada di destinasi masih banyak yang harus dibenahi untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Dengan kenyamanan wisatawan diharapkan lama tinggal wisatawan akan semakin lama dan semakin banyak mengeluarkan anggaran di destinasi wisata. Selain itu, di masa sekarang kebutuhan akan jaringan seluler menjadi salah satu kebutuhan utama dari wisatawan, dimana hal tersebut juga berpengaruh pada pemasaran wisata yang dikunjungi. Dengan adanya sinyal telekomunikasi akan membuat wisatawan semakin cepat dalam menyebarkan foto ataupun gambar mengenai destinasi yang dikunjungi. Pada kenyataannya di Kabupaten Kebumen terdapat juga destinasi yang mempunyai masalah jaringan telekomunikasi dan perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain sarana prasarana di dalam destinasi persoalan lain yang dihadapi adalah kurangnya kualitas jalan menuju destinasi serta papan rambu penunjuk jalan yang kurang

memadai sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan menuju destinasi wisata.

Selain itu permasalahan sarana dan prasarana, untuk menyambut wisatawan diperlukan *story teller* yang mampu membuat wisatawan terkesan dan terkesan dengan destinasi yang dikunjungi. Saat ini, di Kabupaten Kebumen baru tercatat 61 orang pramuwisata/pemandu di destinasi yang telah mendapat pelatihan dan disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata. Jumlah tersebut tentu saja belum sebanding dengan jumlah destinasi yang telah dikelola di Kabupaten Kebumen.

Dari sisi pelayanan, di Kabupaten Kebumen khususnya sektor pariwisata juga belum ada pemesanan tiket, pembayaran tiket masuk ataupun penjualan paket wisata menggunakan media *online*. Kegiatan pembelian tiket masih menggunakan metode manual baik di objek wisata yang dikelola pemerintah daerah ataupun yang dikelola masyarakat. Hal ini menjadi risiko tersendiri di tengah pandemi COVID-19 saat ini, karena sangat rentan terjadi penyebaran virus melalui mata uang.

Hal lain yang menjadi masalah dalam pengelolaan destinasi di Kabupaten Kebumen adalah masalah keamanan untuk pengelola dan wisatawan. Keamanan adalah hal mendasar dalam Sapta Pesona yang harus ada dalam pengelolaan destinasi. Pada salah satu destinasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kebumen yaitu di Pantai Suwuk ada kelompok masyarakat yang ikut membuka pintu masuk ke wisata dan meminta penataan parkir di lokasi wisata

sehingga menyebabkan kurangnya kenyamanan wisatawan serta tidak maksimalnya Pendapatan Asli Daerah.

c. Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pemasaran pariwisata di Kabupaten Kebumen dilaksanakan secara *online* dan *offline*. Pemasaran *online* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan komunitas-komunitas, sedangkan metode *offline* dilaksanakan di dalam kota dan di luar kota. Event-event yang dilaksanakan masih berskala lokal sehingga yang hadir masih dari sekitar Kebumen. Papan promosi dan kegiatan promosi ke luar daerah juga masih minim dilakukan. Kegiatan promosi masih ditekankan pada promosi *mass tourism*, sedangkan untuk wisatawan dengan segmentasi tertentu belum banyak dilaksanakan.

Tabel 2.151
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Kebumen

No	Kegiatan	Keterangan	Jumlah
1	Situs/Web	Dikelola Dinas	2
2	Instagram	Dikelola Dinas	1
3	Facebook	fanpage	1
4	Youtube	Dikelola Dinas	1
5	Event	Tahun 2017	14 kegiatan
6		Tahun 2018	16 kegiatan
7		Tahun 2019	21 kegiatan
8		Tahun 2020	2 kegiatan
9.	Papan Reklame	Dalam Kota	10 titik
10	Papan Reklame	Luar Kota	2 titik
11	Travel Dialog dan Press Tour	Tahun 2017	2 kali
12		Tahun 2018	2 Kali
13		Tahun 2019	1 Kali

Sumber: Disporawisata Kab. Kebumen

d. Kelembagaan Kepariwisata

Selain Destinasi, Industri, dan Pemasaran, ada satu lagi pilar kepariwisataan yaitu Kelembagaan. Secara pengelolaan ada 9 objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan sisanya dikelola oleh swasta dan masyarakat. Secara kelembagaan pengelola destinasi di luar pemerintah bisa berupa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), BUMDes dan swasta. Tahun 2019 jumlah keseluruhan ada 35 Pokdarwis, dan desa wisata yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata sejumlah 12 desa dari 60 desa yang memiliki potensi wisata. Sehingga perlu peningkatan kesadaran pengelola Desa Wisata untuk mengajukan Permohonan Penetapan Desa Wisata ke Disporawisata Kabupaten Kebumen agar desa wisata yang ada di Kabupaten Kebumen memiliki standar yang sama dengan semua desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk kegiatan kerjasama dengan pihak lain Pemerintah Kabupaten Kebumen baru mengadakan kerjasama dengan Kabupaten Wonosobo tentang pengelolaan objek wisata Wadaslintang serta dengan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta untuk pemasangan bahan informasi wisata di bandara dan penampilan kesenian di Bandara Adisucipto.

3. Urusan Pertanian

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, struktur perekonomian Kabupaten Kebumen sampai dengan saat ini masih didominasi oleh sektor

pertanian. Bila dilihat lebih dalam ke masing-masing sub-sektor (Tabel 2.152), terlihat bahwa pertanian Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura. Sub-sektor tanaman perkebunan dan peternakan yang secara ekonomi memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani justru belum banyak dibudidayakan oleh petani. Hal ini sedikit banyak berkorelasi dengan tingginya tingkat kemiskinan petani di Kabupaten Kebumen. Akan tetapi jika dilihat dari tren pertumbuhan sub-sektor, terlihat bahwa mulai ada sedikit pergeseran dari sub-sektor tanaman pangan. Dengan adanya pergeseran ke komoditas bernilai tinggi, diharapkan nantinya kesejahteraan petani akan meningkat.



Tabel 2.152
PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

No	Uraian	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB Sub-sektor Tanaman Pangan (Juta Rupiah)	2.559.574,45	2.440.960,12	2.420.105,63	2.535.626,17	2.374.249,50
2	Pertumbuhan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen)	13,08	-6,74	-2,25	2,75	-7,25
3	PDRB Sub-sektor Tanaman Hortikultura (Juta Rupiah)	1.732.141,65	1.641.877,99	1.634.889,49	1.729.440,34	1.834.989,58
4	Pertumbuhan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen)	6,32	-9,57	0,22	3,21	3,78
5	PDRB Sub-sektor Tanaman Perkebunan (Juta Rupiah)	650.684,06	663.143,57	684.379,66	702.033,18	741.976,30
6	Pertumbuhan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen)	-0,88	-2,28	2,34	0,03	5,07
7	PDRB Sub-sektor Peternakan (Juta Rupiah)	468.105,92	496.464,96	535.242,77	582.002,26	639.343,09
8	Pertumbuhan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen)	-3,42	2,96	6,64	5,12	6,70
9	PDRB Sub-sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu (Juta Rupiah)	108.522,97	110.318,95	116.276,16	122.017,28	126.939,00
10	Pertumbuhan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Persen)	-22,24	0,67	4,17	1,34	1,69

Sumber: BPS 2020, data diolah

Faktor utama dalam sektor pertanian adalah ketersediaan lahan. Di Kabupaten Kebumen, luas lahan pertanian khususnya padi dan palawija, senantiasa mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini dipengaruhi tingginya alih fungsi lahan dari fungsi pertanian ke non-pertanian. Hal ini tentu saja menjadi kendala karena berpengaruh kepada tingkat produksi. Menurunnya luas areal pertanian diikuti dengan tingkat produksi yang cenderung menurun.

Selain alih fungsi lahan, tingkat kepemilikan lahan pertanian juga menjadi kendala dimana usaha pertanian menjadi tidak memenuhi skala ekonomis. Luas lahan sawah di Kabupaten Kebumen 40.073,20 ha dikelola oleh petani sebanyak 177.936 orang. Dengan demikian, maka tingkat kepemilikan lahan pertanian hanya sebesar 0,23 ha per orang. Luasan ini jauh dari memadai karena untuk memenuhi kebutuhannya secara layak, minimal setiap petani memiliki sawah sebesar 2 ha.

Menurunnya tingkat kesuburan tanah juga menjadi faktor penyebab kurang optimalnya tingkat produktivitas lahan. Praktik penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan mengakibatkan rusaknya struktur, tekstur, kimia dan biologi tanah. Hal ini menyebabkan fungsi tanah untuk mengikat air dan unsur hara tersedia menjadi berkurang.

Tabel 2.153
**Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Panen (ha)	75,388.00	73,683.00	73,924.10	74,103.50	68,933.60
2.	Produksi (ton)	486,969.00	446,946.03	411,387.62	422,389.95	438,900.23
3.	Produktivitas (ton/ha)	6.46	6.07	5.57	5.7	6.37

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.154
**Luas Panen dan Produksi Padi Ladang Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Panen (ha)	5,048.00	4,522.00	4,595.00	4,979.50	4,280.00
2.	Produksi (ton)	29,386.00	24,379.02	24,881.93	28,183.97	25,234.88
3.	Produktivitas (ton/ha)	5.82	5.39	5.41	5.66	5.90

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.155
**Luas Panen dan Produksi Palawija Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Panen (ha)	80,436.00	78,205	78,519.10	79,083	73,213.60
2.	Produksi (ton)	234,557.06	118,127.87	131,462.16	110,320.73	79,820.68
3.	Produktivitas (ton/ha)	2.92	1.51	1.67	1.40	1.09

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2020

Dengan adanya ketersediaan lahan yang semakin terbatas, maka perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas lahan maupun pemilihan komoditas bernilai tambah tinggi. Tanaman hortikultura dan perkebunan merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi, terutama jika dibandingkan dengan komoditas tanaman pangan. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2019, luas areal pertanian yang dimanfaatkan untuk budidaya hortikultura maupun komoditas perkebunan masih relatif rendah dan perkembangannya cenderung stagnan. Rendahnya pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya komoditas-komoditas bernilai tinggi tersebut tentu saja menjadi kendala tersendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Tabel 2.156
Luas Lahan Panen Perkebunan Dibanding Luas Lahan Pertanian (ha)
Tahun 2016-2019

Komoditas	2016	2017	2018	2019
Total Luas Perkebunan	37.789,27	42.031,42	41.983,16	41.799,30
Luas Lahan Pertanian	92.112,70	2.112,70	3.585,15	3.585,15
Persentase Luas Lahan Perkebunan terhadap Luas Lahan Pertanian	41,03	5,63	44,86	44,66

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.157
Luas Lahan Panen Hortikultura Dibanding Luas Lahan Pertanian (ha)

Komoditas	2016	2017	2018	2019
Luas Panen Hortikultura	3.848,61	4.503,80	4.644,60	4.391,20
Luas Lahan Pertanian	92.112,70	92.112,70	93.585,15	93.585,15
Persentase Luas Lahan Perkebunan terhadap Luas Lahan Pertanian	4,18	4,89	4,96	4,69

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2020

Pada komoditas buah dan sayuran (Tabel 2.158 dan Tabel 2.159), terlihat adanya fluktuasi yang sangat tinggi pada beberapa komoditas. Hal ini dimungkinkan terjadi salah satunya karena adanya perilaku petani yang belum bisa konsisten dalam menanam suatu komoditas dan cenderung berubah-ubah mengikuti komoditas yang sedang laku di pasar demi memperoleh keuntungan jangka pendek. Padahal di sisi lain, kontinuitas merupakan salah satu faktor penting yang akan menguntungkan petani dalam jangka panjang. Selain itu, inkonsistensi tersebut sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap perkembangan harga komoditas yang seringkali berdampak pada inflasi.

Tabel 2.158
Produksi Buah-Buahan Kabupaten Kebumen (Ton) Tahun 2015-2019

Jenis Buah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sawo	212.10	247.60	370.00	370.00	268.200
Pepaya	10,328.90	12,398.20	7,027.90	5,257.60	6,372.60
Pisang	15,076.60	15,230.20	12,292.80	9,504.10	13,191.20
Nenas	47.90	47.00	50.30	45.40	37.10
Salak	110.20	186.10	176.40	167.50	134.00
Nangka	2,853.60	2,242.70	2,500.70	2,189.10	3,119.30
Rambutan	1,454.80	631.20	1,364.70	1,060.60	1,136.20
Duku/Langsar	101.50	98.90	38.90	38.90	115.40
Cempedak	-	-	-	-	-
Jeruk	116.25	320.33	361.56	372.20	4,570.80
Durian	849.00	187.20	356.10	560.50	1,640.10
Jambu	107.09	122.60	153.23	227.21	5,929.20
Alpukat	115.10	105.80	308.70	911.20	388.40
Buah lainnya	1,260.24	218.53	963.49	1,084.55	10,615.80

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.159
Produksi Sayur-Sayuran Kabupaten Kebumen (Ton) Tahun 2015-2019

Jenis Sayuran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tomat	47.04	31.74	29.85	47.15	328.60
Lombok	215.18	135.79	143.88	192.54	3,107.30

Jenis Sayuran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Terong	81.90	52.22	70.18	139.00	1,201.90
Sawi	8.10	9.17	8.68	0.36	215.50
Kacang-kacangan	148.15	52.32	156.21	68.25	730.30
Ketimun	727.40	245.30	1,155.40	443.60	646.20
Bayam	20.90	8.44	2.94	2.49	177.20
Kangkung	300.46	194.28	230.48	220.05	2,733.20
Sayuran lainnya	642.92	565.27	601.15	673.55	5,812.00

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2020

Faktor iklim menjadi variabel yang sangat berpengaruh pada sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Data menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2019 jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan semakin menurun (Tabel 2.160). Hal ini akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi dan produktivitas pertanian. Adanya perubahan dan anomali iklim yang tidak menentu akan memengaruhi produksi pertanian.

Tabel 2.160
Perubahan Iklim di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2018

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)			Jumlah Hari Hujan (hari)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Januari	264	534	465	16	27	26
Februari	515	421	407	23	22	22
Maret	300	403	513	20	20	18
April	382	374	433	23	22	15
Mei	454	89	105	23	8	4
Juni	407	432	18	18	10	3
Juli	141	36	5	13	8	1
Agustus	159	14	10	11	4	3
September	399	203	35	24	9	7
Oktober	663	451	23	25	24	8
November	774	329	667	27	27	20
Desember	640	331	441	22	20	22
	5098	3617	3122	245	201	149

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2020

Selain faktor iklim, adanya serangan penyakit maupun Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) juga sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi pertanian. Selain dampaknya terhadap penurunan kuantitas produksi, adanya serangan penyakit dan OPT tersebut juga dapat menurunkan kualitas produksi. Serangan ini terjadi pada semua komoditas baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan.

Upaya peningkatan produktivitas pertanian ditunjang oleh banyak faktor mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, akses terhadap permodalan serta kapasitas sumberdaya manusia. Ditinjau dari penyediaan sarana dan prasarana, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana dibandingkan kebutuhan petani masih sangat rendah, terutama untuk traktor (tingkat pemenuhan 38,89 persen) dan *handsprayer* (tingkat pemenuhan 6,07 persen). Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam upaya peningkatan produktivitas petani melalui mekanisasi pertanian. Kurangnya ketersediaan sarana pendukung ikut menghambat penerapan teknologi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas.

Dilihat dari aksesibilitas permodalan secara umum, akses petani terhadap permodalan relatif masih rendah, termasuk di Kabupaten Kebumen. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya jumlah Gapoktan yang memiliki rekening di bank yaitu hanya 330 Gapoktan (71,74 persen) dan 992 kelompok tani (55,29 persen). Rendahnya persentase kelompok tani yang *bankable* ini disebabkan adanya pemahaman petani bahwa persyaratan kredit yang sulit untuk dipenuhi,

sehingga menimbulkan keengganan petani untuk berurusan dengan perbankan. Hal ini tentu saja menjadi satu hal yang perlu didorong agar petani dapat mengembangkan usahanya.

Untuk melihat kapasitas SDM petani, salah satu data proksi yang dapat digunakan adalah jumlah kelompok tani maupun kelompok tani ternak yang telah mendapatkan pembinaan. Sampai dengan tahun 2019, kelompok tani ternak yang telah memperoleh pembinaan hanya mencapai 13,85 persen dari keseluruhan kelompok yang ada. Bahkan pada komoditas hortikultura, jumlah kelompok yang telah memperoleh pembinaan hanya mencapai 7,30 persen dari total kelompok.

Selain penanganan pra panen, tahap pasca panen pertanian juga menjadi hal yang perlu diperbaiki. Kesulitan pemasaran menyebabkan petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga jual produknya, dan cenderung tunduk pada tengkulak. Hal ini dimungkinkan terjadi karena beberapa hal seperti keterdesakan karena kurangnya modal maupun kurangnya kualitas produk. Selain itu, hasil produksi pertanian yang melimpah juga belum ditunjang fasilitas penjualan produk yang memadai seperti pasar agro ataupun toko tani.

4. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berkembang cukup pesat di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data pada tahun 2019 sektor perdagangan menyumbang kontribusi sebesar 15,35 persen PDRB di Kabupaten

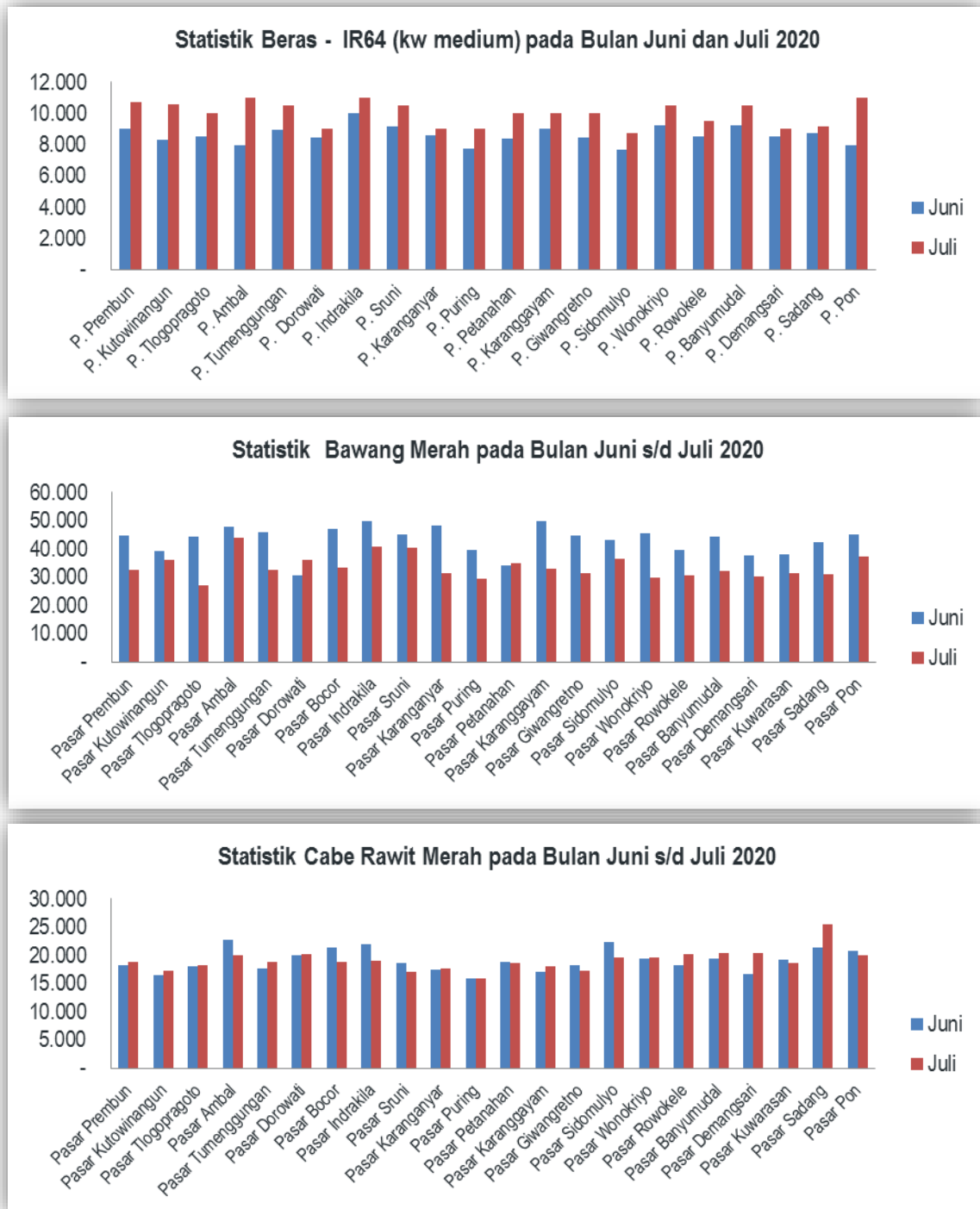
Kebumen, dan tumbuh sebesar 7,29 persen. Peningkatan jumlah pedagang menunjukkan bahwa perdagangan merupakan salah satu sektor yang cukup memberikan hasil sehingga diminati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi ini juga dapat menyebabkan semakin panjangnya rantai distribusi perdagangan yang dapat berdampak pada meningkatnya harga di tingkat konsumen. Oleh karena itu diperlukan pengendalian harga serta pemantauan pasokan dan ketersediaan barang.

Tabel 2.161
**Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB	14.07	14.57	14.88	15.03	15.35
2.	Jumlah Pedagang	<i>n/a</i>	20.928	21.000	21.284	21.284

Sumber: Disperindag Kab. Kebumen, 2020

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Distribusi barang menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap harga akhir yang harus dibayar oleh konsumen. Salah satu yang menjadi kendala dalam distribusi perdagangan di Kabupaten Kebumen adalah tidak adanya produsen maupun distributor untuk beberapa komoditas kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan terjadinya volatilitas harga beberapa komoditas. Selain harga yang mudah berfluktuasi, juga terjadi disparitas harga di beberapa wilayah. Berikut ini disajikan contoh volatilitas dan disparitas harga beberapa komoditas di Kabupaten Kebumen.



Gambar 2.64
**Volatilitas dan Disparitas Harga Beberapa Komoditas
 di Kabupaten Kebumen**

Pasar merupakan urat nadi perekonomian di Kabupaten Kebumen, karena hampir setiap hari para penjual dan pembeli bertransaksi di dalamnya. Pasar yang dikelola oleh Disperindag ada sebanyak 40 (empat puluh) unit yang biasa disebut pasar rakyat, sedangkan ada pasar lain yang tidak dikelola oleh Disperindag yang biasa disebut sebagai pasar desa karena dikelola oleh pemerintah desa setempat. Saat ini ada 32 pasar dalam kondisi baik, 2 pasar dalam kondisi rusak dan 6 pasar kondisi rusak berat. Dilihat secara umum, kondisi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik. Akan tetapi daya saing pasar tradisional belum cukup kuat jika dibandingkan dengan pasar modern seperti supermarket maupun minimarket yang semakin banyak. Kurangnya daya saing tersebut dapat dilihat dari timpangnya sarana prasarana, kualitas sumberdaya manusia serta tata kelola dan pelayanan di pasar tradisional dan pasar modern.

Kurangnya daya saing pedagang tradisional juga dipengaruhi oleh rendahnya akses permodalan yang dimiliki oleh pedagang. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur kredit menjadikan para pedagang kurang berminat mengakses kredit perbankan. Karena kendala tersebut, para pedagang tradisional lebih memilih untuk mengakses modal dari rentenir yang menawarkan persyaratan lebih mudah meskipun dengan bunga yang jauh lebih tinggi.

5. Urusan Perindustrian

Sejalan dengan tren perekonomian secara umum, terjadi peralihan sektoral dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Kebumen, dimana sektor sekunder yaitu industri mengalami peningkatan kontribusi setiap tahun. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang menyumbang angka pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dengan kontribusi mencapai 20,77 persen.

Tabel 2.162
**Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	18.78	19.85	20.06	20.39	20.77
2.	Pertumbuhan Industri (Unit Usaha)	54,899	54,912	56,378	56,402	56,405
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin	65	220	150	240	270

Sumber: Disperindag Kab. Kebumen, 2020

Saat ini jumlah industri yang ada di Kabupaten Kebumen adalah sebanyak 56.411 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 126.843 orang. Dari jumlah industri tersebut untuk industri besar ada sebanyak 3 buah, industri menengah ada sebanyak 63 buah, dan industri kecil ada sebanyak 56.345 buah.

Data lengkap tentang jumlah industri dan jumlah tenaga kerja disajikan dalam Tabel 2.163.

Tabel 2.163
Jumlah Industri di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Industri	Jumlah Tenaga Kerja
2015	54.899	124.972
2016	54.912	125.241
2017	56.378	126.708
2018	56.402	126.821
2019	56.405	126.831
2020	56.411	126.843

Sumber: Disperindag Kab. Kebumen, 2020

Industri Kabupaten Kebumen sendiri didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). IKM yang banyak berkembang antara lain industri makanan, kriya dan genteng. Mayoritas IKM yang ada masih menggunakan metode dan sarana sederhana dalam pengolahan produknya. Hal ini tentu akan memengaruhi produktivitas dan kualitas hasil yang diperoleh. Kurangnya penggunaan teknologi dipengaruhi oleh kurangnya modal maupun kurangnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penggunaan teknologi.

Dari sisi kelembagaan, pelaku IKM di Kabupaten Kebumen juga belum memiliki kelembagaan yang tertata dengan baik. Hal ini menyebabkan kurangnya daya saing karena kurang adanya kekompakan antarpelaku IKM. Sebagai contoh, tidak adanya kesepakatan harga antar pelaku IKM menyebabkan harga akan mudah dipermainkan oleh pengepul.

Terkait dengan aspek pemasaran, belum banyak produk IKM Kabupaten Kebumen yang mampu menembus pasar luar negeri. Pasar luar negeri menjadi pasar yang sangat potensial, apalagi di era sekarang dengan semakin terbukanya arus informasi pasar. Belum optimalnya pemanfaatan pasar

tersebut disebabkan antara lain karena rendahnya kualitas produk yang dihasilkan, serta kontinuitas dan kapasitas produksi yang belum mampu memenuhi permintaan ekspor. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman pelaku IKM terhadap prosedur ekspor juga menjadi kendala pemasaran produk yang perlu diselesaikan.

Saat ini Kabupaten Kebumen sedang dalam proses pembangunan kawasan industri yang terdapat di Kecamatan Petanahan. Maksud dan tujuan pembangunan kawasan industri tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen, membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Kebumen agar lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal. Adapun dampak positif yang diharapkan dari adanya kawasan industri tersebut nantinya adalah untuk membuka lapangan kerja, menumbuhkan berbagai peluang usaha baru, meningkatkan ekspor dan pendapatan daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Inti dari dampak positif kawasan industri tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen, sehingga diharapkan akan mengurangi masyarakat miskin yang ada dan Kabupaten Kebumen terlepas dari status kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah.

6. Urusan Transmigrasi

Kinerja urusan transmigrasi di Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Namun dalam kurun waktu tahun 2018-2019 menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah KK yang

difasilitasi untuk bertransmigrasi yang meningkat dari 4 KK di tahun 2018 menjadi 10 KK pada tahun 2019. Capaian kinerja urusan transmigrasi bergantung dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan target jumlah transmigrasi di kabupaten. Capaian kinerja urusan transmigrasi Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.164.

Tabel 2.164
**Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah KK yang difasilitasi untuk bertransmigrasi	10 KK	13 KK	5 KK	4KK	10 KK

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan KUKM Kab. Kebumen, 2019

2.3.4 Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Administrasi Pemerintahan

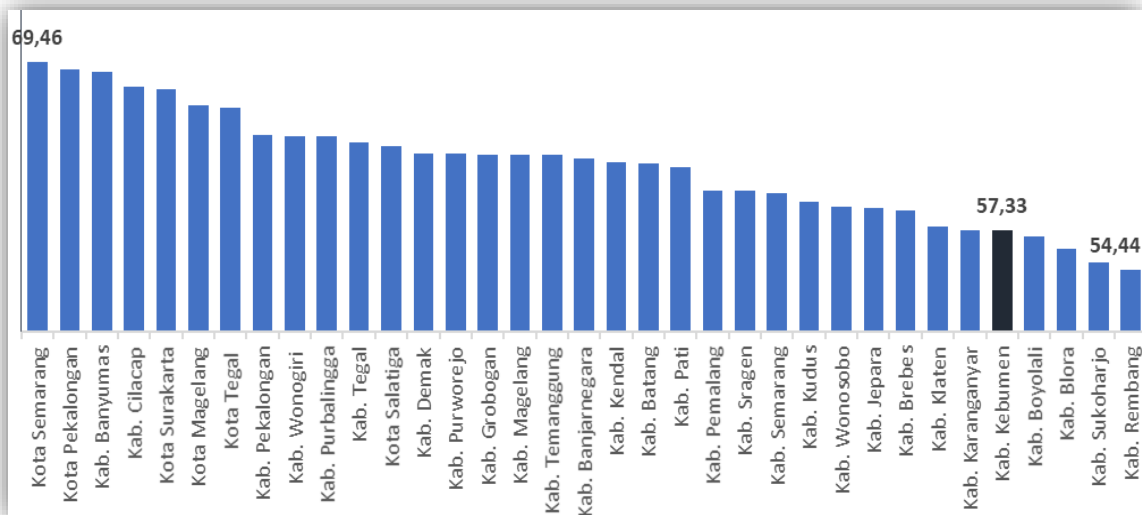
Kinerja tata kelola pemerintahan secara keseluruhan dapat dilihat dari capaian beberapa indikator antara lain Indeks Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP, Opini BPK atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Indeks Integritas Jabatan, Indeks Integritas Organisasi, Indeks Kualitas Pelayanan, dan Indeks Persepsi Korupsi.

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia yang ada di pemerintah dan dilaksanakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks reformasi birokrasi merupakan alat atau *tools* untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Pada tahun 2019, nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebesar 57,33 dengan kategori "CC". Dengan nilai seperti itu, Kabupaten Kebumen berada pada peringkat ke-31 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah (Gambar 2.65).



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2020 (data diolah)

Gambar 2.65
**Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

Rincian indikator penilaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Kebumen tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 2.165.

Tabel 2.165
**Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

No.	Kabupaten/Kota	Indeks RB	Predikat	Peringkat
1	Kota Semarang	69,46	B	1
2	Kota Pekalongan	68,97	B	2
3	Kabupaten Banyumas	68,76	B	3
4	Kabupaten Cilacap	67,69	B	4
5	Kota Surakarta	67,56	B	5
6	Kota Magelang	66,33	B	6
7	Kota Tegal	66,18	B	7
8	Kabupaten Pekalongan	64,24	B	8
9	Kabupaten Wonogiri	64,16	B	9
10	Kabupaten Purbalingga	64,09	B	10
11	Kabupaten Tegal	63,69	B	11
12	Kota Salatiga	63,39	B	12
13	Kabupaten Demak	62,91	B	13
14	Kabupaten Purworejo	62,83	B	14
15	Kabupaten Grobogan	62,78	B	15
16	Kabupaten Magelang	62,76	B	16
17	Kabupaten Temanggung	62,76	B	16
18	Kabupaten Banjarnegara	62,54	B	17
19	Kabupaten Kendal	62,26	B	18
20	Kabupaten Batang	62,16	B	19
21	Kabupaten Pati	61,89	B	20
22	Kabupaten Pemalang	60,20	B	21
23	Kabupaten Sragen	60,19	B	22
24	Kabupaten Semarang	60,02	B	23
25	Kabupaten Kudus	59,35	CC	24
26	Kabupaten Wonosobo	59,04	CC	25
27	Kabupaten Jepara	58,92	CC	26
28	Kabupaten Brebes	58,78	CC	27
29	Kabupaten Klaten	57,55	CC	28
30	Kabupaten Karanganyar	57,35	CC	29
31	Kabupaten Kebumen	57,33	CC	30
32	Kabupaten Boyolali	56,84	CC	31
33	Kabupaten Blora	55,98	CC	32
34	Kabupaten Sukoharjo	54,98	CC	33
35	Kabupaten Rembang	54,44	CC	34

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2020

Nilai komponen tertinggi pembentuk indeks reformasi birokrasi (lihat Tabel 2.166) diperoleh dari komponen penataan sistem manajemen SDM dengan nilai 9,19 dari bobot 15 (porsi 61,27 persen). Di sisi yang lain, dua area dengan nilai yang terendah yaitu penataan perundangan-undangan dengan nilai 1,12 dari bobot 5 (porsi 22,40 persen) dan penataan dan penguatan organisasi dengan nilai 1,64 dari bobot 6,00 (porsi 27,33 persen).

Tabel 2.166
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2019	Porsi
A Komponen Pengungkit				
1.	Manajemen Perubahan	5,00	1,34	26,80%
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,12	22,40%
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,64	27,33%
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,77	55,40%
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	9,19	61,27%
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,08	51,33%
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	4,45	37,08%
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,15	52,50%
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	26,74	44,57%
B Komponen Hasil				
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,22	58,71%
2.	Survey Internal Integritas Organisasi	6,00	4,97	82,83%
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,95	85,00%
4.	Opini BPK	3,00	3,00	100,00%
5.	Survey Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,45	84,50%
Total Komponen Hasil (B)		40,00	30,59	76,48%
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	57,33	57,33%

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2020

Sementara itu, rekomendasi Kemenpan-RB pada area penataan dan penguatan organisasi adalah evaluasi kelembagaan belum fokus pada kinerja yang akan dihasilkan. Struktur kelembagaan daerah harus disusun berdasarkan

pada pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Saat ini beberapa struktur kelembagaan pada perangkat daerah belum mendukung sepenuhnya terhadap prioritas pembangunan daerah. Kelembagaan Perangkat Daerah yang ada belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari tipe-tipe perangkat daerah (PD) yang ada yaitu 7 dari 26 (atau 26,92 persen) tipe PD di Kabupaten Kebumen belum sesuai dengan urusan/proses bisnis yang diampu.

Perangkat daerah yang mendukung atau melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar tentunya harus didukung dengan struktur kelembagaan yang optimal. Namun yang terjadi saat ini, ada beberapa perangkat daerah yang secara struktur tidak mendukung tugas pokok dan fungsinya pada suatu urusan tertentu. Satu contoh konkritnya Dinas Kesehatan selaku pengampu atau pelaksana urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Dinas Kesehatan saat ini struktur organisasinya sangat minimalis (bertipe B), padahal mengampu pelayanan kesehatan dengan SPM 10 persen anggaran harus dialokasikan ke urusan kesehatan. Berikut kondisi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis dan urusan yang diampu.

Tabel 2.167
Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

No	OPD	Urusan Diampu	Tipe		Kondisi	
			Saat ini	Ideal	Ideal	Belum Ideal
1.	Dinas Pendidikan	Pendidikan dan Kebudayaan	A	A	✓	
2.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	B	A		✓
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan umum dan penataan ruang dan Bidang pertanahan	B	A		✓



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

No	OPD	Urusan Diampu	Tipe		Kondisi	
			Saat ini	Ideal	Ideal	Belum Ideal
4.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Perumahan dan Kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	A	A	✓	
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran	B	A		✓
6.	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	A	A	✓	
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang transmigrasi	B	A		✓
8.	Dinas Pertanian dan Pangan	bidang pertanian dan bidang pangan	A	A	✓	
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	perindustrian dan bidang perdagangan	B	B	✓	
10.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	B	B	✓	
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	penanaman modal dan bidang energi dan sumberdaya mineral	B	B	✓	
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	A	A	✓	
13.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik	C	B		✓
14.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata	Kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata	B	B	✓	
15.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	B	B	✓	
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan;	C	B		✓
17.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	B	✓	
18.	Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan	A	A	✓	
19.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	A	A	✓	

No	OPD	Urusan Diampu	Tipe		Kondisi	
			Saat ini	Ideal	Ideal	Belum Ideal
20.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;	B	A	✓	
21.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang keuangan sub fungsi pendapatan daerah.	B	B	✓	
22.	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	A	A	✓	
23.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	A	A	✓	
24.	Inspektorat	Unsur Pengawasan	A	A	✓	
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unsur Penanggulangan Bencana			✓	
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur				✓

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2020

Evaluasi dari Kemenpan-RB terhadap kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. Belum optimalnya sistem penataan peraturan perundang-undangan di sebagian perangkat daerah terkait identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih. Selain itu, belum dilakukan evaluasi atas sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan oleh Bagian Hukum Sekeretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Evaluasi kelembagaan telah dilakukan, namun belum fokus kepada kinerja yang akan dihasilkan. Ke depan, struktur kelembagaan daerah harus disusun berdasarkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD;
3. Pengelolaan sistem manajemen SDM belum berjalan secara optimal, antara lain asesmen pegawai yang belum dilakukan secara menyeluruh, evaluasi jabatan yang belum berdasarkan standar kompetensi jabatan dan

ukuran kinerja individu yang belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi;

4. Sistem perencanaan kinerja berbasis teknologi informasi telah tersusun melalui SIM Perencanaan, SIM KUA PPAS, SIMDA Keuangan dan aplikasi e-SAKIP. Namun aplikasi-aplikasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi;
5. Belum adanya sistem *punishment/reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar di sebagian perangkat daerah. Selain itu, hasil survei kepuasan masyarakat khususnya di tingkat perangkat daerah belum ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan; dan
6. Komitmen pimpinan di tingkat perangkat daerah dalam mengawal reformasi birokrasi belum optimal. Hal ini terlihat dari belum terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi, belum adanya rencana kerja, serta belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di sebagian besar perangkat daerah. Selain itu, agen perubahan di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah juga belum terbentuk.

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi terhadap implementasi SAKIP bertujuan menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen memperoleh nilai 61,85 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018, nilai SAKIP Kabupaten Kebumen tahun 2019 mengalami peningkatan, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2.168.

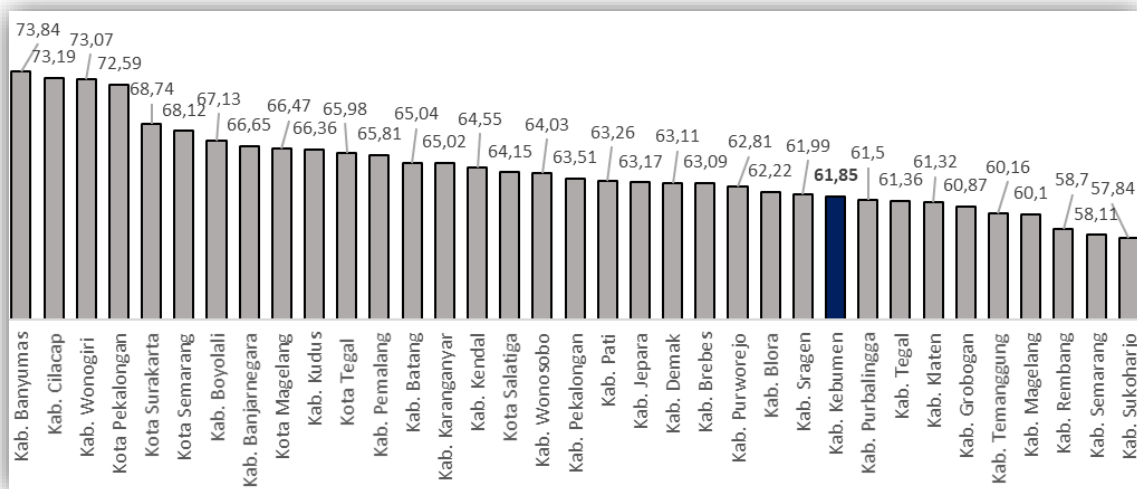
Tabel 2.168
Penilaian SAKIP Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2019

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	2018		2019	
			Nilai	Porsi	Nilai	Porsi
1	2	3	4	5 = (4/3)	6	7=(6/3)
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,29	67,63%	21,13	70,43%
2.	Pengukuran Kinerja	25	13,78	55,12%	14,19	56,76%
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,66	64,40%	9,83	65,53%
4.	Evaluasi Kinerja	10	5,88	58,80%	6,06	60,60%
5.	Capaian Kinerja	20	9,11	45,55%	10,64	53,20%
	Nilai Hasil Evaluasi	100	58,72		61,85	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		B	

Sumber: Kemenpan-RB, 2020

Dari Tabel 2.168, secara proporsi pembentuk penilaian SAKIP, capaian kinerja dan pengukuran kinerja menjadi komponen dengan proporsi nilai paling rendah. Hal ini menunjukkan penjabaran kinerja belum dimanfaatkan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di tingkat penanggungjawab program dan kegiatan, dan juga belum dilakukan sampai dengan tingkat individu pegawai sehingga keselarasan pengukuran antara kinerja individu dan kinerja organisasi belum terkawal dengan baik yang berpotensi pada pemberian *reward and punishment* pada individu pegawai yang kurang berorientasi pada kinerja. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baru sebatas monitoring capaian program dan kegiatan secara fisik, serapan anggaran dan belum digunakan mengukur capaian hasil (*outcome*) program serta keselarasan program dan kegiatan dalam mendukung capaian sasaran strategis organisasi.

Dari tabel dan gambar di atas, nilai SAKIP Kabupaten Kebumen pada tahun 2019, apabila dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, masih cukup rendah, dengan berada pada peringkat ke-26 dari 35 kabupaten/kota (Gambar 2.66).



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2020, data diolah

Gambar 2.66
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

c. Survei Internal Indeks Integritas Jabatan

Pada tahun 2019, hasil survei internal terhadap 106 orang responden ASN atas integritas jabatan menunjukkan indeks 3,21 (skala 4). Terdapat 10 orang pegawai atau 9 persen responden yang tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya, 43 orang ASN atau 41 persen responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya, serta 53 orang ASN atau 50 persen responden yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

d. Survei Internal Indeks Integritas Organisasi

Indeks integritas organisasi menunjukkan persepsi para pegawai/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Pada tahun 2019, survei internal

terhadap integritas organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan indeks 3,42 dalam skala 0-4.

Tabel 2.169
**Indeks Integritas Organisasi
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019**

No.	Komponen	Indeks 2019
1.	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,32
2.	Integritas Kinerja terkait Pengelolaan SDM	3,57
3.	Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran	3,40
4.	Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma	3,38
Indeks Integritas Organisasi		3,42

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, Kemenpan-RB

e. Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

Hasil survei persepsi pelayanan pada tahun 2019 menunjukkan indeks 3,38 dalam skala 4,0. Komponen tertinggi hasil survei persepsi pelayanan diperoleh dari unsur biaya dengan skor 3,47, sedangkan komponen terendah diperoleh unsur respon dengan skor 3,28. Indeks Persepsi Pelayanan Kabupaten Kebumen tahun 2019 sama dengan rata-rata Indeks Persepsi Pelayanan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,38.

Respon pelayanan menjadi unsur yang terendah, berdasar hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kebumen tahun 2019, respon pelayanan sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Unsur perilaku pelaksana lekat kaitannya dengan *attitude* (sikap) dan *behave* (perilaku). Masyarakat pada umumnya menginginkan perilaku pelaksana yang mampu melayani dan

memberikan perhatian terhadap pertanyaan serta mempunyai empati sehingga mampu memberikan kenyamanan. Unsur perilaku menuntut pelaksana untuk dapat menyajikan pelayanan yang ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik serta respon yang memadai dalam menghadapi masyarakat pada saat proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Perilaku pelaksana dalam pelayanan publik di Kabupaten Kebumen belum optimal. Meskipun Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menerapkan budaya kerja "PRIMA" (Profesional, Religius, Inovatif, Komitmen dan Akuntabel), kaidah perilaku merupakan unsur tidak hanya memperhatikan masalah etika saja, tetapi kemampuan komunikasi dan *responsiveness* menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kepuasan pada masyarakat.

f. Survei Eksternal Persepsi Korupsi

Hasil persepsi korupsi tahun 2019 menunjukkan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,40 dalam skala 4,0. Komponen tertinggi hasil survey persepsi korupsi diperoleh dari unsur calo dengan skor 3,43, sedangkan komponen terendah diperoleh unsur integritas dengan skor 3,35. Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Kebumen tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Indeks Persepsi Korupsi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,56.

g. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Realisasi kinerja berdasarkan formula Indikator Kinerja Kunci untuk Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Nilai EKPPD Target

yang ingin dicapai adalah nilai B atau Tinggi. Nilai EKPPD disampaikan setelah penilaian oleh Tim Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya. Nilai EKPPD dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Status dan Kinerja Pemerintahan Daerah.

Realisasi capaian Nilai EKPPD Kabupaten Kebumen tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.170.

Tabel 2.170
Nilai EKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Nilai EKPPD	3,2232	3,1274	2,5236	3,3198

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen, 2020

Berdasarkan data di atas, nilai EKPPD periode 2016-2019, meskipun fluktuatif, cenderung mengalami peningkatan dari 3,2 pada 2016 menjadi 3,3 pada 2019. Upaya peningkatan Nilai EKPPD dilaksanakan dengan adanya dukungan dari Kepala Daerah dalam pelaksanaan *desk data* dan evaluasi mandiri serta adanya koordinasi intensif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kemendagri.

Kendala dalam evaluasi nilai EKPPD adalah keterlambatan hasil kinerja tahun n yang selalu diterbitkan Kementerian Dalam Negeri pada akhir tahun $n+1$, contohnya nilai EKPPD tahun 2018 disampaikan pada tahun 2020. Sehingga perhitungan capaian kinerja tahun 2018 masih merupakan angka

sementara. Pada tahun 2018, target nilai yang ingin dicapai adalah Baik/Tinggi, namun sampai dengan disusunnya laporan ini masih belum diterbitkan SK Mendagri tentang Penetapan dan Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional Tahun 2018. Sementara berdasarkan hasil evaluasi sementara yang disampaikan oleh Tim EKPPD Provinsi Jawa Tengah, bahwa nilai EKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 mencapai 3,3198.

Capaian nilai EKPPD mengalami penurunan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 terjadi kasus temuan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kebumen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 118-8840 Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Peringkat Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2017, pada Ketentuan Kesepuluh, bagi daerah yang masuk peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional pada tahun 2017 mendapat pengurangan skor dikarenakan salah satunya pada huruf (a) "Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerahnya ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi per tanggal 1 April 2017 baik yang sudah maupun belum mendapat putusan pengadilan tetap (*inkracht*)".

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh *stakeholder* untuk mengelola

sumberdaya daerah guna peningkatan kesejahteraan daerah. Perencanaan pembangunan daerah berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan daerah dan pembinaan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2019 telah terbit Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut telah mengatur secara detail pembagian berdasarkan urusan dan kewenangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program antarperangkat daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah dilakukan pemetaan perubahan nomenklatur sub-kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan mensinkronkan indikator maupun sub indikator kegiatan dengan tetap mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Selain itu, telah terbit Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya. Adanya peraturan tersebut maka proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pertanggungjawaban terintegrasi dalam satu sistem yang terhubung. Sebagai tindak lanjut Permendagri tersebut, telah dilakukan interoperabilitas antara *e-Planning* (SIM Perencanaan), SIM KUA-PPAS, dan *e-Budgeting* (SIMDA). Langkah yang sedang dilakukan adalah pengintegrasian aplikasi SIMPER dengan SIPD walaupun belum optimal tetapi diharapkan pada proses perencanaan penganggaran tahun 2021 telah dapat terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perangkat Daerah (PD) telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yaitu RPJMD, dan Renstra PD serta dokumen perencanaan kinerja tahunan yaitu, RKPD, Renja, RKT, RKA, dan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dari tingkat Kepala Daerah sampai penanggungjawab kegiatan di tingkat PD. Kualitas tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan tersebut telah berorientasi hasil (*outcome*) dan telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang terukur.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Perangkat Daerah juga telah membangun dan mengimplementasikan sistem perencanaan kinerja

berbasis teknologi informasi yaitu sim perencanaan, SIM KUA PPAS, SIMDA keuangan, dan aplikasi *e*-SAKIP, namun aplikasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah pada beberapa perangkat daerah masih perlu penyempurnaan rumusan sasaran strategis, indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran terkait dengan relevansi, formulasi pengukuran, dan kecukupan indikator seperti pada Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, serta Dinas Perhubungan. Namun demikian, pada tataran pelaksanaan perencanaan, konsistensi antara dokumen masih menjadi permasalahan. Hal ini terlihat dari adanya program kegiatan dalam dokumen RKPD dan APBD yang tidak tercantum pada dokumen RPJMD. Berikut Persentase Kesesuaian program antara RPJMD dan RKPD serta RKPD dengan APBD Tahun 2018 dan 2019.

Tabel 2.171
**Kesesuaian Program antara RPJMD dan RKPD
serta RKPD dengan APBD Tahun 2018 dan 2019**

Tahun	RPJMD-RKPD				RKPD-APBD			
	RPJMD	RKPD	Kesesuaian RPJMD dan RKPD	%	RKPD	APBD	Kesesuaian RKPD dan APBD	%
2018	165	163	14 Program di RKPD tidak terdapat di RPJMD	91,52%	163	156	Semua Program di RPKD terdapat di APBD	100%
2019	165	148	5 Program di RKPD tidak terdapat di RPJMD	96,97%	148	151	Semua Program di RPKD terdapat di APBD	100%
2020	165	146	5 Program di RKPD tidak terdapat di RPJMD	96,97%	146	146	Semua Program di RPKD terdapat di APBD	100%

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2020, data diolah

Meskipun capaian komponen perencanaan kinerja dalam penilaian SAKIP Kabupaten pada tahun 2018 dan 2019 menjadi komponen dengan nilai dan porsi tertinggi, namun masih terdapat permasalahan mendasar apabila dilihat dari konsistensi antardokumen perencanaan yang masih belum optimal. Meskipun persentase kesesuaian antara jumlah program di RPJMD dengan RKPD meningkat, namun masih terdapatnya program dalam RKPD yang tidak tertuang dalam RPJMD mengindikasikan masih terdapatnya masalah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya konsistensi antardokumen perencanaan;
- b. Belum adanya mekanisme untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran serta mekanisme pembangunan yang lain (integrasi SIMP Perencanaan dengan Penganggaran dan sistem manajemen pemerintah yang lain belum optimal); dan
- c. Pengendalian dan evaluasi kegiatan kurang mendapat perhatian, termasuk penganggarannya.

3. Urusan Keuangan

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, kinerja urusan keuangan Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah yang meningkat dari Rp 2,606 triliun pada 2016 menjadi Rp

2,797 triliun di 2019. Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kebumen selalu mendapat opini BPK dengan predikat WTP sejak tahun 2017. Perkembangan capaian kinerja urusan keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019 secara lebih detail tersaji pada Tabel 2.172.

Tabel 2.172
**Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi pendapatan daerah (triliun rupiah)	2,606	2,713	2,639	2,797
2	Opini BPK atas LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen, 2020

Pada tahun 2019 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. PP tersebut mengamanatkan perubahan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Kinerja urusan keuangan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan aset daerah. Sampai dengan tahun 2020, masih terdapat 1.073 bidang atau 47,10 persen dari total 2.278 bidang tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat. Dari 1.073 bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut, 60 persen atau 644 bidang tanah merupakan aset dalam bentuk tanah bidang jalan dan tanah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Beberapa

aset pemerintah daerah sampai dengan saat ini belum sepenuhnya optimal pemanfaatannya, seperti tanah kebun dinas dan beberapa bidang tanah yang *idle* (belum dimanfaatkan), seperti di antaranya tanah untuk evakuasi bencana, tanah untuk SMA Alian, tanah untuk rencana pembangunan Terminal Karangsambung.

Terkait aset dalam bentuk gedung, sampai dengan tahun 2020, 80 persen gedung yang digunakan untuk sekolah dasar merupakan tanah milik desa. Kemudian, terdapat beberapa aset gedung yang belum jelas rencana pemanfaatannya di antaranya eks Gedung RSUD Soedirman, TIC, eks gedung Kantor Kecamatan Karangsambung, gedung Sekretariat Bersama, dan eks Gedung Pramuka. Permasalahan terkait aset ini disebabkan beberapa hal di antaranya pengelolaan aset daerah yang tidak jelas status hukumnya atau bersengketa, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur, serta tukar-menukar aset.

4. Urusan Pengawasan

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, kinerja urusan pengawasan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari maturitas SPIP dan nilai *levelling* APIP Kabupaten yang meningkat dari level 2 di tahun 2016 menjadi level 3 pada tahun 2019. Sedangkan nilai maturitas SPIP juga meningkat dari 2 pada tahun 2016 menjadi 3 pada tahun 2019. Selain itu, persentase penyelesaian tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu juga meningkat dari

90,00 persen pada tahun 2016 menjadi 94,26 persen di tahun 2019. Nilai tersebut bahkan melebihi target 2019 sebesar 92,00 persen. Perkembangan capaian kinerja pengawasan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016-2019 selengkapnya tersaji pada Tabel 2.173.

Tabel 2.173
**Perkembangan Capaian Kinerja Pengawasan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	90,00	92,00	92,00	94,26
2	Nilai leveling APIP kabupaten	2	2	2,5	3
3	Nilai Maturitas SPIP	2	2,55	3	3

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kebumen, 2020

Dalam penilaian indeks reformasi birokrasi yang telah diuraikan di sub-bab sebelumnya, nilai unsur penguatan pengawasan masih cukup rendah yaitu 4,45 dari skala 12 (nilai bobot 37,08 persen). Dalam pembangunan daerah, pengawasan merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga proses pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan secara optimal. Salah satu penyebab terhambat atau melencengnya proses pembangunan disebabkan kurang efektifnya sistem dan lembaga pengawasan yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan mengamanahkan bahwa daerah melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ada lima unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Penilaian SPIP Kabupaten Kebumen tahun 2019 secara lengkap pada Tabel 2.174.

Tabel 2.174
Hasil Penilaian SPIP Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil SA		Hasil QA		Perubahan Nilai
			Skor	Nilai	Skor	Nilai	
1	Lingkungan Pengendalian	30,00	3,1250	0,9375	3,0000	0,9000	(0,0375)
2	Penilaian Risiko	20,00	3,0000	0,6000	3,0000	0,6000	-
3	Kegiatan Pengendalian	25,00	3,0909	0,7727	3,0000	0,7500	(0,0227)
4	Informasi dan Komunikasi	10,00	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	-
5	Pemantauan	15,00	3,0000	0,4500	3,0000	0,4500	-
	Jumlah	100,00	-	3,0602	-	3,0000	(0,0602)
	Keterangan		Level 3 (terdefinisi)				

Sumber: Inspektorat Kab. Kebumen, 2020

Beberapa permasalahan yang disarankan untuk menjadi prioritas tindak lanjut evaluasi BPKP atas nilai SPIP Kabupaten Kebumen Tahun 2019 di antaranya:

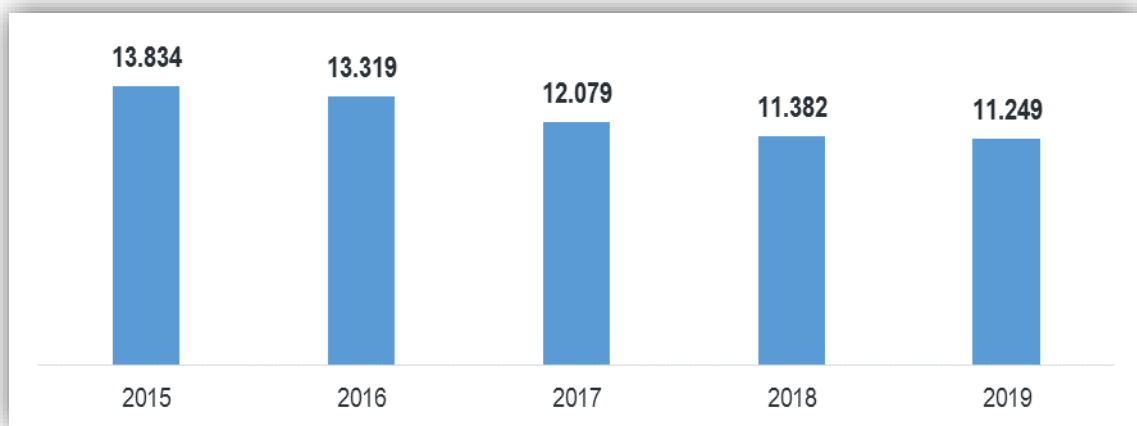
- a. Infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub-unsur SPIP yang menjadi *Area of Improvement (AoI)*, antara lain melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi dan kebijakan pada seluruh sub-unsur, serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi tersebut; dan
- b. Pemantauan yang berkelanjutan atas seluruh kebijakan dan implementasinya pada masing-masing sub-unsur termasuk perubahan lingkungan strategis yang didukung dengan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi, *online, real time* sehingga dapat memberikan informasi bagi pimpinan (*dashboard* pimpinan) secara *update* dan efektif untuk pengambilan keputusan.

5. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penataan sumberdaya manusia aparatur menjadi komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini. Di sisi yang lain, saat ini terjadi permasalahan yang sangat kompleks dan sistematis dalam sistem manajemen SDM aparatur pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi pada seluruh subsistem manajemen SDM aparatur mulai dari sistem rekrutmen, sistem penggajian, dan peningkatan upaya kesejahteraan, penilaian kinerja, sistem mutasi, serta sistem pengawasan.

Secara kuantitas, jumlah ASN di Pemerintah Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir terus mengalami tren yang menurun (Gambar 2.67). Hal

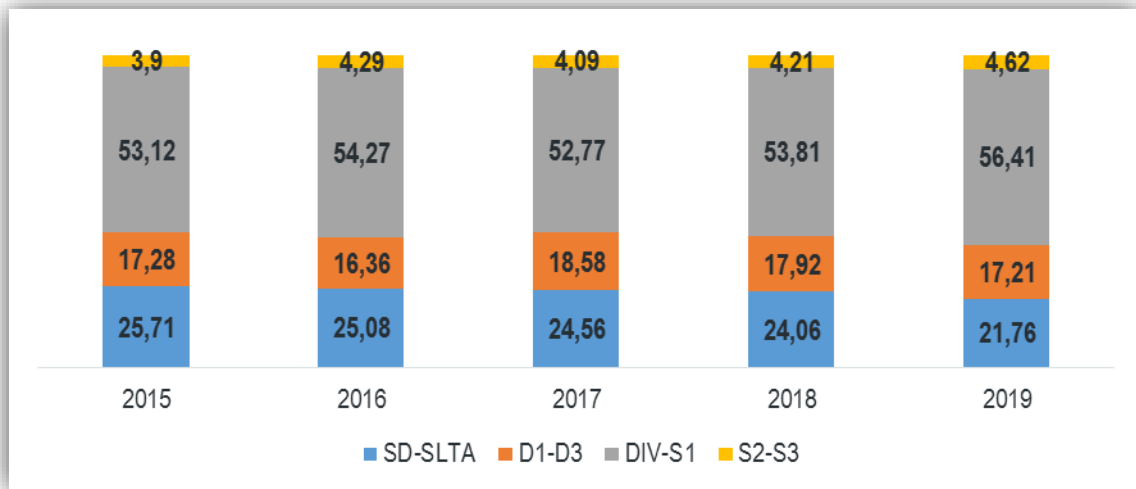
tersebut dapat diamati dari jumlah ASN pada tahun 2015 sebanyak 13.834 personil berkurang menjadi 11.249 personil pada tahun 2019. Berkurangnya jumlah ASN tersebut meningkatkan beban kerja ASN yang ada sehingga perlu penambahan personil ASN baik melalui rekrutmen CPNS atau yang lainnya agar ASN pada dapat melayani masyarakat dengan baik.



Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.67
Jumlah ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Pada sisi yang lain, kualitas ASN Kabupaten Kebumen terus meningkat selama kurun waktu 2015-2019. Hal ini terlihat dari persentase ASN berpendidikan DIV-S1 yang meningkat dari 53,12 persen di 2015 menjadi 56,41 persen pada 2019, sementara ASN berpendidikan SD-SLTA menurun dari 25,71 persen pada 2015 menjadi 21,76 persen di 2019. Jumlah dan tingkat pendidikan ASN di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.68.



Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.68

Persentase Tingkat Pendidikan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Sementara itu, dalam kurun waktu 5 tahun ini, Pemkab Kebumen terus berupaya meningkatkan kualitas aparat ASN-nya agar kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peningkatan kapasitas ASN yang meningkat dari 672 diklat pada tahun 2015 menjadi 1.486 diklat di tahun 2019. Perkembangan peningkatan kapasitas ASN Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.175.

Tabel 2.175

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Diklat	2015	2016	2017	2018	2019
Teknis	210	160	300	160	792
Fungsional	0	30	30	80	60
Kepemimpinan	150	71	46	61	29
Prajabatan	196	4	0	250	498
Pengiriman PNS ke Lembaga Diklat	116	111	212	102	107
Jumlah	672	376	588	653	1.486

Sumber: BKPPD, 2020

Berdasarkan data pejabat struktural dan fungsional di pada tahun 2019 menunjukkan bahwa untuk penataan dan penempatan SDM aparatur di Kabupaten Kebumen masih belum optimal (lihat Tabel 2.176, Tabel 2.177, Tabel 2.178). Meskipun data terkait kesesuaian penempatan SDM dengan Anjab, ABK dan standar kompetensi jabatan sampai saat ini belum tersusun, namun dari komposisi ASN yang menempati jabatan pengawas (Eselon IV) terdapat ketidaksesuaian antara penempatan SDM dengan standar kompetensi jabatan. Untuk jabatan pengawas (Eselon IV), dipersyaratkan tingkat pendidikan minimal sarjana muda (D3). Sampai dengan tahun 2019, masih terdapat 70 orang dari 553 (12,66%) pejabat pengawas (Eselon IV) yang tingkat pendidikannya SMA.

Tabel 2.176
Data Pejabat Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan,
Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

TK DIK	Eselon II (Pimpinan Tinggi)			Eselon III (Administrator)			Eselon IV (Pengawas)		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SLTA	0	0	0	0	0	0	48	22	70
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D3	0	0	0	0	2	2	13	13	26
D4	0	0	0	4	0	4	12	7	19
S1	10	2	12	65	16	81	194	133	327
S2 & S3	15	3	18	53	31	84	74	37	111
Jumlah	25	5	30	122	49	171	341	212	553

Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.177

**Data Pejabat Fungsional Berdasarkan Tingkat Pendidikan,
Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

TK DIK	Rumpun Pendidikan			Rumpun Kesehatan			Rumpun Teknis Lainnya		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SLTA	114	108	222	22	64	86	17	3	20
D1	7	5	12	0	39	39	0	0	0
D2	260	342	602	0	0	0	2	0	2
D3	27	26	53	148	791	939	32	14	46
D4	2	4	6	8	38	46	2	0	2
S1	1.951	2.880	4.831	65	149	214	40	39	79
S2 & S3	117	64	181	44	53	97	5	3	8
Jumlah	2.478	3.429	5.907	287	1.134	1.421	98	59	157

Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.178

**Data Pejabat Fungsional Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan,
Rumpun Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

TK DIK	Gol. I			Gol. II			Gol. III			Gol. IV		
	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
SD	92	10	102	13	0	13	0	0	0	0	0	0
SLTP	7	1	8	268	13	281	0	0	0	0	0	0
SLTA	55	2	57	832	227	1.059	306	222	528	0	0	0
D1	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
D2	0	0	0	9	4	13	8	5	13	3	1	4
D3	0	0	0	18	81	99	41	34	75	0	0	0
D4	0	0	0	0	2	2	6	4	10	0	0	0
S1	0	0	0	18	10	28	282	384	666	15	4	19
S2 & S3	0	0	0	1	0	1	4	9	13	6	0	6
Jumlah	154	13	167	1.161	340	1.501	649	661	1.310	24	5	29

Sumber: BKPPD Kab. Kebumen, 2020

6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Hal ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan guna

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2019 Pemkab Kebumen telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan peran aparatur dan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut meliputi Riset Unggulan Daerah (RUD), Kreatif Inovatif (Krenova) dan Dewan Riset Daerah (DRD).

Terdapat 5 judul penelitian yang dilakukan dalam kegiatan RUD di tahun 2019. Adapun dalam kegiatan Krenova, Kabupaten Kebumen berhasil masuk dalam 10 besar pemenang Lomba Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah serta satu inventor berhasil masuk dalam 14 besar Penghargaan Satu Indonesia Awards (SIA). Sementara itu, DRD pada tahun 2019 telah melaksanakan penelitian tentang kesiapan Kabupaten Kebumen dalam menangkap peluang keberadaan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan edukasi pengelolaan sampah di TPA yang berada di Kabupaten Kebumen. Hasil-hasil penelitian yang disusun dipergunakan sebagai masukan atau dasar dalam penentuan kebijakan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

7. Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat dari fasilitasi terhadap pembahasan peraturan daerah yang dilaksanakan Lembaga DPRD. Selama lima tahun terakhir kinerja Sekretariat DPRD cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase peraturan daerah yang ditetapkan dan tepat waktu dari 62,50 persen pada tahun 2016 menjadi 90 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.179
Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Raperda yang Dibahas	32	15	16	11	20
2.	Raperda yang Disetujui/ Ditetapkan	20	13	16	10	18*
3.	Persentase peraturan daerah yang ditetapkan tepat waktu	62,50 %	86,67 %	100 %	90,91 %	90,00 %

Sumber: Sekretariat DPRD, 2020 *) data perkiraan

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Nilai konsumsi rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka konsumsi perkapita penduduk Kabupaten Kebumen masih berada di bawah rata-rata provinsi (lihat Tabel 2.175). Dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain, Kabupaten Kebumen berada di peringkat ke-32 dari 35 kabupaten/kota.

Tabel 2.180
**Angka Konsumsi RT Perkapita
Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Kebumen	554.413	631.390	729.730	704.294	781.578
2	Prov. Jawa Tengah	n/a	n/a	n/a	938.581	956.403

Sumber: BPS 2020, data diolah

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Selama lima tahun terakhir, NTP Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang fluktuatif namun ada kecenderungan menurun. Pada level regional, angka kabupaten yang semula ada di atas rata-rata provinsi, bergeser menjadi di bawah rata-rata dengan adanya penurunan tersebut. Dilihat dari nilainya, NTP yang hanya berkisar di angka 100 menunjukkan bahwa usaha pertanian yang ada di Kabupaten Kebumen saat ini cenderung tidak menguntungkan bagi petani (Tabel 2.181).

Tabel 2.181
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018

No	NTP	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Kebumen	100,86	100,49	100,32	100,77
2	Prov. Jawa Tengah	100,23	100,02	100,02	102,24

Sumber: BPS 2020, data diolah

3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Selain dilihat dari nilainya, pola konsumsi rumah tangga juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Persentase pengeluaran untuk pangan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka

semakin baik tingkat perekonomian masyarakat. Dilihat dari nilainya, pengeluaran penduduk Kabupaten Kebumen masih berada di bawah rata-rata provinsi, pun bila dilihat dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan yang masih sedikit di bawah angka provinsi (Tabel 2.182).

Tabel 2.182
Rata-rata Konsumsi RT Perkapita Sebulan
Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah, Tahun 2018-2019

No	Uraian	Makanan				Non-Makanan				Total	
		2018		2019		2018		2019		2018	2019
1	Kab. Kebumen	380.	54	419.	54	323.	46	362.	46	704.	781.
		504	%	138	%	790	%	440	%	294	578
2	Prov. Jawa Tengah	460.	49	469.	49	477.	51	486.	51	938.	956.
		891	%	421	%	690	%	982	%	581	403

Sumber: BPS 2020, data diolah

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

1. Luas Wilayah Produktif

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non-pertanian. Kawasan peruntukan budidaya meliputi:

- kawasan hutan produksi;
- kawasan hutan rakyat;
- kawasan pertanian;
- kawasan perikanan;
- kawasan pertambangan dan energi;

- f. kawasan peruntukkan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Sedangkan wilayah produktif adalah lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wilayah produktif terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan perikanan. Dalam analisis citra satelit tahun 2020, luasan budidaya seluas 120.695,42 ha, dengan luas lahan produktif 59.723,48 ha, dan tersebar di 26 kecamatan. Kecamatan Adimulyo, Puring, dan Bonorowo memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling besar, karena topografi wilayahnya terletak di daerah datar yang banyak memiliki sawah atau ladang. Sedangkan Kecamatan Rowokele, Sadang, dan Padureso memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling kecil, dikarenakan topografis wilayahnya pegunungan yang jarang sawah atau ladang, namun banyak hutan.

Tabel 2.183
**Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Kebumen (ha)
Tahun 2020**

No	Uraian	2020
1	Luas Wilayah Produktif	59.723,48
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	120.695,42
3	Rasio	49,48%

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.184
**Persentase Luas Wilayah Produktif (ha) Menurut Kecamatan
 di Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas Wilayah Produktif (ha)	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	Rasio
1	Adimulyo	3.136,82	4.484,44	69,95%
2	Alian	2.253,67	5.494,66	41,02%
3	Ambal	4.227,48	6.173,14	68,48%
4	Ayah	1.671,40	5.302,52	31,52%
5	Bonorowo	1.587,24	2.297,17	69,10%
6	Buayan	1.898,94	5.223,25	36,36%
7	Buluspesantren	3.387,46	5.138,76	65,92%
8	Gombang	953,97	1.896,49	50,30%
9	Karanganyar	1.116,76	2.947,44	37,89%
10	Karanggayam	4.993,21	9.893,61	50,47%
11	Karangsambung	3.581,66	6.700,35	53,45%
12	Kebumen	2.420,43	4.579,79	52,85%
13	Klirong	2.547,44	4.260,44	59,79%
14	Kutowinangun	1.709,54	3.317,85	51,53%
15	Kuwarasan	2.348,31	3.622,63	64,82%
16	Mirit	3.391,52	5.083,99	66,71%
17	Padureso	794,79	2.657,01	29,91%
18	Pejagoan	1.113,47	3.472,51	32,07%
19	Petanahan	2.931,23	4.505,15	65,06%
20	Poncowarno	1.283,48	2.675,91	47,96%
21	Prembun	1.362,83	2.310,77	58,98%
22	Puring	4.348,04	6.217,96	69,93%
23	Rowokele	1.236,54	5.024,05	24,61%
24	Sadang	1.605,10	5.770,79	27,81%
25	Sempor	2.180,99	7.126,09	30,61%
26	Sruweng	1.641,14	4.518,64	36,32%
Jumlah		59.723,48	120.695,42	49,48%

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2020

Tabel 2.185

**Luas Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2020**

No.	Jenis Data	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Luas Alih Fungsi Lahan (m ²)	85.996 m ²	28.573 m ²

Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2020

Faktor utama dalam sektor pertanian adalah ketersediaan lahan. Di Kabupaten Kebumen, luas lahan pertanian khususnya padi dan palawija, senantiasa mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini dipengaruhi tingginya alih fungsi lahan dari fungsi pertanian ke non-pertanian. Hal ini tentu saja menjadi kendala karena berpengaruh kepada tingkat produksi. Menurunnya luas areal pertanian diikuti dengan tingkat produksi yang cenderung menurun.

Selain alih fungsi lahan, tingkat kepemilikan lahan pertanian juga menjadi kendala dimana usaha pertanian menjadi tidak memenuhi skala ekonomis. Luas lahan sawah di Kabupaten Kebumen 40.073,20 ha dikelola oleh petani sebanyak 177.936 orang. Dengan demikian, maka tingkat kepemilikan lahan pertanian hanya seluas 0,23 ha per orang. Luasan ini jauh dari memadai karena untuk memenuhi kebutuhannya secara layak, minimal setiap petani memiliki sawah seluas 2 ha.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Jumlah Kasus Demonstrasi

Jumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 masih tergolong cukup tinggi walaupun mengalami penurunan setiap tahunnya,

namun juga fluktuatif, dimana tahun 2017 dan 2018 sempat mengalami kenaikan. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi sebagian besar pada bidang politik, kemudian aspirasi-aspirasi yang diperjuangkan para pendemo berkorelasi dengan isu-isu yang berkala nasional, contohnya seperti demonstrasi PA 212. Berbagai unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kabupaten Kebumen relatif dapat berjalan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian dan tidak berdampak negatif terhadap iklim investasi yang ada di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.186
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Bidang Politik	16	5	6	13	11
Ekonomi	7	0	9	5	3
Kasus Pemogokan Kerja	1	0	0	0	0
Jumlah	24	5	15	18	14

2. Rata-Rata Lama Perijinan

Di Kabupaten Kebumen terdapat 26 jenis perijinan yang dilayani dengan waktu rata-rata lama perijinan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi standar pelayanan perijinan tahun 2015-2020 (Tabel 2.187)

Tabel 2.187
Rata-rata Lama Perijinan di Kabupaten Kebumen

No	Jenis Perijinan	Standar	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
1	IUJK	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	
2	IMB	10 hr	10 hr	10 hr	10 hr	10 hr	10 hr	
3	Izin pemasangan reklame	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	
4	PIRT	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	



No	Jenis Perijinan	Standar	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan	
5	Izin mendirikan rumah sakit umum	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	- Semua izin akan diproses petugas setelah berkas lengkap	
6	Izin mendirikan rumah sakit khusus	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr		
7	Surat tanda pengobatan tradisional	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr		
8	Izin apotek	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	- Apabila ada izin yang melebihi standar waktu, bisa dikarenakan belum adanya rekomendasi dari dinas terkait	
9	Izin toko obat	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr		
10	Izin optik	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr		
11	Izin depot air minum	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr		
12	Izin lembaga pelatihan kerja	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr		
13	Izin operasional pendirian bursa kerja khusus	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr		
14	Izin lokasi	7 hr	Sudah tidak ada						
15	Izin operasional rumah sakit	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr		
16	Izin operasional klinik pratama	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr		
17	Izin laboratorium klinik pratama	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr		
18	Izin penggunaan Gedung Juang	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam		
19	Izin menempati kios/loos/toko	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam		
20	Izin pendirian klinik pratama	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr		
21	Izin lingkungan	14 hr	14 hr	14 hr	14 hr	14 hr	14 hr		
22	Izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3	45 hr	45 hr	45 hr	45 hr	45 hr	45 hr		
23	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	90 hr	90 hr	90 hr	90 hr	90 hr	90 hr		
24	Kartu penanggung-jawab teknik badan usaha	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr		
25	Izin Penggunaan alun-alun	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam		
26	Izin perubahan penggunaan tanah	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr		

Sumber: DPMPTSP, 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata waktu tingkat penyelesaian perizinan di Kabupaten Kebumen masih cukup panjang (50 persen waktu penyelesaian 7 hari). Beberapa hal yang menyebabkan cukup lamanya waktu penyelesaian perizinan di antaranya:

- a. Rekomendasi yang masih memakan waktu.
- b. Pemanfaatan IT dalam pelayanan belum optimal.
- c. Belum optimalnya koordinasi antarlembaga.

Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya optimal untuk meningkatkan iklim investasi melalui pelayanan perizinan yang lebih baik. Pada tahun 2019, diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dalam Perda ini diatur penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri atau penanaman modal asing (PMA). Pemberian insentif berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan atau pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. Kemudian, kemudahan investasi berbentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, percepatan pelayanan perizinan, dan pemberian advokasi.

Selain itu, pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP). MPP menyediakan 251 layanan dari 26 instansi dengan 21 loket yang tersedia, termasuk layanan dokumen dan perizinan investasi dan usaha. Pendirian MPP ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi

waktu penyelesaian pelayanan perizinan sehingga masyarakat khususnya para investor nyaman dan diuntungkan. Diharapkan pada akhirnya nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Kebumen akan semakin meningkat.

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Fokus sumberdaya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung daya saing daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan sumberdaya manusia merupakan sektor strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Analisis kinerja atas sumberdaya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3 untuk mengetahui potensi sumberdaya manusia yang dimiliki.

1. Kualitas tenaga kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Rasio pendidikan masyarakat Kebumen masih didominasi pendidikan Menengah Atas (SMA, MA) dan Pendidikan Dasar (SMP, MTS). Berdasarkan data Disdukcapil tahun 2019 penduduk Kabupaten Kebumen terdapat 18,21 persen berpendidikan SMP sederajat, 16,84 persen berpendidikan SMA sederajat, 0,81 persen berpendidikan D3, 0,02 persen berpendidikan S1, 0,009 persen berpendidikan S2, dan 0,00004 persen berpendidikan S3. Penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi sebesar 2,53 persen dari seluruh penduduk. Hal ini menunjukkan kualitas SDM di Kabupaten Kebumen ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan masih tergolong rendah dan pendidikan

masyarakat Kebumen masih didominasi dengan pendidikan di bawah SMA dengan persentase 35.05 persen (Tabel 2.188).

Tabel 2.188
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen

No	Jenis Perijinan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan S1	17.748	26.694	28.901	31.725	33.815
2.	Jumlah lulusan S2	812	828	958	1.086	1.204
3.	Jumlah lulusan S3	59	60	62	57	61
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	18.620	27.582	29.921	32.868	35.080
5.	Jumlah Penduduk	1.346.309	1.358.448	1.364.905	1.375.221	1.388.490
6.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5)	1,38	2,03	2,19	2,39	2,53

Sumber: DDA Kabupaten Kebumen, Disdukcapil, 2020

2. Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Struktur penduduk dapat memberikan kontribusi ekonomi pada suatu daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah harus tetap mengendalikan laju pertumbuhannya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka akan menjadi beban bagi pemerintah daerah, termasuk pada ketersediaan pangan dan daya dukung alam serta lingkungan. Kabupaten Kebumen jika dilihat dari struktur penduduk usia produktifnya cukup besar sekitar 68,55 persen (Tabel 2.184), hal ini jika tidak didukung dengan kebijakan yang berwawasan kependudukan akan memicu tingginya angka pengangguran, serta

kemungkinan munculnya masalah pangan dan lingkungan. Selain itu karena sumber-sumber ekonomi di Kabupaten Kebumen yang didominasi oleh sektor pertanian yang kurang diminati kaum muda, dan tidak adanya industri manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar menyebabkan angka migrasi di Kabupaten Kebumen cukup tinggi. Penduduk usia muda cenderung memilih untuk merantau baik ke kota-kota besar maupun ke luar negeri.

Tabel 2.189
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Usia <15 thn	307.846	302.376	297.703	317.028	315.694
Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	115.180	110.617	112.042	115.309	123.813
Jumlah Penduduk usia tidak produktif (1 & 2)	422.026	412.993	409.745	432.337	439.507
Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64	761.912	945.455	955.160	942.884	948.983
Rasio Ketergantungan	55,52	43,68	42,90	45,85	46,31

Sumber: Disdukcapil Kab. Kebumen, 2020

Secara demografis, penuaan penduduk dapat dilihat dari beberapa ukuran (Mundiharno, dalam Heryanah, 2015) yaitu rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10 persen atau lebih, atau jika ketergantungan penduduk muda sebesar 30 persen atau kurang, proporsi penduduk berumur 65 tahun ke atas telah di atas 7 persen dan umur median penduduk berumur 20 tahun ke bawah dan berumur 20 tahun ke atas masing-masing 50 persen. Jika dilihat dari proporsi jumlah penduduk usia tua dibandingkan dengan proporsi jumlah

penduduk Kebumen telah mengalami penuaan penduduk. Proporsi penduduk yang berusia lanjut atau berumur 65 tahun ke atas telah mencapai 8,66 persen. Angka ketergantungan penduduk usia tua Kabupaten Kebumen mencapai 12,64 persen. Artinya, Kabupaten Kebumen memenuhi dua dari tiga kriteria untuk dikategorikan sebagai *ageing population*.

Kondisi ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyusun kebijakan strategis untuk memperhatikan penduduk usia tua seperti kebijakan pemberdayaan ekonomi produktif bagi lansia, bantuan permakanan atau jaminan sosial lain termasuk jaminan kesehatan bagi lansia. Perlu disusun kebijakan menyeluruh berwawasan kependudukan mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, pendidikan anak usia dini, pola asuh, pendidikan karakter, penyiapan menuju dunia usaha, hingga kebijakan bagi lansia. Selain itu, segera melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang memuat kebijakan menyangkut pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui aspek layanan dasar seperti peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kompetensi dan daya saing penduduk baik melalui pendidikan formal maupun non-formal.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah Kabupaten Kebumen sebagai kebijakan fiskal daerah merupakan sinkronisasi dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran belanja dan pengeluaran prioritas pembangunan. Keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gambaran keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta analisis kinerja keuangan masa lalu maupun proyeksinya ke depan.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan di masa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun ke belakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri dari realisasi

pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen meliputi kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah.

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Kebumen berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat (Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Transfer Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa) dan transfer antardaerah (dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi hibah dan dana darurat.

Jika dilihat dari proporsi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3, Kabupaten Kebumen tergolong

daerah dengan tingkat kemandirian yang rendah. Hal ini terlihat dari proporsi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen yang didominasi oleh Pendapatan Transfer. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, proporsi Pendapatan Transfer terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kebumen rata-rata mencapai 82,51%. Hal ini mengindikasikan sumber utama pendapatan daerah Kabupaten Kebumen berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, sehingga pembangunan daerah Kabupaten Kebumen masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Meskipun pendapatan daerah Kabupaten Kebumen sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer, nilainya terus mengalami penurunan. Proporsi Pendapatan Transfer rata-rata berkurang sebesar 1,59% selama kurun waktu tahun 2016- 2019.

Jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kebumen, pertumbuhan PAD Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan. Dari Gambar 3.1 dapat dilihat Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tren pertumbuhannya meningkat pada tahun 2016-2019. Hanya Retribusi Daerah pertumbuhannya fluktuatif pada tahun 2016-2019.

Sementara itu, pertumbuhan Pendapatan Transfer, terutama dana transfer pemerintah pusat, cenderung mengalami tren penurunan. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.2, DBH, DAU dan Transfer Khusus (DAK) nilainya terus berkurang pada tahun 2016-2019. Hanya Dana Desa yang mengalami kenaikan pada tahun 2016-2019. Melihat tren pertumbuhan



pendapatan daerah tersebut, Pajak Daerah menjadi potensi pendapatan daerah yang penting untuk diintensifkan karena pertumbuhannya yang meningkat secara signifikan. Pajak Daerah terutama pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kebumen.



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	APBD Perubahan Penjabaran 2020
1	PENDAPATAN	2.606.107.547.710	2.566.702.621.516	2.639.732.828.939	2.805.819.601.305	2.624.473.215.482
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	290.914.045.379	297.198.086.300	351.965.056.823	409.250.804.941	292.587.864.000
1.1.1	Pajak daerah	62.838.508.061	79.479.454.753	96.775.593.102	110.614.568.810	84.997.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	25.564.440.139	22.617.622.835	37.339.858.915	27.140.141.792	22.385.473.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.895.862.950	21.901.327.127	9.734.494.832	14.210.376.188	13.243.497.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	195.615.234.229	173.199.681.585	208.197.145.433	257.285.718.151	171.961.894.000
1.2	Pendapatan Transfer	2.201.391.835.786	2.135.168.764.973	2.161.177.552.652	2.259.070.686.352	2.204.467.151.482
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.062.173.278.786	2.072.158.632.973	2.004.158.940.906	2.112.887.911.443	2.046.970.151.482
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.779.771.732.786	1.712.419.381.173	1.654.135.303.906	1.682.906.890.843	1.662.665.903.482
1.2.1.1.1	Transfer Umum	1.299.356.193.721	1.274.011.545.950	1.263.630.595.379	1.296.360.271.400	1.319.605.320.482
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	43.287.944.721	40.008.376.950	29.627.426.379	22.159.108.400	31.832.006.000
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.256.068.249.000	1.234.003.169.000	1.234.003.169.000	1.274.201.163.000	1.287.773.314.482
1.2.1.1.2	Transfer Khusus (DAK)	480.415.539.065	438.407.835.223	390.504.708.527	386.546.619.443	343.060.583.000
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)				34.569.662.000	41.243.665.000
1.2.1.3	Dana Desa	282.401.546.000	359.739.251.800	350.023.637.000	395.411.358.600	405.025.869.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	139.218.557.000	63.010.132.000	157.018.611.746	146.182.774.909	157.497.000.000
1.2.2.1	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota	36.876.802.000	51.141.752.000	133.143.854.746	136.246.574.909	138.000.000.000



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	APBD Perubahan Penjabaran 2020
1.2.2.2	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	102.341.755.000	11.868.380.000	23.874.757.000	9.936.200.000	19.497.000.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	113.801.666.545	134.335.770.243	126.590.219.464	137.498.110.012	127.418.200.000
1.3.1	Hibah	3.030.221.000	5.214.000.000	126.590.219.464	137.498.110.012	127.418.200.000
1.3.2	Dana darurat	10.771.445.545	129.121.770.243			

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data diolah

Tabel 3.2
Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2019	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020
1	PENDAPATAN	-1,51%	2,85%	6,29%	-7,88%	2,54%	-0,06%
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,16%	18,43%	16,28%	-28,51%	12,29%	2,09%
1.1.1	Pajak daerah	26,48%	21,76%	14,30%	-23,16%	20,85%	9,85%
1.1.2	Retribusi daerah	-11,53%	65,09%	-27,32%	-17,52%	8,75%	2,18%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	217,60%	-55,55%	45,98%	-6,80%	69,34%	50,31%
1.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-11,46%	20,21%	23,58%	-33,16%	10,78%	-0,21%
1.2	Pendapatan Transfer	-3,01%	1,22%	4,53%	-4,17%	0,91%	-0,36%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	0,48%	-3,28%	5,43%	-4,05%	0,88%	-0,35%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	-3,78%	-3,40%	1,74%	-6,05%	-1,81%	-2,87%
1.2.1.1.1	Transfer Umum	-1,95%	-0,81%	2,59%	-4,50%	-0,06%	-1,17%
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-7,58%	-25,95%	-25,21%	43,65%	-19,58%	-3,77%
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	-1,76%	0,00%	3,26%	-5,33%	0,50%	-0,96%
1.2.1.1.2	Transfer Khusus (DAK)	-8,74%	-10,93%	-1,01%	-11,25%	-6,89%	-7,98%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)				19,31%		19,31%



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

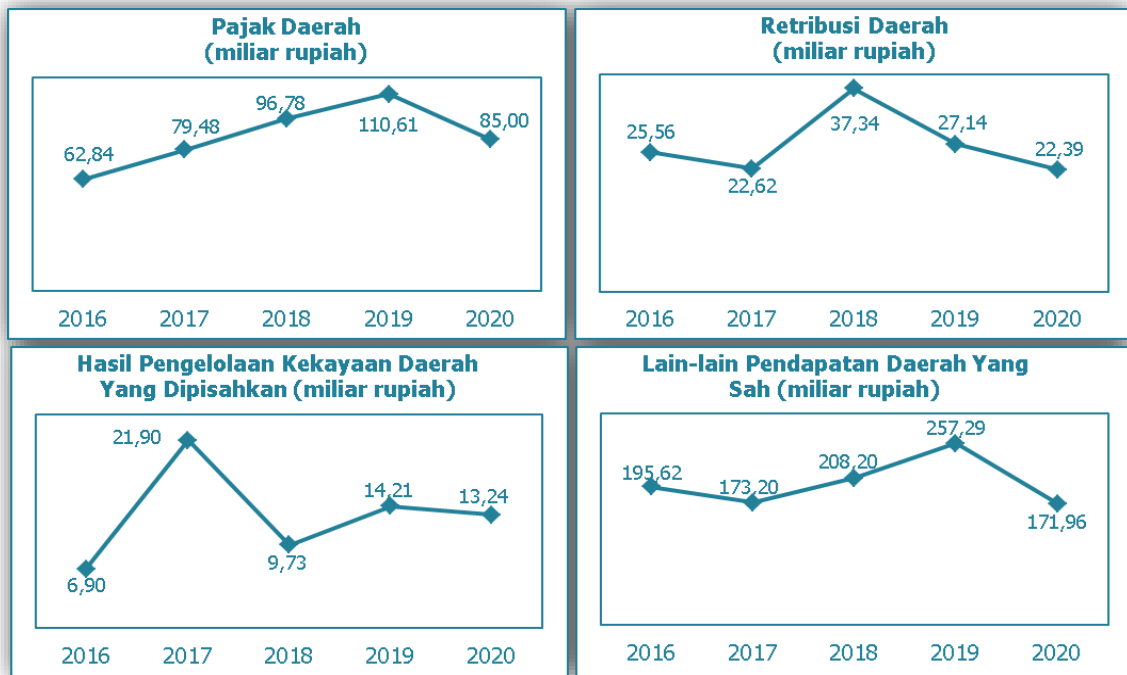
No	Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2019	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020
1.2.1.3	Dana Desa	27,39%	-2,70%	12,97%	2,43%	12,55%	10,02%
1.2.2	Transfer Antar Daerah	-54,74%	149,20%	-6,90%	-5,98%	29,19%	20,39%
1.2.2.1	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota	38,68%	160,34%	2,33%	-13,43%	67,12%	46,98%
1.2.2.2	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	-88,40%	101,16%	-58,38%	96,22%	-15,21%	12,65%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18,04%	-5,77%	8,62%	-7,33%	6,96%	3,39%
1.3.1	Hibah	72,07%	2.327,89%	8,62%	-7,33%	802,86%	600,31%
1.3.2	Dana darurat	16,57%				16,57%	16,57%

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

Tabel 3.3
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

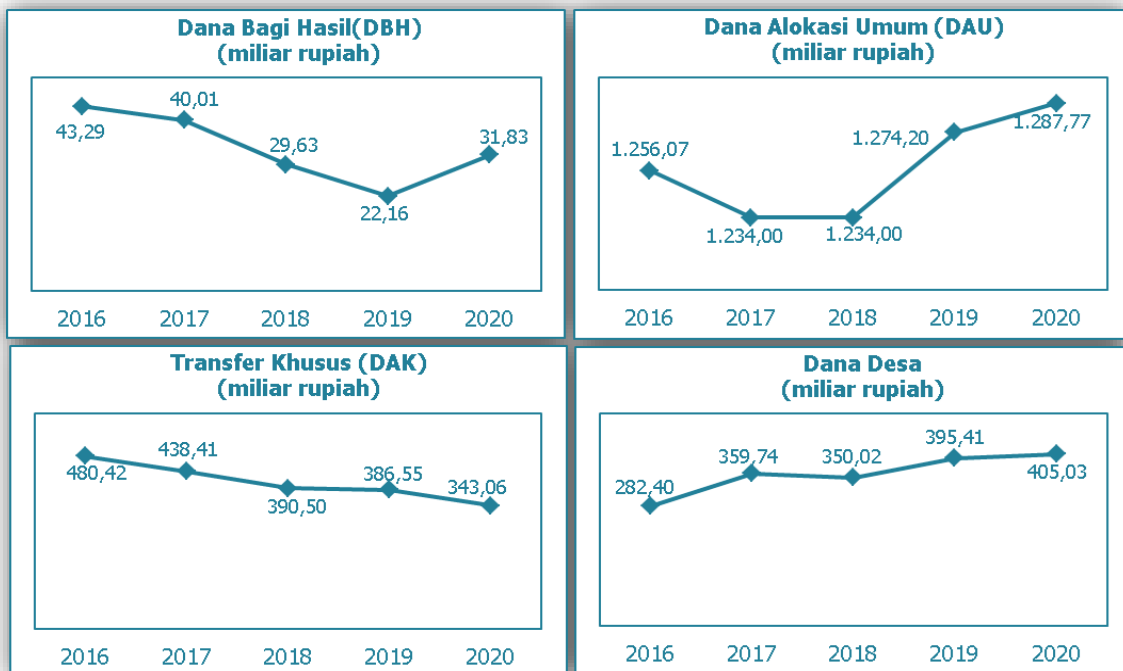
No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	APBD Perubahan Penjabaran 2020	Rata-rata Proporsi Tahun 2016-2019	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi Tahun 2016-2019
1	PENDAPATAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11,16%	11,58%	13,33%	14,59%	11,32%	12,67%	9,42%
1.2	Pendapatan Transfer	84,47%	83,19%	81,87%	80,51%	83,75%	82,51%	-1,59%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4,37%	5,23%	4,80%	4,90%	4,93%	4,82%	4,56%

Sumber: Analisis Penyusun, 2020



Sumber: BPKAD Kab. Kebumen, 2020

Gambar 3.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD Kab. Kebumen, 2020

Gambar 3.2
Dana Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

3.1.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi yang dimaksud terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Jika melihat proporsi belanja daerah Kabupaten Kebumen pada Tabel 3.6, belanja daerah Kabupaten Kebumen masih belum progresif untuk pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat. Hal ini diindikasikan dari proporsi belanja daerah Kabupaten Kebumen sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Kebumen rata-rata sebesar 43,47 persen pada tahun 2016-2019. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas bekerja untuk mengurangi postur anggaran Belanja Pegawai agar belanja daerah dapat lebih besar dialokasikan untuk belanja kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat.

Sementara itu, pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Kebumen secara umum mengalami tren peningkatan. Belanja daerah dari jenis Belanja Operasi

cenderung meningkat seperti tercantum pada Gambar 3.3. Belanja Pegawai cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2017-2020. Hanya pada periode tahun 2016-2017, Belanja Pegawai berkurang. Belanja Barang dan Jasa cenderung bertambah secara konsiten di tahun 2016-2019. Belanja Barang dan Jasa menurun hanya pada tahun 2019-2020 karena pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada pengurangan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Hibah juga cenderung meningkat di tahun 2016-2020. Belanja Hibah hanya turun pada tahun 2018-2019. Seperti halnya Belanja Hibah, selama kurun waktu tahun 2016-2018, Belanja Bantuan Sosial cenderung mengalami peningkatan. Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan pada periode tahun 2018-2020. Adapun belanja daerah dari jenis Belanja Transfer juga cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2016-2020 (Gambar 3.4). Namun, belanja daerah dari jenis Belanja Modal selama kurun waktu tahun 2016-2020 nilainya cenderung menurun, seperti yang tercantum pada Gambar 3.4. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu melakukan upaya peningkatan Belanja Modal agar pembangunan daerah Kabupaten Kebumen semakin signifikan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Jika dikaitkan dengan pendapatan daerah Kabupaten Kebumen, belanja daerah Kabupaten Kebumen sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer mencakup 82,51 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Kebumen yang digunakan sebagai sumber untuk membiayai belanja daerah Kabupaten Kebumen.



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 3.4
Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	APBD Perubahan Penjabaran 2020
2	BELANJA	2.707.059.847.131	2.630.271.307.685	2.652.047.686.376	2.796.779.466.780	2.730.696.553.000
2.1	Belanja Operasi	1.632.755.658.513	1.678.033.681.238	1.775.837.942.602	1.867.921.138.852	1.854.258.354.000
2.1.1	Belanja Pegawai	1.210.242.089.274	1.134.490.482.085	1.156.078.232.394	1.186.782.303.406	1.261.634.029.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	344.031.356.716	452.644.541.214	511.197.078.477	629.097.379.446	483.715.842.000
2.1.3	Belanja Hibah	35.289.065.833	45.614.321.177	56.720.440.981	31.299.036.000	80.397.513.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	43.193.146.690	45.284.336.762	51.842.190.750	20.742.420.000	28.510.970.000
2.2	Belanja Modal	649.703.102.744	433.698.055.660	370.004.376.524	365.833.554.028	188.095.520.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.073.035.374	1.400.727.387	5.000.000	570.000	89.245.036.000
2.4	Belanja Transfer	423.528.050.500	517.138.843.400	506.200.367.250	563.024.203.900	599.097.643.000

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen dan data diolah, 2016-2020

Tabel 3.5
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA	-2,84%	0,83%	5,46%	-2,36%	0,27%
2.1	Belanja Operasi	2,77%	5,83%	5,19%	-0,73%	3,26%
2.1.1	Belanja Pegawai	-6,26%	1,90%	2,66%	6,31%	1,15%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31,57%	12,94%	23,06%	-23,11%	11,12%
2.1.3	Belanja Hibah	29,26%	24,35%	-44,82%	156,87%	41,41%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4,84%	14,48%	-59,99%	37,45%	-0,80%
2.2	Belanja Modal	-33,25%	-14,69%	-1,13%	-48,58%	-24,41%
2.3	Belanja Tidak Terduga	30,54%	-99,64%	-88,60%	15.656.923,86%	3.914.191,54%
2.4	Belanja Transfer	22,10%	-2,12%	11,23%	6,41%	9,41%

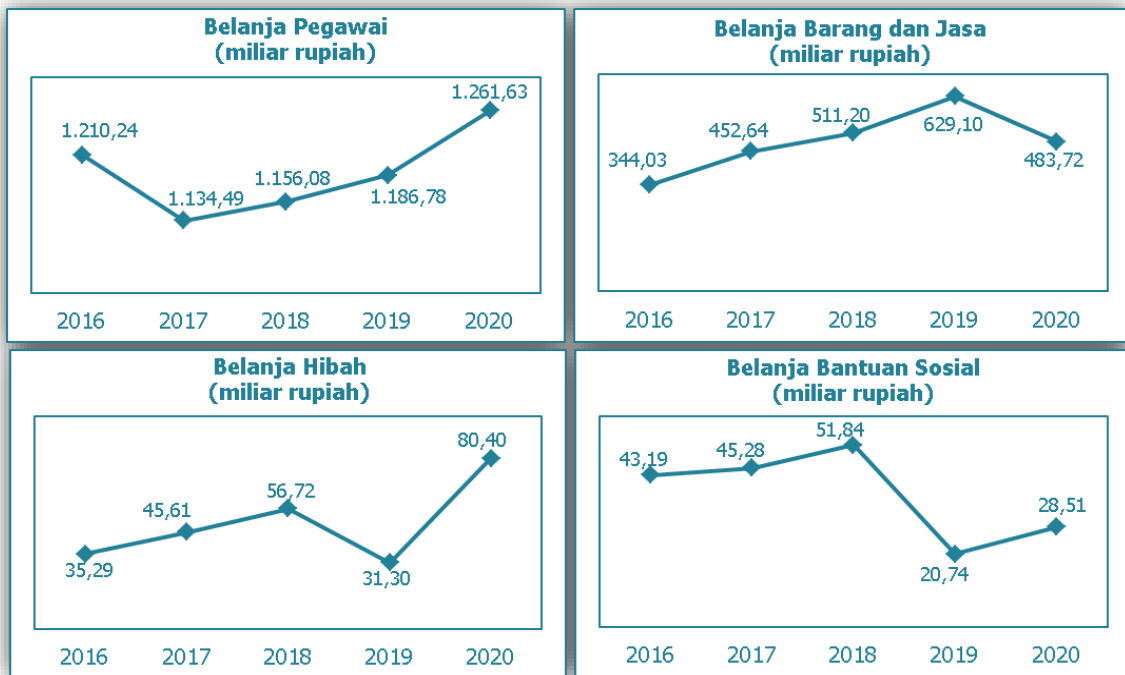
Sumber: Analisis Penyusun, 2020



Tabel 3.6
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

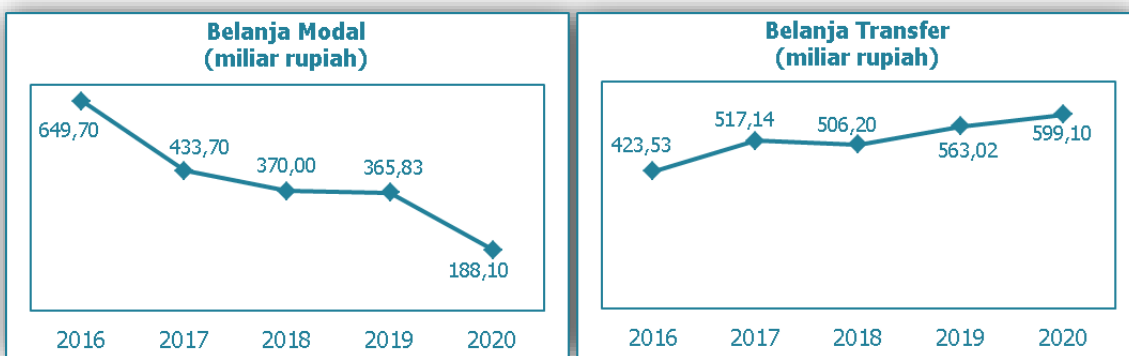
No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	APBD Perubahan Penjabaran 2020	Rata-rata Proporsi Tahun 2016-2019
2	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.1	Belanja Pegawai	44,71%	43,13%	43,59%	42,43%	46,20%	43,47%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12,71%	17,21%	19,28%	22,49%	17,71%	17,92%
2.1.3	Belanja Hibah	1,30%	1,69%	2,10%	1,16%	2,97%	1,56%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1,60%	1,67%	1,92%	0,77%	1,05%	1,49%
2.2	Belanja Modal	24,00%	16,02%	13,67%	13,51%	6,95%	16,80%
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,04%	0,05%	0,00%	0,00%	3,30%	0,02%
2.4	Belanja Transfer	15,65%	19,10%	18,70%	20,80%	22,13%	18,56%

Sumber: Analisis Penyusun, 2020



Sumber: BPKAD Kab. Kebumen, 2020

Gambar 3.3
Belanja Operasi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD Kab. Kebumen, 2020

Gambar 3.4
Belanja Modal dan Belanja Transfer Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing

pemerintah. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

3.1.2.1. Perkembangan Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan menggeliatnya berbagai aktivitas pembangunan yang secara gencar dilaksanakan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, swasta, maupun masyarakat. Jumlah aset Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2016-2019 dari Rp 4.090.224.673.989,84 pada tahun 2016 menjadi Rp 5.501.771.335.589,08 pada tahun 2019, atau secara rata-rata mengalami pertumbuhan 10,52 persen.

Sementara itu, jumlah kewajiban Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2016-2019 secara rata-rata naik 19,01 persen, dengan nilai Rp 11.349.354.666,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 19.108.779.525,00 di tahun 2019. Jumlah ekuitas dana Kabupaten Kebumen juga meningkat pada tahun



2016-2019 dengan rata-rata pertumbuhan 11,22 persen. Jumlah ekuitas dana Kabupaten Kebumen di tahun 2016 sebesar Rp 3.886.976.050.889,00 meningkat menjadi sebesar Rp 5.350.881.771.203,00 pada tahun 2019. Nilai pertumbuhan kewajiban dan ekuitas dana Kabupaten Kebumen yang cukup tinggi menunjukkan Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu. Perkembangan neraca daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8.



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 3.7
Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	ASET					
1.1	ASET LANCAR	213.922.651.095,84	275.571.491.863,48	315.711.395.011,30	185.106.867.214,78	n/a
1.1.1	Kas	161.848.532.938,94	221.645.072.879,60	202.048.010.985,50	72.724.977.927,18	n/a
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	n/a
1.1.3	Piutang	14.015.344.310,00	14.015.344.310,00	27.361.582.282,00	27.361.582.282,00	n/a
1.1.4	Piutang Lain-lain	28.427.824.290,12	31.421.697.347,00	35.890.263.679,20	33.789.205.540,00	n/a
1.1.5	Persediaan	21.501.881.946,08	20.556.022.601,18	38.151.661.475,60	38.724.124.378,60	n/a
1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	-	-	91.565.399,00	91.565.399,00	n/a
1.1.7	Penyisihan Piutang	(11.870.932.389,30)	(12.066.645.274,30)	12.168.311.190,00	12.415.411.688,00	n/a
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	91.894.169.330,00	91.894.169.330,00	116.128.436.385,72	116.128.436.385,72	n/a
1.2.1	Investasi Non Permanen	111.608.000,00	111.608.000,00	43.400.000,00	43.400.000,00	n/a
1.2.2	Investasi Permanen	91.782.561.330,00	91.782.561.330,00	116.085.036.385,72	116.085.036.385,72	n/a
1.3	ASET TETAP	3.708.978.732.467,10	4.106.147.641.402,10	4.580.753.883.547,58	4.901.158.061.252,58	n/a
1.3.1	Tanah	794.498.833.026,29	802.912.159.505,29	740.069.826.489,55	773.170.039.957,55	n/a
1.3.2	Peralatan dan Mesin	601.232.586.558,00	676.744.500.009,00	659.965.978.941,00	731.774.606.152,00	n/a
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.506.638.846.118,00	1.586.599.455.718,00	1.419.884.762.281,00	1.492.287.371.509,00	n/a
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.725.937.141.232,07	1.955.277.609.137,07	2.300.286.882.380,25	2.441.047.158.220,25	n/a
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	101.622.272.261,00	105.564.863.761,00	120.430.292.795,00	122.762.744.753,00	n/a
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	556.338.000,00	556.338.000,00	n/a
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.020.950.946.728,26)	(1.020.950.946.728,26)	(660.440.197.339,22)	(660.440.197.339,22)	n/a
1.4	ASET LAINNYA	75.429.121.096,90	75.429.121.096,90	299.377.970.736,00	299.377.970.736,00	n/a
1.4.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	n/a



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025 **BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	n/a
1.4.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	18.307.584.000,00	18.307.584.000,00	16.134.562.688,00	16.134.562.688,00	n/a
1.4.4	Aset Tidak Berwujud	6.288.096.773,25	6.288.096.773,25	8.768.635.128,00	8.768.635.128,00	n/a
1.4.5	Aset Lain-lain	50.833.440.323,65	50.833.440.323,65	274.474.772.920,00	274.474.772.920,00	n/a
JUMLAH ASET DAERAH		4.090.224.673.989,84	4.549.042.423.692,48	5.311.971.685.680,60	5.501.771.335.589,08	n/a
2	KEWAJIBAN	11.349.354.666,00	14.018.937.744,00	16.368.936.526,00	19.108.779.525,00	n/a
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.349.354.666,00	14.018.937.744,00	16.368.936.526,00	19.108.779.525,00	n/a
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	132.725.711,00	3.028.524,00	56.395.170,00	39.730.169,00	n/a
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	n/a
2.1.3	Utang Pajak	-	-	2.699.254,00	2.699.254,00	n/a
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	n/a
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	751.179.015,00	751.179.015,00	422.811.722,00	444.610.222,00	n/a
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.521.027.295,00	9.335.938.766,00	10.236.332.994,00	12.936.633.232,00	n/a
2.1.7	Utang Beban	3.944.422.645,00	3.928.791.439,00	5.650.697.386,00	5.685.106.648,00	n/a
3	EKUITAS DANA	4.078.875.319.323,84	4.540.466.807.508,48	5.282.391.233.176,60	5.599.245.986.061,08	n/a
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	182.105.706.337,54	246.528.285.587,18	251.912.440.678,60	248.363.015.858,08	n/a
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	161.844.574.984,94	225.067.664.976,60	203.146.450.200,50	204.129.229.114,18	n/a
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	11.062.287.047,52	16.006.915.915,40	30.550.447.723,00	28.202.289.085,80	n/a
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	21.501.881.946,08	20.556.022.601,18	34.288.074.122,10	34.860.537.025,10	n/a
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(12.284.204.309,00)	(15.083.484.574,00)	(16.072.531.367,00)	(18.829.039.367,00)	n/a



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025 **BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	(18.833.332,00)	(18.833.332,00)	-	-	n/a
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	3.886.976.050.889,00	4.284.144.959.824,00	5.030.477.593.498,00	5.350.881.771.203,00	n/a
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	91.894.169.330,00	91.894.169.330,00	116.128.436.386,72	116.128.436.386,72	n/a
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.741.262.583.289,96	4.138.431.492.224,96	4.741.878.506.836,28	5.062.282.684.541,28	n/a
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	53.820.894.549,04	53.820.894.549,04	172.476.132.368,00	172.476.132.368,00	n/a
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	(1.596.280,00)	(1.596.280,00)	(5.482.093,00)	(5.482.093,00)	n/a
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN	9.793.562.097,30	9.793.562.097,30	1.199.000,00	1.199.000,00	n/a
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	9.793.562.097,30	9.793.562.097,30	1.199.000,00	1.199.000,00	n/a
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.090.224.673.989,84	4.554.485.745.252,48	5.298.760.169.702,60	5.618.354.765.586,08	n/a

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen dan data diolah, 2016-2020



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 3.8
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET					
1.1	ASET LANCAR	28,82%	14,57%	-41,37%	-	0,67%
1.1.1	Kas	36,95%	-8,84%	-64,01%	-	-11,97%
1.1.2	Investasi Jangka Pendek					
1.1.3	Piutang	0,00%	95,23%	0,00%	-	31,74%
1.1.4	Piutang Lain-lain	10,53%	14,22%	-5,85%	-	6,30%
1.1.5	Persediaan	-4,40%	85,60%	1,50%	-	27,57%
1.1.6	Beban Dibayar Dimuka			0,00%	-	0,00%
1.1.7	Penyisihan Piutang	1,65%	-200,84%	2,03%	-	-65,72%
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00%	26,37%	0,00%	-	8,79%
1.2.1	Investasi Non Permanen	0,00%	-61,11%	0,00%	-	-20,37%
1.2.2	Investasi Permanen	0,00%	26,48%	0,00%	-	8,83%
1.3	ASET TETAP	10,71%	11,56%	6,99%	-	9,75%
1.3.1	Tanah	1,06%	-7,83%	4,47%	-	-0,77%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	12,56%	-2,48%	10,88%	-	6,99%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	5,31%	-10,51%	5,10%	-	-0,03%
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	13,29%	17,65%	6,12%	-	12,35%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	3,88%	14,08%	1,94%	-	6,63%
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan			0,00%	-	0,00%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0,00%	-35,31%	0,00%	-	-11,77%
1.4	ASET LAINNYA	0,00%	296,90%	0,00%	-	98,97%
1.4.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-
1.4.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00%	-11,87%	0,00%	-	-3,96%



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

No	Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.4.4	Aset Tidak Berwujud	0,00%	39,45%	0,00%	-	13,15%
1.4.5	Aset Lain-lain	0,00%	439,95%	0,00%	-	146,65%
JUMLAH ASET DAERAH		11,22%	16,77%	3,57%	-	10,52%
2	KEWAJIBAN	23,52%	16,76%	16,74%	-	19,01%
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23,52%	16,76%	16,74%	-	19,01%
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-97,72%	1762,13%	-29,55%	-	544,96%
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Utang Pajak	-	-	0,00%	-	0,00%
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00%	-43,71%	5,16%	-	-12,85%
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	43,17%	9,64%	26,38%	-	26,40%
2.1.7	Utang Beban	-0,40%	43,83%	0,61%	-	14,68%
3	EKUITAS DANA	11,32%	16,34%	6,00%	-	11,22%
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	35,38%	2,18%	-1,41%	-	12,05%
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	39,06%	-9,74%	0,48%	-	9,94%
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	44,70%	90,86%	-7,69%	-	42,62%
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	-4,40%	66,80%	1,67%	-	21,36%
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	22,79%	6,56%	17,15%	-	15,50%
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	10,22%	17,42%	6,37%	-	11,34%
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00%	26,37%	0,00%	-	8,79%
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	10,62%	14,58%	6,76%	-	10,65%
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	0,00%	220,46%	0,00%	-	73,49%
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0,00%	243,43%	0,00%	-	81,14%



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

No	Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN	0,00%	-99,99%	0,00%	-	-33,33%
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00%	-99,99%	0,00%	-	-33,33%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		11,35%	16,34%	6,03%	-	11,24%

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

3.1.2.2. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio *quick*.

a) Rasio Lancar

Rasio likuiditas yang diukur dengan rasio lancar kondisinya meningkat dari tahun 2016 sampai 2018, namun menurun pada tahun 2019. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Rasio Lancar Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Aktiva Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
1	2016	213.922.651.095,84	11.349.354.666,00	18,85
2	2017	275.571.491.863,48	14.018.937.744,00	19,66
3	2018	315.711.395.011,30	16.368.936.526,00	19,29
4	2019	185.106.867.214,78	19.108.779.525,00	9,69
5	2020	n/a	n/a	n/a
Rata-rata Pertumbuhan				-15,78%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data diolah

b) Rasio *Quick*

Rasio likuiditas yang diukur dengan rasio *quick* kondisinya fluktuatif, dengan tren yang menurun sampai tahun 2019. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kebumen masih memiliki kemampuan yang baik dalam membayar kewajiban jangka pendek. Untuk mengetahui rincian rasio *quick* daerah dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Rasio *Quick* Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Aktiva Lancar - Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
1	2016	192.420.769.149,76	11.349.354.666,00	16,95
2	2017	255.015.469.262,30	14.018.937.744,00	18,19
3	2018	277.559.733.535,70	16.368.936.526,00	16,96
4	2019	146.382.742.836,18	19.108.779.525,00	7,66
5	2020	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Rata-rata Pertumbuhan				-18,09%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data diolah

3.1.2.3. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal.

a) Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya. Rumusnya adalah total hutang dibagi total aset. Rasio total hutang terhadap total aset Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2016-2019 terus meningkat dari 0,28 persen di tahun 2016 menjadi 0,35 persen pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen cukup kuat untuk membayar jika melakukan pinjaman ke kreditur dengan kemampuan pembayaran yang meningkat. Rasio total hutang terhadap total aset selengkapnya disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11

Rasio Total Hutang terhadap Aset Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Hutang	Total Aset	Rasio (%)
1	2016	11.349.354.666,00	4.090.224.673.989,84	0,28%
2	2017	14.018.937.744,00	4.549.042.423.692,48	0,31%
3	2018	16.368.936.526,00	5.311.971.685.680,60	0,31%
4	2019	19.108.779.525,00	5.501.771.335.589,08	0,35%
5	2020	n/a	n/a	n/a
Rata-rata Pertumbuhan				7,87%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data diolah

b) Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal mengukur seberapa jauh aset Pemerintah Kabupaten Kebumen dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri. Rumusnya adalah total hutang dibagi total modal. Rasio ini menunjukkan tingkat dana yang diambil dari luar Pemerintah Kabupaten Kebumen. Rasio hutang terhadap modal Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016- 2019 sebesar 0,28 persen di tahun 2016 menjadi 0,34 persen di tahun 2019. Rasio hutang terhadap modal pada periode tahun 2016-2019 masih di bawah 100 persen yang berarti modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen masih lebih besar daripada hutang yang harus ditanggung. Rasio hutang terhadap modal secara rinci tersaji pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12

Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Hutang	Total Ekuitas	Rasio (%)
1	2016	11.349.354.666,00	4.078.875.319.323,84	0,28%
2	2017	14.018.937.744,00	4.540.466.807.508,48	0,31%
3	2018	16.368.936.526,00	5.282.391.233.176,60	0,31%
4	2019	19.108.779.525,00	5.599.245.986.061,08	0,34%
5	2020	n/a	n/a	n/a
Rata-rata Pertumbuhan				6,80%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data diolah

3.1.2.4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Jenis rasio aktivitas yang digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

a) Rata-rata Umur Piutang

Rata-rata umur piutang digunakan untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Rumusnya adalah 365 dibagi dengan perputaran piutang. Perputaran piutang didapat dari pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Rata-rata piutang pendapatan daerah dihitung dari penjumlahan saldo awal piutang dan saldo akhir piutang dibagi dua.

Tabel 3.13
Rata-rata Umur Piutang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Saldo Awal Piutang	Saldo Akhir Piutang	Pendapatan Daerah	Perputaran Piutang	Rata-rata Umur Piutang
1	2016	n/a	42.443.168.600,12	2.606.107.547.710	n/a	n/a
2	2017	42.443.168.600,12	45.437.041.657,00	2.566.702.621.516	58,41	6,25
3	2018	45.437.041.657,00	63.251.845.961,20	2.639.732.828.939	48,57	7,51
4	2019	3.251.845.961,20	61.150.787.822,00	2.805.819.601.305	87,13	4,19
5	2020	61.150.787.822,00	n/a	2.898.053.768.000	n/a	n/a
Rata-rata Pertumbuhan						-12,02%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data diolah

b) Rata-rata Umur Persediaan

Rata-rata umur persediaan digunakan untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Rumusnya adalah 365 dibagi dengan perputaran persediaan. Perputaran persediaan didapat dari nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi rata-rata nilai persediaan. Rata-rata nilai persediaan dihitung dari penjumlahan saldo awal persediaan dan saldo akhir persediaan dibagi dua.

Tabel 3.14
Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Saldo Awal Persediaan	Saldo Akhir Persediaan	Nilai Persediaan	Perputaran Persediaan	Rata-rata Umur Persediaan
1	2016	n/a	21.501.881.946,08	21.501.881.946,08	n/a	n/a
2	2017	21.501.881.946,08	20.556.022.601,18	20.556.022.601,18	0,98	373,40
3	2018	20.556.022.601,18	38.151.661.475,60	38.151.661.475,60	1,30	280,83
4	2019	38.151.661.475,60	38.724.124.378,60	38.724.124.378,60	1,01	362,30
5	2020	38.724.124.378,60	n/a	n/a	n/a	n/a
Rata-rata Pertumbuhan						0,02

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data diolah

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan ini bermuatan tentang proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Kebijakan ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 seperti pada Tabel 3.15 secara umum menunjukkan laju pertumbuhan yang terus menurun walaupun sempat meningkat pada tahun 2019 dibanding tahun 2018. Hal ini juga sesuai dengan Tabel 3.16 dimana persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kebumen terhadap total pengeluaran yaitu total belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menunjukkan laju pertumbuhan proporsi yang terus menurun. Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS cenderung fluktuatif sesuai dengan jumlah ASN yang masih aktif di Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sementara itu honorarium non-PNS meningkat cukup tinggi pada tahun 2019 dibanding tahun 2018 dikarenakan penyesuaian honorarium non-PNS (THL) dengan Upah Minimum Regional



(UMR) Kabupaten Kebumen. Sedangkan belanja modal menunjukkan proporsi yang terus menurun utamanya pada tahun 2020 dimana banyak dirasionalisasi untuk *refocusing* belanja pencegahan penyebaran COVID-19. Walaupun demikian, ke depan belanja modal harus terus ditingkatkan untuk mendorong perekonomian daerah terutama pasca pandemi COVID-19.



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 3.15
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	APBD Perubahan Penjabaran 2020
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	843.364.620.192	757.528.982.418	739.369.742.590	750.002.656.516	807.196.465.000
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	318.590.442.778	304.615.353.767	334.632.341.322	320.200.014.934	325.361.816.000
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.368.400.000	8.136.550.000	14.651.000.000	16.942.960.000	17.697.000.000
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.889.762.443	3.451.314.209	4.408.727.932	4.849.915.600	319.060.000
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	712.559.875	572.858.835	1.128.909.299	638.304.885	109.030.000
6	Honorarium PNS	20.253.057.150	18.603.526.750	17.368.561.600	19.350.749.498	13.546.937.000
7	Honorarium Non PNS	15.290.602.000	12.736.166.800	7.991.059.200	32.685.600.167	37.786.275.000
8	Uang Lembur	4.772.369.836	5.031.715.300	5.512.211.926	5.425.585.403	3.213.204.000
9	Belanja Pegawai Dana BOS	-	14.737.081.971	16.186.909.935	15.619.803.199	25.619.451.000
10	Belanja Pegawai BLUD	7.070.245.353	9.090.687.035	14.828.768.590	21.066.713.204	30.784.791.000
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	679.545.710	514.663.265	358.724.250	682.236.650	470.346.00
12	Belanja Pakaian Kerja	574.776.350	646.191.000	1.025.718.751	1.247.022.000	916.566.000
13	Belanja Pakaian khusus dan hari hari tertentu	303.601.300	427.976.000	408.742.500	510.998.000	273.646.000
14	Belanja Perjalanan Dinas	35.082.545.739	37.546.732.878	43.253.158.201	47.099.396.526	21.598.459.000
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	512.100.000	34.650.000	20.460.000	35.500.000	25.250.000
16	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.011.593.000	2.318.636.259	5.069.137.332	8.263.096.363	1.622.962.000



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	APBD Perubahan Penjabaran 2020
17	Belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	649.702.711.144	433.698.055.660	370.004.376.524	365.833.554.028	188.095.520.000
Total Belanja		1.907.178.932.870	1.609.691.142.147	1.576.218.549.952	1.610.454.106.973	1.474.166.432.000

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data diolah

Tabel 3.16
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2016	1.907.178.932.870	2.719.959.847.131	70,12%
2	2017	1.609.691.142.147	2.651.370.307.685	60,71%
3	2018	1.576.218.549.952	2.663.797.686.376	59,17%
4	2019	1.610.454.106.973	2.806.249.466.780	57,39%
5	2020	1.474.166.432.000	2.740.246.553.000	53,80%

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data diolah

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan sisa belanja dana alokasi khusus. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen, jika dilihat dari pertumbuhannya, cenderung menurun atau stagnan. Seperti yang tersaji pada Gambar 3.5, SiLPA pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, namun pada periode tahun 2018-2020 cenderung mengalami penurunan. Adapun Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman cenderung stagnan dari tahun 2017-2020 dengan terjadi penurunan pada tahun 2016-2017. Sementara itu, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah cenderung menurun pada periode tahun

2017-2020, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.6. Pemberian Pinjaman Daerah tren pertumbuhannya sama dengan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman yaitu cenderung stagnan pada tahun 2017-2020.

Komponen terbesar dari pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen adalah SiLPA. Pertumbuhan SiLPA Kabupaten Kebumen dipengaruhi oleh ketepatan antara perencanaan dan realisasi kegiatan Perangkat Daerah. SiLPA Kabupaten Kebumen cenderung menurun yang mengindikasikan Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen semakin baik dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 3.17
Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017	Realisasi APBD 2018	Realisasi APBD 2019	APBD Perubahan Penjabaran 2020
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	102.698.376.188	162.392.405.488	225.675.495.480	203.192.379.502	155.391.154.000
3.1.1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-
3.1.2	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	100.198.376.188	160.912.405.488	224.135.495.480	201.692.379.502	153.891.154.000
3.1.3	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	2.500.000.000	1.480.000.000	1.540.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
3.1.5	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
3.1.6	Sisa Belanja Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan	12.900.000.000	21.099.000.000	11.750.000.000	9.470.000.000	9.550.000.000
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	10.400.000.000	19.599.000.000	10.250.000.000	7.970.000.000	8.050.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.3	Pemberian pinjaman daerah	2.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
3.2.4	Kelompok Usaha Masyarakat	-	-	-	-	-
3.2.5	Penyediaan Dana Talangan Pangan	-	-	-	-	-
3.2.6	Subsidi Bunga	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	89.798.376.188	141.293.405.488	213.925.495.480	193.722.379.502	145.841.154.000

Sumber: BPKAD Kab. Kebumen 2016-2020, data diolah

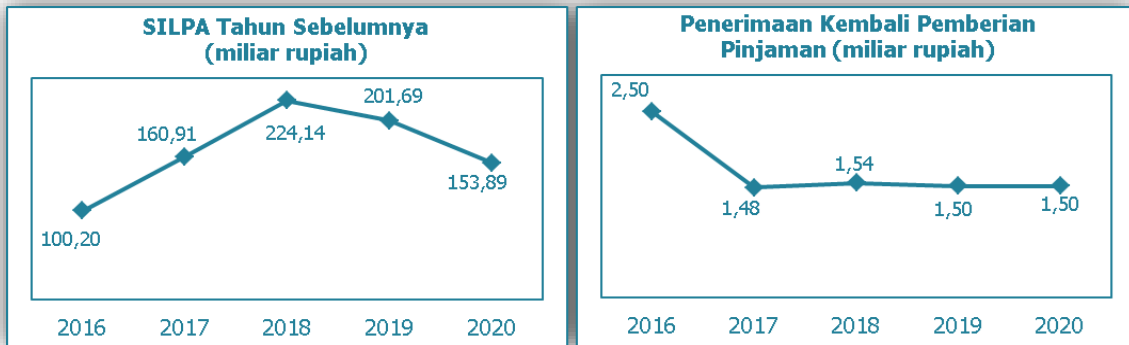


RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 3.18
Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

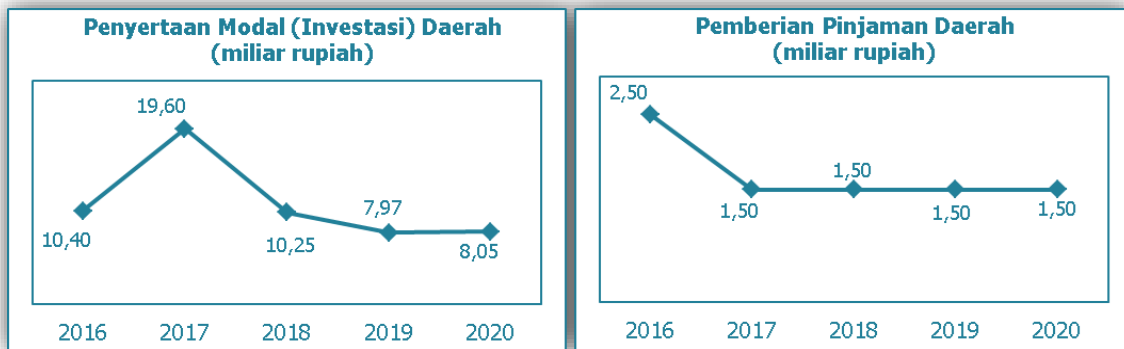
No	Uraian	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	58,13%	38,97%	-9,96%	-23,53%	15,90%
3.1.1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-
3.1.2	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	60,59%	39,29%	-10,01%	-23,70%	16,54%
3.1.3	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-40,80%	4,05%	-2,60%	0,00%	-9,84%
3.1.5	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
3.1.6	Sisa Belanja Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan	63,56%	-44,31%	-19,40%	0,84%	0,17%
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	88,45%	-47,70%	-22,24%	1,00%	4,88%
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.3	Pemberian pinjaman daerah	-40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-10,00%
3.2.4	Kelompok Usaha Masyarakat	-	-	-	-	-
3.2.5	Penyediaan Dana Talangan Pangan	-	-	-	-	-
3.2.6	Subsidi Bunga	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	57,35%	51,41%	-9,44%	-24,72%	18,65%

Sumber: Analisis Penyusun, 2020



Sumber: BPKAD Kab. Kebumen, 2020

Gambar 3.5
Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD Kab. Kebumen, 2020

Gambar 3.6
Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan untuk memproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada lima tahun mendatang, yaitu tahun 2021-2025. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun 2021-2025 tidak dapat dilakukan dengan menghitung

rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama kurun waktu sebelumnya, yaitu tahun 2015-2020. Tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan syok pada seluruh sendi kehidupan, tidak terkecuali nilai pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam kondisi syok, proyeksi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan data tren, untuk itu proyeksi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menemukan variabel penentu yang mempengaruhi pendapatan, belanja maupun pembiayaan
2. Melakukan regresi linier atas variabel yang ditemukan
3. Menggunakan hasil regresi untuk melakukan proyeksi

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD diproyeksikan dengan meregresikan PAD atas PDRB Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2019 sebagai *proxy* bahwa jika aktivitas ekonomi masyarakat (PDRB) meningkat akan meningkatkan PAD secara agregat baik untuk pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Hasil regresi PAD atas PDRB Kabupaten Kebumen menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{PAD} = 0,023 \text{ PDRB Kabupaten Kebumen} - 225.748.911.046$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah PAD yang didapat berkorelasi positif terhadap PDRB Kabupaten Kebumen dengan angka 0,023. Angka tersebut memiliki makna, jika PDRB berubah sebesar Rp 1,- maka PAD akan berubah sebesar Rp 0,023 (PDRB) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi PAD tahun 2021-2025 ditentukan asumsi pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen yang nilainya sama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh IMF per Oktober 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	6,1%	5,3%	5,2%	5,1%	5,1%

Sumber: IMF Data Mapper 2021-2025, Per Oktober 2020

Dari data pada Tabel 3.19 dapat diperoleh nilai proyeksi PAD tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Proyeksi PAD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen	Proyeksi PDRB Kabupaten Kebumen	Proyeksi PAD Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	6,10%	Rp29.203.898.287.051	Rp445.940.749.556	Data Proyeksi
2022	5,30%	Rp30.751.704.896.265	Rp481.540.301.568	Data Proyeksi
2023	5,20%	Rp32.350.793.550.871	Rp518.319.340.624	Data Proyeksi
2024	5,10%	Rp34.000.684.021.965	Rp556.266.821.459	Data Proyeksi
2025	5,10%	Rp35.734.718.907.085	Rp596.149.623.817	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

2. Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Seperti halnya PAD, DBH juga diproyeksikan dengan meregresikan DBH atas PDRB Kabupaten Kebumen pada tahun 2013-2017. Hal ini mendasari prinsip pembagian DBH oleh pemerintah pusat dengan konsep *by origin*, artinya DBH dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, sedangkan daerah lainnya mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 sehingga jika

PDRB Kabupaten Kebumen dapat tumbuh minimal sama dengan pertumbuhan PDB Nasional maka akan memberikan proporsi pembagian DBH yang lebih baik bagi Kabupaten Kebumen. Regresi hanya dilakukan sampai dengan tahun 2017 karena terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2018 dan 2019. Hasil regresi DBH atas PDRB Kabupaten Kebumen menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$DBH = 0,00135367221418 \text{ PDRB Kabupaten Kebumen} + 7.532.606.547$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah DBH yang didapat berkorelasi positif terhadap PDRB Kabupaten Kebumen dengan angka 0,00135. Angka tersebut memiliki makna, jika PDRB berubah sebesar Rp 1,- maka DBH akan berubah sebesar Rp 0,00135 (PDRB) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi DBH tahun 2021-2025 ditentukan asumsi pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen yang nilainya sama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh IMF per Oktober 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.19 sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi DBH tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21
Proyeksi DBH Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen	Proyeksi PDRB Kabupaten Kebumen	Proyeksi DBH Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	6,10%	Rp29.203.898.287.051	Rp47.065.112.204	Data Proyeksi
2022	5,30%	Rp30.751.704.896.265	Rp49.160.335.004	Data Proyeksi
2023	5,20%	Rp32.350.793.550.871	Rp51.324.976.883	Data Proyeksi
2024	5,10%	Rp34.000.684.021.965	Rp53.558.387.771	Data Proyeksi
2025	5,10%	Rp35.734.718.907.085	Rp55.905.702.613	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU diproyeksikan dengan meregresikan DAU atas jumlah ASN dan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2019 sebagai *proxy* dasar pengalokasian DAU yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu untuk membayar gaji ASN dan untuk mendanai pelayanan umum bagi masyarakat. Hasil regresi DAU atas jumlah ASN dan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$DAU = 115.851.848 \text{ ASN} + 33.045.246 \text{ Populasi} - 39.580.379.516.000$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah DAU yang didapat berkorelasi positif terhadap jumlah ASN Kabupaten Kebumen dengan angka 115.851.848 dan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen dengan angka 33.045.246. Angka tersebut memiliki makna, jika jumlah ASN berubah sebesar 1 orang maka DAU akan berubah sebesar Rp 115.851.848,- (ASN) ke arah yang

sama dan jika jumlah penduduk berubah sebesar 1 jiwa maka DAU akan berubah sebesar Rp 33.045.246,- (penduduk) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi jumlah ASN dan jumlah penduduk tahun 2021-2025 menggunakan metode *autoregressive* sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi DAU tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22
Proyeksi DAU Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Jumlah ASN di Pemerintah Kabupaten Kebumen	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen	Proyeksi DAU Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	12.019	1.203.141	Rp 1.570.092.864.211	Data Proyeksi
2022	11.751	1.205.435	Rp 1.614.913.064.686	Data Proyeksi
2023	11.496	1.207.557	Rp 1.655.434.660.540	Data Proyeksi
2024	11.251	1.209.520	Rp 1.692.008.111.807	Data Proyeksi
2025	11.018	1.211.337	Rp 1.724.974.928.717	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

c) Transfer Khusus (DAK)

Transfer Khusus dalam bentuk DAK diproyeksikan dengan meregresikan DAK atas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2019 sebagai *proxy* dari sebagian besar DAK digunakan untuk urusan pendidikan dan kesehatan. Hasil regresi DAK atas RLS dan UHH Kabupaten Kebumen menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$DAK = 3.580.464.716 \text{ RLS} + 2.320.664.777 \text{ UHH} + 147.950.836.400$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah DAK yang didapat berkorelasi positif terhadap RLS Kabupaten Kebumen dengan angka 3.580.464.716 dan HLS Kabupaten Kebumen dengan angka 2.320.664.777. Angka tersebut memiliki makna, RLS berubah sebesar 1 tahun maka DAK akan berubah sebesar Rp 3.580.464.716,- (RLS) ke arah yang sama dan jika UHH berubah sebesar 1 tahun maka DAK akan berubah sebesar Rp 2.320.664.777,- (UHH) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi RLS dan UHH tahun 2021-2025 menggunakan metode *autoregressive* sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi DAK tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
**Proyeksi Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025**

Tahun	Proyeksi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen	Proyeksi Usia Harapan Hidup Kabupaten Kebumen	Proyeksi DAK Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	7,80	73,44	Rp346.295.547.903	Data Proyeksi
2022	7,81	73,54	Rp346.580.121.541	Data Proyeksi
2023	8,03	73,65	Rp347.613.278.137	Data Proyeksi
2024	8,04	73,75	Rp347.896.618.000	Data Proyeksi
2025	8,26	73,85	Rp348.893.723.136	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

d) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) yang setiap tahun tidak selalu didapatkan dimana sebagian besar DID diperoleh atas penghargaan WTP yang berdasarkan pengelolaan belanja akuntabel. Terakhir Kabupaten Kebumen mendapatkan DID pada tahun 2019 dan 2020. Oleh karena itu DID ke lima tahun kedepan dalam hal ini diasumsikan sama besarnya dengan DID yang diterima terakhir yaitu pada tahun 2020 sebagai *reward* opini WTP Tahun 2018 sebagai berikut seperti pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24
Proyeksi Dana Insentif Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Dana Insentif Daerah
2021	Rp 41.243.665.000,00
2022	Rp 41.243.665.000,00
2023	Rp 41.243.665.000,00
2024	Rp 41.243.665.000,00
2025	Rp 41.243.665.000,00

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

e) Dana Desa

Dana Desa diproyeksikan dengan meregresikan Dana Desa atas angka kemiskinan dan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019 sebagai *proxy* dari Dana Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Dana Desa dialokasikan di antaranya berdasarkan jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk secara umum. Hasil regresi Dana Desa atas angka kemiskinan dan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{Dana Desa} = 42.292 \text{ Kemiskinan} + 25,84 \text{ Populasi} + 402.712.195.869$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah Dana Desa yang didapat berkorelasi positif terhadap angka kemiskinan Kabupaten Kebumen dengan angka 42.292 dan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen dengan angka 25,84. Angka tersebut memiliki makna, angka kemiskinan berubah sebesar 1 persen maka Dana Desa akan berubah sebesar Rp 42.292,- (angka kemiskinan) ke arah yang sama dan jika jumlah penduduk berubah sebesar 1 jiwa maka Dana Desa akan berubah sebesar Rp 25,84 (penduduk) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi angka kemiskinan dan jumlah penduduk tahun 2021-2025 menggunakan metode *autoregressive* sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi Dana Desa tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25
Proyeksi Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen	Proyeksi Dana Desa Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	20,46	1.203.141	Rp402.744.150.571	Data Proyeksi
2022	20,33	1.205.435	Rp402.744.204.336	Data Proyeksi
2023	20,27	1.207.557	Rp402.744.256.630	Data Proyeksi
2024	20,16	1.209.520	Rp402.744.302.710	Data Proyeksi
2025	20,08	1.211.337	Rp402.744.346.265	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

3. Transfer Antardaerah

a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepada Kab./Kota

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah kepada Kab./Kota (DBH Provinsi) diproyeksikan dengan meregresikan DBH Provinsi atas PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019 sebagai *proxy* bahwa DBH Provinsi diperoleh sebagai bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak yang dipungut oleh provinsi. Hasil tersebut menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{DBH Provinsi} = 0,117946565763 \text{ PDRB Perdagangan Besar dan Eceran;} \\ \text{Reparasi Mobil dan Sepeda Motor} - 352.478.931.249$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah DBH Provinsi yang didapat berkorelasi positif terhadap PDRB Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan angka 0,117946565763. Angka tersebut memiliki makna, jika PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berubah sebesar Rp 1,- maka DBH Provinsi akan berubah sebesar Rp 0,117946565763 (PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi DBH Provinsi tahun 2021-2025 ditentukan asumsi pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Kebumen yang nilainya sama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh IMF per Oktober 2020 yang juga digunakan sebagai asumsi pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen secara agregat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.19 sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi DBH Provinsi tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26
**Proyeksi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah kepada
Kab./Kota Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025**

Tahun	Proyeksi Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Proyeksi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Proyeksi DBH Provinsi Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	6,10%	Rp4.481.693.823.490	Rp176.121.464.033	Data Proyeksi
2022	5,30%	Rp4.719.223.596.135	Rp204.137.284.983	Data Proyeksi
2023	5,20%	Rp4.964.623.223.134	Rp233.081.328.227	Data Proyeksi
2024	5,10%	Rp5.217.819.007.514	Rp262.944.901.460	Data Proyeksi
2025	5,10%	Rp5.483.927.776.897	Rp294.331.516.928	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

b) Bantuan Keuangan Provinsi/Pemda Lainnya

Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah (Banprov) diproyeksikan dengan meregresikan Banprov atas Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019 sebagai *proxy* bahwa Banprov utamanya dialokasikan untuk kegiatan konstruksi di Kabupaten Kebumen. Hasil tersebut menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{Banprov} = 699.076.323.788 - 6.488.948.024,76 \text{ IKK}$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah Banprov yang didapat berkorelasi negatif terhadap IKK dengan angka -6.488.948.024,76. Angka tersebut memiliki makna, jika IKK berubah 1 poin maka Banprov akan berkurang sebesar Rp 6.488.948.024,76 (IKK) ke arah yang berlawanan. Hal ini menunjukkan Banprov yang sebagian besar untuk kegiatan konstruksi harapannya ke depan dapat mengefisienkan biaya konstruksi. Hal ini juga sesuai dengan proyeksi IKK tahun 2021-2025 menggunakan metode *autoregressive* yang menghasilkan asumsi IKK ke depan stabil di level 88, lebih rendah dibandingkan angka IKK tahun 2019 sebesar 96,15 poin. Selanjutnya nilai proyeksi Banprov tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27
**Proyeksi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2025**

Tahun	Proyeksi Indeks Kemahalan Konstruksi	Proyeksi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	88,59529287442	Rp 124.186.073.087	Data Proyeksi
2022	88,59534287324	Rp 124.185.748.648	Data Proyeksi
2023	88,59536099489	Rp 124.185.631.057	Data Proyeksi
2024	88,59536756230	Rp 124.185.588.442	Data Proyeksi
2025	88,59536994225	Rp 124.185.572.998	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Hibah

Hibah dari pemerintah pusat diproyeksikan dengan meregresikan Hibah atas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kebumen Tahun 2014-2019 sebagai *proxy* dari sebagian besar Hibah adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digunakan untuk urusan pendidikan. Hasil regresi Hibah atas RLS menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{Hibah} = 18.152.988.341,3 \text{ RLS} - 1,25187765088$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah Hibah yang didapat berkorelasi positif terhadap RLS Kabupaten Kebumen dengan angka 18.152.988.341,3. Angka tersebut memiliki makna, RLS berubah sebesar 1 tahun maka Hibah akan berubah sebesar Rp 18.152.988.341,30 (RLS) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi RLS tahun 2021-2025 menggunakan metode *autoregressive* sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi Hibah tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28
Proyeksi Hibah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Rata-Rata Lama Sekolah	Proyeksi Hibah Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	7,80	Rp 141.541.609.428	Data Proyeksi
2022	7,81	Rp 141.767.157.328	Data Proyeksi
2023	8,03	Rp 145.797.019.494	Data Proyeksi
2024	8,04	Rp 146.034.229.574	Data Proyeksi
2025	8,26	Rp 149.899.095.590	Data Proyeksi

b) Dana Darurat

Dana Darurat pada tahun 2021-2025 diproyeksikan bernilai 'nol'. Hal ini didasari pada data Dana Darurat pada tahun 2018-2020 yang bernilai 'nol', sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. Dengan demikian, proyeksi Dana Darurat tahun 2021-2025 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29

Proyeksi Dana Darurat Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Dana Darurat
2021	Rp 0,00
2022	Rp 0,00
2023	Rp 0,00
2024	Rp 0,00
2025	Rp 0,00

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai diproyeksikan dengan meregresikan Belanja Pegawai atas Jumlah ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2019 karena belanja pegawai diperuntukkan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN. Hasil regresi Belanja Pegawai atas Jumlah ASN Kabupaten Kebu menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{Belanja Pegawai} = 83.374.096 \text{ ASN} + 218.202.376.391$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah Belanja

Pegawai yang dibelanjakan berkorelasi positif terhadap jumlah ASN Kabupaten Kebumen dengan angka 83.374.096. Angka tersebut memiliki makna, jika jumlah ASN berubah sebesar 1 orang maka Belanja Pegawai akan berubah sebesar Rp 83.374.096,- (ASN) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi ASN tahun 2021-2025 menggunakan metode *autoregressive* sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi Belanja Pegawai tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30
Proyeksi Belanja Pegawai Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Jumlah ASN	Proyeksi Belanja Pegawai Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	12.019	Rp1.220.237.972.464	Data Proyeksi
2022	11.751	Rp1.197.951.854.151	Data Proyeksi
2023	11.496	Rp1.176.650.442.017	Data Proyeksi
2024	11.251	Rp1.156.281.004.782	Data Proyeksi
2025	11.018	Rp1.136.807.171.988	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan dengan meregresikan Belanja Barang dan Jasa atas PDRB Kabupaten Kebumen pada tahun 2010-2019 sebagai *proxy* bahwa aktivitas ekonomi masyarakat (PDRB) akan mempengaruhi pendapatan pemerintah yang salah satunya akan digunakan untuk belanja barang dan jasa pemerintah yang kembali akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Hasil regresi Belanja Barang dan Jasa atas PDRB Kabupaten Kebumen menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{Belanja Barang \& Jasa} = 0,0347107690122 \text{ PDRB} - 392.420.639.741$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah Belanja Barang dan Jasa yang dibelanjakan berkorelasi positif terhadap PDRB Kabupaten Kebumen dengan angka 0,0347107690122. Angka tersebut memiliki makna, jika PDRB berubah sebesar Rp 1,- maka DBH akan berubah sebesar Rp 0,0347107690122 (PDRB) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021-2025 ditentukan asumsi pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen yang nilainya sama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia per Juli 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.19 sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31
**Proyeksi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025**

Tahun	Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen	PDRB Kabupaten Kebumen	Proyeksi Belanja Barang dan Jasa Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	6,10%	Rp29.203.898.287.051	Rp621.269.127.957	Data Proyeksi
2022	5,30%	Rp30.751.704.896.265	Rp674.994.685.645	Data Proyeksi
2023	5,20%	Rp32.350.793.550.871	Rp730.500.282.565	Data Proyeksi
2024	5,10%	Rp34.000.684.021.965	Rp787.769.249.602	Data Proyeksi
2025	5,10%	Rp35.734.718.907.085	Rp847.958.933.959	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah diproyeksikan dengan meregresikan Belanja Hibah atas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2019 dikarenakan sebagian besar belanja hibah digunakan untuk urusan pendidikan. Hasil regresi Belanja Hibah atas RLS menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{Belanja Hibah} = 21.100.946.398 \text{ RLS} - 122.662.789.341$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah Belanja Hibah yang dibelanjakan berkorelasi positif terhadap RLS Kabupaten Kebumen dengan angka 21.100.946.398. Angka tersebut memiliki makna, jika RLS berubah sebesar 1 tahun maka Belanja Hibah akan berubah sebesar Rp 21.100.946.398,- ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi RLS tahun 2021-2025 menggunakan metode *autoregressive* sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi Belanja Hibah tahun 2021-2025 seperti tercantum pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32
**Proyeksi Belanja Hibah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025**

Tahun	Proyeksi Rata-Rata Lama Sekolah	Proyeksi Belanja Hibah Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	7,80	Rp 41.864.497.164	Data Proyeksi
2022	7,81	Rp 42.126.672.959	Data Proyeksi
2023	8,03	Rp 46.810.965.372	Data Proyeksi
2024	8,04	Rp 47.086.697.229	Data Proyeksi
2025	8,26	Rp 51.579.198.910	Data Proyeksi

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan dengan meregresikan Belanja Bantuan Sosial atas angka kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018 sebagai *proxy* dari Belanja Bantuan Sosial yang digunakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Hasil regresi Belanja Bantuan Sosial atas angka kemiskinan Kabupaten Kebumen menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{Belanja Bansos} = - 6.547.657.341 \text{ Angka Kemiskinan} + 162.443.435.531$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dibelanjakan berkorelasi negatif terhadap angka kemiskinan Kabupaten Kebumen dengan angka -6.547.657.341. Angka tersebut memiliki makna, jika angka kemiskinan berubah sebesar 1 persen maka Belanja Bantuan Sosial akan berkurang sebesar Rp 6.547.657.341,- (angka kemiskinan) ke arah yang berlawanan. Untuk menghitung proyeksi angka kemiskinan tahun 2021-2025 menggunakan metode *autoregressive* sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33
**Proyeksi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025**

Tahun	Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen	Proyeksi Belanja Bantuan Sosial Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	20,46	Rp 28.478.366.331	Data Proyeksi
2022	20,33	Rp 29.329.561.785	Data Proyeksi
2023	20,27	Rp 29.722.421.226	Data Proyeksi
2024	20,16	Rp 30.442.663.533	Data Proyeksi
2025	20,08	Rp 30.966.476.121	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

5. Belanja Subsidi

Mulai tahun 2021 digulirkan Belanja Subsidi dalam bentuk subsidi bunga sebagai upaya membantu meringankan beban bunga pinjaman produksi bagi UMKM dengan bekerjasama melalui BUMD perbankan. Sebagai pilot pelaksanaan pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00. Untuk tahun berikutnya direncanakan akan dianggarkan sekitar 1 miliar rupiah per tahun dengan dimungkinkan bisa diakses oleh pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Dengan demikian, proyeksi Belanja Subsidi tahun 2021-2025 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34
Proyeksi Belanja Subsidi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Belanja Subsidi
2021	Rp 500.000.000,00
2022	Rp 1.000.000.000,00
2023	Rp 1.000.000.000,00
2024	Rp 1.000.000.000,00
2025	Rp 1.000.000.000,00

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

6. Belanja Modal

Seperti halnya Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal diproyeksikan dengan meregresikan Belanja Modal atas PDRB Kabupaten Kebumen pada tahun 2010-2019 sebagai *proxy* bahwa aktivitas ekonomi masyarakat (PDRB) akan mempengaruhi pendapatan pemerintah yang salah satunya akan digunakan untuk belanja modal pemerintah yang kembali akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Hasil regresi Belanja Modal atas PDRB Kabupaten Kebumen menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{Belanja Modal} = 0,0172129937631 \text{ PDRB} - 21.038.880.809$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah Belanja Modal yang dibelanjakan berkorelasi positif terhadap PDRB Kabupaten Kebumen dengan angka 0,0172129937631. Angka tersebut memiliki makna, jika PDRB berubah sebesar Rp 1,- maka Belanja Modal akan berubah sebesar Rp 0,0172129937631 (PDRB) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi Belanja Modal tahun 2021-2025 ditentukan asumsi pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen yang nilainya sama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh IMF per Oktober 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.19 sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi Belanja Modal tahun 2021-2025 yang diharapkan akan terus meningkat untuk memberikan efek multiplier bagi perekonomian daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35

Proyeksi Belanja Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen	Proyeksi PDRB Kabupaten Kebumen	Proyeksi Belanja Modal Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	6,10%	Rp29.203.898.287.051	Rp481.647.638.264	Data Proyeksi
2022	5,30%	Rp30.751.704.896.265	Rp508.290.023.775	Data Proyeksi
2023	5,20%	Rp32.350.793.550.871	Rp535.815.126.813	Data Proyeksi
2024	5,10%	Rp34.000.684.021.965	Rp564.214.681.202	Data Proyeksi
2025	5,10%	Rp35.734.718.907.085	Rp594.062.612.865	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga diasumsikan setiap tahun sebesar Rp 1.000.000.000,00. Dengan demikian, proyeksi Belanja Tidak Terduga tahun 2021-2025 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36

**Proyeksi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025**

Tahun	Proyeksi Belanja Tidak Terduga
2021	Rp 1.000.000.000,00
2022	Rp 1.000.000.000,00
2023	Rp 1.000.000.000,00
2024	Rp 1.000.000.000,00
2025	Rp 1.000.000.000,00

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

8. Belanja Transfer

Belanja Transfer diproyeksikan dengan meregresikan Belanja Transfer atas angka kemiskinan dan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2019 dikarenakan sebagian besar adalah berupa Dana Desa sesuai UU

Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Dana Desa dialokasikan diantaranya berdasarkan jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk secara umum. Hasil regresi Belanja Transfer atas angka kemiskinan dan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{Belanja Transfer} = 57.443 \text{ Angka Kemiskinan} + 34,38 \text{ Populasi} - 616.079.666.526$$

Berdasarkan rumus regresi di atas, menunjukkan bahwa jumlah Belanja Transfer yang dibelanjakan berkorelasi positif terhadap angka kemiskinan Kabupaten Kebumen dengan angka 57.443 dan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen dengan angka 34,38. Angka tersebut memiliki makna, angka kemiskinan berubah sebesar 1 persen maka Dana Desa akan berubah sebesar Rp 57.443,- (angka kemiskinan) ke arah yang sama dan jika jumlah penduduk berubah sebesar 1 jiwa maka Dana Desa akan berubah sebesar Rp 34,38 (penduduk) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi angka kemiskinan dan jumlah penduduk tahun 2021-2025 menggunakan metode *autoregressive* sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi Belanja Transfer tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37
**Proyeksi Belanja Transfer Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025**

Tahun	Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen	Proyeksi Dana Desa Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	20,46	1.203.141	Rp 616.122.205.809	Data Proyeksi
2022	20,33	1.205.435	Rp 616.122.277.190	Data Proyeksi
2023	20,27	1.207.557	Rp 616.122.346.696	Data Proyeksi
2024	20,16	1.209.520	Rp 616.122.407.876	Data Proyeksi
2025	20,08	1.211.337	Rp 616.122.465.732	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

3.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

1. SiLPA

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya diproyeksikan dengan meregresikan SiLPA atas Belanja Modal dan Belanja BLUD Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2019 dikarenakan sebagian besar SiLPA berasal dari efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja BLUD. Hasil regresi SiLPA atas Belanja Modal dan Belanja BLUD Kabupaten Kebumen menghasilkan rumus regresi dengan persamaan:

$$\text{SiLPA} = 190.743.818.694 - 0,101249497519 \text{ Belanja Modal} + 0,236365309737 \text{ Belanja BLUD}$$

Berdasarkan rumus di atas, menunjukkan bahwa jumlah SiLPA yang didapat berkorelasi negatif terhadap Belanja Modal dengan angka - 0,101249497519 dan berkorelasi positif terhadap Belanja BLUD dengan angka

0,236365309737. Angka tersebut memiliki makna, jika Belanja Modal berubah sebesar Rp 1,- maka SiLPA akan berkurang sebesar Rp 0,10 (Belanja Modal) ke arah yang berlawanan dan jika Belanja BLUD berubah sebesar Rp 1,- maka SiLPA akan berubah sebesar Rp. 0,23 (Belanja BLUD) ke arah yang sama. Untuk menghitung proyeksi Belanja BLUD tahun 2021-2025 menggunakan metode *autoregressive* sedangkan proyeksi Belanja Modal sudah dilakukan seperti pada Tabel 3.35 sehingga dapat diperoleh nilai proyeksi SiLPA tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38
Proyeksi SiLPA Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Belanja Modal	Proyeksi Belanja BLUD	Proyeksi SiLPA Hasil Rumus Regresi	Keterangan
2021	Rp481.647.638.264	Rp247.149.331.514	Rp200.394.765.633	Data Proyeksi
2022	Rp508.290.023.775	Rp280.109.239.652	Rp205.487.816.383	Data Proyeksi
2023	Rp535.815.126.813	Rp314.274.141.375	Rp210.776.311.109	Data Proyeksi
2024	Rp564.214.681.202	Rp349.688.090.485	Rp216.271.499.548	Data Proyeksi
2025	Rp594.062.612.865	Rp386.396.751.370	Rp221.926.065.466	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya seperti disebutkan di atas sebagian besar berasal dari efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja BLUD. SiLPA yang berasal dari efisiensi belanja BLUD bersifat transitoris yaitu harus dibelanjakan untuk kegiatan BLUD sehingga dengan demikian SiLPA riil dalam proyeksi diperoleh dari efisiensi belanja modal dan sebagian dari efisiensi belanja lainnya. Dalam hal ini nilai konstanta pada model regresi adalah SiLPA lainnya diluar dari efisiensi belanja modal dan BLUD dan sementara dianggap sebagai SiLPA riil. Secara lengkap proyeksi SiLPA Riil,

Transitoris dan Total secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel 3.39 di bawah ini.

Tabel 3.39
Proyeksi SiLPA Belanja Modal, SiLPA Belanja BLUD dan SiLPA Total Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi SiLPA Riil	Proyeksi SiLPA Transitoris	Proyeksi SiLPA Total	Keterangan
2021	Rp141.977.237.338	Rp58.417.528.295	Rp200.394.765.633	Data Proyeksi
2022	Rp139.279.709.192	Rp66.208.107.191	Rp205.487.816.383	Data Proyeksi
2023	Rp136.492.806.341	Rp74.283.504.768	Rp210.776.311.109	Data Proyeksi
2024	Rp133.617.365.729	Rp82.654.133.819	Rp216.271.499.548	Data Proyeksi
2025	Rp130.595.277.647	Rp91.330.787.819	Rp221.926.065.466	Data Proyeksi

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman diasumsikan setiap tahun sebesar Rp 1.500.000.000,00. Dengan demikian, proyeksi Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman tahun 2021-2025 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40
Proyeksi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
2021	Rp 1.500.000.000,00
2022	Rp 1.500.000.000,00
2023	Rp 1.500.000.000,00
2024	Rp 1.500.000.000,00
2025	Rp 1.500.000.000,00

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

3. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal disesuaikan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2020

tentang Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan pada Tanggal 12 Oktober 2020. Adapun rencana Penyertaan Modal tahun 2021-2025 sesuai Perda tersebut selengkapnya disajikan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41
Proyeksi Penyertaan Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Penyertaan Modal
2021	Rp3.000.000.000,00
2022	Rp18.200.000.000,00
2023	Rp21.731.000.000,00
2024	Rp0,00
2025	Rp19.521.000.000,00

Sumber: Bag. Perekonomian Setda Kab. Kebumen, 2020

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah diasumsikan setiap tahun sebesar Rp 1.500.000.000,00. Dengan demikian, proyeksi Pemberian Pinjaman Daerah tahun 2021-2025 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42
Proyeksi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
2021	Rp 1.500.000.000,00
2022	Rp 1.500.000.000,00
2023	Rp 1.500.000.000,00
2024	Rp 1.500.000.000,00
2025	Rp 1.500.000.000,00

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

Dari analisis proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di atas dapat disajikan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021-2025 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.43.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil keuangan kepala daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.44. Dalam hal ini kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diperoleh nantinya juga masih harus dialokasikan untuk pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 3.43
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	PENDAPATAN	Rp3.295.231.235.993	Rp3.406.271.883.094	Rp3.519.744.156.592	Rp3.626.882.626.223	Rp3.738.328.175.064
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp445.940.749.556	Rp481.540.301.568	Rp518.319.340.624	Rp556.266.821.459	Rp596.149.623.817
1.2	Pendapatan Transfer	Rp2.707.748.877.009	Rp2.782.964.424.198	Rp2.855.627.796.474	Rp2.924.581.575.190	Rp2.992.279.455.657
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	Rp2.407.441.339.889	Rp2.454.641.390.567	Rp2.498.360.837.190	Rp2.537.451.085.288	Rp2.573.762.365.731
1.2.1.1	Dana Perimbangan	Rp1.963.453.524.318	Rp2.010.653.521.231	Rp2.054.372.915.560	Rp2.093.463.117.578	Rp2.129.774.354.466
1.2.1.1.1	Transfer Umum	Rp1.617.157.976.415	Rp1.664.073.399.690	Rp1.706.759.637.423	Rp1.745.566.499.578	Rp1.780.880.631.330
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp47.065.112.204	Rp49.160.335.004	Rp51.324.976.883	Rp53.558.387.771	Rp55.905.702.613
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp1.570.092.864.211	Rp1.614.913.064.686	Rp1.655.434.660.540	Rp1.692.008.111.807	Rp1.724.974.928.717
1.2.1.1.2	Transfer Khusus (DAK)	Rp346.295.547.903	Rp346.580.121.541	Rp347.613.278.137	Rp347.896.618.000	Rp348.893.723.136
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp41.243.665.000	Rp41.243.665.000	Rp41.243.665.000	Rp41.243.665.000	Rp41.243.665.000
1.2.1.3	Dana Desa	Rp402.744.150.571	Rp402.744.204.336	Rp402.744.256.630	Rp402.744.302.710	Rp402.744.346.265
1.2.2	Transfer Antar Daerah	Rp300.307.537.120	Rp328.323.033.631	Rp357.266.959.284	Rp387.130.489.902	Rp418.517.089.926
1.2.2.1	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota	Rp176.121.464.033	Rp204.137.284.983	Rp233.081.328.227	Rp262.944.901.460	Rp294.331.516.928
1.2.2.2	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	Rp124.186.073.087	Rp124.185.748.648	Rp124.185.631.057	Rp124.185.588.442	Rp124.185.572.998
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp141.541.609.428	Rp141.767.157.328	Rp145.797.019.494	Rp146.034.229.574	Rp149.899.095.590
1.3.1	Hibah	Rp141.541.609.428	Rp141.767.157.328	Rp145.797.019.494	Rp146.034.229.574	Rp149.899.095.590
1.3.2	Dana darurat					
2	BELANJA	Rp3.011.119.807.989	Rp3.070.815.075.505	Rp3.137.621.584.689	Rp3.203.916.704.224	Rp3.279.496.859.575
2.1	Belanja Operasi	Rp1.912.349.963.916	Rp1.945.402.774.540	Rp1.984.684.111.180	Rp2.022.579.615.146	Rp2.068.311.780.978
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp1.220.237.972.464	Rp1.197.951.854.151	Rp1.176.650.442.017	Rp1.156.281.004.782	Rp1.136.807.171.988
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp621.269.127.957	Rp674.994.685.645	Rp730.500.282.565	Rp787.769.249.602	Rp847.958.933.959
2.1.3	Belanja Hibah	Rp41.864.497.164	Rp42.126.672.959	Rp46.810.965.372	Rp47.086.697.229	Rp51.579.198.910
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	Rp28.478.366.331	Rp29.329.561.785	Rp29.722.421.226	Rp30.442.663.533	Rp30.966.476.121
2.1.5	Belanja Subsidi	Rp500.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
2.2	Belanja Modal	Rp481.647.638.264	Rp508.290.023.775	Rp535.815.126.813	Rp564.214.681.202	Rp594.062.612.865
2.3	Belanja Tidak Terduga	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	Rp616.122.205.809	Rp616.122.277.190	Rp616.122.346.696	Rp616.122.407.876	Rp616.122.465.732

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp201.894.765.633	Rp206.987.816.383	Rp212.276.311.109	Rp217.771.499.548	Rp223.426.065.466
3.1.1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah					
3.1.2	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	Rp200.394.765.633	Rp205.487.816.383	Rp210.776.311.109	Rp216.271.499.548	Rp221.926.065.466
3.1.3	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000
3.1.5	Penerimaan piutang daerah					
3.1.6	Sisa Belanja Dana Alokasi Khusus					
3.2	Pengeluaran pembiayaan	Rp4.500.000.000	Rp19.700.000.000	Rp23.231.000.000	Rp1.500.000.000	Rp21.021.000.000
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	Rp3.000.000.000	Rp18.200.000.000	Rp21.731.000.000	Rp0	Rp19.521.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.3	Pemberian pinjaman daerah	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000
3.2.4	Kelompok Usaha Masyarakat					
	Pembiayaan Netto	Rp197.394.765.633	Rp187.287.816.383	Rp189.045.311.109	Rp216.271.499.548	Rp202.405.065.466

Sumber: Analisis Penyusun, 2020



RANCANGAN TEKNOKRATIK R P J M D KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2020

Tabel 3.44
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah dan Kapasitas Riil Kemampuan Kepala Daerah
 untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pendapatan	Rp3.295.231.235.993	Rp3.406.271.883.094	Rp3.519.744.156.592	Rp3.626.882.626.223	Rp3.738.328.175.064
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	Rp200.394.765.633	Rp205.487.816.383	Rp210.776.311.109	Rp216.271.499.548	Rp221.926.065.466
	Total penerimaan	Rp3.495.626.001.626	Rp3.611.759.699.477	Rp3.730.520.467.702	Rp3.843.154.125.771	Rp3.960.254.240.530
	Dikurangi:					
4	Belanja Pegawai	Rp1.220.237.972.464	Rp1.197.951.854.151	Rp1.176.650.442.017	Rp1.156.281.004.782	Rp1.136.807.171.988
5	Pengeluaran pembiayaan	Rp4.500.000.000	Rp19.700.000.000	Rp23.231.000.000	Rp1.500.000.000	Rp21.021.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	Rp2.270.888.029.162	Rp2.394.107.845.326	Rp2.530.639.025.685	Rp2.685.373.120.989	Rp2.802.426.068.542
	Dikurangi:					
6	Belanja Transitoris (DAK, Banprov, Hibah, Subsidi, Tidak Terduga, Belanja Transfer, SILPA Transitoris)	Rp1.288.062.964.522	Rp1.296.863.411.898	Rp1.310.001.780.152	Rp1.318.892.977.711	Rp1.332.431.645.275
7	Pembentukan dana cadangan Pilkada		Rp40.000.000.000	Rp40.000.000.000	Rp40.000.000.000	Rp40.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah	Rp982.825.064.641	Rp1.057.244.433.429	Rp1.180.637.245.532	Rp1.326.480.143.278	Rp1.429.994.423.267

Sumber: Analisis Penyusun, 2020

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DAERAH

Analisis terhadap isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Ini merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Penentuan dan identifikasi isu yang dilakukan dengan tepat dan bersifat strategis sangat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu penting.

Dalam Bab IV ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Kebumen, khususnya untuk jangka waktu 2016-2021. Komponen pembentuk isu-isu strategis di Kabupaten Kebumen terdiri dari: analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dan faktor penentu keberhasilannya; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen 2015- 2025; hasil telaah terhadap dokumen RPJMN 2020-2024; hasil telaah isu

dari dunia internasional; dan analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/ bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini.



Sumber : Bappeda Kab. Kebumen, 2020

Gambar 4.1
Komponen Pembentuk Isu Strategis Kabupaten Kebumen

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka

menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama lima tahun. Penyajian permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu: 1) Pembangunan sumberdaya manusia, 2) Pengembangan ekonomi wilayah, 3) Penyediaan infrastruktur, lingkungan hidup dan kebencanaan, dan 4) Tata kelola pemerintahan.

4.1.1 Bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia

Pada aspek pembangunan sumberdaya manusia sebagai motor utama penggerak pembangunan daerah kualitas SDM menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan suatu daerah dapat diukur dari perkembangan sumberdaya manusia (SDM), karena SDM adalah modal utama dalam pembangunan. Pembangunan manusia dan masyarakat meliputi pembangunan kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pembangunan di berbagai sektor tersebut merupakan rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia guna mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Untuk mencapai kualitas hidup manusia yang baik memerlukan prasyarat pendukung yang mencakup

komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas-sektor, serta kapasitas untuk melaksanakannya.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 menempatkan peningkatan kualitas manusia Indonesia pada misi pertamanya. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai IPTEK didukung kerjasama industri dan talenta global melalui layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Strategi yang dilakukan guna mencapai SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pengendalian penduduk, penguatan perlindungan sosial, peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2020-2025) merupakan tahapan penting dari RPJPD (2005-2025). Secara umum sasaran pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Kebumen 2005-2025 dalam pembangunan sumberdaya manusia ditandai dengan meningkatnya IPM, IDG, terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, dan terbentuknya karakter budaya (jati diri) masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sasaran pokok lainnya adalah berkurangnya tingkat kemiskinan penduduk yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin, meningkatnya tingkat pendapatan penduduk

miskin, meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta meningkatnya harkat hidup dan martabat penduduk miskin.

Arah kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen 2020-2025 dalam pencapaian visi daerah akan dicapai melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan, peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kemampuan dalam pemberantasan penyakit melalui upaya preventif dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, dan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk.

Sementara itu dalam tahap terakhir RPJPD 2020-2025 fokus pembangunan SDM antara lain:

1. Peningkatan kerjasama yang harmonis dari semua pihak dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan;
2. Peningkatan peran serta masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal agar masyarakat memiliki profesionalisme yang memadai;

4. Peningkatan kerjasama yang harmonis dalam pembinaan olahraga bagi generasi muda;
5. Mempertahankan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan;
6. Menjaga keberlangsungan penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat luas;
7. Meningkatkan angka harapan hidup dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
8. Pemantapan kesehatan reproduksi remaja;
9. Pelestarian pengembangan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta perlindungan anak; dan
10. Pemantapan sistem perlindungan perempuan dan anak dan pelestarian kerukunan hidup beragama.

Dengan demikian, dalam perencanaan pembangunan manusia perlu terus meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2015-2019), IPM Kabupaten Kebumen terus menunjukkan peningkatan, namun angka IPM Kabupaten Kebumen masih berada pada kategori menengah ke bawah. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Kebumen sebesar 69,6 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan

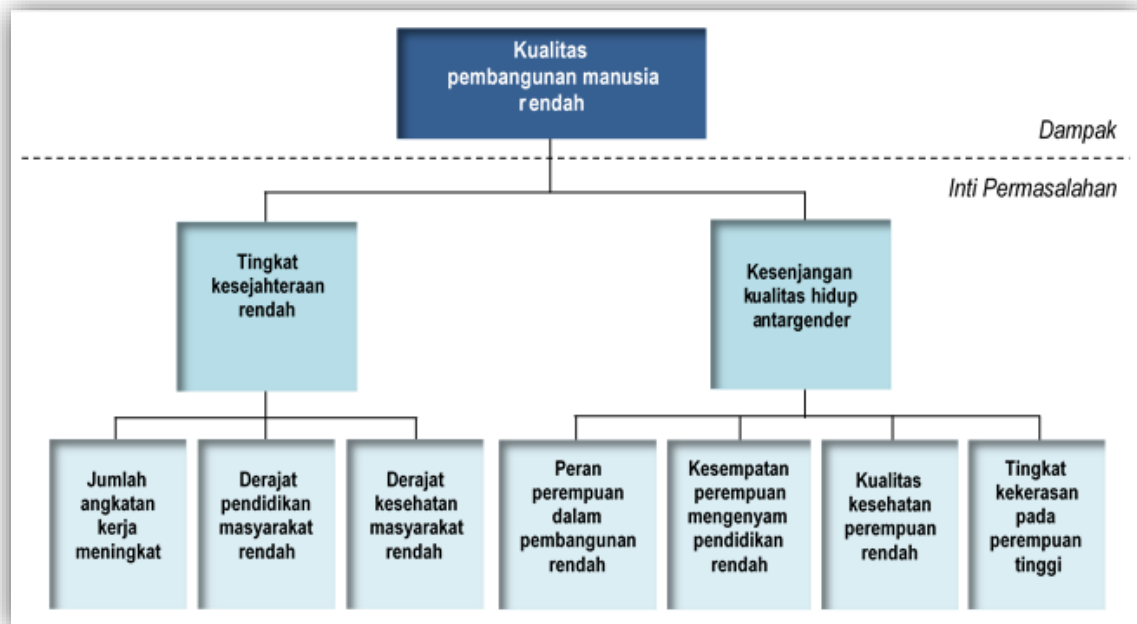
IPM kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen menempati urutan ke-10 kabupaten/kota dengan IPM terendah.

Berbagai permasalahan pokok yang muncul di awal pada awal periode pemerintahan sebelumnya memang telah diatasi seoptimalnya—hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan. Namun, IPM yang berada pada kategori menengah ke bawah ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen masih memiliki permasalahan pokok yang mendasar. Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap of expectation* atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Salah satu tujuan pembangunan manusia adalah untuk memperluas pilihan bagi seluruh penduduk. Untuk mewujudkannya, pemerintah berkewajiban untuk menjamin masyarakat agar memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini (Indeks Pembangunan Manusia, 2018). Rencana pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen ke depan adalah untuk memastikan untuk pencapaian IPM yang tinggi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil.

Untuk dapat memecahkan permasalahan dalam pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen untuk mencapai perluasan pilihan dan kesejahteraan seluruh penduduk, maka analisis ini berfokus pada disparitas pembangunan manusia. Konsep disparitas digunakan untuk memastikan pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen membuka kesempatan yang sama untuk semua individu dalam memperluas pilihan-pilihannya, baik laki-laki maupun perempuan. Pembangunan manusia yang merata pada bidang pendidikan, kesehatan, peluang untuk menjadi sejahtera. Dari analisis disparitas diketahui bahwa masih terdapat permasalahan yang menjadi tantangan bagi pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen. Beberapa komponen pembangunan masih belum seperti yang diharapkan terkait pemerataan.

Dalam kerangka disparitas, maka diperoleh permasalahan yang masih belum seperti yang diharapkan. Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen masih rendah. Secara umum, permasalahan-permasalahan pembangunan manusia yang ditemukan di Kabupaten Kebumen adalah kesejahteraan yang tidak dirasakan oleh semua individu dan terdapat kesenjangan pembangunan manusia antargender. Secara garis besar, permasalahan pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam bagan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2
Permasalahan Pembangunan Manusia di Kabupaten Kebumen

Berikut akan dijelaskan masing-masing permasalahan pembangunan manusia Kabupaten Kebumen.

1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Rendah

Rendahnya IPM Kabupaten Kebumen disebabkan oleh kesenjangan kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Pada pembangunan SDM, indikator yang digunakan untuk mengukur disparitas antarindividu adalah jumlah penduduk miskin. Menurut data Bappenas dalam *poverty brief* Kabupaten Kebumen 2019, secara rata-rata pengeluaran perkapita penduduk selama kurun waktu 2009-2019 tumbuh sebesar 2,36 persen, namun 18,2 persen penduduk Kabupaten Kebumen tumbuh di bawah rata-rata. Pertumbuhan pengeluaran perkapita

antara penduduk berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah relatif sangat timpang, dimana penduduk 10 persen termiskin (desil 1) hanya bertumbuh sebesar 0.26 persen, sementara penduduk 10 persen terkaya (desil 10) tumbuh hingga 3.37 persen.

Meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 P1 dan P2 di Kabupaten Kebumen meningkat (lihat Gambar 2.31), Artinya jarak antara pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan jarak rata-rata pengeluaran antarpenduduk miskin merenggang atau semakin jauh.

Dalam berbagai literatur, kemiskinan selalu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi. Kemiskinan yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal seseorang. Faktor internal seperti, kemampuan yang mereka miliki dan faktor eksternal seperti, ketiadaan kesempatan kerja yang disediakan pemerintah, kurangnya lapangan pekerjaan, dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka.

Beberapa akar masalah yang menyebabkan rendahnya kesejahteraan penduduk di Kabupaten Kebumen adalah angka pengangguran Kabupaten Kebumen cukup tinggi, dan di sisi lain tenaga kerja yang terserap oleh pasar kerja memiliki daya saing rendah karena kompetensi dan ketrampilan yang dimiliki rendah. Akar-akar masalah akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Jumlah angkatan kerja meningkat

Cepatnya laju pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan berbagai implikasi dan tekanan dalam berbagai bidang pembangunan, salah satu di antaranya adalah penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang ada, karena bila penduduk bertambah maka jumlah angkatan kerja bertambah yang berarti masalah bagi penyediaan lapangan kerja baru untuk meminimalkan jumlah pengangguran terbuka. Tahun 2019, TPAK meningkat menjadi 68,48 persen dari 65,53 persen pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang tenaga kerja terdapat 68 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja, menganggur, dan sedang mencari kerja. TPAK yang tinggi berkontribusi pada rendahnya kesejahteraan disebabkan oleh beberapa alasan berikut:

Tingginya Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 memang menunjukkan tren menurun dengan angka terendah tahun 2019 sebesar 4,76 persen. Namun, angka tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2015

sebesar 4,14 persen. TPT Kabupaten Kebumen dibandingkan dengan TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk dalam 10 kabupaten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Jawa Tengah. Angka pengangguran yang tinggi menyebabkan daya beli penduduk menjadi rendah.

Penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Komposisi TPT Kabupaten Kebumen berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk tingkat Pendidikan SMA/SMK sebanyak 67,41 persen dari total pengangguran terbuka atau 19.768 penduduk, dengan jumlah pengangguran SMA sebanyak 7,38 persen atau sejumlah 2.164 orang dan SMK sebanyak 60,03 persen atau 17.604 orang. Padahal tingkat kesempatan kerja tahun 2019 lebih tinggi (95,24 persen) dibandingkan tahun 2017 dan 2018, meski lebih rendah dibanding tahun 2015 (95,86 persen). Data ini mengindikasikan bahwa terdapat *missmatch* antara lowongan pekerjaan dengan ketersediaan tenaga kerja atau kualitas lulusan SMA/SMK masih rendah.

Menteri Tenaga Kerja menyampaikan setidaknya ada tiga isu utama dalam masalah sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pertama adalah kualitas, kedua kuantitas, dan ketiga adalah persebaran. Kualitas tenaga kerja dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat. Hasil dari pendidikan yang kurang berkualitas menyebabkan pengangguran karena memengaruhi kompetensi, penguasaan *soft skill* maupun

ketrampilan yang dimiliki lulusan pada jenjang tertentu. Banyaknya perguruan tinggi dan sekolah yang belum dapat menjamin kualitas pendidikan.

Era globalisasi bahkan revolusi Industri 4.0 menuntut kompetensi sumberdaya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademis namun mampu menguasai teknologi, bahasa asing, ketrampilan, *attitude*, dan *soft skill* lainnya yang sesuai dengan kebutuhan industri. Perubahan inilah yang seharusnya diikuti oleh sistem pendidikan di Indonesia termasuk kurikulum dalam sekolah-sekolah vokasi agar lulusan Indonesia dapat terserap oleh pasar kerja baik nasional maupun internasional.

Tatanan dunia pada era globalisasi mendorong keterbukaan pasar baik barang, jasa, modal bahkan tenaga kerja. Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan Kebumen kedepan. Kebutuhan tenaga terampil dan berdaya saing, lalu lintas barang, jasa dan modal yang sangat cepat dan tidak terbatas ruang maupun waktu merupakan sebuah peluang besar jika daerah mampu menyiapkan sumberdaya yang berdaya saing. Jumlah penduduk yang besar dan *supply* angkatan kerja yang besar tidak akan berarti apapun jika tidak mampu bersaing. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, kecepatan arus informasi dan ekonomi digital, serta dimulainya era Industri 4.0 perlu disikapi Pemerintah Daerah dalam penyiapan sumberdaya manusianya agar mampu berkontribusi, berkompetisi, dan tidak hanya menjadi target pasar.

Kualitas tenaga kerja yang terserap rendah

Angkatan kerja yang tinggi jika tidak disertai dengan pembangunan kualitas manusianya akan menjadi beban bagi daerah dalam sektor ketenagakerjaan. Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir didominasi pekerja dengan tingkat pendidikan SD dan SMP/ sederajat. Komposisi tenaga kerja seperti ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja yang terserap adalah pekerja yang tidak memiliki keahlian yang memadai. Pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang semakin meningkat mengakibatkan pekerja dengan tingkat pendidikan seperti ini akan bekerja pada level terendah dari manajemen, yaitu pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Penduduk bekerja menurut status pekerjaan selama kurun waktu 2015-2019 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, berusaha sendiri, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Status pekerjaan ini memengaruhi besaran pendapatan yang akan diterima oleh pekerja. Status pekerjaan sebagai buruh dan pekerja keluarga/tidak dibayar memiliki upah yang kurang layak atau di bawah UMK, selain itu pekerjaan tersebut seperti pekerjaan paruh waktu atau musiman seperti di sektor pertanian. Akibatnya pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja yang bekerja tidak cukup untuk memenuhi standar hidup layak.

Pengeluaran perkapita Kabupaten Kebumen sebesar Rp 9.066.000 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sementara UMK Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah Rp 1.835.000,

meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 1.686.000. Namun jika melihat pada karakteristik tenaga kerja Kabupaten Kebumen yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian 33,71 persen dan perdagangan 24,37 persen, memiliki tingkat pendidikan mayoritas SD/SMP dan bahkan tidak tamat SD sebesar 70,85 persen, dengan status pekerjaan terbesar adalah buruh, berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tidak dibayar menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Kabupaten Kebumen tidak mendapatkan upah sesuai dengan standar minimal kabupaten.

Dengan demikian, struktur kependudukan dengan jumlah usia produktif dominan, perlu disikapi dengan kebijakan pembangunan yang tepat. Angka pengangguran semakin tinggi karena keterbatasan penyerapan tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja. Selain pengendalian jumlah penduduk, mobilitas penduduk, pemerintah daerah harus menyiapkan tenaga kerja yang trampil dan kompeten di tengah keterbukaan perdagangan dan pasar tenaga kerja.

b) Derajat Pendidikan Masyarakat Rendah

Kualitas hidup manusia sangat ditentukan oleh pendidikan. Pengetahuan menjadi salah satu unsur penting dari modal manusia yang sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya saing suatu bangsa dalam kehidupan global. Tenaga kerja yang terdidik dan terampil sebagai *output* dari proses pendidikan formal dan non formal adalah komponen yang memengaruhi kelangsungan proses produksi barang dan jasa, serta secara tidak langsung hal ini akan

memberi pengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk secara umum. Banyak fakta yang menunjukkan semakin baik kualitas pengetahuan penduduk di suatu wilayah maka akan diikuti oleh perbaikan kesejahteraan, sehingga pendidikan seringkali dianggap sebagai variabel antara bagi penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Manusia yang berkualitas yang seharusnya dapat memberikan keuntungan yang besar dalam mengurangi disparitas antarindividu karena berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 adalah sebesar 13,04 tahun menggambarkan perkiraan lamanya tahun sekolah yang dijalani anak-anak usia 7 tahun yang setara dengan jenjang pendidikan DI atau DII. Angka ini lebih tinggi dibanding Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sangat terkait dengan kesediaan infrastruktur tingkat menengah dan tinggi yang cukup representatif, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan Harapan Lama Sekolah menjadi indikasi positif dalam sektor pendidikan, sebab semakin lama seseorang mengenyam sekolah, artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang dilaluinya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Angka HLS yang baik tidak diikuti dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang baik. RLS Kabupaten Kebumen meski menunjukkan peningkatan ditahun 2019 sebesar 7,53 tahun atau hanya sampai kelas VII. Angka ini sama dengan RLS Provinsi Jawa Tengah tapi di bawah RLS nasional. RLS yang rendah ini

mengurangi kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen. Hal ini ditunjukkan pula dengan data pada jenjang pendidikan dasar tren Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) cenderung menurun. APS rendah menjadi potensi tingginya angka putus sekolah dan anak tidak sekolah. Sehingga, meskipun akses dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan maupun tenaga kependidikan yang ada cukup baik di wilayah Kabupaten Kebumen, namun APS terus mengalami penurunan. Sementara itu APS pada jenjang SD di tahun 2019 sebesar 95,83 persen, jenjang SMP 88,90 persen, dan SMA hanya sebesar 68,78 persen. Artinya terdapat potensi tingginya anak tidak sekolah yang disebabkan oleh ketidakmampuan orangtua secara ekonomi sehingga putus sekolah, atau karena faktor sosial di keluarga dan lingkungannya.

c) Derajat kesehatan masyarakat rendah

Aspek penting kesejahteraan yang lain adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. UHH Saat Lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Umur Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan. UHH merupakan standar

suatu negara maupun daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Angka UHH Kabupaten Kebumen dalam lima tahun memang menunjukkan tren positif meski peningkatannya tidak signifikan dan berada di bawah UHH Jawa Tengah namun di atas UHH nasional. Tahun 2019, UHH Kabupaten Kebumen sebesar 73,22 tahun, sehingga diperkirakan anak yang lahir dapat hidup rata-rata sampai usia 73,22 tahun. Namun, capaian indikator utama bidang kesehatan menunjukkan masih tingginya angka stunting pada anak, tingginya kasus kematian ibu dan bayi, serta tingginya angka kesakitan baik yang disebabkan oleh penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Pada tahun 2019 terdapat 36 kasus kematian bayi atau sebesar 6,9/1.000 kelahiran hidup, dan kasus kematian ibu sebanyak 9 kasus atau 45,9/1.000 kelahiran hidup. Kasus kematian bayi banyak terjadi pada wilayah Kebumen, Ambal, dan Karanggayam.

Penyakit penyerta, keterlambatan penanganan, dan faktor sosial ekonomi masyarakat menjadi penyebab kasus kematian ibu maupun bayi. Selain itu ketersediaan layanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial/Emergensi Komprehensif) dalam rangka penyelamatan ibu dan anak baru lahir melalui program rujukan berencana dalam satu wilayah masih terbatas. Kabupaten Kebumen baru memiliki 2 fasilitas layanan PONEK yaitu RSUD dr. Soedirman dan RSUD PKU Gombang. Di sisi lain persentase bayi dengan status gizi kurang dan buruk memiliki tren yang meningkat. Angka Kesakitan penyakit menular

maupun tidak menular masih cukup tinggi. Hasil Susenas tahun 2019 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 20,19 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 13,16 persen. Tiga penyakit menular utama yang cukup signifikan adalah temuan kasus baru HIV, TB, dan DBD, sedangkan penyakit tidak menular utama dengan kasus yang cukup tinggi adalah Diabetes Melitus, Hipertensi, Asma, dan Kanker yang cenderung meningkat kasusnya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Korelasi antara kemiskinan dan kesehatan bukanlah suatu hubungan yang sederhana, dan merupakan suatu hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan dan kemiskinan berpotensi besar membawa pada status kesehatan yang rendah. Sebagaimana dinyatakan oleh World Bank (2002) bahwa kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menghabiskan tabungan rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan. Sebaliknya, orang miskin pada gilirannya akan terkena risiko pribadi dan lingkungan yang lebih besar, kekurangan gizi, dan kemampuan yang rendah untuk mengakses fasilitas kesehatan.

2. Kesenjangan Kualitas Hidup Antargender

Konsep gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan, sebab ketidakadilan yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Kesenjangan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan (Indeks Pembangunan Manusia). Kesenjangan gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan yang juga menjadi fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Disparitas capaian antargender tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan ukuran pembangunan manusia namun dengan pilah gender. Capaian kinerja IPG Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan meski relatif lambat. Pada tahun 2019 IPG Kabupaten Kebumen sebesar 93,34 meningkat dari tahun 2018 sebesar 93,09. Pembangunan manusia yang dicapai laki-laki di Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibanding perempuan selama lima tahun terakhir. Tahun 2019, tercatat bahwa IPM laki-laki mencapai 73,15 dan perempuan sebesar 68,28. Secara konseptual, capaian ini merefleksikan masih adanya disparitas pembangunan manusia antargender di Kabupaten Kebumen.

Kualitas hidup perempuan yang relatif lebih rendah dibanding laki-laki pada dasarnya mengindikasikan lebih terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, lebih lemahnya kontrol perempuan terhadap sumberdaya pembangunan, dan lebih minimnya manfaat yang diperoleh perempuan dari pembangunan. Beberapa akar masalah yang diidentifikasi dalam menyebabkan kualitas hidup perempuan lebih rendah dari laki-laki adalah:

a) Peran perempuan dalam pembangunan rendah

Kesempatan dan perlakuan setara dalam bagi perempuan sangat penting untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan. Kemiskinan, isolasi geografis, status minoritas, kecacatan, pernikahan dini dan kehamilan, kekerasan berbasis gender, dan kepercayaan tradisional tentang status dan peran perempuan merupakan beberapa hambatan yang menghalangi hak perempuan dan anak perempuan untuk menjalankan hak mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan haknya dalam segala bidang. Salah satu hal yang memengaruhi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adalah pemberdayaan perempuan yang rendah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kebumen, capaian IDG menurun dari 70,13 pada tahun 2017 menjadi 68,09 pada tahun 2018. Komposit pembentuk IDG adalah keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan

sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Keterlibatan perempuan di parlemen cenderung menurun dari 28 persen pada tahun 2017 menjadi 27,6 persen pada 2018 dan 26 persen pada tahun 2019. Sementara perempuan sebagai tenaga profesional juga menurun dari 46,71 persen pada tahun 2017 menjadi 46,53 persen pada tahun 2018. Persentase perempuan yang menjadi PNS dan menduduki jabatan penting dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif perkembangannya.

Sementara sumbangan pendapatan perempuan sangat kecil yaitu 25,59 persen. Pada sektor ekonomi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat besar selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pengeluaran perkapita laki-laki pada tahun 2019 sebesar RP 11.904.000 dan perempuan sebesar Rp 8.305.000. Artinya daya saing tenaga kerja perempuan sangat rendah, upah yang diberikan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, serta kesempatan menduduki posisi penting dalam pekerjaan relatif rendah. Dengan demikian, disparitas gender sangat terlihat dari rendahnya kesempatan partisipasi perempuan dalam keputusan penting dan pembangunan daerah, serta daya saing dalam mendapatkan upah yang layak.

b) Kesempatan perempuan mengenyam pendidikan rendah

Disparitas antargender dari sisi pendidikan memang masih terjadi. Namun, kondisinya lebih baik bila dibandingkan pemberdayaan perempuan pada sektor ekonomi. HLS perempuan sebesar 13,48 lebih tinggi dibandingkan dengan laki-

laki sebesar 13,01, namun untuk RLS perempuan sebesar 7,09 lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu 7,97 tahun. Artinya meskipun perempuan memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki namun rata-rata hanya mengenyam pendidikan selama 7,09 tahun atau setara SMP Kelas VII. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh persepsi orangtua tentang pendidikan. Khususnya bagi anak perempuan, persepsi orangtua sangat penting karena akan menentukan dukungan capaian pendidikan anak perempuan tersebut. Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi orangtua adalah umur, kemampuan ekonomi, dan tingkat pendidikan (Widyaningsih, 2010).

c) Kualitas kesehatan perempuan lebih rendah

Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan memang lebih tinggi dibanding AHH laki-laki. Namun, hal ini sangat terkait dengan *female advantages* (FA), terutama faktor biologis dan tingkah laku atau kebiasaan dari setiap gender. Lemaire (2002) menyatakan bahwa secara biologis perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Sedangkan dari segi gaya hidup, laki-laki lebih memiliki risiko kematian yang lebih tinggi karena stres, kebiasaan merokok, dan pekerjaan berat. Namun demikian, secara praktik di beberapa wilayah, *female advantages* lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan.

Disparitas antargender dari sisi kesehatan di Kabupaten Kebumen masih terjadi. Meskipun Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan lebih besar dari laki-laki, namun dari aspek kesehatan yang lain seperti keluhan kesehatan perempuan masih di atas laki-laki. Pada tahun 2019 angka kesakitan laki-laki sebesar 19,50 persen dan angka kesakitan perempuan sebesar 20,86. Sehingga, dapat dikatakan bahwa meskipun perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang, tetapi perempuan lebih rentan mengalami sakit. Hal ini terkait dengan karakter fisik perempuan yang secara umum lebih lemah dibandingkan laki-laki.

d) Tingkat kekerasan pada perempuan tinggi

Aspek perlindungan terhadap kekerasan tidak dapat diasumsikan terefleksikan secara langsung maupun tidak langsung melalui pengukuran kualitas hidup. Fenomena kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diasumsikan berkorelasi secara negatif dengan kualitas hidup perempuan. Kualitas hidup perempuan yang meningkat tidak selalu diikuti dengan tindak kekerasan yang menurun. Banyak kajian menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban kekerasan tanpa memperhatikan tingkat pendidikan, ekonomi, dan status sosialnya. Sehingga, selain berfokus pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, pengukuran atas tindak kekerasan yang dialami perempuan perlu juga mendapat perhatian khusus.

Meskipun sistem perlindungan perempuan dan anak telah dibangun melalui P2TP2A KARTIKA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan) yang terdiri dari Tim Koordinator dan Tim Pelaksana Harian yang terdiri dari lintas sektor termasuk di dalamnya pelibatan instansi vertikal (TNI, POLRI) dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, selama kurun waktu lima tahun terakhir kasus kekerasan yang terjadi baik kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen berfluktuatif namun relatif tinggi.

4.1.2 Bidang Ekonomi

Analisis ekonomi diperlukan untuk memahami kondisi perekonomian yang ada di daerah dan selanjutnya dapat dilakukan intervensi kebijakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi. Analisis dilakukan terhadap data-data terkait aktivitas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita masyarakat serta struktur ekonomi juga kinerja sektor sektor ekonomi seperti pertanian, industri pengolahan perdagangan dan jasa lainnya. Melalui analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa permasalahan pembangunan bidang perekonomian Kabupaten Kebumen adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Alur permasalahan bidang ekonomi secara rinci digambarkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3
Alur Permasalahan Bidang Ekonomi

Permasalahan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen dapat dirinci menjadi tiga permasalahan pada masing-masing sektor yaitu sektor primer (pertanian dalam arti luas), sektor sekunder (industri pengolahan) serta sektor tersier (jasa). Permasalahan pada masing-masing sektor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sektor pertanian dalam arti luas belum mampu menjadi sumber kesejahteraan penduduk

Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan ciri khas agraris dimana mayoritas penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Secara struktur, perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian, meskipun setiap tahun peranannya semakin menurun

yang menunjukkan terjadinya peralihan baik ke sektor sekunder maupun tersier. Pertanian yang dimaksud adalah dalam arti luas yang meliputi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Meskipun sektor pertanian menjadi sektor dominan, namun sektor ini belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pertumbuhan di sektor pertanian, kelautan dan perikanan. Kurangnya pertumbuhan sektor pertanian bersumber dari turunnya produksi dan rendahnya nilai tambah sektor pertanian (lihat Tabel 2.152) serta kurangnya pemanfaatan potensi sektor perikanan dan kelautan yang dimiliki.

Permasalahan di sektor pertanian dipengaruhi beberapa hal seperti skala usaha yang tidak memenuhi skala ekonomis, kurangnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah produk serta kurangnya manajemen usaha dan akses pemasaran. Saat ini, tingkat kepemilikan lahan pertanian di Kabupaten Kebumen hanya mencapai 0,23 ha per petani, masih sangat jauh dari kriteria dimana untuk memenuhi kebutuhannya secara layak, minimal setiap petani mengelola lahan seluas 2 ha. Permasalahan kurangnya kepemilikan lahan pertanian masih ditambah dengan masih kurangnya produktivitas jika dibandingkan dengan potensi lahan. Kurangnya produktivitas dipengaruhi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna, pengaruh iklim dan cuaca serta menurunnya kualitas lahan.

Kondisi keterbatasan lahan dan produktivitas lahan yang kurang optimal, masih diperparah dengan rendahnya nilai tambah produk pertanian yang ada. Mayoritas petani di Kabupaten Kebumen menanam komoditas tanaman pangan yang memiliki nilai tambah paling rendah dibandingkan komoditas pertanian lainnya. Selain itu, perilaku petani yang belum terbiasa mengolah produknya dan hanya menjual dalam bentuk dasar/mentah menyebabkan hilangnya potensi pendapatan petani atas produk tersebut. Hal ini sangat terkait dengan kurangnya manajemen usaha serta sulitnya akses pemasaran produk petani.

Di sektor perikanan dan kelautan, nilai tambah tidak menjadi masalah utama. Hal ini dibuktikan dengan tingginya nilai tukar yang jauh lebih tinggi dari Nilai Tukar Petani (NTP). Masalah sektor perikanan dan kelautan adalah pada kurangnya pemanfaatan potensi yang ada, dimana produksi saat ini masih lebih rendah daripada potensi tangkapan di laut maupun luasan lahan budidaya yang tersedia (lihat Tabel 2.149). Sebagaimana penyebab masalah di sektor pertanian, kurangnya pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan juga dipengaruhi kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, terutama pada perikanan tangkap yang cenderung padat modal. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna, pengaruh iklim dan cuaca, skala budidaya yang kecil serta manajemen usaha yang kurang baik juga menjadi beberapa hal yang perlu diselesaikan (lihat data permasalahan kelautan dan perikanan).

Belum optimalnya pertumbuhan sektor pertanian sedikit banyak akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, yang juga menjadi aspek penting

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi ketersediaan pangan utama, saat ini tidak menjadi masalah daerah karena Kabupaten Kebumen merupakan wilayah lumbung pangan dengan surplus produksi beras. Akan tetapi, tingkat kerawanan pangan merupakan indikator yang sangat mudah berubah baik karena faktor internal maupun eksternal, terbukti dengan tingginya fluktuasi jumlah desa rawan pangan setiap tahun. Selain itu, fluktuasi harga pangan juga menjadi permasalahan tersendiri, terutama pada komoditas pangan yang belum bisa diproduksi sendiri oleh daerah. Selain dari sisi kuantitas, kualitas konsumsi pangan juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait dengan keamanan produk pangan serta pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang yang masih perlu didorong (lihat Tabel 2.106).

2. Sektor industri belum mampu menjadi penarik bagi sektor pertanian

Sektor industri di Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal tersebut sejalan dengan data dan fakta bahwa sampai dengan saat ini, struktur ekonomi Kabupaten Kebumen masih ditopang oleh dua sektor andalan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan sektor Industri Pengolahan (lihat Tabel 2.13). Meskipun demikian, kedua sektor tersebut belum memiliki keterkaitan yang saling mendukung. Sektor industri yang tumbuh pesat belum mampu menjadi penarik bagi sektor pertanian. Hal ini diperkuat dari nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung dari keterkaitan ke belakang

(*backward linkages*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkages*) pada Tabel 2.15 dan Tabel 2.16, yang menunjukkan bahwa sektor aneka industri memiliki kategori kemampuan dalam menggerakkan sektor yang menjadi input lebih rendah dibandingkan rata-rata total perekonomian.

Industri Kabupaten Kebumen yang masih didominasi oleh industri kecil dan menengah, mayoritas masih menggunakan metode dan sarana sederhana dalam pengolahan produknya yang berakibat pada rendahnya produktivitas industri. Kondisi tersebut ditengarai menjadi salah satu penyebab pesatnya pertumbuhan sektor industri yang belum mampu menjadi penarik bagi sektor pertanian. Lemahnya kapasitas kelembagaan ekonomi lokal yang berakibat pada manajemen usaha yang kurang baik, juga diindikasikan sebagai penyebab pesatnya pertumbuhan sektor industri yang belum mampu menjadi penarik bagi sektor pertanian (lihat Tabel 2.140).

Di sisi lain kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha industri, koperasi maupun UMKM juga masih sangat rendah. Kurang dari 1 persen usaha yang sudah mendapatkan pembinaan, sementara itu hasil pembinaan juga masih kurang memuaskan dilihat dari peningkatan kelas UMKM maupun omset koperasi yang telah mendapatkan pembinaan.

3. Sektor jasa yang belum mampu menjadi penarik bagi pengembangan ekonomi lokal

Sama halnya dengan sektor industri, sektor jasa juga mengalami pertumbuhan pesat, namun belum mampu menjadi penarik pengembangan ekonomi lokal. Hal ini disebabkan belum optimalnya daya saing pariwisata dan sektor perdagangan belum mampu menjadi media untuk menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi. Daya saing pariwisata dipengaruhi oleh 4 pilar pariwisata yang belum berjalan secara baik. Pada aspek industri pariwisata, sudah cukup banyak lembaga pariwisata, namun yang memiliki sertifikasi masih terbatas. Destinasi pariwisata cukup banyak, namun demikian, akses ke lokasi wisata dan kondisi destinasi yang kurang terawat menciptakan keengganan wisatawan untuk berkunjung. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran pariwisata juga masih harus ditingkatkan. Pokdarwis mewakili kelembagaan pariwisata telah banyak terbentuk, namun demikian kemampuan kelembagaan pariwisata belum cukup untuk menjadi pengungkit aktivitas pariwisata yang menciptakan *multiplier* bagi perekonomian lokal.

Sektor perdagangan belum mampu menjadi media untuk menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya sektor perdagangan di beberapa wilayah di Kabupaten Kebumen. Sektor perdagangan masih dominan di kecamatan-kecamatan perkotaan seperti Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutowinangun, Prembun, sehingga belum

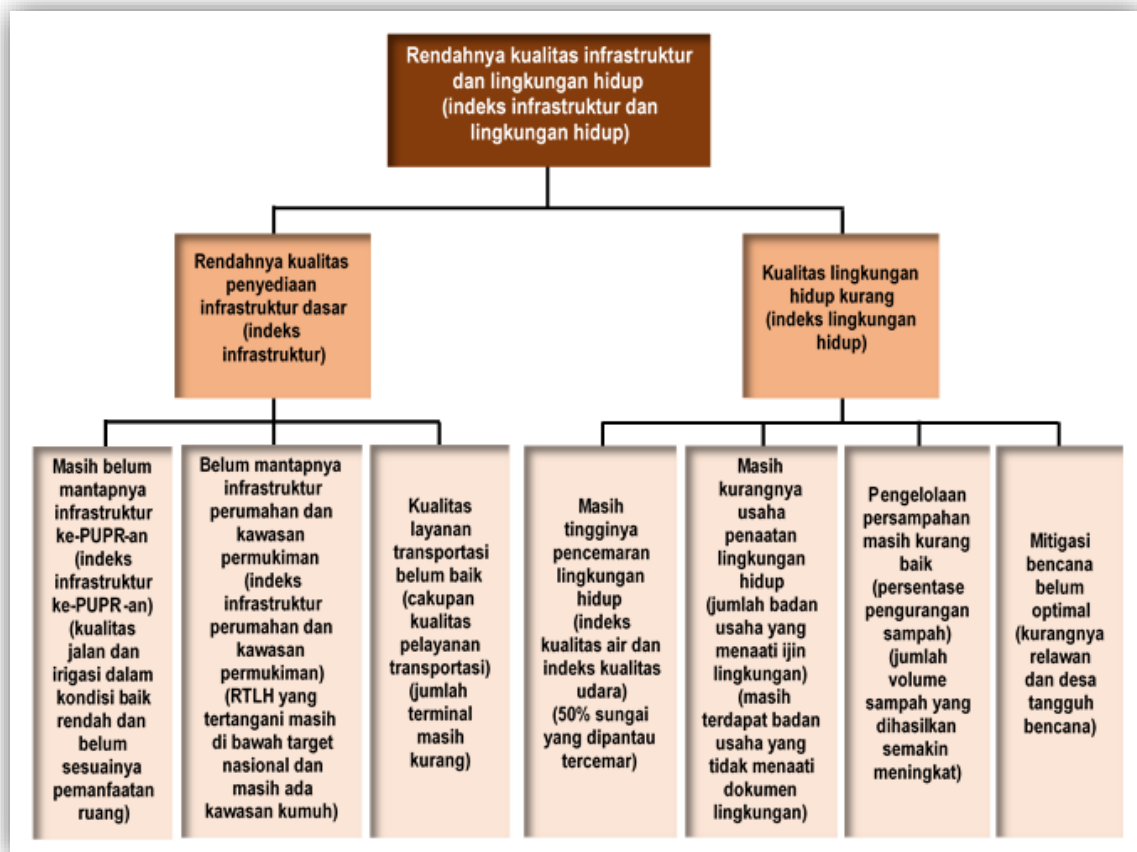
memberikan dampak pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kebumen.

Inflasi sebagai indikator dari efisiensi perdagangan cukup baik, namun demikian hal ini tidak tercermin di wilayah pedesaan. Harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi, pada sisi lain harga produk pertanian yang dihasilkan petani tidak stabil.

Perkembangan sektor ekonomi itu pada akhirnya sangat bergantung pada investasi masing masing sektor. Dari analisis pada BAB II dapat diketahui bahwa sebagian besar investasi mengalir ke sektor perdagangan. Investasi hanya akan hadir jika sektor bersangkutan menjanjikan cukup insentif. Arah investasi ini memberikan informasi tidak menariknya sektor sekunder apalagi sektor primer. Tidak mengherankan jika kemudian sektor primer tidak mampu tumbuh dan berkembang, dan akhirnya menjadi lingkaran setan.

4.1.3 Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Analisis permasalahan bidang pelayanan infrastruktur dapat dilihat pada Gambar 4.4 teridentifikasi bahwa terjadinya ketimpangan wilayah di Kabupaten Kebumen karena belum optimalnya kualitas infrastruktur.



Gambar 4.4
Kerangka Alur Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Belum optimalnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Kebumen disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:

1. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Dasar; kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi sebagai berikut:
 - Konektivitas wilayah strategis di Kabupaten Kebumen belum mantap. Wilayah strategis prioritas yaitu Kawasan Perkotaan, Kawasan Industri Kebumen, Kawasan Perbatasan, Kawasan Geopark Karangsembung-Karangbolong, Kawasan menuju rencana-tol, belum memiliki

dukungan infrastruktur jalan dan sarana prasarana yang memadai. Rencana pembangunan fisik jalan tol dari tahun 2021-2025 akan berdampak pada arus transportasi, sehingga perlu diantisipasi.

- Kualitas infrastruktur di Kebumen masih terbilang rendah dan perlu adanya penanganan terhadap berbagai kebutuhan infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarpras keciptakarya. Selain itu, penataan ruang di Kabupaten Kebumen juga masih kurang baik. Revisi RTRW Kabupaten Kebumen dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perkotaan masih belum tuntas dan perlu segera diselesaikan. Rencana detail tata ruang kawasan strategis kabupaten juga perlu disusun. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada Ruang Terbuka Hijau perkotaan, kawasan dengan fungsi lindung, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Selain itu juga diperlukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik.
- Pada kawasan perumahan dan permukiman, pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman masih kurang baik. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau publik pada kawasan perkotaan juga belum memenuhi target 20 persen. Sementara, masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni terutama masyarakat berpenghasilan rendah. RTLH yang tertangani pada Kabupaten Kebumen masih berada di bawah target nasional, masih terdapat

kawasan kumuh, dan *backlog* (jarak antara ketersediaan dan kebutuhan) perumahan yang masih tinggi.

- Layanan transportasi masih perlu ditingkatkan baik dari sarana lalu lintas maupun transportasi publik. Pada Kabupaten Kebumen, masih terdapat angka kecelakaan yang cukup tinggi dan menimbulkan kerugian secara material. Hal ini dikarenakan kesadaran pengendaraan keselamatan lalu lintas maupun ketersediaan sarana pengaman lalu lintasnya (rambu-rambu, lampu penerangan, palang pintu kereta api, perlintasan tanah sebidang dan tidak sebidang, dsb.) masih kurang.
- Angkutan umum masih perlu ditingkatkan terutama di wilayah perbukitan/perbatasan. Jumlah terminal angkutan perlu ditambah untuk mendukung transportasi publik. Kendaraan angkutan juga perlu diuji secara berkala agar aman, sehingga memerlukan kesiapan dan kualitas alat pengujian kendaraan bermotor serta perlunya peremajaan alat pengujian kendaraan bermotor.
- Keselamatan berkendara juga masih perlu ditingkatkan. Jalan kabupaten masih banyak yang berlubang, masih terbatas sarana pengaman lalu lintasnya (rambu-rambu, lampu penerangan, palang pintu kereta api, dan sebagainya).
- Angkutan perdesaan masih perlu ditingkatkan terutama di wilayah perbukitan/perbatasan. Kondisi jalur jalan kabupaten yang dilalui

trayek angkutan banyak yang rusak. Kendaraan angkutan juga perlu diuji secara berkala agar aman, sehingga memerlukan kesiapan dan kualitas alat pengujian kendaraan bermotor serta perlunya peremajaan alat pengujian kendaraan bermotor.

- Infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari masih sangat perlu ditingkatkan seperti sanitasi. Saat ini sanitasi lingkungan masih kurang baik. Sarana prasarana dan akses pelayanan air minum, sanitasi, dan air limbah domestik masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, utamanya bagi masyarakat miskin/kumuh. Upaya-upaya fasilitasi penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman perkotaan/ perdesaan dan masyarakat berpenghasilan rendah perlu ditingkatkan baik melalui skema bantuan sosial, insentif maupun pemberdayaan masyarakat.
- Penataan ruang masih kurang baik. Revisi RTRW Kabupaten Kebumen dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perkotaan masih belum tuntas dan perlu segera diselesaikan. Rencana detail tata ruang kawasan strategis kabupaten juga perlu disusun. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada Ruang Terbuka Hijau perkotaan, kawasan dengan fungsi lindung, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Selain itu juga diperlukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik.

- Perumahan dan kawasan permukiman masih kurang baik. Kurang baiknya pengelolaan persampahan. Masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Wajah dan trotoar perkotaan juga masih kurang baik. Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Terdapat *backlog* (jarak antara ketersediaan dan kebutuhan) perumahan yang masih tinggi, masih adanya kawasan permukiman kumuh.
- Infrastruktur TIK masih kurang. Rendahnya kualitas dan keamanan media penyimpanan data sistem layanan pemerintahan. Masih banyaknya celah keamanan sistem informasi pemerintah. Masyarakat belum mendapatkan kemudahan akses layanan berbasis internet.
- Mutu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif masih rendah. Kondisi jaringan irigasi dan drainase masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kondisi drainase dan trotoar juga masih perlu ditingkatkan untuk menurunkan resiko banjir atau genangan. Masih terdapat kelembagaan petani pemakai air dalam kondisi tidak aktif.

2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kurangnya tingkat kesiapsiagaan bencana:

- Kelembagaan lingkungan hidup masih rendah. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam

pengelolaan lingkungan hidup. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.

- Tingginya pencemaran lingkungan hidup dapat dilihat dari indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Kualitas air permukaan yang menurun meski masih berada di jangkauan target berkaitan juga dengan kondisi lahan kritis yang belum tertangani. Banyak terdapat industri kecil yang belum memiliki IPAL sehingga limbahnya langsung dibuang ke tanah atau mengalir ke sungai menyebabkan pencemaran, termasuk juga limbah domestik rumah tangga. Kualitas udara yang memburuk berkaitan pula dengan polusi udara yang disebabkan salah satunya oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan. Sedimentasi sebagian besar sungai dapat meningkatkan risiko banjir. Daya dukung lingkungan yang semakin menurun, sangat membutuhkan perbaikan lingkungan/hutan. Adanya indikasi rendahnya kualitas lingkungan terbukti dalam beberapa parameter kualitas lingkungan yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan (meningkatnya pencemaran air dan udara). Masih kurangnya pula usaha-usaha konservasi lingkungan hidup pada kawasan prioritas rencana jalan tol, kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong dan Kawasan Industri Kebumen.
- Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana masih kurang. Perlunya peningkatan koordinasi pengurangan dan penanganan bencana antara pemerintah dengan masyarakat.

- Mitigasi bencana masih kurang baik. Alat sensor, alat kebencanaan, gedung, sarana logistik untuk mitigasi bencana belum memadai. Perlunya pembentukan dan pembinaan desa dan relawan tangguh bencana. Masih perlunya kajian dan sosialisasi tentang eksploitasi SDA dan pembangunan permukiman yang memperhatikan faktor kebencanaan. Kurangnya sosialisasi/edukasi tentang kebencanaan semenjak usia dini/sekolah. Kuantitas dan kualitas SDM penanggulangan bencana perlu dibina dan dilatih secara berkala.
- Jumlah kekeringan meningkat. Masih kurangnya usaha-usaha konservasi sumberdaya air. Ketersediaan air baku perdesaan dan daerah perbukitan semakin menurun. Hilangnya sumber mata air menyebabkan semakin tingginya pemberian bantuan air bersih oleh Pemerintah Daerah.

4.1. 4 Bidang Tatakelola Pemerintahan

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik harus selalu diupayakan agar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) terwujud. Salah satu strategi yang telah dilakukan untuk mewujudkan *clean and good governance* adalah reformasi birokrasi. Menurut Eddy Cahyono Sugiarto (2020), perjalanan panjang reformasi birokrasi di

Indonesia kini telah memasuki fase ketiga atau fase terakhir dari peta jalan reformasi birokrasi, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Fase terakhir ini akan sangat menentukan keberhasilan peta jalan perubahan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju negara adil dan makmur serta sejahtera, dengan prakondisi terbangunnya birokrasi yang berkelas dunia, yaitu birokrasi yang baik dan bersih (*good and clean bureaucracy*).

Reformasi Birokrasi merupakan suatu keniscayaan dalam upaya membangun birokrasi kelas dunia, utamanya dalam mempersiapkan langkah strategis yang terukur guna memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan menopang jalannya pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Dengan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, maka diyakini akan mampu berperan menjadi faktor pengungkit dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Dengan kata lain, semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Dalam peta jalan (*roadmap*) reformasi birokrasi fase ketiga ini, pengelolaan reformasi birokrasi sejatinya dirancang dengan lebih mengutamakan empat asas utama yaitu fokus, prioritas, implementatif, dan kolaboratif.

Berbagai upaya terobosan telah dilakukan dalam upaya meningkatkan adaptasi kontekstual masing-masing instansi pemerintah, yang terus berlomba-lomba menciptakan *value* baru di lingkungan instansinya masing-masing,

kesemuanya diarahkan untuk tetap kondusif mendukung internalisasi perubahan *mind-set* dan *cultural set* dengan mengedepankan “*demand-based reform*”. Berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan mengembangkan/membangun sistem pelayanan terintegrasi (Mal Pelayanan Publik), Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (*e-Services*), dan juga inovasi pelayanan publik lainnya.

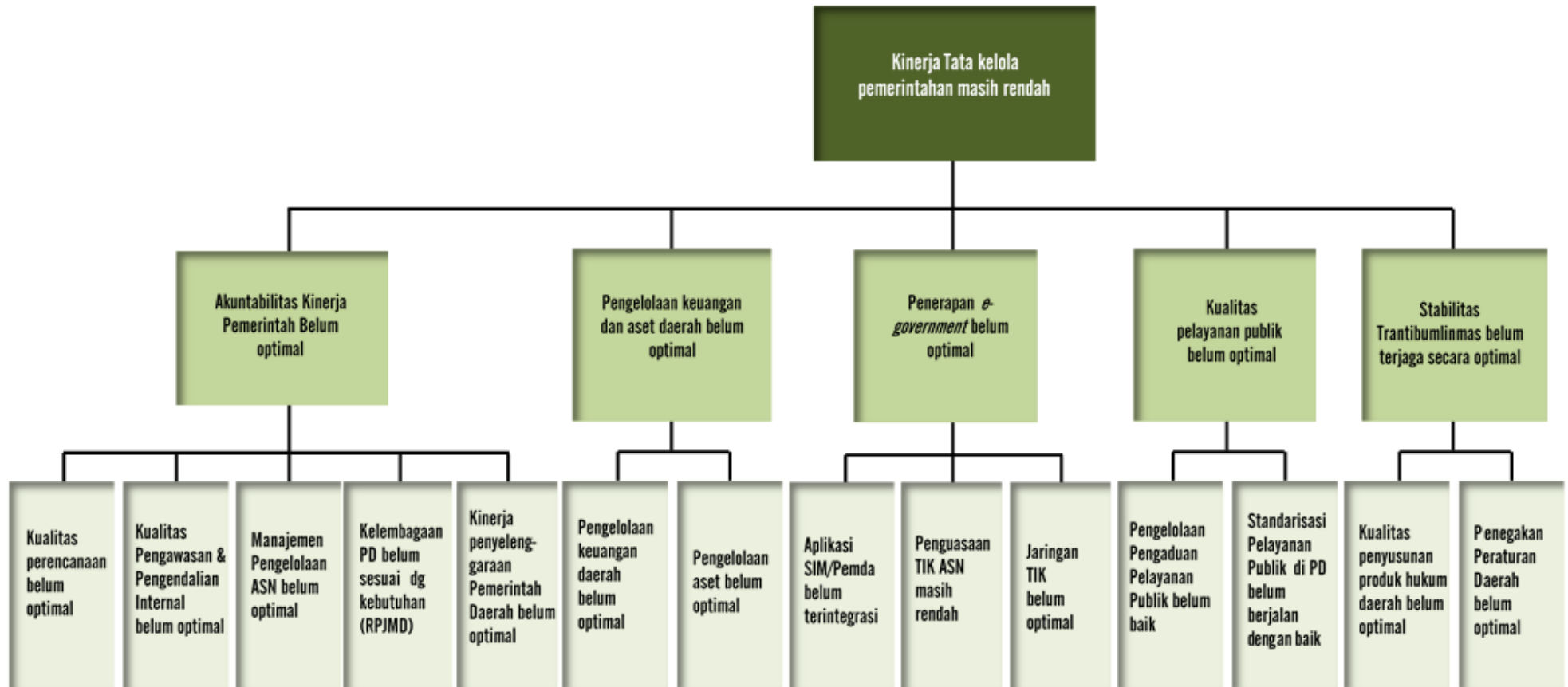
Sementara itu dari sisi kelembagaan dan struktur juga telah dilakukan berbagai langkah reformasi agar birokrasi kita lebih cepat bergerak dan cepat dalam mengambil keputusan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi yang diarahkan oleh pemerintah pusat antara lain menata ulang eselonisasi dengan penyederhanaan eselonisasi menjadi dua level saja, memperbanyak jabatan fungsional, serta mengedepankan fungsi daripada struktur. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang lincah dan adaptif terhadap perubahan.

Reformasi birokrasi menjadi faktor pengungkit yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. Daerah-daerah yang cenderung lebih cepat berkembang dan maju adalah daerah-daerah yang telah menerapkan dengan baik pelaksanaan reformasi birokrasi. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, serta dinamika masyarakat, dan peningkatan daya saing menjadi pendorong penerapan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi terbukti berdampak langsung kepada perbaikan kualitas kebijakan publik, transparansi untuk kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi mendorong terlaksananya pembangunan secara menyeluruh. Terwujudnya reformasi birokrasi juga dapat meyakinkan para investor untuk terus berinvestasi dan menanamkan modal di suatu daerah.

Kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat menggambarkan bagaimana kinerja tatakelola pemerintahan di daerah. Berdasarkan data yang tersaji pada Bab II (Tabel 2.166), nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 baru mencapai sebesar 57,33 dengan kategori CC. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tatakelola pemerintahan di Kabupaten Kebumen masih rendah. Ada beberapa aspek yang menyebabkan kondisi tersebut yaitu rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum optimal, penerapan *e-government* yang belum optimal, kualitas pelayanan publik belum optimal serta stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum terjaga secara optimal.

Secara detil kerangka permasalahan dalam bidang tatakelola pemerintahan terangkum dalam bagan berikut.



Sumber: data primer diolah

Gambar 4.5
Kerangka Alur Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Kebumen

1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Belum Optimal

Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat direpresentasikan dengan hasil evaluasi SAKIP. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP tahun 2019 yang tersaji pada Bab II (Tabel 2.168) menunjukkan bahwa nilai SAKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kebumen masih rendah yaitu 61,85. Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik namun masih perlu banyak perbaikan baik pada perencanaan, pengukuran kinerja, capaian kinerja, evaluasi maupun pelaporan. Ada beberapa aspek yang menyebabkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Kebumen masih rendah.

Pertama, kualitas perencanaan yang belum optimal, merujuk pada data yang ada di Bab II (Tabel 2.171) terlihat bahwa persentase konsistensi program pembangunan RPJMD terhadap RKPD masih 96,97 persen artinya masih ada inkonsistensi sebesar 3,03 persen. Di samping itu penjabaran kinerja belum dimanfaatkan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di tingkat penanggungjawab program dan kegiatan, dan juga belum dilakukan sampai dengan tingkat individu pegawai sehingga keselarasan pengukuran antara kinerja individu dan kinerja organisasi belum terkawal dengan baik. Artinya pengukuran kinerja belum sepenuhnya selaras dengan perencanaan. Perencanaan dalam tingkat perangkat daerah beberapa masih perlu disempurnakan terkait relevansi rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja.

Kedua, kualitas pengawasan dan pengendalian internal belum optimal. Berdasarkan data pada Bab II (Tabel 2.173) terlihat bahwa nilai maturitas SPIP Kabupaten Kebumen sebesar 3. Di samping itu nilai unsur Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi juga masih cukup rendah (Bab II Tabel 2.166). Hal ini disebabkan karena beberapa rekomendasi hasil evaluasi belum ditindaklanjuti, belum adanya tindak lanjut terhadap evaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan serta pemantauan belum didukung dengan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi, online, dan real time. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baru sebatas monitoring capaian program dan kegiatan secara fisik dan serapan anggaran, belum berbasis capaian hasil (*outcome*) program serta keselarasan program dan kegiatan dalam mendukung capaian sasaran strategis organisasi.

Ketiga, Manajemen Pengelolaan ASN belum optimal, merujuk data di bab II (Tabel 1.176, Tabel 2.177 dan Tabel 2.178) terlihat bahwa penempatan pejabat belum sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan ASN khususnya analisis kebutuhan dan penempatan SDM. Begitu pula evaluasi jabatan juga belum berdasarkan standar kompetensi jabatan dan ukuran kinerja belum sepenuhnya mengacu pada kinerja organisasi. Proses pengelolaan SDM tersebut sangat memengaruhi dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Keempat, Kelembagaan perangkat daerah belum sesuai dengan kebutuhan (RPJMD), masih ada sekitar 26,92 persen struktur kelembagaan yang belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen (Bab II Tabel 2.167). Kondisi ini menunjukkan bahwa arsitektur kelembagaan belum sesuai dengan arsitektur perencanaan pembangunan daerah. Pembentukan struktur kelembagaan di Kabupaten Kebumen belum sesuai dengan proses bisnis pembangunan daerah dalam RPJMD. Struktur kelembagaan merupakan sebuah kendaraan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan proses pembangunan. Struktur kelembagaan yang tidak sesuai dengan proses bisnis pembangunan daerah mengakibatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menjadi belum optimal.

Kelima, Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum optimal yang dapat dilihat dari nilai EKPPD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2019 (Bab II Tabel 2.170). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah cenderung fluktuatif. Adanya temuan kasus tindak korupsi di Kabupaten Kebumen tahun 2018 memengaruhi proses kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Akibatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menjadi rendah.

2. Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum optimal

Pencapaian kinerja tata kelola Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terlihat dari kinerja reformasi birokrasi maupun kinerja akuntabilitas pemerintah daerah tidak terlepas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kinerja

pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan data yang ada di Bab II (Tabel 2.172) kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah menunjukkan hasil yang positif walaupun belum optimal. Sejak tahun 2017 Kabupaten Kebumen berhasil mendapatkan opini BPK dengan predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (KLPD). Begitu pula realisasi pendapatan daerah yang terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (Bab II Tabel 2.172). Walaupun BPK memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, namun dalam proses pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan diantaranya dalam pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Temuan BPK juga menyampaikan bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini yang menyebabkan pengelolaan keuangan daerah belum optimal.

Pada sisi yang lain, manajemen pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kebumen masih memiliki berbagai kendala yaitu 47,10 persen aset pemerinah belum memiliki sertifikat dan beberapa aset pemerintah daerah juga belum jelas pemanfaatannya. Permasalahan aset ini disebabkan beberapa hal di antaranya pengelolaan aset daerah yang tidak jelas status hukumnya atau

bersengketa, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur, serta adanya tukar-menukar aset. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan aset di Kabupaten Kebumen belum optimal. Akibatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset juga menjadi tidak optimal.

3. Penerapan *e-government* belum optimal

Di era keterbukaan tata kelola pemerintahan saat ini tidak hanya *good governance* yang ingin diwujudkan namun *smart governance*, maka dibutuhkan dukungan teknologi dan informasi beserta kecepatannya. Disrupsi teknologi dan digitalisasi data dalam tata kelola pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan. Namun sampai saat ini penerapan *e-government* di Kabupaten Kebumen belum optimal mengakibatkan kinerja tata kelola pemerintahan menjadi tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kabupaten Kebumen yang masih rendah pada tahun 2019 (Bab II Tabel 2.134). Bahkan nilai indeks SPBE Kabupaten Kebumen tersebut masih cukup tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam

pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini yaitu *pertama*, aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah belum terintegrasi. Sampai tahun 2019 telah banyak aplikasi *e-government* yang telah diterapkan pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Bab II Tabel 2.137). Namun hampir sebagian besar aplikasi tersebut belum terintegrasi sehingga perangkat daerah masih harus menginput data di masing-masing aplikasi. *Kedua*, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Kebumen masih rendah. Hal ini terlihat dari data ASN yang memiliki kompetensi TIK baru sekitar 0,43 persen dari keseluruhan jumlah ASN yang ada. Persebarannya pun belum merata di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (bab II Tabel 2.139). *Ketiga*, Jaringan TIK belum optimal. Berdasarkan data kondisi infrastruktur digital Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2019 pada Bab II Tabel 2.138 terlihat masih terdapat 92,39 persen desa/kelurahan yang belum ada koneksi jaringan internetnya. Kondisi ini tentu saja akan menghambat penerapan *e-government* di Kabupaten Kebumen.

4. Pelayanan Publik yang Belum Optimal

Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu di era digital saat ini semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik

untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut. Berbagai keluhan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui media massa dan jejaring sosial dapat segera diproses, ditindaklanjuti dan diselesaikan. Penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat yang cepat menjadi sangat penting. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan publik akan berdampak pada kinerja tata kelola pemerintahan.

Secara umum kondisi pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik. Namun Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan 3 kabupaten/kota tetangga (Cilacap, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang) masih lebih rendah (Bab II Tabel 2.33). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kebumen belum optimal. Apabila kita mencermati data yang ada di Bab II, terlihat bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan publik di Kabupaten Kebumen belum optimal diantaranya standarisasi pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen belum berjalan dengan baik. Beberapa perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik belum melaksanakan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari kinerja waktu penyelesaian sebagai unsur pembentuk pelayanan yang masih rendah (Bab II Tabel 2.34). Begitu pula rata-rata tingkat penyelesaian pelayanan perizinan pada perangkat daerah di Kabupaten Kebumen relatif masih cukup

panjang (Bab II Tabel 2.187). Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Waktu pelayanan merupakan suatu unsur yang menjadi tolak ukur dari konsep pelayanan prima yang memprioritaskan kepuasan dalam pelayanan. Semakin pendek waktu yang diperlukan dalam pelayanan merupakan indikator utama dalam kepuasan masyarakat atas pelayanan. Rata-rata sistem pelayanan masih dilaksanakan secara manual dan seringkali pejabat pengampu memiliki banyak kepentingan sehingga tidak dapat menyelesaikan berkas administrasi pelayanan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini yang mengakibatkan standarisasi pelayanan publik belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Faktor kedua penyebab kualitas pelayanan publik belum optimal adalah pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang belum baik. Hasil survei persepsi pelayanan pada Bab II menunjukkan bahwa unsur respon memiliki nilai paling rendah. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Kebumen belum optimal. Respon pelayanan yang rendah di Kabupaten Kebumen lebih disebabkan karena kompetensi petugas pelayanan yang terbatas khususnya kemampuan komunikasi dan *responsiveness* dalam melayani pengaduan masyarakat.

5. Stabilitas Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belum Terjaga secara Optimal

Faktor eksternal yang memengaruhi kinerja tatakelola pemerintahan adalah kondisi stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat suatu daerah. Berdasarkan data yang tersaji pada Bab II Tabel 2.78, terlihat bahwa stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kebumen belum kondusif, karena masih terdapat angka kriminalitas. Bahkan jenis kasus narkoba cenderung meningkat pada tahun 2019. Sementara itu jumlah demonstrasi di Kabupaten Kebumen juga sangat fluktuatif, bahkan tahun 2017-2018 mengalami peningkatan (Bab II Tabel 2.186). Pada tahun 2019 juga terjadi beberapa konflik sosial yang menyita perhatian publik yaitu konflik warga dengan TNI di wilayah Urut Sewu dan konflik penolakan kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di wilayah Kecamatan Adimulyo. Kondisi seperti ini secara tidak langsung akan memengaruhi proses kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Ada beberapa aspek yang menyebabkan stabilitas keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen belum terjaga secara optimal diantaranya penegakan peraturan daerah yang belum optimal. Adanya beberapa penolakan dari masyarakat merupakan salah satu penyebab peraturan daerah tersebut belum bisa dilaksanakan. Salah satu contoh konkritnya adalah Peraturan Daerah terkait retribusi pelayanan pasar, yang sudah ditetapkan pada awal tahun 2019 ditindaklanjuti dengan Peraturan

Bupati pelaksanaannya pada akhir 2019, namun pada implementasinya di tahun 2020, terkendala karena adanya penolakan dari obyek sasaran retribusi pelayanan pasar tersebut. Terjadi tarik ulur dan negosiasi terhadap penerapan besaran tarif retribusi tersebut, sehingga potensi pendapatan yang seharusnya bisa didapatkan tidak tercapai.

Aspek kedua adalah kualitas penyusunan produk hukum daerah yang belum optimal. Hal ini tercermin dari nilai unsur penataan perundang-undangan yang memiliki nilai terendah pada komponen Indeks Reformasi Birokrasi (Bab II Tabel 2.166). Masih terdapatnya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Organisasi Perangkat Daerah dan belum dilaksanakan evaluasi atas sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen menyebabkan kualitas penyusunan produk hukum daerah belum optimal. Akibat lebih lanjut seringkali muncul berbagai demonstrasi terkait politik dan produk hukum tersebut. Kondisi yang belum stabil ini menyebabkan kinerja tata kelola pemerintahan menjadi tidak optimal.

4.2 Lingkungan Strategis

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di

masa yang akan datang. Isu strategis akan menjadi jembatan antara capaian pembangunan saat ini dengan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis yang terpetakan dengan baik akan membuat perencanaan pembangunan yang disusun dapat lebih tepat dalam mengatasi permasalahan. Identifikasi terhadap isu-isu strategis merupakan langkah awal untuk memetakan potensi-potensi permasalahan pembangunan di suatu daerah. Dengan teridentifikasinya isu strategis maka proses perumusan kebijakan akan memperoleh batu pijakan yang tepat, yaitu informasi mengenai hal-hal yang harus didahulukan penanganannya.

Isu strategis merupakan pengayaan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Isu strategis yang dihadapi bisa muncul karena perubahan lingkungan internal dan eksternal, karena perubahan mandat publik, perubahan lingkungan, seperti munculnya keputusan politik tertentu, seringkali berimplikasi terhadap mandat dan misi (Primadani *et al.*, 2013).

4.2.1 Lingkungan Internal

Konsep pembangunan suatu daerah dikembangkan melalui berbagai bidang seperti ekonomi, geografi, sosial dan politik. Pembangunan daerah pada umumnya mencakup berbagai dimensi pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap. Pembangunan daerah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi merupakan suatu proses perbaikan tatanan sosial, ekonomi, hukum, politik, lingkungan, yang bermuara pada kesejahteraan

rakyat (*social welfare*). Tujuan tersebut dapat dicapai apabila daerah mempunyai kondisi yang dinamis untuk menghadapi persaingan sehingga konsep pembangunan pada suatu daerah harus tetap mengacu pada kondisi daerah itu sendiri. Untuk kepentingan tersebut, maka analisis internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki daerah sebagai modal pembangunan, serta kelemahan yang dapat menjadi penghambat pembangunan.

Isu strategis internal pembangunan daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari:

1. Posisi geografis dan geoekonomi daerah

Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 1.281,11 km dan terdiri dari 26 kecamatan. Dari luas wilayah tersebut, sebesar 31,09 persen luas wilayah merupakan lahan pertanian. Jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Kebumen dapat dibedakan atas tanah alluvial, latosol, podsolik, regosol, glei humus, alluvial kelabu dan mediteran coklat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen pada sebagian wilayahnya tergolong cukup subur, sehingga dapat difungsikan sebagai lahan pertanian, walaupun terdapat pula wilayah yang kurang subur untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian seperti yang terdapat di Kecamatan Sempor, Karanggayam, Sadang, dan Alian (Bappeda Kab. Kebumen, 2004). Kecamatan-kecamatan ini terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Kebumen dan sebagian besar lahannya berupa pengunungan. Selain itu, Kabupaten Kebumen mempunyai sumberdaya yang

besar untuk mengembangkan sektor pertanian menjadi sektor unggulan, karena mempunyai 2 (dua) waduk yang cukup besar guna mengatasi masalah air. Kemampuan kedua waduk itu mampu mengairi areal persawahan seluas 38.000 ha. Dengan suplai air tersebut akan banyak komoditi pertanian yang bisa dikembangkan.

Pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal tersebut disebabkan sebagian besar penduduk negara-negara berkembang berada di daerah pedesaan. Oleh karena itu harus segera dicarikan langkah-langkah penyelesaiannya guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah pedesaan. Perlu diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif, maka pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar. Meskipun pertumbuhan industri bisa berjalan, tetapi pertumbuhan tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian.

Menurut Sukirno (2002) di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian penting sekali artinya. Sebagian besar produksi nasional merupakan hasil pertanian dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Perkembangan ekonomi sedikit demi sedikit akan mengurangi peranan sektor pertanian. Kemunduran peranan sektor pertanian dalam perekonomian antara lain disebabkan oleh permintaan terhadap hasil pertanian yang lambat perkembangannya.

Pertumbuhan pada lima sektor terbesar Kabupaten Kebumen dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa justru sektor pertanian perkembangannya tertinggal dibanding sektor lain seperti sektor pendidikan, industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa konstruksi. Sampai dengan tahun 2019, luas areal pertanian yang dimanfaatkan untuk budidaya hortikultura maupun komoditas perkebunan masih relatif rendah dan perkembangannya cenderung stagnan. Faktor rendahnya pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya komoditas-komoditas bernilai tinggi tersebut tentu saja juga menjadi penghambat tumbuhnya sektor pertanian di Kabupaten Kebumen karena faktor yang memengaruhi produktivitas pertanian tidak saja letak geografis, luas wilayah, cuaca, dan iklim, tetapi juga sumberdaya manusia (petani, nelayan, peternak, dan lain-lain), tingkat pengetahuan dan lain sebagainya. Ditinjau dari penyediaan sarana dan prasarana, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan petani masih sangat rendah, terutama untuk traktor (tingkat pemenuhan 38,89 persen) dan *handsprayer* (tingkat pemenuhan 6,07 persen). Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam upaya peningkatan produktivitas petani melalui mekanisasi pertanian.

Selain itu, Kabupaten Kebumen memiliki beberapa situs geosite di kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong yang telah menjadi objek edukasi (*geoeducation*) dan wisata (*geotourism*). Pada awalnya, sebagian besar geosite di bagian utara kawasan geopark tepatnya di Karangsambung, Sadang, dan Karanggayam, mempunyai fungsi untuk pembelajaran dan pengembangan

edukasi kebumian khususnya bagi mahasiswa dan pelajar. Tetapi dengan semakin berkembangnya wisata alam, fungsi geosite bertambah menjadi fungsi wisata kebumian (geowisata). Bentang alam, jenis dan kelangkaan batuan menjadi daya tarik geowisata untuk masyarakat umum. Berbeda halnya dengan geosite yang berada di bagian selatan kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong, fungsinya lebih berkembang sebagai objek wisata alam. Hal ini tercermin dengan banyaknya kunjungan wisata dari berbagai kalangan, tidak hanya mahasiswa dan pelajar saja, tetapi masyarakat umum jauh lebih banyak berkunjung ketempat ini.

Situs budaya di Kabupaten Kebumen terbagi dalam budaya *tangible* (kasat mata) dan *intangible* (tak kasat mata). Situs budaya *tangible* di Kabupaten Kebumen sebagian merupakan benda cagar budaya yang dilindungi, sebagian lagi merupakan benda yang diakui memiliki nilai sejarah. Potensi situs budaya intangible (tak kasat mata) berupa kesenian, tarian khas Kebumen, dan lain-lain. Selain memiliki potensi pariwisata yang tinggi, aktivitas geologi di Karangsambung menyimpan beberapa permasalahan karena belum semua pemangku kepentingan yang berada dalam ranah ini memiliki *sense of belonging*. Aktivitas geologi masih bersifat elitis. Terlihat masyarakat lokal acuh terhadap praktik geologi yang berlangsung.

Dari analisis yang telah dilakukan atas data dan permasalahan pembangunan ekonomi, dapat diketahui bahwa masalah krusial yang masih dihadapi oleh kabupaten Kebumen adalah masih rendahnya tingkat

kesejahteraan masyarakat. Sumber dari rendahnya kesejahteraan itu adalah karena belum terhubungnya sektor sekunder dan tersier dengan sektor primer. Keterputusan itu menyebabkan sektor sekunder dan tersier tidak mampu menarik sektor primer dimana penduduk banyak menggantungkan hidupnya.

Isu keterputusan antar sektor menjadi sangat strategis untuk dikemukakan. Untuk itu upaya untuk mencitakan keterkaitan antara sektor primer (pertanian) sekunder (industri) dan tersier (perdagangan dan jasa) harus menjadi arus utama kebijakan pembangunan ekonomi Kebumen. Perdagangan sebagai urat nadi dari arus barang dan jasa harus menjadi kunci untuk dilancarkan. Lancarnya arus perdagangan akan dengan cepat meningkatkan nilai tambah, baik produk konsumsi maupun produksi. Sejalan dengan itu maka pada sisi *supply* penguatan kapasitas masing masing sektor, utamanya yang bergerak pada pengembangan ekonomi lokal juga menjadi strategis untuk dikemukakan. Penguatan kelembagaan ekonomi local diikuti dengan penguatan kapasitas kewirausahaan diharapkan akan menjadi pendorong bagi masing masing sektor untuk tumbuh dan menciptakan saling keterhubungan. Untuk membangun kekuatan kelembagaan ekonomi local, maka arus investasi juga diarahkan secara merata pada semua sektor. Adalah investasi yang emnajdi sumber dari pertumbuhan yang terjadi. Namun investasi tidak akan hadir ketika sektor yang bersangkutan tidak menjanjikan insentif yang memadai.

2. Kondisi Demografi

Dinamika kependudukan (demografi), tidak hanya ditentukan dari sisi jumlah tetapi yang sangat menentukan adalah sisi kualitasnya/capaian tingkat pendidikan berdasar kelompok jenjang pendidikan tertentu. Struktur kependudukan Kabupaten Kebumen yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Namun angka putus sekolah mengalami peningkatan selama tahun 2016-2019 di jenjang SD/MI. Sementara pada jenjang SMP/MTs kembali mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Pasar tenaga kerja kemudian diisi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan tingkat kompetensi yang tidak memadai. Rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap angka sengketa pengusaha-pekerja karena tidak memiliki *bargaining position* yang baik.

Berdasarkan data Sakernas tahun 2019, Penduduk Bekerja menurut pendidikan tertinggi didominasi oleh lulusan SD sebesar 32,69 persen, SMP sebesar 20,27 persen, Tidak/Belum Sekolah atau Tamat SD 17,89 persen, SMK 14,85 persen, dan SMA 8,64 persen. Jumlah sengketa pengusaha-pekerja meskipun jumlahnya tidak banyak namun kasusnya cenderung meningkat. Penduduk Bekerja menurut lapangan kerja utama masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan 33,71 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan restoran dan perhotelan 24,37 persen, serta sektor manufaktur 21 persen. Sektor-sektor tersebut berkarakter padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, namun kelemahannya sektor-sektor

tersebut tidak memberikan upah yang layak. Kepatuhan penerapan UMK belum dapat terpenuhi.

Di sisi yang lain, ketersediaan lapangan kerja menjadi indikator penting dalam menekan tingkat pengangguran terbuka. Beberapa permasalahan yang memengaruhi tingkat pengangguran adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Angkatan kerja yang ada sebagian besar tidak menguasai teknologi informasi, *mismatch* kompetensi dan kualifikasi jurusan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja, sebagian besar angkatan kerja bekerja pada sektor informal, serta tingkat urbanisasi yang tinggi karena keterbatasan lapangan kerja dan masalah upah. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 adalah 4,76 persen didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 67,41 persen dari total pengangguran terbuka atau 19.768 penduduk. Jika dipilah jumlah pengangguran SMA sebanyak 7,38 persen atau sejumlah 2.164 orang, dan SMK sebanyak 60,03 persen atau 17.604 orang dan 16.503 diantaranya sedang mencari pekerjaan. Hal ini menunjukkan kondisi pengangguran di Kabupaten Kebumen adalah pengangguran yang berpendidikan. Jika dilihat pada komposisi Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kelompok usia dapat dilihat jika di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu lima tahun rata-rata didominasi pada rentang usia 20-24 tahun sebesar 42,92 persen, dan 25-29 tahun sebesar 16,28 persen.

Pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten Kebumen secara umum progress peningkatannya cukup baik, namun jika dibandingkan dengan capaian

provinsi dan nasional masih jauh tertinggal. Peningkatan IPM yang cukup lambat pada komponen Angka Harapan Hidup dan Angka Harapan Sekolah menggambarkan pembangunan sumberdaya manusia belum optimal. Di sisi lain meskipun pertumbuhan komponen pengeluaran perkapita cukup bagus rata-rata pertumbuhannya namun angkanya masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, pengeluaran perkapita Kabupaten Kebumen masih sangat rendah sebesar Rp 8.976.000/tahun.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kebumen mencapai 73,22 tahun lebih baik jika dibandingkan dengan angka nasional walaupun berada di bawah angka provinsi Jawa Tengah. Namun angka kesakitan baik penyakit menular utama maupun penyakit tidak menular di Kabupaten Kebumen tinggi. Hasil Susenas tahun 2019 menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 20,19 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 13,16 persen. Tiga penyakit menular utama yang cukup signifikan adalah temuan kasus baru HIV, TB dan DBD, sedangkan penyakit tidak menular utama dengan kasus yang cukup tinggi adalah Diabetes Melitus, hipertensi, asma, dan kanker yang cenderung meningkat kasusnya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Selain itu kinerja AKI, AKB dan penanganan stunting memengaruhi lambatnya peningkatan angka harapan hidup. Beberapa isu peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat adalah pada sektor kesehatan adalah peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan bagi seluruh

masyarakat. Selain itu pencapaian *universal health coverage* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Persentase kepemilikan jaminan kesehatan di Kabupaten Kebumen sebesar 82,86 persen pada tahun 2019. Namun berdasarkan data Susenas 61,28 persen penduduk yang mengalami kesulitan kesehatan justru tidak menggunakan jaminan kesehatan yang dimiliki.

Secara umum fasilitas pelayanan kesehatan yang ada cukup memadai, namun rasio sumberdaya manusia kesehatan, sarana/prasarana pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum memenuhi standar ideal. Tantangannya kemudian adalah optimalisasi pelayanan kesehatan dasar dengan jaringan yang telah terbangun hingga level desa seperti bidan desa, PKD untuk meningkatkan promosi kesehatan, penggalakan GERMAS dan PHBS, penerapan pola asuh dan edukasi pemenuhan gizi mulai dari 1000 HPK menjadi titik awal penyiapan SDM berkualitas perlu dioptimalkan mengingat kesadaran masyarakat akan penerapan pola hidup bersih dan sehat masih kurang.

3. Lingkungan Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya di Kabupaten Kebumen, antara lain juga masih ditunjukkan oleh tingginya persentase penduduk miskin. Kemiskinan di Kebumen sampai tahun 2019 sebesar 16,82 persen, angka ini bila dibandingkan dengan target RPJMD 2016-2021 sudah di atas target, dimana target RPJMD tahun 2019 sebesar 18,92 persen. Namun bila dibandingkan dengan angka

kemiskinan di kabupaten-kabupaten tetangga, Jawa Tengah dan Nasional angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen tercatat paling tinggi se-Jawa Tengah. Beberapa upaya telah dilakukan Kabupaten Kebumen untuk menekan angka kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, bantuan sosial, maupun pemberian stimulus ekonomi. Namun demikian akselerasi penurunan tingkat kemiskinan masih belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.

Karakteristik penduduk dengan 40 persen penduduk pendapatan terbawah antara lain sebagian besar angkatan kerja bekerja tidak penuh atau paruh waktu, bekerja pada sektor pertanian, perikanan, petani dengan lahan garapan yang sempit bahkan sebagai petani penggarap yang tidak punya lahan, serta bekerja pada sektor informal. Rendahnya akses pelayanan dasar baik pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan, serta rendahnya akses permodalan dan kesempatan berusaha menjadikan masyarakat tidak memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang layak. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang dominan PDRB Kabupaten Kebumen. Sektor ini memiliki karakteristik padat karya, namun upah yang rendah atau lahan yang tidak cukup luas dan nilai tukar petani yang kecil mengakibatkan sebagian penduduk miskin Kabupaten Kebumen adalah petani. Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian menjadi penting dalam upaya peningkatan pendapatan petani Kabupaten Kebumen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami tren positif, namun pada tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat menjadi 2,58 persen. Artinya jarak antara pendapatan penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan semakin jauh, peningkatan garis kemiskinan tidak diikuti peningkatan pendapatan secara linier. Demikian halnya dengan ketimpangan pendapatan antara masyarakat miskin dalam 3 tahun terakhir mengalami tren positif namun ketimpangan kembali meningkat pada tahun 0,65 persen pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 diasumsikan akan memperparah kondisi kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan data struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga yang dirilis oleh BPS pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Kebumen 48,05 persen konsumsinya adalah untuk makanan dan minuman, 20,56 persen untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya, serta 10,9 persen untuk perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan.

Berdasarkan data penanganan PMKS tahun 2015-2019 menunjukkan kinerja pelayanan yang positif. Pada tahun 2018 persentase PMKS yang tertangani sebesar 67,25 persen dan meningkat menjadi 70,65 persen pada tahun 2019. Jumlah PMKS yang meningkat antara lain perempuan rawan sosial

ekonomi, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan keluarga bermasalah sosial psikologis.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial diharapkan dapat membantu menangani masalah kesejahteraan sosial. Namun, jika dibandingkan dengan penyandang masalah kesejahteraan yang cukup besar jumlah PSKS yang dimiliki di Kabupaten Kebumen belum cukup memadai. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dimiliki sebesar 71 orang, tagana 45 orang, pendamping PKH 259 orang, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat 460.

Persoalan ketimpangan gender terdapat dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari struktur sosial, politik, ekonomi, dan kultur masyarakat. Realita kondisi sosial-budaya, interpretasi agama dan kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan di masyarakat selama ini tidak menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki. Tingkat kekerasan pada perempuan dan anak cenderung di Kabupaten Kebumen meningkat. Sistem perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dan anak telah dirintis di Kabupaten Kebumen melalui P2TP2A yang jaringannya dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait sampai level desa. Namun, rendahnya keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus yang terjadi di sekitarnya menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es.

4. Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen adalah kinerja tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal tersebut yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah masih rendah, kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal, penerapan *e-government* belum optimal, kualitas pelayanan publik belum optimal serta stabilitas keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum terjaga secara optimal.

Pada sisi yang lain, saat ini tata kelola pemerintahan dan juga seluruh aspek kehidupan masyarakat, menghadapi isu global berbentuk pandemi COVID -19. Ada hikmah di balik pandemi COVID -19 yang melanda dunia dan Indonesia bahkan Kabupaten Kebumen, utamanya dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi, pemberlakuan sistem *work from home* bagi ASN menandakan babak baru *shifting* cara kerja atau memasuki situasi yang “tidak normal” dalam pelaksanaan tugas ASN sehari-hari. Pemanfaatan informasi teknologi dan *internet of thing* menjadi “keterpaksaan” baru, telah terjadi perubahan secara masif budaya kerja dan cara berpikir ASN. Beberapa ahli meramalkan pasca pandemi COVID-19, seluruh dunia akan menghadapi apa yang disebut sebagai *The New Normal*. Suatu kondisi global yang merupakan akumulasi bagaimana umat manusia berperilaku menuju kondisi normal yang baru. Salah satu kondisi *the new normal* adalah percepatan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik tatakelola pemerintahan,

yang lebih berorientasi pada hasil dengan mengedepankan pemanfaatan informasi teknologi dan kecepatannya.

Kondisi Pandemi COVID-19 telah mengubah paradigma bekerja ASN Kabupaten Kebumen menjadi lebih efektif dan efisien, lebih berorientasi pada hasil daripada prosedural, serta percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi kebutuhan pada semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kebumen sekarang sudah umum melakukan *tele-meeting* atau *tele-conference* dan pengadaan rapat-rapat koordinasi yang menggunakan teknologi digital tanpa dibatasi ruang dan waktu dan lokasi sehingga lebih efektif efisien dari sisi waktu dan biaya. Hal ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahannya.

Penerapan *e-governance* yang terintegratif merupakan tantangan kedepan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan. Berbagai aplikasi *e-government* (*e-planning, e-budgeting, system delivery*, penatausahaan, *e-controlling, e-reporting, e-monev* serta aplikasi lainnya) yang saat ini sudah diterapkan di Kabupaten Kebumen walaupun belum terintegrasi juga merupakan potensi tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan *smart governance*. Kedepan, paradigma orientasi bekerja dalam tata kelola pemerintahan telah berubah dari *network government* menjadi *collaborative governance*. Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah

publik sendirian. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kebumen diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mampu menggerakkan investasi, menciptakan lapangan kerja dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

4.2.2 Lingkungan Eksternal

Dinamika eksternal yang akan datang harus dapat diidentifikasi dengan baik agar pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Beberapa faktor eksternal yang dapat menjadi peluang dalam pembangunan Kabupaten Kebumen ke depan adalah:

1. Kondisi Geoekonomi Global

Kondisi geoekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Kondisi geoekonomi ke depan tentunya perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat, agar peluang yang terbuka dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan bidang ekonomi perlu

diarahkan untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada transformasi industri yang berkelanjutan, sehingga perekonomian Indonesia akan berbasis kepada nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Perkiraan pelemahan harga komoditas di pasar internasional menjadi tantangan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor Indonesia ke arah produk manufaktur. Sementara itu, peningkatan jaringan rantai pasok global dan regional pun perlu dimanfaatkan oleh Indonesia melalui kebijakan kondusif, yang dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pengusaha domestik termasuk usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dalam rantai pasok internasional.

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan daya saing perekonomian ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan rente ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah di Indonesia.

Selain itu, pembangunan manusia Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional dan global. Secara geografis Indonesia terletak di jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan timur Asia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata kawasan lain di dunia. Ketika tren pertumbuhan ekonomi dunia jangka panjang (1970–2000) mengalami penurunan, tren pertumbuhan ekonomi kawasan timur Asia menunjukkan peningkatan pusat gravitasi perekonomian global. Secara geografis, kedudukan Indonesia berada di tengah-tengah kawasan timur Asia yang mempunyai potensi ekonomi sangat besar. Kawasan timur Asia (termasuk Asia Tenggara) memiliki jumlah penduduk sekitar 50 persen dari penduduk dunia. Cina memiliki sekitar 1,3 miliar penduduk, sementara India menyumbang sekitar 1,2 miliar orang, dan ASEAN dihuni oleh sekitar 600 juta jiwa (MP3EI, 2011). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN maupun internasional.

Di sisi hubungan internasional, diplomasi ekonomi internasional diarahkan untuk mengedepankan kepentingan nasional yang dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas maupun kemitraan ekonomi akan dilakukan

secara selektif, yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Visi Indonesia 2045

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, dimana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

3. RPJPN 2005-2025

Sejalan dengan tahapan yang diamanatkan RPJPN tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh

SDM berkualitas dan berdaya saing. Pada periode ini struktur perekonomian diharapkan sudah semakin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, sumberdaya alam (seperti kelautan, pertanian, dan pertambangan), dan sektor jasa. Kondisi berbangsa dan bernegara juga sudah semakin maju dan sejahtera yang didukung oleh diselenggarakannya jaringan transportasi, telekomunikasi dan informatika, elektrifikasi, sanitasi dan air bersih serta irigasi yang andal bagi seluruh masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dengan demikian, kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung dapat terpenuhi dan kota tanpa permukiman kumuh dapat diwujudkan.

4. Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai target dan indikator SDGs melalui pengintegrasian target tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur berkontribusi dalam pencapaian Tujuan 2 “Tanpa Kelaparan” melalui pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Tujuan 6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak” diwujudkan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi. Kemudian, Tujuan 7 “Energi Bersih dan Terjangkau” diwujudkan dengan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Tujuan 9 “Industri, Inovasi dan

Infrastruktur” dan Tujuan 11 “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan” diwujudkan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, serta pengembangan konektivitas dan transportasi umum massal.

Dalam perspektif NKRI, kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 akan memengaruhi pembangunan Kabupaten Kebumen. Di dalam konteks perencanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan baik jangka panjang maupun jangka menengah perlu sekali memperhatikan sasaran dari RPJMN dan sasaran prioritas pertumbuhan ekonomi yang diterjemahkan di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2025 adalah mencapai pendapatan perkapita Indonesia setara dengan *middle income* negara-negara di dunia dengan tingkat pengangguran di bawah 5 persen, jumlah rakyat miskin di bawah 5 persen penduduk, serta melakukan peningkatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Pembangunan Gender (IPG) negara. Hal ini menjadi beberapa agenda yang memerlukan perhatian di dalam proses perumusan kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan bidang transportasi, mengingat target pertumbuhan ekonomi negara akan sangat berkorelasi dengan peningkatan aksesibilitas antarnegara, antarpulau, maupun antarwilayah.

Secara khusus, isu mengenai pembangunan manusia menjadi salah satu poin penting dalam agenda pemerintah. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam strategi pembangunan nasional. Komitmen positif pemerintah juga ditunjukkan dengan menjadikan TPB sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyelarasan target-target TPB di tingkat nasional tersebut mencakup: (1) program, (2) kegiatan dan indikator yang dapat mengukur dan mengevaluasi, dan (3) indikasi dukungan pembiayaannya.

Dukungan terhadap pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia diwujudkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 mengenai Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres ini menetapkan 17 tujuan, 169 target dan 316 indikator yang selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Secara eksplisit, dari 319 indikator TPB nasional, pembangunan manusia tidak langsung menjadi tujuan. Namun, selanjutnya terdapat beberapa target yang terkait pembangunan manusia yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan.

Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Pada target 3.1, tertulis komitmen bahwa pada tahun 2030, rasio Angka Kematian Ibu akan menurun hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Target ini bertujuan mengakhiri

kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, Umur Harapan Hidup Saat Lahir akan menjadi salah satu indikator TPB. Umur harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator TPB yaitu angka kematian neonatal dapat ditekan.

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4.1, terdapat komitmen untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Pada target ini, beberapa indikator yang menjadi sasaran antara lain:

- Proporsi anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan
- Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Apabila target 4.1 dapat dicapai, maka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang termasuk indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat, sebab angka kelulusan pendidikan dasar dan menengah berdampak terhadap Harapan Lama Sekolah. Dalam jangka panjang, Rata-rata Lama

Sekolah juga akan meningkat karena peningkatan kapasitas pendidikan dasar dan menengah.

Tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Secara lebih spesifik, pada dasarnya arah kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mengarah pada upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Tentunya ketiga bidang pembangunan harus dilaksanakan secara holistik agar tidak terjadi kesenjangan antarbidang pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4-6,0 persen per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI perkapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD 5.550–5.930 perkapita pada 2024. Kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan perbaikan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 6,5-7,0 persen dan 4,0-4,6 persen pada 2024. Tingkat Rasio Gini menurun menjadi 0,370-0,374 pada 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumberdaya manusia.

Tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen V Tahun 2021-2024 harus sejalan dengan RPJMN IV Tahun 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Secara khusus, agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang menyinggung bidang sosial berkonsentrasi pada pembangunan manusia pada agenda ketiga, yaitu meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Isu strategis nasional yang berpengaruh terhadap pengembangan permukiman saat ini adalah mengimplementasikan konsepsi pembangunan berkelanjutan serta, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, percepatan pencapaian target MDGs 2020 yaitu penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan, perlunya dukungan terhadap pelaksanaan program-program direktif Presiden yang tertuang dalam MP3EI dan MP3KI, Meminimalkan penyebab dan dampak bencana sekecil mungkin, meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan, dan bertambahnya kawasan kumuh, belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur permukiman yang sudah dibangun, perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam pengembangan kawasan permukiman, belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan permukiman. Ditopang oleh belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Kegiatan pengembangan permukiman terdiri dari pengembangan permukiman kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Pengembangan permukiman kawasan perkotaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman baru dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sedangkan untuk pengembangan kawasan perdesaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman perdesaan, kawasan pusat pertumbuhan, serta desa tertinggal.

5. *New Urban Agenda (NUA)*

New Urban Agenda (NUA) merupakan komitmen global, sesuai dengan kesepakatan yang disusun oleh delegasi dari 140 negara, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*Sustainable Urbanization*). NUA berupaya untuk mendorong aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi. Komitmen global ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan perkotaan di tingkat nasional dan lokal, agar kemudian dapat diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.

Secara garis besar, NUA menawarkan pendekatan baru dalam membangun, mengelola, dan menata suatu kota. Sesuai dengan tujuan utamanya, *Cities for All*, NUA berkomitmen untuk mendorong pembangunan kota dan permukiman yang lebih inklusif, non-diskriminatif, serta berkelanjutan. Hal ini memiliki implikasi lanjutan terhadap cara pandang dari urbanisasi itu sendiri, terutama dalam konteks migrasi penduduk desa ke kota. Migrasi penduduk tersebut tidak bisa dicegah, bahkan dilarang, karena sama artinya dengan melarang pendatang untuk mencari kesempatan yang lebih baik di kota. Oleh karenanya, semangat inklusivitas dalam pembangunan kota perlu diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan kota untuk semua, termasuk bagi para pendatang.

Dalam mengimplementasikan NUA di Indonesia, perlu diperhatikan bahwa kondisi perkotaan di Indonesia sangat beragam. Dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa terdapat tiga kategori kawasan perkotaan: kecil, sedang, besar, dan metropolitan. Sampai dengan tahun 2011, Bappenas mencatat bahwa terdapat 11 kota kecil, 56 kota sedang, 17 kota besar, dan 14 metropolitan di Indonesia. Walaupun NUA tidak memberikan penekanan khusus terhadap berbagai ukuran kota, baik dari segi besaran, lokasi, dan jumlah penduduk, namun perlu memahami adanya perbedaan dan klasifikasi perkotaan tersebut.

6. Dampak COVID-19

Penyebaran COVID-19 yang sudah dapat dikendalikan di beberapa

negara, termasuk Tiongkok, berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di saat kurva mulai melandai yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan pasien COVID-19, kondisi di Indonesia memperlihatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan pasien COVID-19 yang cukup signifikan. Secara umum, dampak COVID-19 memang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Perlambatan kinerja industri manufaktur yang diiringi oleh masih melambatnya ekonomi secara global yang berimbas pada penurunan permintaan, secara otomatis akan menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Tiongkok untuk beberapa kuartal ke depan tampaknya akan mengalami kontraksi ekonomi dimana kegiatan produksi dan produktivitasnya kemungkinan menurun hingga 20-25 persen. Sehingga ekonomi Tiongkok kemungkinan hanya tumbuh di kisaran 5 persen (Damuri dan Herawan, 2020).

Ada ketidakpastian tentang epidemiologis perkembangan virus, selama berapa lama dan sejauh mana ini akan berpengaruh pada rutinitas, limpahan ke ekonomi global, dan tentang bagaimana pasar keuangan mencerna berita, rumor, dan data. Hubungan timbal balik antara tanggapan otoritas, bisnis, konsumen, dan pasar menjadi rumit dan sulit untuk dimodelkan (Man, 2020), akan terjadi evolusi data dan prospek ke depan. Pandemi ini tidak saja menjadi kejutan pada pasokan, tetapi juga bisa menjadi guncangan pada permintaan sehingga dapat memukul sektor-sektor tertentu, ini semua tergantung pada bagaimana konsumen berperilaku. Banyak konsumsi saat ini dapat disebut "konsumsi sosial"—hal-hal yang membuat konsumen berhubungan dengan

orang lain—seperti pergi ke kafe, ke restoran, berwisata, dan lain sebagainya. Selain itu, sektor lain yang terpengaruh adalah yang menyediakan layanan konsumsi yang melibatkan kontak pribadi (misalnya, potong rambut) dan dapat dengan mudah ditunda, juga mungkin akan terkena. Kekhawatiran orang akan tertular COVID-19 yang hanya dapat diatasi dengan mengurangi aktivitas konsumsi sosial ini, membuat dampak ekonomi akan lebih parah daripada angka yang dibahas sebelumnya. Salah satu alasan keparahan tersebut adalah karena sebagian merupakan kerugian permanen (Wern-Lewis, 2020).

Dari sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (*global supply chain*). Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran COVID-19 secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang (Damuri dan Herawan, 2020).

Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga

akan terdampak akibat penyebaran COVID-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas industri manufaktur di Indonesia masih bergantung pada impor, yang salah satunya berasal dari Tiongkok. Kegiatan produksi di Tiongkok pun terganggu akibat kasus virus ini. Perlu diketahui bahwa struktur impor Indonesia memang didominasi bahan baku/penolong yang angkanya mencapai di atas 70 persen. Buah simalakama antara struktur ekspor dan impor inilah yang kemungkinan besar akan berdampak besar pada kinerja industri manufaktur di Indonesia (Damuri dan Herawan, 2020).

Untuk menghadapi situasi ini, kita harus belajar dari perpecahan kecil yang saat ini menjangkiti Amerika Serikat. Perpecahan tidak boleh terjadi, perlu untuk menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk bertindak bersama dan untuk menunjukkan solidaritas. Selain menggunakan fleksibilitas peraturan fiskal untuk menambah ruang bagi pengeluaran, juga harus mempertimbangkan dana pereda bencana umum untuk membantu wilayah dan masyarakat yang terkena dampak. Semangat gotong royong menjadi modal sosial dapat menjadi strategi terbaik dalam menghadapi ketidakpastian akibat COVID-19. Dalam nada yang sama, pemerintah dan pembuat kebijakan harus

sangat berhati-hati untuk mengirim pesan kohesi, tanggung jawab dan kepemimpinan untuk mencegah rasa takut dan panik. Kita dapat belajar dari Singapura dalam hal ini. Singapura telah berjuang melawan penyakit ini sejak Tahun Baru Imlek; itu sangat terhubung dengan Cina dan memiliki lonjakan kasus sejak awal, dan berhasil menekan penyebarannya. Sejak awal, pemerintah Singapura berkomunikasi secara luas dan menyerukan agar warga berperilaku secara bertanggung jawab dan saling menghormati. Pada saat yang sama, transparan dan jujur tentang tindakan yang harus diambil jika eskalasi tingkat ancaman lebih lanjut.

Secara keseluruhan, banyak yang akan bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola. Pandemi ini bisa menjadi krisis ekonomi dalam dimensi global dan ancaman bagi globalisasi, atau juga bisa jadi momen agar pembuat kebijakan mampu mengelola respons krisis bersama dan bahkan berhasil membangun kembali kepercayaan (*Centre for Economic Policy Research* (CEPR), 2020)

4.3. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan dan analisis dari permasalahan pembangunan dan isu/kebijakan internasional, nasional dan regional, maka isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas

Tujuan pembangunan sumberdaya manusia adalah guna mencetak sumberdaya manusia unggul yang produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, maka diperlukan peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan manusia antargender di segala bidang. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat dan selaras dengan pencapaian sasaran tujuan pertama dalam sasaran SDGs/TPB mengurangi setidaknya setengah dari kemiskinan. Arah kebijakan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dalam RPJPD 2020-2025 akan dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin, peningkatan tingkat pendapatan penduduk miskin, peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan harkat hidup dan martabat penduduk miskin.

Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak penting untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam setiap sektor pembangunan dan menciptakan generasi penerus yang dapat tumbuh dengan optimal. Capaian indikator keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan penting cukup rendah, derajat kesehatan perempuan tidak lebih baik jika dibandingkan dengan laki-laki. Tingkat partisipasi kerja perempuan pun rendah, walaupun bekerja kontribusi pendapatan perempuan jauh tertinggal

dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, termasuk dalam kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif belum dapat terpenuhi. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum dapat merespon kebutuhan pasar kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. Perlu upaya sistematis dalam peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dengan meningkatkan peran dan kerja sama industri/swasta dalam penyelarasan program studi pada pendidikan tinggi maupun sekolah vokasi dengan kebutuhan pasar. Selain itu kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.

Selain dalam rangka membentuk SDM kompeten dan unggul, peningkatan derajat pendidikan dan ketrampilan dapat meningkatkan peluang keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja. Secara umum fasilitas pelayanan pendidikan yang dimiliki cukup memadai, ketersediaan tenaga pendidik maupun sarpras pendukung pembelajaran cukup memadai termasuk layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Tantangannya kemudian adalah menekan angka putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk kembali belajar. Selain itu peningkatan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Kabupaten Kebumen mempunyai peluang emas dengan ditetapkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung dan Bregasmalang. Berdasarkan

perpres tersebut Kabupaten Kebumen berperan sebagai kawasan yang dapat meningkatkan nilai tambah pada Kawasan Bregasmalang yang diprioritaskan pada Kawasan Industri Brebes dalam bingkai Kawasan Barlingmascakeb. Kabupaten Kebumen dapat berperan sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang dalam aspek industri, perdagangan/jasa, penyuplai bahan baku pertanian dan tenaga kerja.

Dalam rangka optimalisasi peran Kabupaten Kebumen sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang, pemerintah pusat merencanakan program di Kabupaten Kebumen yaitu kawasan industri, industri gula semut, industri garam, industri perikanan dan ekonomi rakyat. Peluang tersebut harus diantisipasi dengan penyiapan tenaga kerja yang trampil, kompeten, menguasai Iptek dan *soft skill* yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, dengan mencetak SDM unggul, produktif dan berdaya saing maka Kabupaten Kebumen dapat menangkap peluang dari Perpres 79 tahun 2019 untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean dimana pasar tenaga kerja menjadi *borderless*. Tingkat persaingan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen tidak lagi pada lingkup regional maupun nasional namun global.

Selain terobosan melalui program-program penanggulangan kemiskinan, perlu upaya sistematis dalam pengendalian garis kemiskinan melalui pengendalian inflasi, serta pemantauan jalur-jalur distribusi dan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu pentingnya membangun sinergitas

dengan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun pemerintah dalam melakukan aksi kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi

Manfaat pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan output/kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian bertambah. Selain itu, pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas, karena tersedia lebih banyak barang-barang maupun jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan akan mengurangi jurang perbedaan (kesenjangan) ekonomi.

Pada analisis sebelumnya telah diketahui bahwa Kabupaten Kebumen setidaknya mempunyai empat sektor unggulan yakni sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Sektor-sektor tersebut diharapkan akan lebih mampu berperan dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangan daerah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu memperhatikan secara serius keempat sektor unggulan tersebut dan dilaksanakan secara sinergis dengan sektor-sektor perekonomian yang lain.

Isu pembangunan daerah ke depan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga dari sisi pemerataannya (*equity*). Kesejahteraan masyarakat secara luas tidak hanya akan terwujud dengan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi perlu redistribusi pendapatan secara merata ke setiap masyarakat, sehingga hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan ini juga muncul akibat dari keterbatasan kesempatan bagi sebagian masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung di jantung aktivitas ekonomi. Masalah pendidikan dan kesehatan berkorelasi langsung dengan kurang baiknya tingkat adaptasi, respon, antisipasi, peran aktif masyarakat terhadap upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Selain itu, pemerintah harus berperan dalam pengendalian harga agar masyarakat dapat menjangkau harga kebutuhan pokok.

3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur memengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie, 2002). Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai

konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989; Munnell, 1990) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60 persen (Suyono Dikun, 2003). Bahkan studi dari World Bank (1994) menyebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen sampai dengan 44 persen, variasi angka yang cukup signifikan. Secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen saat ini menghadapi masalah yang sama dengan banyak daerah bahkan masalah nasional, yaitu "kesenjangan wilayah" (*regional imbalances*). Penyebab ketimpangan wilayah bersifat multi-faktor, dari hal yang bersifat alamiah, seperti perbedaan kandungan sumberdaya alam, kualitas sumberdaya manusia, sampai kepada kurangnya infrastruktur wilayah yang menyebabkan rendahnya minat dan

realisasi investasi. Infrastruktur jelas merupakan faktor utama yang signifikan untuk merapatkan atau merenggangkan ketimpangan wilayah tersebut. Pada umumnya, wilayah-wilayah miskin tidak memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, jauh kontras dibandingkan dengan wilayah yang tidak miskin. Hal ini mengisyaratkan bahwa infrastruktur menjadi prasyarat utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin kompleksnya persoalan pembangunan tersebut 'mendorong' lahirnya pendekatan-pendekatan baru untuk mengatasi masalah ketimpangan. Diperlukan inovasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Kebumen ke depan, agar isu ketimpangan yang selama ini belum mampu diatasi dapat teratasi dengan baik.

6. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Optimal

Kabupaten Kebumen juga harus turut berperan dalam penyempurnaan kebijakan nasional di bidang aparatur, sehingga mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda, manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebut pada masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda akan mendorong perubahan *mindset* dan *culture set* pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel.

Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktik KKN, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi ini akan menjadi profil birokrasi yang diharapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan sistem penataan peraturan perundang-undangan.



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**